



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN PEREKONOMIAN
PROVINSI
KALIMANTAN BARAT

NOVEMBER 2023



LAPORAN PEREKONOMIAN

Provinsi Kalimantan Barat

NOVEMBER 2023

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
Provinsi Kalimantan Barat

VISI BANK INDONESIA

Menjadi Bank Sentral Digital Terdepan yang Berkontribusi Nyata Terhadap Perekonomian Nasional dan Terbaik di antara Negara *Emerging Markets* untuk Indonesia Maju

MISI BANK INDONESIA

- Mencapai dan memelihara stabilitas nilai Rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia.
- Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan.
- Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan Pemerintah serta mitra strategis lain.
- Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain.
- Memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan pembiayaan ekonomi, termasuk infrastruktur, melalui akselerasi pendalaman pasar keuangan.
- Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah.
- Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan melalui penguatan organisasi, sumber daya manusia, tata kelola dan sistem informasi yang handal, serta peran internasional yang proaktif.

Salinan publikasi ini juga dapat diperoleh dengan menghubungi:

Tim Perumusan dan Implementasi KEKDA
Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Kalimantan Barat
Jl. Ahmad Yani No. 2, Pontianak
Telp : 0561 - 734134
Faks : 0561 – 732033

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Barat edisi November 2023. Laporan Perekonomian yang sebelumnya bernama Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional ini memiliki empat fungsi utama, yaitu: (i) merupakan pandangan Bank Indonesia terhadap dinamika perekonomian di Provinsi Kalimantan Barat; (ii) menyajikan informasi terkini mengenai kondisi makroekonomi, keuangan pemerintah daerah (Pemda), stabilitas sistem keuangan, inflasi, sistem pembayaran, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan serta prospek perekonomian Provinsi Kalimantan Barat ke depan untuk mendukung pembentukan ekspektasi masyarakat yang menjadi pertimbangan penting dalam perumusan berbagai kebijakan di Bank Indonesia; (iii) sebagai media bagi Dewan Gubernur Bank Indonesia dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat luas mengenai berbagai pertimbangan yang melandasi keputusan kebijakan moneter, makroprudensial dan sistem pembayaran yang ditempuh Bank Indonesia; dan (iv) menjadi referensi penting bagi seluruh

stakeholders dalam melakukan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Dalam penyusunan Laporan Perekonomian ini, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat telah mendapatkan banyak dukungan data dan informasi dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah bersedia memberikan data dan informasi yang kami perlukan dalam menyusun buku ini.

Sebagai penutup, kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Perekonomian ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca agar kualitas kajian ini dapat terus ditingkatkan.

Pontianak, 28 November 2023
KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Nur Asyura Anggini Sari

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR GRAFIK ix

DAFTAR TABEL x

RINGKASAN UMUM x

BAB 1 • PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH 01

| | |
|-------------------------------------------------------------|----|
| 1.1. Kondisi Umum | 03 |
| 1.2. Perkembangan Ekonomi Sisi Penawaran: | |
| Lapangan Usaha (LU) | 04 |
| 1.2.1 Perdagangan Besar dan Eceran | 06 |
| 1.2.2 Transportasi dan Pergudangan | 07 |
| 1.2.3 Industri Pengolahan | 08 |
| 1.2.4 Konstruksi | 09 |
| 1.2.5 Pertanian | 10 |
| 1.3. Perkembangan Ekonomi Sisi Permintaan | 12 |
| 1.3.1. Konsumsi Rumah Tangga | 13 |
| 1.3.2. Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPR) | 15 |
| 1.3.3. Konsumsi Pemerintah | 15 |
| 1.3.4. Investasi | 16 |
| 1.3.5. Ekspor-Impor | 18 |
| 1.3.5.1. Ekspor | 18 |
| 1.3.5.2. Impor | 21 |
| 1.3.5.3. Neraca Perdagangan Luar Negeri Kalimantan Barat | 23 |

BAB 2 • KEUANGAN PEMERINTAH 27

| | |
|---------------------------------------------------------|----|
| 2.1. APBD Provinsi Kalimantan Barat | 29 |
| 2.1.1. Anggaran Pendapatan Provinsi Kalimantan Barat | 29 |
| 2.1.2. Anggaran Belanja Provinsi Kalimantan Barat | 31 |
| 2.2. APBD Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat | 32 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.2.1. Anggaran Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat | 32 |
| 2.2.2. Anggaran Belanja Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat | 33 |
| 2.3. Alokasi APBN di Kalimantan Barat | 34 |

BAB 3 • PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH 37

| | |
|----------------------------------------------|----|
| 3.1. Gambaran Umum | 39 |
| 3.2. Inflasi Bulanan (mtm) | 40 |
| 3.3. Inflasi Tahunan (yoy) | 43 |
| 3.4. Inflasi Kota | 46 |
| 3.5. Program Pengendalian Inflasi Tahun 2022 | 48 |

BAB 4 • PEMBIAYAAN DAERAH, SERTA PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM 51

| | |
|-----------------------------------------|----|
| 4.1. Perkembangan Perbankan Secara Umum | 53 |
| 4.1.1. Dana Pihak Ketiga (DPK) | 53 |
| 4.1.2. Penyaluran Kredit | 56 |
| 4.2. Ketahanan Sektor Korporasi | 61 |
| 4.3. Ketahanan Sektor Rumah Tangga | 63 |
| 4.4. Ketahanan Sektor UMKM | 66 |

BAB 5 • PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH 71

| | |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| 5.1. Perkembangan Transaksi Non Tunai | 73 |
| 5.1.1. Transaksi Kliring dan <i>Real Time Gross Settlement</i> | 73 |
| 5.1.2. Transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) | 73 |
| 5.2. Penyediaan Uang Layak Edar | 74 |
| 5.3. Perkembangan Temuan Uang Rupiah yang Diragukan Keasliannya | 74 |

| | | |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5.4. | Perkembangan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) dan Penyedia Jasa Pembayaran Layanan Remitansi (PJP LR) | 75 |
| 5.5. | Program Elektronifikasi Transaksi Keuangan | 76 |

BAB 6 • KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN **81**

| | | |
|--------|------------------------------------------------------------|----|
| 6.1. | Gambaran Umum | 83 |
| 6.2. | Ketenagakerjaan Kalimantan Barat | 83 |
| 6.3. | Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan | 86 |
| 6.3.1. | Nilai Tukar Petani (NTP) | 86 |
| 6.3.2. | Perbandingan dengan NTP Provinsi Lain di Kalimantan | 87 |
| 6.4. | Inflasi Pedesaan | 88 |
| 6.5. | Profil Kemiskinan dan Pemerataan Penduduk Kalimantan Barat | 88 |
| 6.6. | Indeks Pembangunan Manusia | 89 |

BAB 7 • PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH **93**

| | | |
|------|---------------------------------------------|----|
| 7.1. | Prospek Pertumbuhan Ekonomi Dunia | 95 |
| 7.2. | Prospek Ekonomi Kalimantan Barat Tahun 2023 | 95 |
| 7.3. | Prakiraan Inflasi Daerah Tahun 2023 | 97 |
| 7.4. | Rekomendasi | 99 |

DAFTAR ISTILAH **102**

TIM PENYUSUN **104**

DAFTAR GRAFIK

BAB 1 • Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

| | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Grafik 1.1. | Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan Kalimantan Barat, Kalimantan, dan Nasional 2020-2023 | 3 |
| Grafik 1.2. | Pertumbuhan Ekonomi Tahunan Kalimantan Barat dan Nasional 2015-2022 | 3 |
| Grafik 1.3. | Pemetaan Matriks Komponen PDRB Sisi Penawaran Triwulan III 2023 | 5 |
| Grafik 1.4. | Perkembangan Kredit Properti Prov. Kalimantan Barat | 6 |
| Grafik 1.5. | Perkembangan Kredit Perdagangan Prov. Kalimantan Barat | 6 |
| Grafik 1.6. | Perkembangan Kredit Kendaraan dan Multiguna Prov. Kalimantan Barat | 7 |
| Grafik 1.7. | Perkembangan Tingkat Penghunian Kamar Hotel Berbintang Prov. Kalimantan Barat | 7 |
| Grafik 1.8. | Volume Ekspor Bauksit Kalimantan Barat | 7 |
| Grafik 1.9. | Nilai Ekspor Bauksit Kalimantan Barat | 7 |
| Grafik 1.10. | Perkembangan Produksi Industri Karet | 8 |
| Grafik 1.11. | Volume Ekspor Alumina Triwulanan | 8 |
| Grafik 1.12. | Kredit LU Industri Pengolahan | 9 |
| Grafik 1.13. | Rata-Rata Harga CPO Kalbar Triwulanan | 9 |
| Grafik 1.14. | Volume Produksi CPO Triwulanan | 9 |
| Grafik 1.15. | Rata-Rata Harga CPO Global Triwulanan | 9 |
| Grafik 1.16. | Konsumsi Semen | 10 |
| Grafik 1.17. | Impor Material Konstruksi | 10 |
| Grafik 1.18. | Kredit LU Konstruksi | 10 |
| Grafik 1.19. | Perkembangan Produksi TBS Kelapa Sawit | 11 |
| Grafik 1.20. | Perkembangan Rata-Rata Harga TBS (Kelapa Sawit) Kalbar Triwulanan | 11 |
| Grafik 1.21. | Perkembangan Luas Lahan Tanam Sawah | 11 |
| Grafik 1.22. | Perkembangan Luas Lahan Panen Sawah | 11 |
| Grafik 1.23. | Perkembangan Rata-Rata Harga Karet Internasional Triwulanan | 12 |
| Grafik 1.24. | Perkembangan Rata-Rata Harga Karet Kalbar Triwulanan | 12 |
| Grafik 1.25. | Pemetaan Matriks Komponen PDRB Sisi Permintaan Triwulan III 2023 | 13 |
| Grafik 1.26. | Perkembangan NTP | 14 |
| Grafik 1.27. | Indeks Keyakinan Konsumen Pontianak | 14 |
| Grafik 1.28. | Perkembangan NTP Subkategori | 14 |
| Grafik 1.29. | Kredit Konsumsi Prov. Kalimantan Barat | 14 |
| Grafik 1.30. | Persentase Realisasi Belanja APBD Pemprov + Kab/Kota & APBN Kalimantan Barat | 15 |

| | | |
|--------------|-------------------------------------------------------|----|
| Grafik 1.31. | Perkembangan Realisasi PMDN | 16 |
| Grafik 1.32. | Perkembangan Jumlah Proyek PMDN | 16 |
| Grafik 1.33. | Perkembangan Realisasi PMA | 17 |
| Grafik 1.34. | Perkembangan Jumlah Proyek PMA | 17 |
| Grafik 1.35. | Komposisi PMDN | 17 |
| Grafik 1.36. | Komposisi PMA | 17 |
| Grafik 1.37. | Perkembangan Kredit Investasi | 17 |
| Grafik 1.38. | Realisasi PMDN per Kabupaten/Kota | 18 |
| Grafik 1.39. | Realisasi PMA per Kabupaten/Kota | 18 |
| Grafik 1.40. | Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor | 19 |
| Grafik 1.41. | Perbandingan Proporsi Nilai Ekspor Komoditas | 19 |
| Grafik 1.42. | Perkembangan Nilai Ekspor Karet (SITC) | 19 |
| Grafik 1.43. | Perkembangan Nilai Ekspor Alumina (SITC) | 19 |
| Grafik 1.44. | Perkembangan Nilai Ekspor Minyak Kelapa Sawit (SITC) | 20 |
| Grafik 1.45. | Perkembangan Nilai Ekspor Bauksit (SITC) | 20 |
| Grafik 1.46. | Perkembangan Volume Ekspor Karet (SITC) | 20 |
| Grafik 1.47. | Perkembangan Volume Ekspor Alumina (SITC) | 20 |
| Grafik 1.48. | Perkembangan Volume Ekspor Minyak Kelapa Sawit (SITC) | 20 |
| Grafik 1.49. | Perkembangan Volume Ekspor Bauksit (SITC) | 20 |
| Grafik 1.50. | Perkembangan Pangsa Negara Tujuan Ekspor per Triwulan | 21 |
| Grafik 1.51. | Perkembangan Volume dan Nilai Impor | 21 |
| Grafik 1.52. | Perkembangan Nilai Impor Barang Bahan Baku | 22 |
| Grafik 1.54. | Perkembangan Komposisi Komponen Impor | 22 |
| Grafik 1.53. | Perkembangan Nilai Impor Barang Modal | 22 |
| Grafik 1.55. | Pergerakan Pertumbuhan Komponen Impor | 22 |
| Grafik 1.56. | Perkembangan Pangsa Negara Asal Impor per Triwulan | 23 |
| Grafik 1.57. | Impor Material Konstruksi | 23 |
| Grafik 1.58. | Neraca Perdagangan Luar Negeri Kalimantan Barat | 23 |

BAB 2 • Keuangan Pemerintah

| | | |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Grafik 2.1. | APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat | 29 |
| Grafik 2.2. | Rasio Kemandirian Fiskal Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2016-2023 | 31 |
| Grafik 2.3. | Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Provinsi Kalimantan Barat Periode 2016-2023 | 32 |

DAFTAR GRAFIK

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Grafik 2.4. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kabupaten/ Kota di Kalimantan Barat Tahun 2023 | 33 | Grafik 4.10. Suku Bunga Tertimbang (SBT) Kredit Perbankan di Kalimantan Barat | 58 |
| Grafik 2.5. Rasio Kemandirian Fiskal Daerah Kab/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2023 | 33 | Grafik 4.11. Perkembangan LDR dan Rasio NPL Perbankan | 58 |
| Grafik 2.6. Anggaran dan Realisasi Belanja Per Kabupaten/ Kota di Kalimantan Barat Periode 2023 | 33 | Grafik 4.12. Perkembangan Rasio NPL Perbankan Berdasarkan Jenis Penggunaan | 58 |
| Grafik 2.7. Proporsi Belanja Kab/Kota di Kalimantan Barat Periode 2023 | 33 | Grafik 4.13. Perkembangan Pembiayaan Perbankan Berdasarkan Kegiatan Bank | 60 |
| Grafik 2.8. Rincian Belanja Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat per Jenis Belanja s.d Triwulan III 2023 | 34 | Grafik 4.14. Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Jenis Penggunaan | 60 |
| Grafik 2.9. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Per Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat s.d. Triwulan III 2023 | 34 | Grafik 4.15. Perkembangan <i>Non Performing Finance</i> (NPF) Pembiayaan Syariah | 60 |
| BAB 3 • Perkembangan Inflasi Daerah | | Grafik 4.16. Pertumbuhan Kredit Korporasi Sektor Ekonomi Utama Kalbar | 61 |
| Grafik 3.1. Laju Inflasi Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional | 39 | Grafik 4.17. Komposisi Kredit Korporasi Berdasarkan Sektor Ekonomi | 61 |
| Grafik 3.2. Laju Inflasi Antar Provinsi di Kalimantan dan Nasional Triwulan III 2023 | 39 | Grafik 4.18. Perkembangan Likert Scale Penjualan Domestik | 62 |
| Grafik 3.3. Perkembangan Inflasi Kota Sampel Kalimantan Barat | 39 | Grafik 4.19. Penyaluran Kredit kepada Sektor Korporasi di Kalimantan Barat Berdasarkan Jenis Penggunaan | 62 |
| Grafik 3.4. Pergerakan Inflasi Bulanan 3 Kota di Kalimantan Barat | 46 | Grafik 4.20. NPL Kredit kepada Sektor Korporasi di Kalimantan Barat | 62 |
| Grafik 3.5. Perkembangan Inflasi Tahunan 3 Kota di Kalimantan Barat | 46 | Grafik 4.21. Perkembangan Jenis DPK Korporasi Kalimantan Barat | 63 |
| BAB 4 • Pembiayaan Daerah, Serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM | | Grafik 4.22. Perkembangan DPK Sektor Korporasi pada KC/ KCP di Kalimantan Barat Berdasarkan Golongan Pemilik | 63 |
| Grafik 4.1. Perkembangan Jenis DPK Perbankan | 53 | Grafik 4.23. Pangsa DPK Sektor Korporasi pada KC/KCP di Kalimantan Barat Berdasarkan Golongan Pemilik | 63 |
| Grafik 4.2. Perkembangan SBT DPK Perbankan | 53 | Grafik 4.24. Perkembangan Indeks Penghasilan dan Ketersediaan Lapangan Kerja di Kalimantan Barat | 64 |
| Grafik 4.3. Posisi Valuta DPK Perbankan TW II 2023 (Rp triliun) | 54 | Grafik 4.25. Perkembangan IKK, IKE, dan IEK Survei Konsumen di Kalimantan Barat | 64 |
| Grafik 4.4. Perkembangan DPK Perbankan Berdasarkan Kegiatan Bank | 54 | Grafik 4.26. Pertumbuhan DPK Perseorangan Berdasarkan Jenis Penempatan | 65 |
| Grafik 4.5. Pangsa Penghimpunan DPK Kalimantan Barat berdasarkan Golongan Nasabah | 55 | Grafik 4.27. Perkembangan Kredit Rumah Tangga | 65 |
| Grafik 4.6. Pertumbuhan Penghimpunan DPK Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat | 55 | Grafik 4.28. Nominal dan NPL Kartu Kredit Rumah Tangga | 65 |
| Grafik 4.7. Lokasi Bank Asal Penyalur Kredit berdasarkan Lokasi Proyek di Kalimantan Barat | 56 | Grafik 4.29. Perkembangan Rasio NPL Kredit RT Berdasarkan Sektor | 65 |
| Grafik 4.8. Lokasi Penyaluran Kredit oleh Perbankan Asal Kalimantan Barat | 57 | | |
| Grafik 4.9. Jenis Kredit Perbankan di Kalimantan Barat | 58 | | |

• • • DAFTAR GRAFIK • • •

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Grafik 4.30. Pertumbuhan Nominal Kartu Kredit Rumah Tangga | 66 | Grafik 5.6. Transaksi Valuta Asing di Prov. Kalimantan Barat | 75 |
| Grafik 4.31. Pembiayaan UMKM Kalbar Berdasarkan Jenis Penggunaan | 66 | Grafik 5.7. Andil Penjualan Valas di Kalimantan Barat per Jenis Mata Uang | 75 |
| Grafik 4.32. Perkembangan Pembiayaan UMKM (dalam triliun) | 66 | Grafik 5.8. Andil Pembelian Valas di Kalimantan Barat per Jenis Mata Uang | 75 |
| Grafik 4.33. Pangsa Pembiayaan UMKM Kalbar TW III 2023 berdasarkan Jenis Penggunaan | 67 | Grafik 5.9. Nominal Transaksi PJP LR di Kalimantan Barat | 76 |
| Grafik 4.34. Pendorong Pertumbuhan Pembiayaan UMKM Triwulan III 2023 Berdasarkan Lapangan Usaha | 67 | Grafik 5.10. Volume Transaksi PJP LR di Kalimantan Barat | 76 |
| Grafik 4.35. Nominal (Rp Triliun) dan Pangsa Pembiayaan UMKM Kalbar Berdasarkan Lapangan Usaha | 67 | Grafik 5.11. Pangsa <i>Merchant</i> QRIS berdasarkan Kategori Usaha di Prov. Kalimantan Barat | 76 |
| Grafik 4.36. Perkembangan Kredit UMKM Berdasarkan Kategori Debitur | 67 | | |
| Grafik 4.37. Perkembangan NPL Kredit UMKM | 68 | BAB 6 • Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan | |
| Grafik 4.38. Perkembangan NPL Kredit UMKM Berdasarkan Lapangan Usaha | 68 | Grafik 6.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | 84 |
| | | Grafik 6.2. Tingkat Pertumbuhan Indikator Ketenagakerjaan | 84 |
| | | Grafik 6.3. Perkembangan Tingkat Penyerapan Angkatan Kerja (TPAK) Kalimantan Barat dan Nasional | 84 |
| | | Grafik 6.4. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kalimantan Barat dan Nasional | 84 |
| | | Grafik 6.5. Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Formal dan Informal | 86 |
| | | Grafik 6.6. Perkembangan NTP Kalimantan Barat | 86 |
| | | Grafik 6.7. Perkembangan NTP Provinsi Kalimantan Barat Berdasarkan Klasifikasi Subsektor | 86 |
| | | Grafik 6.8. Pergerakan NTP Antar Provinsi di Kalimantan | 88 |
| | | Grafik 6.9. Perbandingan Inflasi Pedesaan Kalimantan Barat dan Nasional (mtm) | 88 |
| | | Grafik 6.10. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kalimantan Barat | 89 |
| | | Grafik 6.11. Perbandingan Tingkat Kemiskinan di Kalimantan dan Nasional | 89 |
| | | Grafik 6.12. Perkembangan Persentase Tingkat Kemiskinan di Kalimantan Barat | 89 |
| | | Grafik 6.13. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Barat dan Nasional | 90 |

BAB 5 • Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| Grafik 5.1. Perkembangan Transaksi RTGS di Kalimantan Barat | 73 |
| Grafik 5.2. Perkembangan Transaksi RTGS di Kalimantan Barat | 73 |
| Grafik 5.3. Penggunaan transaksi APMK ATM/Debet di Kalimantan Barat | 74 |
| Grafik 5.4. Penggunaan transaksi APMK Kartu Kredit di Kalimantan Barat | 74 |
| Grafik 5.5. Perkembangan <i>Inflow-Outflow</i> di KPwBI Prov. Kalimantan Barat | 74 |

DAFTAR TABEL

BAB 1 • Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

| | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1. | Nominal ADHK PDRB s/d. Triwulan III 2023 Wilayah Kalimantan dan Nasional | 3 |
| Tabel 1.2. | Pertumbuhan PDRB s.d. Triwulan III 2023 Sisi Penawaran | 5 |
| Tabel 1.3. | Penyerapan Belanja Modal APBD Kalimantan Barat dan APBN s/d. Triwulan III 2023 (Rp miliar) | 10 |
| Tabel 1.4. | Perkembangan Luas Lahan Panen Sawah Kabupaten/Kota (Ha) | 12 |
| Tabel 1.5. | Pertumbuhan PDRB Triwulan III 2023 Sisi Permintaan | 12 |
| Tabel 1.6. | Perkembangan Realisasi PMDN per Sektor | 16 |
| Tabel 1.7. | Perkembangan Realisasi PMA per Sektor | 17 |

BAB 2 • Keuangan Pemerintah

| | | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1. | Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 dan 2023 | 30 |
| Tabel 2.2. | Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 dan 2023 | 32 |
| Tabel 2.3. | Anggaran dan Realisasi Alokasi Belanja APBN di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 dan 2023 | 35 |

BAB 3 • Perkembangan Inflasi Daerah

| | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 3.1. | Perkembangan Inflasi Bulanan (mtm) | 42 |
| Tabel 3.2. | Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Bulanan (mtm) | 43 |
| Tabel 3.3. | Perkembangan Inflasi Tahunan (yoy) | 44 |
| Tabel 3.4. | Perkembangan Andil Inflasi Tahunan (yoy) | 45 |
| Tabel 3.5. | Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Tahunan (yoy) | 45 |
| Tabel 3.6. | Perkembangan Inflasi Kota di Provinsi Kalimantan Barat (yoy) | 47 |
| Tabel 3.7. | Andil Inflasi Tahunan 3 Kota di Kalimantan Barat | 47 |
| Tabel 3.8. | Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Bulanan di 3 Kota Sampel (mtm) | 48 |

BAB 4 • Pembiayaan Daerah, Serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

| | | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 4.1. | Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) * | 53 |
| Tabel 4.2. | Perkembangan nominal DPK Kalimantan Barat Per Kabupaten/Kota (Rp Triliun) | 55 |
| Tabel 4.3. | Perkembangan Kredit Perbankan (Rp Triliun) | 56 |
| Tabel 4.4. | Perkembangan Nominal Kredit Berdasarkan Kabupaten/Kota (Rp Miliar) | 59 |
| Tabel 4.5. | Perkembangan NPL Berdasarkan Kabupaten/Kota | 60 |

BAB 6 • Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

| | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 6.1. | Indikator Ketenagakerjaan (Ribu Jiwa) | 83 |
| Tabel 6.2. | Persentase Penduduk Bekerja Berdasarkan Lapangan Usaha (Ribu Jiwa) | 85 |
| Tabel 6.3. | Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Status Utama Pekerja (Ribu Jiwa) | 85 |
| Tabel 6.4. | Nilai Tukar Petani Provinsi Kalimantan Barat | 87 |
| Tabel 6.5. | Perbandingan NTP dengan Provinsi Lain di Kalimantan dan Nasional | 87 |
| Tabel 6.6. | Perkembangan Inflasi Pedesaan | 88 |
| Tabel 6.7. | IPM Provinsi Wilayah Kalimantan 2015-2022 | 90 |
| Tabel 6.8. | Perkembangan IPM Kalimantan Barat Berdasarkan Komponennya | 90 |

RINGKASAN UMUM

LAPORAN PEREKONOMIAN

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOVEMBER 2023

Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

Perekonomian Kalimantan Barat pada triwulan III 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,27% (yoy), melanjutkan pertumbuhan positif triwulan sebelumnya.

Dari sisi penawaran, kinerja lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, informasi dan komunikasi, konstruksi, jasa kesehatan dan sosial menjadi kontributor utama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) triwulan III 2023.

Dari sisi permintaan, pertumbuhan didorong oleh kinerja pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dan konsumsi rumah tangga.

Keuangan Pemerintah

Kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan perlambatan. Hal ini terlihat dari realisasi pendapatan APBD Provinsi Kalimantan Barat pada triwulan III 2023 sebesar Rp4.420,01 miliar atau 73,54% dari pagu anggaran. Angka realisasi ini lebih rendah secara persentase dibandingkan dengan triwulan III 2022 yang sebesar Rp4.286,09 miliar atau 79,48% dari pagu anggaran.

Realisasi belanja APBD Provinsi Kalimantan Barat Triwulan III 2023 secara total sebesar Rp3.877,52 miliar atau 50,80% dari pagu anggaran. Dilihat dari persentasenya realisasi belanja menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan triwulan III 2022 yang sebesar Rp3.094,37 miliar atau 54,02% dari pagu anggaran.

Sementara itu, persentase realisasi belanja Kementerian/Lembaga di Kalimantan Barat hingga Triwulan III 2023 tercatat sebesar Rp7.227,90 miliar atau 62,81% dari pagu anggaran. Realisasi tersebut meningkat dibandingkan dengan realisasi belanja Triwulan III 2022 yang tercatat sebesar Rp6.393,60 miliar atau 61,55% dari pagu anggaran..

Perkembangan Inflasi Daerah

Inflasi Kalimantan Barat pada triwulan III 2023 kembali melanjutkan tren penurunan dari periode-periode sebelumnya dan tetap stabil pada kisaran sasaran $3 \pm 1\%$. Capaian ini didukung oleh beberapa poin antara lain:

- Koordinasi dan komunikasi yang solid antar instansi dalam forum TPID dan penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP)
- Penurunan harga komoditas bahan pangan dan tarif angkutan udara yang memiliki andil cukup besar

Program pengendalian inflasi di Kalimantan Barat pada triwulan III 2023 difokuskan untuk menjaga suplai bahan pokok makanan di tengah ancaman el-Nino dan curah hujan yang tidak menentu. Upaya pengendalian inflasi baik jangka pendek maupun jangka panjang dilakukan melalui kerangka 4K yaitu ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi efektif.

Pembiayaan Daerah, Serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Intermediasi perbankan Kalimantan Barat pada triwulan III 2023 tetap tumbuh dan berada pada level yang terjaga. Kredit perbankan tumbuh sebesar 6,05% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya 2,96% (yoy). Pertumbuhan tersebut didorong peningkatan konsumsi masyarakat seiring peningkatan mobilitas pasca pencabutan status pandemi oleh Presiden sejak Juni 2023, percepatan beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kalimantan Barat, dan kebijakan regulator yang mendukung antara lain kebijakan *loan to value* (LTV) yang akomodatif. Pada perbankan syariah, pembiayaan tumbuh sebesar 8,48% (yoy) pada triwulan III 2023. Di segmen UMKM, pertumbuhan kredit juga terus berlanjut. Rasio kredit UMKM sudah mencapai 31, 70%. Adapun Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan Kalimantan Barat juga terus meningkat, didorong oleh peningkatan giro dan deposito. Sementara itu, risiko kredit bermasalah di Kalimantan Barat mengalami sedikit peningkatan namun masih berada dalam level yang terjaga (di bawah 5%).

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Pada triwulan III 2023, pengelolaan Uang Rupiah Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kalimantan Barat mengalami *net inflow* sebesar Rp117,43 miliar sejalan dengan normalisasi aktivitas ekonomi pasca HBKN Idul Adha dan periode liburan pada sektor pendidikan. Sementara itu, penurunan transaksi BI-RTGS dan SKNBI dari sisi nominal transaksi selama triwulan III 2023 turut dipengaruhi oleh perkembangan implementasi BI-Fast.

Perkembangan implementasi Bantuan Sosial Non Tunai melalui Program Keluarga Harapan (PKH) berjalan baik. Tingkat penyerapan PKH pada triwulan III 2023 mencapai 96,8%. Selanjutnya, upaya akselerasi elektronifikasi transaksi keuangan di Kalimantan Barat terus dilakukan terutama melalui metode pembayaran digital QRIS dan menjaga kelancaran penyaluran program bantuan sosial. Hingga September 2023 Jumlah *merchant* QRIS di Kalimantan Barat mencapai 311.089 *merchants* dan jumlah pengguna sebanyak 582.598 user QRIS.

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat menunjukkan perbaikan berdasarkan indikator terkini. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2023 berada pada angka 5,05%, membaik dibandingkan Agustus 2022 sebesar 5,11%.

Rasio kemiskinan mengalami perbaikan menjadi 6,71% pada Maret 2023, turun dibandingkan Maret 2022 yang tercatat sebesar 6,73%. Meski demikian, jumlah penduduk miskin Kalimantan Barat pada Maret 2023 meningkat 3,1 ribu jiwa atau 0,89% (yoy), dibandingkan Maret 2023.

Selanjutnya, Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan III 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,81% (qtq) atau 139,50 dari sebelumnya sebesar 133.10 pada akhir triwulan II 2023.

Prospek Perekonomian Daerah

Kinerja ekonomi global masih dibayangi oleh ketidakpastian yang meningkat. Divergensi pertumbuhan antarnegara yang semakin melebar. Meningkatnya ketegangan geopolitik tidak hanya di Rusia-Ukraina, melainkan juga Palestina-Israel, mendorong harga energi dan pangan meningkat sehingga mendorong inflasi global yang tetap tinggi.

Perekonomian Kalimantan Barat tahun 2023 diperkirakan tumbuh positif, walaupun melambat dibandingkan tahun 2022. Kinerja lapangan usaha utama dan tingkat konsumsi masyarakat yang diperkirakan masih tumbuh menjadi faktor pendorong perekonomian Kalimantan Barat pada tahun 2023.

Secara keseluruhan inflasi tahun 2023 di Kalimantan Barat diperkirakan lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022 dan tetap pada rentang target inflasi nasional yang sebesar $3,0 \pm 1\%$ (yoy).

TABEL INDIKATOR MAKROEKONOMI

| Indikator | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | |
|---------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Tw I | Tw II | Tw III | Tw IV | Tw I | Tw II | Tw III | Tw IV | Tw I | Tw II | Tw III |
| Ekonomi Makro Regional | | | | | | | | | | | |
| Produk Domestik Regional Bruto (% yoy) | -0,10 | 10,81 | 4,60 | 4,31 | 4,15 | 4,58 | 6,53 | 5,01 | 4,65 | 4,00 | 4,27 |
| Berdasarkan Sektor (%-YoY) : | | | | | | | | | | | |
| - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 4,17 | 11,45 | 5,52 | -4,08 | -5,13 | -1,39 | 4,46 | 12,39 | 2,69 | 0,13 | 0,09 |
| - Pertambangan dan Penggalian | -4,81 | -22,15 | -6,05 | 42,98 | 44,81 | 9,28 | 4,64 | -28,93 | -24,44 | -12,06 | -10,97 |
| - Industri Pengolahan | 2,89 | 11,85 | 8,17 | -2,13 | 1,51 | -1,26 | 6,46 | 9,61 | 4,36 | 2,69 | -1,80 |
| - Pengadaan Listrik dan Gas | 4,67 | 0,21 | -8,11 | 8,16 | 5,90 | 3,64 | 3,76 | 4,19 | 27,58 | 21,53 | 24,14 |
| - Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 5,55 | 6,58 | 5,77 | 5,42 | 6,26 | 6,80 | 5,67 | 7,84 | 6,77 | 2,12 | 7,89 |
| - Konstruksi | -2,02 | 22,23 | 10,71 | 8,30 | 7,78 | 0,86 | -7,33 | 2,92 | 3,99 | 6,96 | 7,15 |
| - Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | -7,16 | 15,58 | 3,56 | 6,41 | 9,26 | 21,34 | 14,18 | 5,42 | 11,82 | 2,36 | 10,56 |
| - Transportasi dan Pergudangan | -25,1 | 6,04 | -11,42 | 1,24 | 10,21 | 32,95 | 40,03 | 14,44 | 7,35 | 4,10 | 4,95 |
| - Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | -9,19 | 45,84 | 0,82 | 10,34 | 10,70 | 12,36 | 16,57 | 3,66 | 8,09 | 7,27 | 10,33 |
| - Informasi dan Komunikasi | 5,51 | 7,54 | 4,03 | 9,13 | 6,13 | 6,51 | 7,64 | 10,42 | 11,80 | 10,97 | 10,91 |
| - Jasa Keuangan dan Asuransi | 3,12 | 10,79 | 1,99 | 2,66 | 3,91 | -5,74 | 3,35 | 2,34 | 3,07 | 11,61 | 5,18 |
| - Real Estate | -1,7 | 4,71 | 2,22 | 8,67 | -0,02 | -0,09 | -2,89 | 4,89 | 17,38 | 15,90 | 16,70 |
| - Jasa Perusahaan | -5,47 | -4,33 | -2,61 | 14,22 | 14,01 | 21,06 | 15,73 | 0,63 | 1,40 | 15,16 | 16,39 |
| - Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | -7,11 | 7,90 | -2,84 | -1,55 | -3,36 | -7,92 | 5,09 | -0,14 | 13,83 | 5,84 | -0,09 |
| - Jasa Pendidikan | 4,75 | 8,57 | 7,79 | -0,95 | 0,86 | 3,40 | 6,19 | 14,33 | 6,08 | 13,71 | 8,46 |
| - Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 61,44 | 56,58 | 37,95 | 6,23 | 3,91 | 10,81 | 11,46 | 2,24 | 12,15 | 15,11 | 19,80 |
| - Jasa lainnya | -2,57 | 9,93 | -13,16 | 10,52 | 6,70 | 14,25 | 28,81 | 8,51 | 11,49 | 9,94 | 27,08 |
| Berdasarkan Permintaan (%-YoY) : | | | | | | | | | | | |
| - Konsumsi Rumah Tangga | -1,5 | 1,56 | 0,06 | 3,17 | 2,38 | 4,82 | 4,35 | 2,93 | 3,89 | 5,80 | 4,20 |
| - Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba | 0,89 | 7,05 | 3,38 | -9,79 | -1,82 | 0,31 | 0,46 | 19,11 | 4,11 | 10,08 | 13,07 |
| - Konsumsi Pemerintah | -0,34 | 10,73 | -0,40 | -7,46 | -6,53 | -7,84 | -4,60 | -6,64 | 14,05 | 14,62 | -1,30 |
| - PMTB | -2,56 | 3,11 | 6,95 | 3,84 | 1,89 | 3,50 | 3,28 | 3,52 | 6,04 | 8,62 | 8,69 |
| - Ekspor | 5,25 | 30,07 | -4,95 | 69,97 | 49,50 | 46,12 | 53,97 | -10,92 | -16,66 | -35,19 | -28,60 |
| - Impor | -40,37 | -1,86 | -0,81 | 19,18 | 6,95 | 10,83 | 9,86 | 21,57 | 42,43 | 53,91 | 89,18 |
| Ekspor | | | | | | | | | | | |
| - Nilai Ekspor Non Migas (USD Juta) | 440,31 | 534,62 | 516,13 | 786,31 | 809,28 | 804,43 | 748,28 | 604,87 | 612,72 | 489,11 | 497,34 |
| - Volume Ekspor Non Migas (ribu ton) | 3498,78 | 4996,63 | 4600,60 | 8111,91 | 5874,00 | 4431,85 | 4342,35 | 4068,06 | 2886,14 | 1033,47 | 1039,33 |
| Impor | | | | | | | | | | | |
| - Nilai Impor Non Migas (USD Juta) | 67,11 | 54,04 | 41,92 | 55,83 | 60,11 | 50,40 | 60,68 | 60,06 | 69,86 | 98,21 | 112,26 |
| - Volume Impor Non Migas (ribu ton) | 35,75 | 32,19 | 26,99 | 45,46 | 51,12 | 32,81 | 35,90 | 44,19 | 64,82 | 61,78 | 91,25 |
| Indeks Harga Konsumen | | | | | | | | | | | |
| - Provinsi Kalimantan Barat | 106,3 | 107,24 | 107,54 | 107,96 | 109,62 | 111,87 | 113,68 | 114,77 | 115,17 | 116,45 | 116,25 |
| - Kota Pontianak | 106,21 | 107,08 | 107,27 | 107,40 | 109,10 | 111,11 | 113,10 | 114,22 | 114,60 | 115,84 | 115,62 |
| - Kota Singkawang | 103,8 | 105,5 | 106,38 | 106,75 | 107,83 | 110,27 | 111,91 | 113,11 | 113,66 | 115,09 | 114,91 |
| - Kabupaten Sintang | 111,21 | 111,46 | 111,59 | 114,37 | 116,74 | 120,45 | 121,18 | 121,80 | 122,11 | 123,49 | 123,44 |
| Laju Inflasi Tahunan (% yoy) | | | | | | | | | | | |
| - Provinsi Kalimantan Barat | 1,02 | 1,15 | 2,01 | 1,45 | 3,13 | 4,31 | 5,71 | 6,30 | 5,06 | 4,10 | 2,26 |
| - Kota Pontianak | 0,89 | 0,98 | 1,68 | 1,16 | 2,72 | 3,76 | 5,43 | 6,35 | 5,04 | 4,26 | 2,23 |
| - Kota Singkawang | 1,31 | 2,19 | 3,81 | 2,55 | 3,88 | 4,52 | 5,20 | 5,96 | 5,41 | 4,37 | 2,68 |
| - Kabupaten Sintang | 1,51 | 0,67 | 1,61 | 1,88 | 4,97 | 8,07 | 8,59 | 6,50 | 4,60 | 2,52 | 1,86 |
| Stabilitas Keuangan Daerah | | | | | | | | | | | |
| Perbankan Secara Umum (Rp Miliar) | | | | | | | | | | | |
| Aset (Berdasarkan Lokasi Bank) | 87.143 | 87.796 | 89.488 | 93.185 | 90.393 | 93.185 | 91.659 | 93.849 | 96.193 | 97.183 | 99.351 |
| Dana Pihak Ketiga (Berdasarkan Lokasi Bank) | 65.687 | 68.262 | 68.597 | 71.829 | 72.211 | 73.552 | 73.281 | 74.045 | 73.375 | 74 | 75.492 |
| Kredit (Berdasarkan Lokasi Bank) | 55.826 | 57.241 | 56.662 | 58.138 | 85.438 | 86.574 | 85.493 | 86.401 | 87.327 | 89 | 90.666 |

| Indikator | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Tw I | Tw II | Tw III | Tw IV | Tw I | Tw II | Tw III | Tw IV | Tw I | Tw II | Tw III |
| Kredit Korporasi (Rp Miliar) | 40.280 | 40.772 | 35.982 | 43.046 | 41.762 | 41.288 | 38.954 | 37.943 | 38.425 | 39.253 | 39.551 |
| - Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan | 26.095 | 26.380 | 20.954 | 26.526 | 25.947 | 24.969 | 25.176 | 25.269 | 25.808 | 26.705 | 26.159 |
| - Pertambangan dan Penggalian | 933 | 933 | 853 | 1.086 | 1.083 | 813 | 717 | 715 | 488 | 691 | 656 |
| - Industri Pengolahan | 4.144 | 4.114 | 5.228 | 5.509 | 5.274 | 6.180 | 4.102 | 2.742 | 3.102 | 2.907 | 3.497 |
| - Listrik, Gas dan Air Bersih | 207 | 196 | 201 | 405 | 402 | 404 | 412 | 403 | 402 | 393 | 438 |
| - Bangunan | 1.248 | 1.254 | 1.398 | 1.359 | 1.608 | 1.650 | 1.289 | 1.250 | 1.106 | 1.123 | 1.197 |
| - Perdagangan, Hotel, dan Restoran | 4.470 | 4.532 | 4.290 | 4.544 | 4.585 | 4.436 | 4.466 | 4.628 | 4.705 | 4.746 | 4.933 |
| - Pengangkutan dan Komunikasi | 878 | 927 | 792 | 1.005 | 969 | 1.052 | 999 | 1.124 | 1.125 | 1.075 | 1.109 |
| - Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan | 2.284 | 2.267 | 2.102 | 2.332 | 1.618 | 1.574 | 1.609 | 1.623 | 1.491 | 1.406 | 1.389 |
| - Jasa-Jasa | 156 | 159 | 140 | 180 | 200 | 131 | 122 | 144 | 164 | 181 | 122 |
| - Lainnya | 14 | 10 | 23 | 99 | 78 | 80 | 62 | 44 | 34 | 26 | 51 |
| Kredit Perseorangan (Rp Miliar) | 41.163 | 40.213 | 40.777 | 42.300 | 43.523 | 45.176 | 46.431 | 47.977 | 48.525 | 49.622 | 50.947 |
| - Modal Kerja | 10.307 | 10.651 | 11.049 | 11.451 | 11.579 | 12.005 | 12.538 | 12.872 | 12.767 | 13.043 | 13.228 |
| - Investasi | 4.845 | 4.108 | 4.067 | 4.172 | 4.475 | 4.648 | 4.659 | 4.926 | 5.168 | 5.499 | 5.836 |
| - Konsumsi / Sektor Rumah Tangga | 26.010 | 25.454 | 25.660 | 26.677 | 27.470 | 28.523 | 29.234 | 30.179 | 30.590 | 31.081 | 31.883 |
| Kredit Rumah Tangga (Rp Miliar) | 26.009 | 25.454 | 25.660 | 26.677 | 27.470 | 28.523 | 29.234 | 30.179 | 30.590 | 31.081 | 31.883 |
| - Perumahan | 7.250 | 7.486 | 7.713 | 7.736 | 7.926 | 7.999 | 8.256 | 8.457 | 8.575 | 8.756 | 9.074 |
| - Ruko/Rukan | 655 | 642 | 622 | 591 | 594 | 612 | 571 | 549 | 546 | 531 | 544 |
| - Kendaraan | 1.615 | 1.608 | 1.589 | 1.636 | 1.717 | 1.816 | 1.927 | 2.123 | 2.174 | 2.312 | 2.360 |
| - Peralatan | 139 | 143 | 143 | 146 | 155 | 167 | 184 | 197 | 213 | 238 | 268 |
| - Multiguna | 15.770 | 14.970 | 14.915 | 15.902 | 16.284 | 17.001 | 17.205 | 17.594 | 17.703 | 17.711 | 17.923 |
| - Lainnya | 577 | 604 | 679 | 666 | 794 | 928 | 1.092 | 1.259 | 1.380 | 1.533 | 1.714 |
| Kredit UMKM (Rp Miliar) | 22.088 | 22.611 | 23.267 | 24.023 | 24.156 | 25.268 | 25.809 | 26.523 | 27.115 | 27.951 | 28.737 |
| - Mikro | 2.734 | 2.703 | 2.776 | 5.902 | 6.213 | 6.566 | 7.733 | 8.014 | 9.491 | 9.956 | 10.297 |
| - Kecil | 8.320 | 8.657 | 9.063 | 8.907 | 9.157 | 9.692 | 9.163 | 9.484 | 9.547 | 9.819 | 10.234 |
| - Menengah | 11.032 | 11.251 | 11.427 | 9.214 | 8.786 | 9.010 | 8.914 | 9.025 | 8.077 | 8.176 | 8.206 |
| NPL Umum (%) | 1,64 | 1,78 | 1,81 | 2,26 | 1,96 | 2,01 | 2,06 | 1,82 | 1,82 | 1,88 | 2,08 |
| NPL Korporasi (%) | 1,62 | 1,79 | 1,72 | 2,75 | 2,02 | 2,08 | 2,16 | 1,89 | 1,75 | 1,93 | 2,05 |
| NPL Rumah Tangga (%) | 0,82 | 0,87 | 0,86 | 0,75 | 0,73 | 0,73 | 0,72 | 0,6 | 0,68 | 0,87 | 0,92 |
| NPL UMKM (%) | 3,25 | 3,51 | 3,58 | 2,77 | 3,1 | 3,65 | 3,52 | 3,21 | 3,14 | 2,66 | 2,99 |
| Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah | | | | | | | | | | | |
| Kliring | | | | | | | | | | | |
| - Volume (lembar) | 147.749 | 154.943 | 149.793 | 180.455 | 135.724 | 138.682 | 134.050 | 146.261 | 109.855 | 121.876 | 132.282 |
| - Nominal (Rp miliar) | 8.761 | 8.808 | 8.458 | 10.303 | 8.566 | 8.268 | 7.383 | 7.826 | 6.579 | 6.252 | 6.916 |
| RTGS | | | | | | | | | | | |
| - Volume (lembar) | 10.972 | 12.367 | 11.996 | 13.410 | 12.630 | 11.990 | 10.992 | 11.829 | 10.200 | 8.390 | 9.046 |
| - Nominal (Rp miliar) | 33.952 | 50.738 | 40.118 | 33.827 | 31.270 | 39.879 | 27.165 | 30.118 | 23.645 | 25.286 | 21.332 |
| Tunai (Rp Miliar) | | | | | | | | | | | |
| - Inflow | 3.831 | 2.713 | 1.851 | 822 | 3.326 | 3.037 | 2.525 | 1.217 | 3.783 | 2.860 | 2.005 |
| - Outflow | (1.318) | (3.929) | (2.657) | (4.822) | (1.385) | (3.813) | (1.978) | (4.858) | (1.446) | -3.382 | -1.871 |
| - Netflow | 2.513 | (1.216) | (545) | (4.000) | 1.941 | (0.775) | 548 | (3.641) | 2.337 | -586 | 117 |



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA



BAB 1

Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

Perekonomian Kalimantan Barat pada triwulan III 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,27% (yoy), melanjutkan pertumbuhan positif triwulan sebelumnya.

Dari sisi penawaran, kinerja lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, informasi dan komunikasi, konstruksi, jasa kesehatan dan sosial menjadi kontributor utama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) triwulan III 2023.

Dari sisi permintaan, pertumbuhan didorong oleh kinerja pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dan konsumsi rumah tangga.

| PDRB (Rp miliar) | 2021 | | | | 2021 | 2022 | | | | 2022 | 2023 | |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | I | II | III | IV | | I | II | III | IV | | I | II |
| Kalimantan Barat | 34.670 | 35.297 | 35.046 | 36.199 | 141.212 | 36.110 | 36.913 | 37.335 | 38.011 | 148.369 | 37.788 | 38.388 |
| Kalimantan Tengah | 24.664 | 25.410 | 25.365 | 27.042 | 102.481 | 26.337 | 27.131 | 27.043 | 28.584 | 109.095 | 27.184 | 27.934 |
| Kalimantan Selatan | 31.924 | 33.691 | 34.900 | 34.907 | 135.423 | 33.045 | 35.660 | 36.870 | 36.765 | 142.339 | 34.737 | 37.427 |
| Kalimantan Timur | 118.305 | 120.555 | 122.310 | 123.269 | 484.439 | 121.145 | 124.923 | 128.847 | 131.243 | 506.159 | 129.566 | 133.465 |
| Kalimantan Utara | 15.271 | 15.617 | 15.983 | 16.291 | 63.163 | 15.980 | 16.405 | 16.852 | 17.297 | 66.534 | 16.816 | 17.227 |
| Kalimantan | 224.835 | 230.570 | 233.604 | 237.709 | 926.718 | 232.617 | 241.033 | 246.947 | 251.900 | 972.496 | 246.090 | 254.441 |
| Nasional | 2.736.846,0 | 2.789.075,7 | 2.830.807,2 | 2.882.564,9 | 11.239.294 | 2.869.413 | 2.945.400 | 2.994.112 | 3.030.856 | 11.839.781 | 3.014.066 | 3.099.175 |

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah

1.1. KONDISI UMUM

Ekonomi Kalimantan Barat tumbuh meningkat pada triwulan III 2023. Perekonomian Kalimantan Barat tumbuh sebesar 4,27% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,00% (yoy)¹. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat tersebut berbeda arah dengan pertumbuhan kawasan Kalimantan yang tumbuh 4,83% (yoy), atau melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,56% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat ini lebih rendah daripada pertumbuhan perekonomian nasional yang sebesar 4,94% (yoy). Berbeda dengan arah pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat, perekonomian nasional tumbuh 4,94% (yoy), atau melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,17% (yoy).



Grafik 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan Kalimantan Barat, Kalimantan, dan Nasional 2020-2023

Tabel 1.1. Nominal ADHK PDRB s/d. Triwulan III 2023 Wilayah Kalimantan dan Nasional

| PDRB (Rp miliar) | 2021 | 2022 | | | | 2022 | 2023 | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | I | II | III | IV | | I | II | III |
| Kalimantan Barat | 141.212 | 36.110 | 36.913 | 37.335 | 38.011 | 148.369 | 37.788 | 38.388 | 38.930 |
| Kalimantan Tengah | 102.481 | 26.337 | 27.131 | 27.043 | 28.584 | 109.095 | 27.184 | 27.934 | 28.054 |
| Kalimantan Selatan | 135.423 | 33.045 | 35.660 | 36.870 | 36.765 | 142.339 | 34.737 | 37.427 | 38.553 |
| Kalimantan Timur | 484.439 | 121.145 | 124.923 | 128.847 | 131.243 | 506.159 | 129.566 | 133.465 | 135.668 |
| Kalimantan Utara | 63.163 | 15.980 | 16.405 | 16.852 | 17.297 | 66.534 | 16.816 | 17.227 | 17.659 |
| Kalimantan | 926.718 | 232.617 | 241.033 | 246.947 | 251.900 | 972.496 | 246.090 | 254.441 | 258.864 |
| Nasional | 11.239.294 | 2.869.413 | 2.945.400 | 2.994.112 | 3.030.856 | 11.839.781 | 3.014.066 | 3.099.175 | 3.142.156 |

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah

1 BPS Provinsi Kalimantan Barat



Grafik 1.2. Pertumbuhan Ekonomi Tahunan Kalimantan Barat dan Nasional 2015-2022

Ekonomi Provinsi Kalimantan Barat memiliki pangsa sebesar 15,04% terhadap perekonomian kawasan Kalimantan pada triwulan III 2023. Pangsa tersebut sedikit menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 15,09%. Penurunan tersebut sejalan dengan kinerja industri pengolahan Kalimantan Barat yang melambat pada triwulan III 2023. Di sisi lain, kontribusi total perekonomian kawasan Kalimantan terhadap perekonomian nasional pada triwulan III 2023 meningkat sebesar 8,24% dibandingkan dengan kontribusi pada triwulan sebelumnya yang sebesar 8,21%. Hal tersebut terjadi, seiring masih kuatnya pertumbuhan di beberapa sektor di kawasan Kalimantan khususnya sektor pertambangan batu bara, konstruksi, dan perdagangan besar dan eceran.

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat pada triwulan III 2023 terutama bersumber dari lapangan usaha (LU) perdagangan besar dan eceran, konstruksi, informasi dan komunikasi, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Empat LU tersebut memiliki andil pertumbuhan masing-masing 1,53%, 0,69%, 0,65%, serta 0,51% pada triwulan III 2023. Hal ini sejalan dengan beberapa faktor pendukung antara lain: (1) mobilitas masyarakat yang menggeliat pasca penghapusan status pandemi Covid-19, tercermin dari peningkatan tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang di Kalimantan Barat (2) berlanjutnya proyek *multiyears* pemerintah dan swasta utamanya pembangunan *refinery* alumina di Kabupaten Mempawah, (3) pertumbuhan aktivitas percetakan dalam rangka menyambut pemilu serentak yaitu pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif pada awal tahun 2024, (4) peningkatan aktivitas rumah sakit daerah seiring dengan peningkatan jumlah pasien akibat wabah demam berdarah (DBD) di Kalimantan Barat. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan perekonomian terutama bersumber dari pembentukan modal tetap bruto (PMTB), konsumsi rumah tangga, dan konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) dengan andil pertumbuhan masing-masing 2,57%, 2,12%, dan 0,15% pada triwulan III 2023.

1.2. PERKEMBANGAN EKONOMI SISI PENAWARAN: LAPANGAN USAHA (LU)

Dari sisi penawaran, kinerja LU triwulan III 2023 melanjutkan pertumbuhan positif pada semua komponen, kecuali LU pertambangan, industri pengolahan, dan administrasi pemerintahan. Kinerja LU perdagangan besar dan eceran, konstruksi, informasi dan komunikasi, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial menjadi kontributor utama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) triwulan III 2023 dengan andil masing-masing 1,53%, 0,69%, 0,65%, serta 0,51% pada triwulan III 2023.

Peningkatan kinerja LU perdagangan besar dan eceran sejalan dengan mobilitas masyarakat yang menggeliat pasca penghapusan status pandemi Covid-19, tercermin dari peningkatan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Kalimantan Barat. Peningkatan kinerja LU konstruksi sejalan dengan berlanjutnya proyek *multiyears* pemerintah dan swasta khususnya pembangunan *refinery* alumina di Kabupaten Mempawah. Sementara, peningkatan kinerja LU informasi dan komunikasi sejalan dengan pertumbuhan aktivitas percetakan yang meningkat dalam rangka menyambut pemilu serentak yaitu pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif pada awal tahun 2024. Pertumbuhan pada LU jasa kesehatan dan kegiatan sosial masing-masing didorong oleh (1) peningkatan aktivitas rumah sakit daerah seiring dengan peningkatan jumlah pasien akibat wabah demam berdarah (DBD) di Kalimantan Barat dan (2) peningkatan bantuan sosial pemerintah melalui bantuan pangan beras di tengah tekanan inflasi komoditas tersebut yang meningkat pada triwulan III 2023. Di sisi lainnya, LU pertambangan mengalami kontraksi 10,97% (yoy) pada triwulan III 2023. Penurunan kinerja pada LU pertambangan disebabkan oleh keterbatasan kuota ekspor bauksit triwulan III 2023 akibat tidak adanya persetujuan kuota ekspor sejak awal tahun 2023 dan kebijakan moratorium ekspor bauksit mulai 10 Juni 2023. Sedangkan, kontraksi LU industri pengolahan diakibatkan oleh penurunan tingkat produksi *crude palm oil* (CPO) Kalimantan Barat sebesar 1,64% (yoy) berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Kalbar.

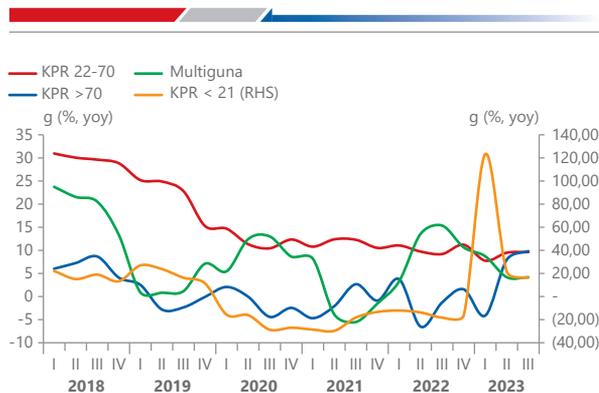
Berdasarkan pangsa terhadap PDRB, perekonomian Kalimantan Barat pada triwulan III 2023 masih didominasi oleh empat LU utama, yaitu LU pertanian, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta konstruksi, dengan total pangsa sebesar 63,04%, meningkat dibandingkan dengan pangsa triwulan lalu yang sebesar 62,34% sejalan dengan penguatan pada LU perdagangan besar dan eceran. LU pertanian masih mendominasi pangsa PDRB yaitu sebesar 22,27% diikuti oleh LU perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, serta konstruksi masing-masing sebesar 15,41%, 15,36% dan 9,99%.

1.2.1. Perdagangan Besar dan Eceran

Kinerja LU perdagangan besar dan eceran mengalami peningkatan pertumbuhan pada triwulan III 2023. LU perdagangan besar dan eceran tumbuh 10,56% (yoy) pada triwulan III 2023, meningkat signifikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,36% (yoy). Peningkatan kinerja LU perdagangan besar dan eceran didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga (RT) dan mobilitas masyarakat yang mengeliat, seiring dengan penghapusan status pandemi dan maraknya kegiatan massal yang dilakukan. Selain itu, peningkatan pertumbuhan kredit kendaraan roda 2 (dua) mendorong perbaikan kinerja pada LU perdagangan besar dan eceran. Kredit kendaraan roda 2 (dua) pada triwulan III 2023 tercatat tumbuh 75,67% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan II 2023 yang tumbuh 69,55% (yoy). Kredit konsumsi berupa kredit perumahan tipe 22-70 dan >70 turut mengalami peningkatan pertumbuhan masing-masing menjadi 9,61% dan 9,82% (yoy), dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 9,48% dan 7,98% (yoy). Akselerasi pertumbuhan kredit perumahan tersebut ditambah dengan pertumbuhan positif jenis kredit konsumsi

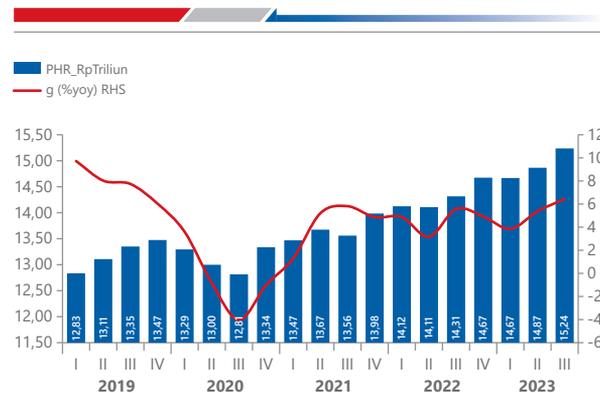
lainnya mampu mendorong kredit konsumsi triwulan III 2023 tumbuh 9,00% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 8,75% (yoy). Peningkatan *traffic* pada *border* Kalbar-Sarawak turut mendorong aktivitas perdagangan dan konsumsi. Peningkatan perdagangan turut didukung oleh kredit kepada sektor perdagangan Kalimantan Barat yang tumbuh 6,44% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,38% (yoy). Selain itu, peningkatan kinerja perdagangan di Kalbar turut tercermin dari TPK hotel berbintang yang tumbuh 13,63% (yoy) pada triwulan III 2023, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 9,00% (yoy).

Berdasarkan data BPS Kalbar, peningkatan kinerja LU perdagangan besar dan eceran yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan jumlah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor I (BBNKB I) yang berkontraksi 16,95% (yoy). Penurunan BBNKB menjadi proksi perdagangan kendaraan bermotor khususnya kendaraan roda empat yang tertahan pada triwulan III 2023. Hal ini sejalan dengan kredit kendaraan roda empat yang melambat pada triwulan III 2023, jika dibandingkan triwulan sebelumnya.



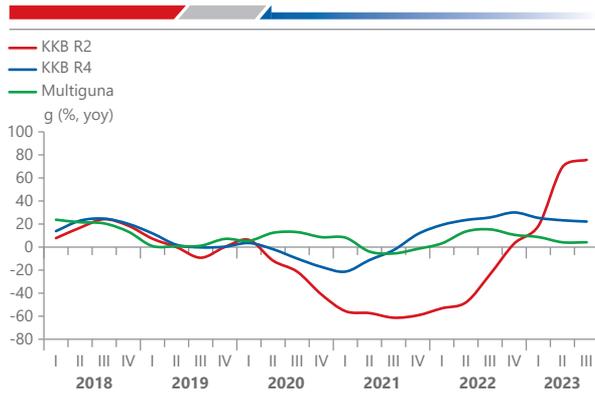
Sumber: Cognos Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.4. Perkembangan Kredit Properti Prov. Kalimantan Barat



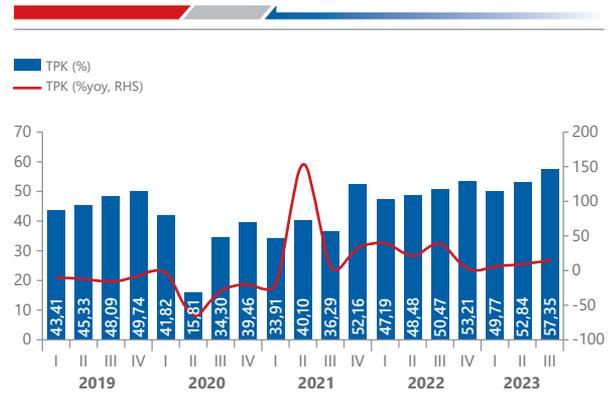
Sumber: Cognos Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.5. Perkembangan Kredit Perdagangan Prov. Kalimantan Barat



Sumber: Cognos Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.6. Perkembangan Kredit Kendaraan dan Multiguna Prov. Kalimantan Barat



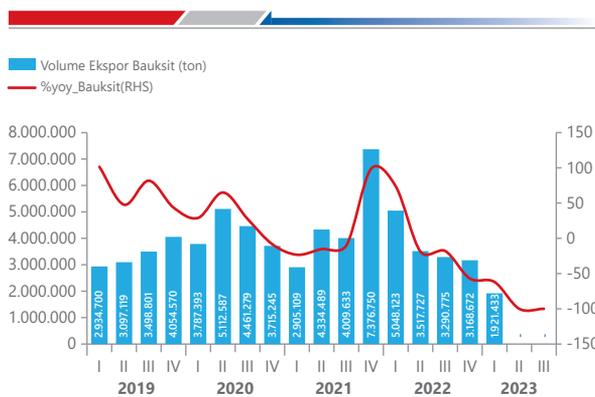
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, diolah

Grafik 1.7. Perkembangan Tingkat Penghunian Kamar Hotel Berbintang Prov. Kalimantan Barat

1.2.2. Pertambangan

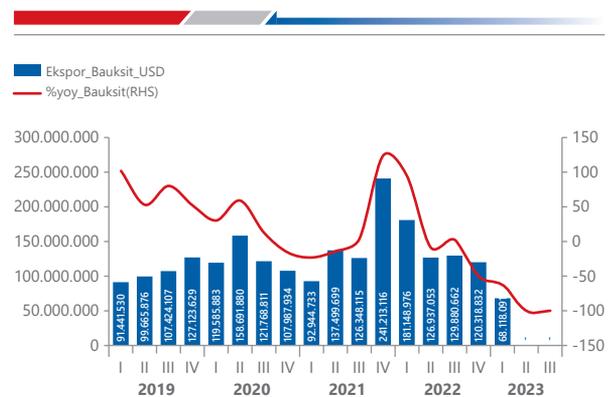
Kinerja LU pertambangan pada triwulan III 2023 terkontraksi 10,97% (yoy), melanjutkan tren triwulan II 2023 yang terkontraksi 12,06% (yoy). Kinerja LU pertambangan yang terkontraksi, tercermin dari volume ekspor bauksit Kalimantan Barat yang terkontraksi dari 100% (yoy) secara berturut-turut sejak triwulan II 2023 atau tidak ada aktivitas ekspor bauksit yang tercatat. Hal ini disebabkan oleh belum adanya persetujuan/penerbitan kuota ekspor 2023 untuk perusahaan tambang bauksit di Kalimantan Barat. Faktor tersebut menjadi kendala perusahaan tambang untuk kembali mengekspor bauksit sebelum

pemberlakuan larangan ekspor pada 10 Juni 2023. Pada bagian lain, permintaan dari sisi domestik belum dapat menyerap produksi bauksit dari Kalimantan Barat disebabkan jumlah *refinery* alumina domestik yang masih terbatas. Saat ini hanya terdapat 3 *refinery* alumina domestik yang beroperasi di antaranya (1) smelter grade alumina (SGA) *refinery* PT. Well Harvest Wining di Kab. Ketapang, (2) SGA *refinery* PT. Bintan Alumina Indonesia di Kab. Bintan, serta (3) *Chemical Grade Alumina* (CGA) *refinery* PT. Indonesia Chemical Alumina di Kab. Sanggau. Permintaan bauksit domestik yang masih minim juga memengaruhi penurunan kinerja LU pertambangan.



Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah

Grafik 1.8. Volume Ekspor Bauksit Kalimantan Barat



Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cuka, diolah

Grafik 1.9. Nilai Ekspor Bauksit Kalimantan Barat

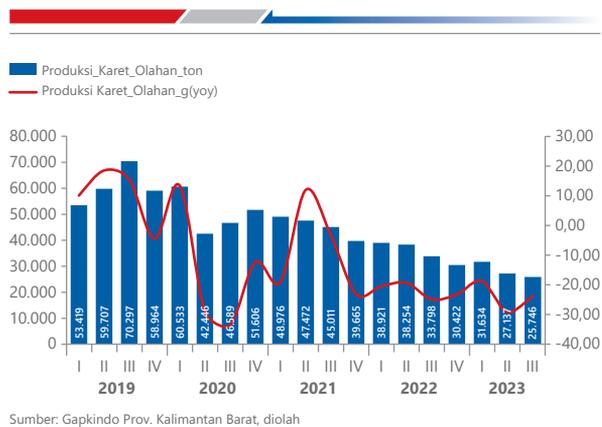
1.2.3. Industri Pengolahan

LU industri pengolahan mengalami kontraksi pertumbuhan pada triwulan III 2023. Kinerja industri pengolahan tercatat kontraksi 1,80% (yoy), berbalik dibandingkan dengan triwulan II 2023 yang tumbuh 2,69% (yoy). Kontraksi LU industri pengolahan triwulan III 2023 didorong oleh berlanjutnya kontraksi produksi pengolahan karet. Volume produksi industri karet pada triwulan III 2023 tercatat terkontraksi 23,82% (yoy). Hal ini disebabkan oleh permasalahan dalam penyediaan bahan baku akibat penurunan produktivitas karet alam dan konversi lahan karet menjadi komoditas lainnya karena perkembangan *margin* perdagangan komoditas karet yang *inferior* dibandingkan dengan komoditas lainnya. Selain itu, penyakit gugur daun turut menurunkan jumlah hasil lateks dari karet alam di tengah usia tanaman yang semakin tua.

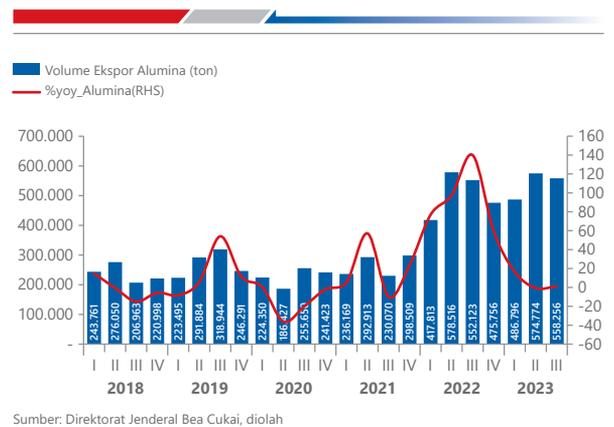
Selain itu, perlambatan LU industri pengolahan pada triwulan III 2023 turut didorong oleh kinerja volume produksi industri pengolahan *crude palm oil* (CPO). Berdasarkan data BPS Kalbar, produksi industri CPO mengalami kontraksi 1,64% (yoy) pada triwulan III 2023. Perkembangan ini berlawanan apabila dibandingkan dengan data produksi CPO triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 13,84% (yoy), dengan sumber data

Disbun Kalbar. Perlambatan pertumbuhan volume produksi CPO didorong oleh harga CPO internasional yang melanjutkan tren kontraksi pada level -7,23% (yoy), sehingga menjadi disinsentif bagi produsen CPO. Selain itu, kekeringan yang menyebabkan turunnya debit sungai Kapuas menghambat proses transportasi CPO sehingga produsen menyesuaikan tingkat produksi CPO di tengah keterbatasan *storage tank*. Meski demikian, volume produksi CPO masih menopang perekonomian Kalbar didorong oleh tingkat permintaan terhadap CPO yang terjaga, seiring dengan konsumsi domestik khususnya pada HBKN, penerapan bio diesel B35, dan puncak panen yang terjadi pada triwulan berjalan.

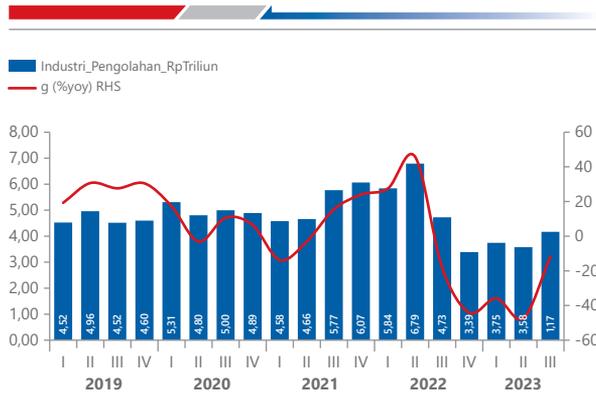
Kontraksi lebih lanjut pada LU industri pengolahan tertahan oleh produksi industri alumina yang tumbuh positif. Produksi alumina tercermin dari volume ekspor alumina yang tercatat 558 ribu ton pada triwulan III 2023 atau tumbuh 1,11%, berbalik arah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 0,65% (yoy). Dari sisi pembiayaan, kredit LU industri pengolahan mengalami perbaikan meski masih kontraksi dari -47,36% (yoy) pada triwulan II 2023 menjadi -11,77% (yoy) pada triwulan III 2023.



Grafik 1.10. Perkembangan Produksi Industri Karet

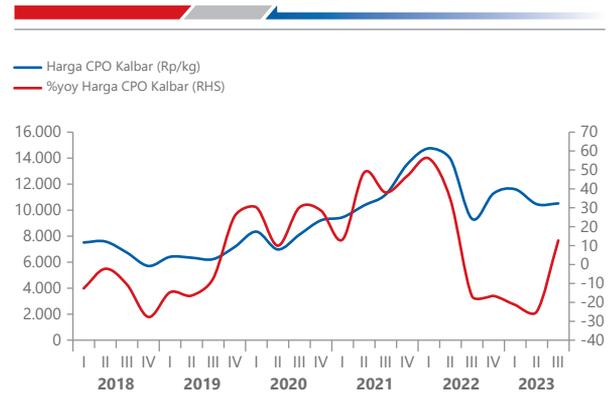


Grafik 1.11. Volume Ekspor Alumina Triwulanan



Sumber: Cognos BI, diolah

Grafik 1.12. Kredit LU Industri Pengolahan



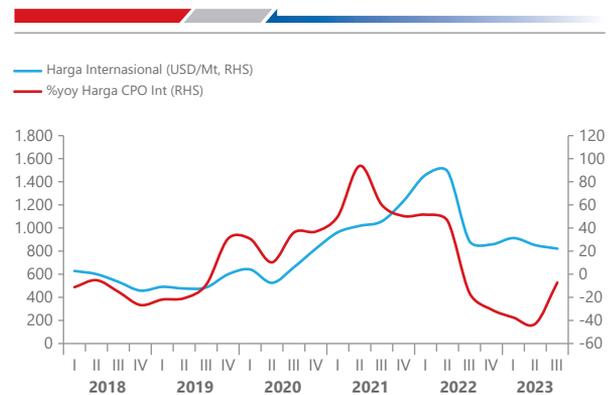
Sumber: Dinas Perkebunan Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 1.13. Rata-Rata Harga CPO Kalbar Triwulanan



Sumber: Dinas Perkebunan Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 1.14. Volume Produksi CPO Triwulanan



Sumber: Bloomberg, diolah

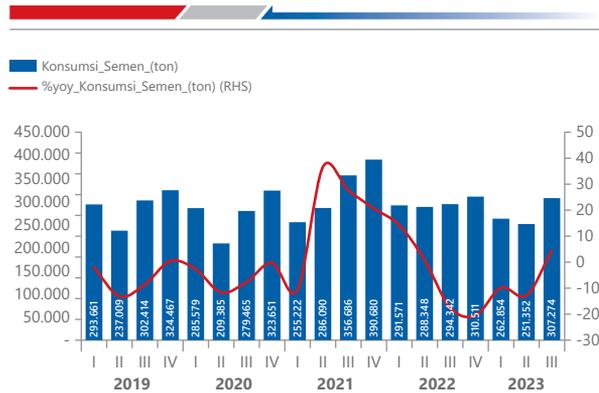
Grafik 1.15. Rata-Rata Harga CPO Global Triwulanan

1.2.4. Konstruksi

LU konstruksi pada triwulan III 2023 tumbuh 7,15% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 6,96% (yoy). Peningkatan kinerja LU konstruksi tercermin dari pertumbuhan impor seluruh tipe material konstruksi, terutama bahan material *clay*. Impor material *Clay Construction Materials & Refractory Construction* tumbuh 29,55% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 48,62% (yoy). Sementara, impor material *lime, cement & fabricated* dan *iron & steel* melanjutkan pertumbuhan dari triwulan sebelumnya dengan pertumbuhan masing-masing 291,20% (yoy) dan 23,34% (yoy). Peningkatan kinerja LU konstruksi juga didorong oleh pembangunan infrastruktur *multiyear* yang masih berlangsung seperti percepatan

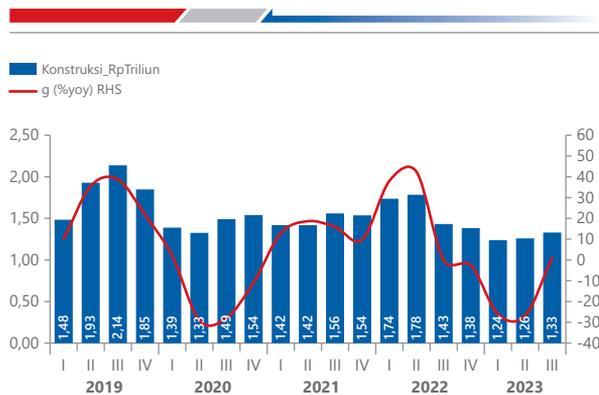
pembangunan *refinery* alumina di Mempawah, kawasan industri, Jembatan Sungai Sambas Besar, duplikasi Jembatan Kapuas I, serta peningkatan infrastruktur jalan. Peningkatan kinerja konstruksi pada triwulan III 2023 turut ditopang oleh peningkatan pertumbuhan realisasi belanja modal pemerintah melalui APBD dan APBN. Realisasi belanja modal APBN Kementerian/Lembaga dan APBD Pemprov + Kab/Kota di Kalimantan Barat masing-masing tumbuh 13,15% dan 47,11% (yoy) pada triwulan III 2023.

Peningkatan kinerja LU konstruksi triwulan III 2023 turut didukung oleh peningkatan kinerja konsumsi semen. Konsumsi semen pada triwulan III 2023 tercatat tumbuh 4,39% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 12,83% (yoy).



Sumber: Asosiasi Semen Indonesia, diolah

Grafik 1.16. Konsumsi Semen

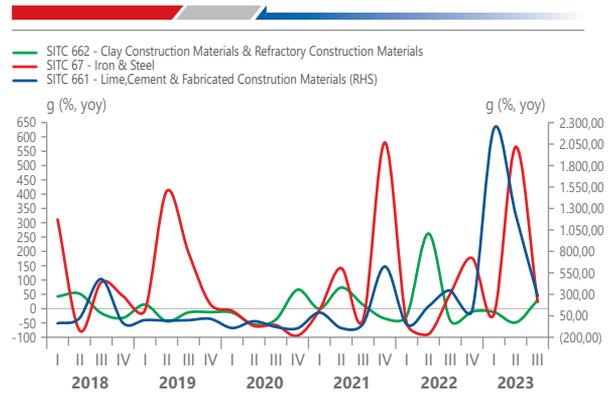


Sumber: Cognos Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.18. Kredit LU Konstruksi

1.2.5. Pertanian

Kinerja LU pertanian pada triwulan III 2023 mengalami perlambatan. LU pertanian tercatat tumbuh 0,09% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 0,13% (yoy). Perlambatan pertumbuhan LU pertanian triwulan III 2023 didorong oleh penurunan produksi padi akibat penurunan luas lahan panen padi Kalimantan Barat. Luas lahan panen padi Kalimantan Barat berkontraksi 10,65% (yoy), sama dibandingkan dengan triwulan sebelumnya



Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah

Grafik 1.17. Impor Material Konstruksi

yang berkontraksi 11,21% (yoy). Penurunan luas lahan panen terutama terjadi di Kab. Sambas dan Kab. Sintang yang masing-masing berkontraksi 20,56% yoy (berkurang 4.442 ha) dan 67,99% yoy (berkurang 1.043 ha). Penurunan luas panen padi tersebut diakibatkan penurunan luas tanam oleh petani sejalan dengan kekhawatiran akan kekeringan akibat kondisi El Nino. Aktivitas penanaman padi sawah pada triwulan III 2023 tercatat berkontraksi 19,88% (yoy), lebih dalam dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi 5,56% (yoy). Kontraksi luas tanam padi sawah ini berisiko menahan pada produksi padi pada triwulan I dan II 2024. Selain itu, produksi karet alam di Kalimantan Barat turut melanjutkan tren penurunan akibat penurunan produktivitas karena usia tanaman yang sudah tua, keterbatasan realisasi replanting, serta alih lahan pertanian ke komoditas yang saat ini menawarkan margin lebih tinggi. Margin yang inferior, tercermin dari rata-rata harga internasional dan Kalbar untuk komoditas karet yang masing-masing tercatat berkontraksi 8,09% dan 4,19% (yoy) pada triwulan III 2023, melanjutkan kontraksi pada triwulan sebelumnya.

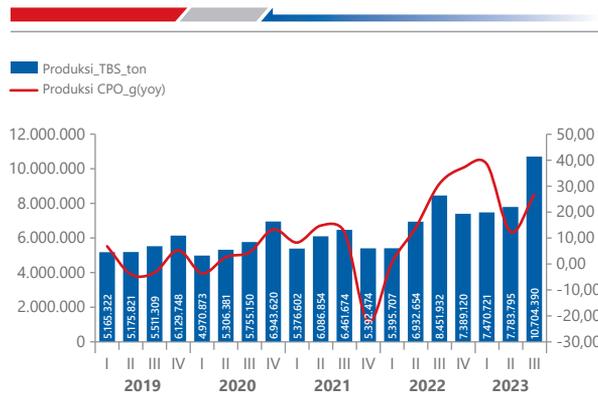
Tabel 1.3. Penyerapan Belanja Modal APBD Kalimantan Barat dan APBN s/d. Triwulan III 2023 (Rp miliar)

| Belanja Modal | Pagu | | Realisasi s.d Tw III | | % Realisasi Tw III | | % Perubahan (yoy) | |
|-------------------------|----------|----------|----------------------|----------|--------------------|-------|-------------------|-----------|
| | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | Pagu | Realisasi |
| APBD Pemprov + Kab/Kota | 4.150,99 | 4.673,21 | 1.228,74 | 1.807,63 | 29,60 | 38,68 | 12,58 | 47,11 |
| APBN | 2.616,07 | 2.379,53 | 1.058,60 | 1.197,77 | 40,47 | 49,85 | -8,15 | 13,15 |

Sumber: Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Barat, diolah

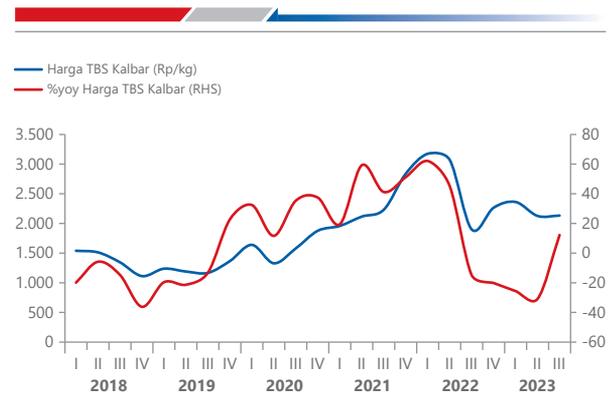
Perlambatan LU pertanian yang lebih jauh tertahan oleh pertumbuhan produksi Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Kalimantan Barat. Volume produksi TBS tercatat tumbuh 26,65% (yoy) pada triwulan III 2023, meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 12,28% (yoy). Peningkatan volume produksi TBS Kalbar pada triwulan III 2023, didorong

oleh aktivitas pemupukan yang terus dilakukan oleh perkebunan TBS, khususnya perkebunan milik perusahaan. Selain itu, kondisi cuaca yang lebih kondusif di wilayah sentra produksi TBS dan program mitigasi banjir oleh pemerintah daerah setempat, mendorong aktivitas kelancaran aktivitas panen TBS.



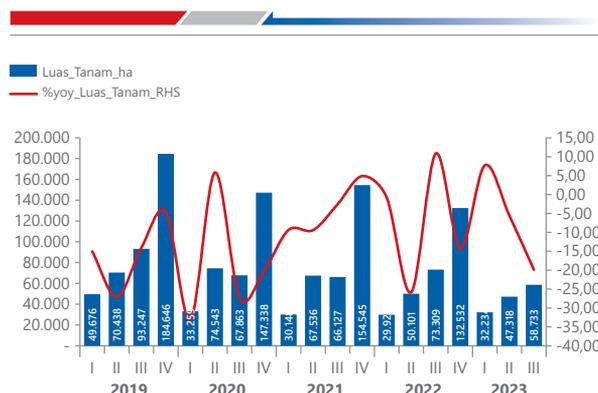
Sumber: Dinas Perkebunan Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 1.19. Perkembangan Produksi TBS Kelapa Sawit



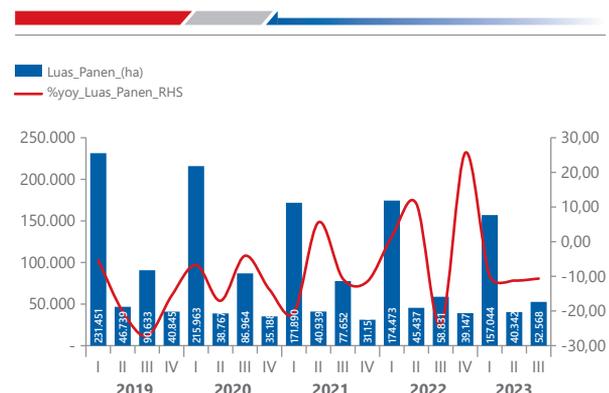
Sumber: Dinas Perkebunan Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 1.20. Perkembangan Rata-Rata Harga TBS (Kelapa Sawit) Kalbar Triwulanan



Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, diolah

Grafik 1.21. Perkembangan Luas Lahan Tanam Sawah



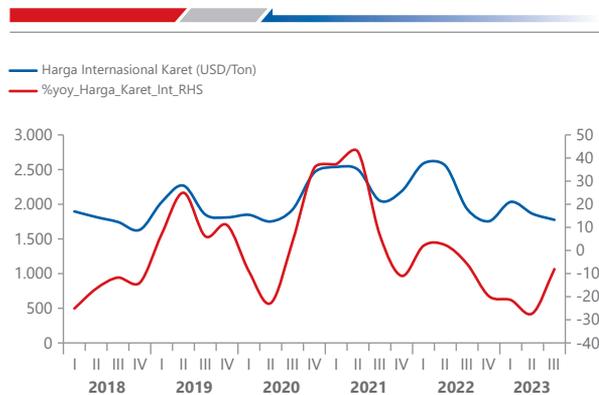
Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, diolah

Grafik 1.22. Perkembangan Luas Lahan Panen Sawah

Tabel 1.4. Perkembangan Luas Lahan Panen Sawah Kabupaten/Kota (Ha)

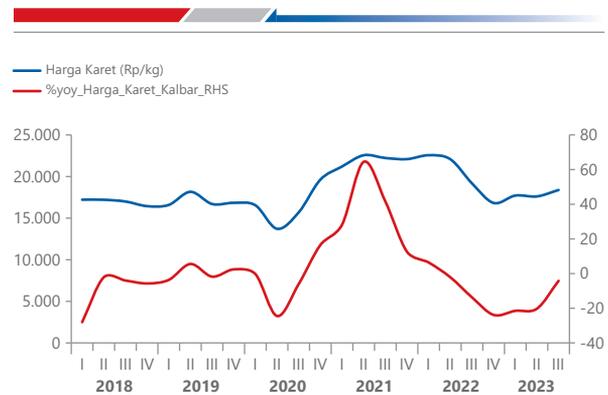
| Kab/Kota | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | Perubahan Luas Panen Thd | | | |
|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | Tw III 2022 (ha) | Tw III 2022 (%) (yoy) | Tw II 2023 (ha) | Tw II 2023 (%) (qtq) |
| Sambas | 45,873 | 5,341 | 34,840 | 5,349 | 47,667 | 9,817 | 21,509 | 10,994 | 31,787 | 11,765 | 17,087 | (4,422) | (20.56) | 5,322 | 45.24 |
| Bengkayang | 8,373 | 10 | 6,270 | 847 | 8,097 | 22 | 4,102 | 1,218 | 7,806 | 25 | 5,027 | 925 | 22.55 | 5,002 | 20,008.00 |
| Landak | 28,642 | 4,873 | 17,156 | 11,569 | 29,917 | 8,521 | 16,237 | 18,009 | 44,724 | 8,543 | 16,236 | (1) | (0.01) | 7,693 | 90.05 |
| Mempawah | 8,313 | 2,534 | 4,989 | 4,611 | 7,509 | 3,024 | 4,768 | 4,528 | 6,983 | 2,382 | 4,351 | (417) | (8.75) | 1,969 | 82.66 |
| Sanggau | 15,018 | 532 | 1,799 | 4,254 | 18,830 | 1,618 | 984 | 881 | 11,795 | 1,229 | 939 | (45) | (4.57) | (290) | (23.60) |
| Ketapang | 13,787 | 8,030 | 1,978 | 682 | 12,398 | 7,653 | 2,624 | 494 | 10,598 | 2,982 | 2,764 | 140 | 5.34 | (218) | (7.31) |
| Sintang | 7,923 | 4,378 | 2,375 | 33 | 6,814 | 3,002 | 1,534 | 694 | 6,112 | 3,974 | 491 | (1,043) | (67.99) | (3,483) | (87.64) |
| Kapuas Hulu | 6,790 | 234 | 1,458 | 6 | 6,835 | 256 | 1,048 | 22 | 6,457 | 535 | 728 | (320) | (30.56) | 193 | 36.02 |
| Sekadau | 6,844 | 1,039 | 103 | 5,055 | 1,855 | 1,335 | 107 | 5,146 | 2,123 | 940 | (395) | (29.59) | (1,183) | (55.71) | |
| Melawi | 3,177 | 1,565 | 411 | 42 | 3,066 | 0 | 550 | 75 | 2,922 | 0 | 785 | 235 | 42.73 | 785 | #DIV/0! |
| Kayong Utara | 4,460 | 6,826 | 945 | 739 | 3,889 | 6,437 | 1,111 | 868 | 1,454 | 5,639 | 357 | (754) | (67.83) | (5,281) | (93.66) |
| Kubu Raya | 20,378 | 5,742 | 2,356 | 2,851 | 22,130 | 3,065 | 1,382 | 970 | 19,566 | 857 | 1,384 | 2 | 0.14 | 527 | 61.49 |
| Pontianak | 146 | 34 | 33 | 41 | 164 | 35 | 6 | 0 | 160 | 17 | 5 | (1) | (16.67) | (12) | (70.59) |
| Singkawang | 2,166 | 86 | 2,003 | 105 | 2,103 | 132 | 1,642 | 288 | 1,535 | 272 | 1,474 | (168) | (10.23) | 1,202 | 441.91 |
| Total | 171,890 | 40,184 | 77,652 | 31,231 | 174,474 | 45,437 | 58,832 | 39,148 | 157,044 | 40,342 | 52,568 | -6,264 | -10.65 | 12,226 | 30.31 |

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, diolah



Sumber: Bloomberg, diolah

Grafik 1.23. Perkembangan Rata-Rata Harga Karet Internasional Triwulanan



Sumber: Gapkindo Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 1.24. Perkembangan Rata-Rata Harga Karet Kalbar Triwulanan

1.3. PERKEMBANGAN EKONOMI SISI PERMINTAAN

Dari sisi pengeluaran, perkonomian Kalimantan Barat pada triwulan III 2023 ditopang oleh pertumbuhan pada semua sektor pengeluaran, kecuali ekspor dan konsumsi pemerintah. Kinerja investasi pada triwulan

III 2023 meningkat, didorong oleh peningkatan pertumbuhan pada aktivitas investasi pelaku usaha dalam negeri khususnya pada proyek investasi besar *refinery* alumina. Konsumsi rumah tangga juga melanjutkan pertumbuhan positif, antara lain didorong oleh penghapusan status pandemic covid-19

Tabel 1.5. Pertumbuhan PDRB Triwulan III 2023 Sisi Permintaan

| Pengeluaran | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | Triwulan III 2023 | |
|-----------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------------|--|
| | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | Pangsa | Andil Pertumbuhan (%) | |
| Konsumsi Rumah Tangga | 0.44 | 1.57 | 0.93 | 3.73 | 2.38 | 4.82 | 4.35 | 2.93 | 3.89 | 5.80 | 4.20 | 48.66 | 2.12 | |
| Konsumsi LNPR | 0.89 | 7.05 | 3.38 | -9.79 | -1.82 | 0.31 | 0.46 | 19.11 | 4.11 | 10.08 | 13.07 | 1.32 | 0.15 | |
| Konsumsi Pemerintah | -0.34 | 10.73 | -0.40 | -7.46 | -6.53 | -7.84 | -4.60 | -6.64 | 14.05 | 14.62 | -1.30 | 10.23 | -0.13 | |
| PMTB | 0.34 | 4.33 | 4.57 | 1.68 | 1.89 | 3.50 | 3.28 | 3.52 | 6.04 | 8.62 | 8.69 | 33.46 | 2.57 | |
| Ekspor | 6.39 | 22.15 | -14.02 | 62.01 | 49.50 | 46.12 | 53.97 | -10.92 | -16.66 | -35.19 | -28.60 | 13.78 | -6.82 | |
| Impor | -42.23 | -11.57 | -17.22 | 5.02 | 6.95 | 10.83 | 9.86 | 21.57 | 42.43 | 53.91 | 89.18 | 7.93 | 4.48 | |
| Total (yoy) | -0.09 | 10.81 | 4.66 | 4.31 | 4.15 | 4.58 | 6.53 | 5.01 | 4.65 | 4.00 | 4.27 | 100.00 | | |

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah

Tumbuh
Kontraksi

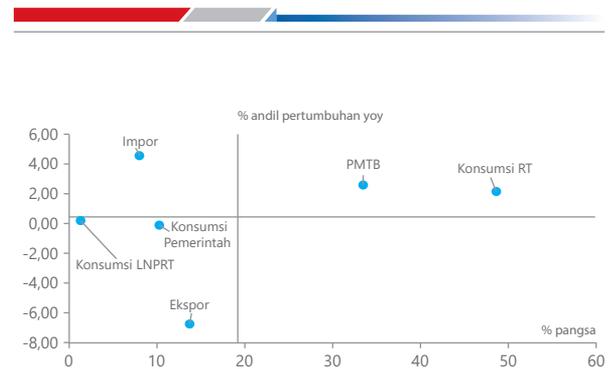
dan mobilitas tinggi masyarakat pada triwulan III 2023. Sementara, peningkatan kinerja konsumsi LNPRТ didorong oleh peningkatan aktivitas partai politik dan komunitas non profit lainnya menjelang pemilihan umum serentak pada awal tahun 2024. Sementara itu, peningkatan kinerja impor didorong oleh peningkatan kinerja impor barang modal di tengah perkembangan konstruksi proyek pemerintah dan aktivitas investasi mesin/perlengkapan usaha dan barang konstruksi oleh pelaku usaha.

Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tertahan oleh kontraksi ekspor terutama nilai ekspor bauksit yang tercatat nihil semenjak triwulan sebelumnya. Hal ini didorong oleh ketiadaan kuota ekspor bauksit sejalan dengan tidak terbitnya perizinan ekspor dan pemberlakuan moratorium ekspor bauksit mulai 10 Juni 2023. Konsumsi pemerintah terkonsentrasi akibat kinerja realisasi anggaran pemerintah pusat dan daerah di Kalbar yang termoderasi.

Komponen konsumsi Rumah Tangga (RT) serta investasi pada triwulan III 2023 memiliki pangsa terbesar dalam PDRB Kalimantan Barat dengan kumulatif 82,12% dari total PDRB Kalimantan Barat, meningkat dibandingkan dengan pangsa pada triwulan sebelumnya yang sebesar 81,71%, akibat peningkatan pangsa pada sektor investasi. Pangsa investasi tercatat sebesar 33,46% pada triwulan III 2023, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 31,78%. Sedangkan, pangsa konsumsi RT tercatat sebesar 48,66%, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya dengan pangsa 49,93%.

Pada matriks PDRB sisi pengeluaran yang ditunjukkan pada Grafik 1.24, kinerja investasi dan konsumsi RT berada di kuadran kanan atas yaitu komponen dengan tingkat andil dan pangsa perekonomian berada di atas *threshold*³. Sementara itu, komponen pengeluaran ekspor melanjutkan kontraksi pertumbuhan secara berturut-turut. Hal ini menempatkan ekspor pada kuadran kiri – bawah (pangsa maupun andil

3. *Threshold* yang digunakan dalam pemetaan matriks adalah 0,40% sebagai batas pada andil pertumbuhan ekonomi daerah dan 19,23% sebagai batas pada pangsa komponen PDRB. Penentuan batas *threshold* yang digunakan merupakan rata-rata pertumbuhan dan pangsa lapangan usaha pada Triwulan berjalan.



Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 1.25. Pemetaan Matriks Komponen PDRB Sisi Permintaan Triwulan III 2023

pertumbuhan di bawah rata-rata). Oleh karena itu perlu dilakukan akselerasi industri pengolahan berbasis bauksit dengan memberi dukungan terhadap pembangunan *refinery* alumina. Selain itu, peningkatan ekspor komoditas lainnya perlu diinisiasi, terutama peningkatan ekspor berbasis CPO dengan cara optimalisasi Terminal Kijing (pengadaan *crane*, fasilitas curah cair, dan pembangunan industri di sekitar).

1.3.1. Konsumsi Rumah Tangga

Kinerja konsumsi RT melanjutkan pertumbuhan pada triwulan III 2023. Konsumsi rumah tangga pada triwulan III 2023 tumbuh sebesar 4,20% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,80% (yoy). Pertumbuhan kinerja konsumsi RT antara lain didorong oleh penghapusan status pandemi covid-19 yang mendorong mobilitas masyarakat yang mengeliat. Penyelenggaraan berbagai kegiatan massal oleh masyarakat dan pemerintah pada triwulan berjalan turut mendorong pertumbuhan konsumsi RT. Peningkatan lalu lintas pada *border* Kalimantan Barat-Serawak turut mendukung pertumbuhan konsumsi RT pada triwulan III 2023. Bantuan sosial yang terus diberikan oleh pemerintah pusat Selain itu, kondisi tekanan inflasi yang melandai turut menjaga daya beli masyarakat dan rumah tangga. Inflasi umum pada triwulan III 2023 tercatat 2,26% (yoy), menurun dibandingkan dengan inflasi triwulan sebelumnya yang tercatat 4,10% (yoy).

pada triwulan III 2023, dari 141,16 pada triwulan II 2023. Selain itu, perlambatan konsumsi RT turut sejalan dengan realisasi belanja bantuan sosial pada APBN di Kalbar yang berkontraksi 4,21% (yoy) menjadi Rp7,56 miliar pada triwulan III 2023 dari Rp7,90 miliar pada periode sama tahun sebelumnya.

1.3.2. Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT)

Kinerja konsumsi LNPRT pada triwulan III 2023 mengalami peningkatan. Pertumbuhan konsumsi LNPRT tercatat tumbuh sebesar 13,07% (yoy) pada triwulan III 2023, meningkat dibandingkan dengan triwulan II 2023 yang tumbuh 10,08% (yoy). Pertumbuhan positif ini didorong oleh aktivitas partai politik dan komunitas non profit lainnya menjelang pemilihan umum serentak pada awal tahun 2024. Ke depan, LNPRT diperkirakan akan melanjutkan tren pertumbuhan impresif sampai pada awal tahun 2024. Hal ini sejalan dengan peningkatan intensitas aktivitas partai politik menjelang pemilihan umum serentak.

1.3.3. Konsumsi Pemerintah

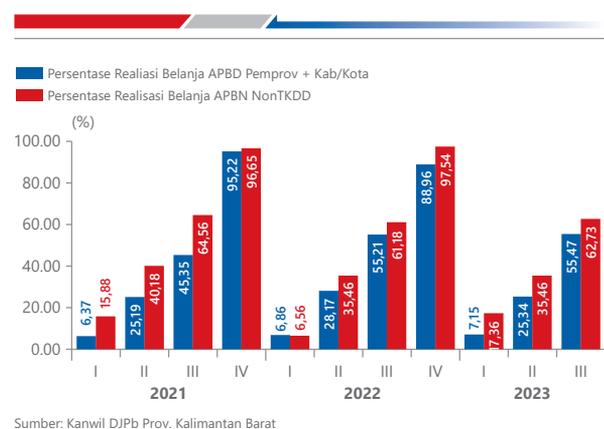
Konsumsi pemerintah pada triwulan III 2023 mengalami penurunan kinerja. Konsumsi pemerintah berkontraksi 1,30% (yoy) pada triwulan III 2023, berbalik dibandingkan triwulan II 2023 yang tumbuh 14,46% (yoy). Penurunan kinerja konsumsi pemerintah dipengaruhi oleh penurunan nominal realisasi beberapa komponen belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) di Kalimantan Barat pada triwulan III 2023.

Berdasarkan data Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat, realisasi komponen belanja bantuan sosial dan belanja tidak terduga APBD masing-masing tercatat Rp10,39 miliar dan Rp14,09 miliar atau berkontraksi sebesar -37,78% dan -36,34% (yoy). Selain itu, dari sisi belanja APBN di Kalbar, realisasi komponen belanja pegawai dan belanja bantuan sosial masing-masing tercatat Rp2,85 triliun dan Rp7,56 miliar, berkontraksi sebesar -1,68% (yoy) dan -4,21% (yoy).

APBN non-Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan akhir triwulan III 2023 tercatat telah direalisasikan sebesar 62,73% sampai dengan triwulan III 2023. Realisasi belanja APBN non TKDD s.d. triwulan III 2023 ini utamanya ditopang oleh realisasi pada komponen belanja barang dan belanja pegawai yang tercatat sebesar Rp3,17 triliun dan Rp2,85 triliun. Realisasi belanja barang dan pegawai tersebut memiliki total pangsa sebesar 79,05% dari keseluruhan realisasi belanja APBN non TKDD s.d. triwulan III 2023.

Belanja APBD kab/kota dan pemerintah provinsi di Kalimantan Barat telah direalisasikan sebesar 55,47% sampai dengan triwulan III 2023. Realisasi belanja ini utamanya ditopang oleh realisasi pada komponen belanja operasi dan belanja transfer yang masing-masing tercatat sebesar Rp10,31 triliun dan Rp2,79 triliun. Kedua komponen belanja tersebut memiliki total pangsa sebesar 87,77% dari keseluruhan realisasi belanja APBD s.d. triwulan III 2023.

Secara umum, terdapat peningkatan pagu anggaran belanja APBD Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota Kalimantan Barat tahun 2023 sebesar 5,93% (yoy) dari Rp25,39 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp26,9 triliun pada tahun 2023. Sementara, pagu belanja non-TKDD APBN di Kalimantan Barat pada tahun 2023 tumbuh 7,46% (yoy) dari Rp10,72 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp11,52 triliun pada tahun 2023.



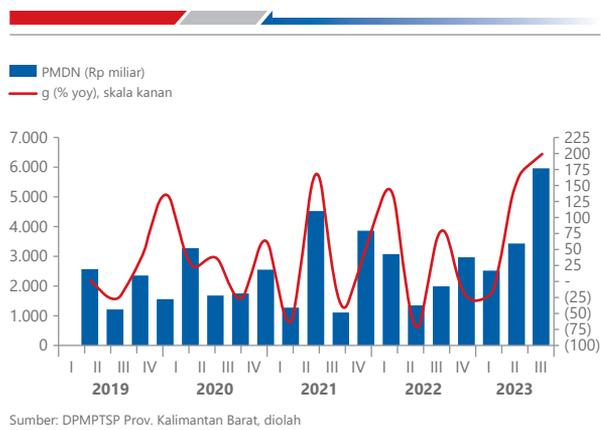
Sumber: Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Barat

Grafik 1.30. Persentase Realisasi Belanja APBD Pemprov + Kab/Kota & APBN Kalimantan Barat

1.3.4. Investasi

Kinerja investasi pada triwulan III 2023 meningkat. Kinerja investasi tercatat tumbuh sebesar 8,69% (yoy) pada triwulan III 2023, meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 8,62% (yoy). Peningkatan kinerja investasi didorong oleh peningkatan pertumbuhan realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) pada triwulan III 2023. PMDN pada triwulan III 2023 tercatat sebesar Rp5,95 triliun, atau tumbuh 199,37% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 154,34% (yoy). Peningkatan pertumbuhan PMDN pada triwulan III 2023 terutama didorong oleh penambahan investasi pada proyek *refinery* alumina di Mempawah dan investasi pelaku usaha pada sektor perkebunan dan industri makanan.

Peningkatan pertumbuhan realisasi PMDN terjadi pada semua sektor (primer, sekunder, dan tersier), dengan tingkat pertumbuhan masing-masing 157,35%, 328,68%, dan 37,10% (yoy). Peningkatan pertumbuhan terjadi pada sektor sekunder dengan tingkat pertumbuhan 328,68% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh

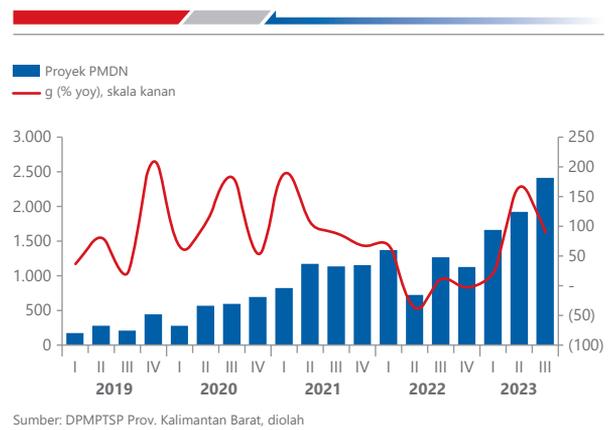


Grafik 1.31. Perkembangan Realisasi PMDN

Tabel 1.6. Perkembangan Realisasi PMDN per Sektor

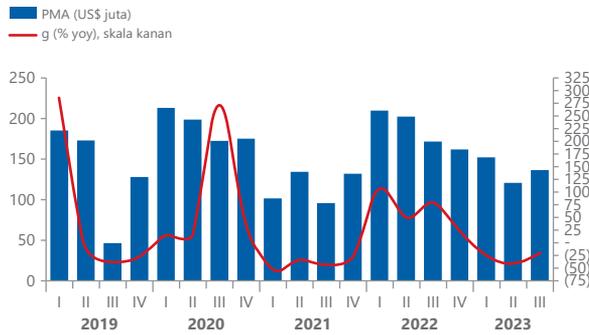
| PMDN (Rp Juta) | 2021 | 2022 | | | | 2022 | 2023 | | |
|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | I | II | III | IV | | I | II | III |
| Primer | 3,206,554 | 2,297,015 | 622,616 | 852,734 | 1,965,927 | 5,738,291.80 | 1,963,746 | 1,770,795 | 2,194,546 |
| Sekunder | 6,269,233 | 316,184 | 444,783 | 755,401 | 526,397 | 2,042,764.20 | 279,377 | 1,136,946 | 3,238,287 |
| Tersier | 1,297,607 | 462,929 | 281,833 | 381,181 | 475,925 | 1,601,867.50 | 277,742 | 523,960 | 522,606 |
| Total | 10,773,393 | 3,076,127 | 1,349,232 | 1,989,316 | 2,968,249 | 9,382,924 | 2,520,866 | 3,431,700 | 5,955,439 |

Sumber: DPMPSTSP Prov. Kalimantan Barat, diolah



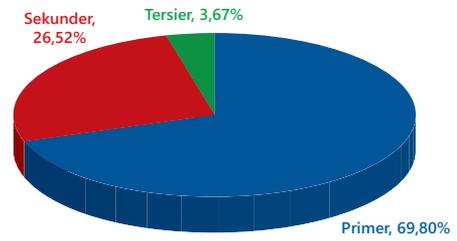
Grafik 1.32. Perkembangan Jumlah Proyek PMDN

155,62% (yoy). Berdasarkan bidang usaha, peningkatan PMDN terutama didorong oleh (1) industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya, (2) tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan, serta (3) industri makanan. Ketiga sektor tersebut masing-masing tumbuh 4225,14%, 156,93%, serta 3,74% (yoy) pada triwulan III 2023. Peningkatan PMDN pada industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya ditopang oleh peningkatan realisasi investasi pada proyek *refineriy* alumina yang progresif di Kabupaten Mempawah. Hal ini sejalan dengan percepatan konstruksi proyek tersebut setelah mengalami kendala pada triwulan-triwulan sebelumnya, dengan target produksi pada tahun 2024. Peningkatan investasi pada bidang usaha tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan didorong oleh investasi pada perkebunan kelapa sawit dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi. Berdasarkan data dari DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Barat, realisasi PMDN tertinggi pada triwulan III 2023 terjadi di Kabupaten Mempawah, Ketapang, dan Sintang dengan nilai PMDN masing-masing Rp2,53 triliun, Rp875,33 miliar, dan Rp716,74 miliar atau dengan pangsa 42,51%, 14,70%, dan 12,03%.



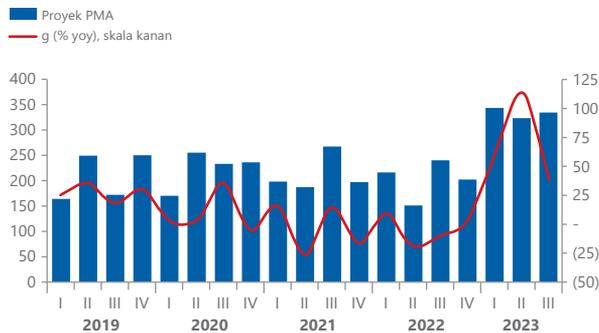
Sumber: DPMPSTSP Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 1.33. Perkembangan Realisasi PMA



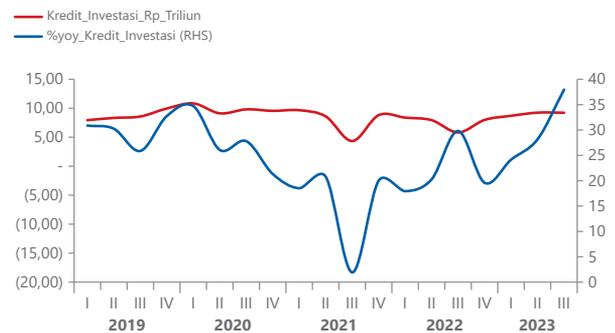
Sumber: DPMPSTSP Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 1.36. Komposisi PMA



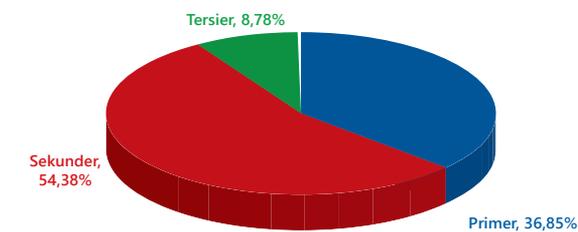
Sumber: DPMPSTSP Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 1.34. Perkembangan Jumlah Proyek PMA



Sumber: Bank Indonesia, Cognos

Grafik 1.37. Perkembangan Kredit Investasi



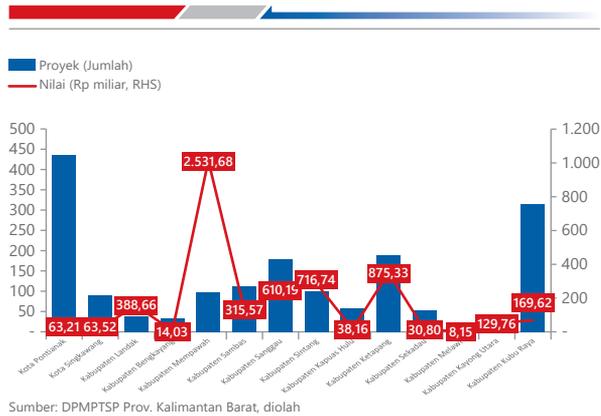
Sumber: DPMPSTSP Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 1.35. Komposisi PMDN

Tabel 1.7. Perkembangan Realisasi PMA per Sektor

| PMA (US\$ Ribu) | 2021 | 2022 | | | | 2022 | 2023 | | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | I | II | III | IV | | I | II | III |
| Primer | 249,102.00 | 120,269.6 | 122,143.6 | 127,060.7 | 102,692.3 | 472,166.20 | 87,761 | 101,914 | 95,233 |
| Sekunder | 151,426.30 | 80,944.0 | 59,573.0 | 36,792.6 | 25,394.2 | 202,703.80 | 62,222 | 14,885 | 36,187 |
| Tersier | 62,885.40 | 8,465.6 | 20,652.3 | 7,659.2 | 33,819.8 | 70,596.90 | 2,084 | 3,939 | 5,013 |
| Total | 463,414 | 209,679 | 202,369 | 171,513 | 161,906 | 745,467 | 152,067 | 120,738 | 136,433 |

Sumber: DPMPSTSP Prov. Kalimantan Barat, diolah



Sumber: DPMPSTSP Prov. Kalimantan Barat, diolah

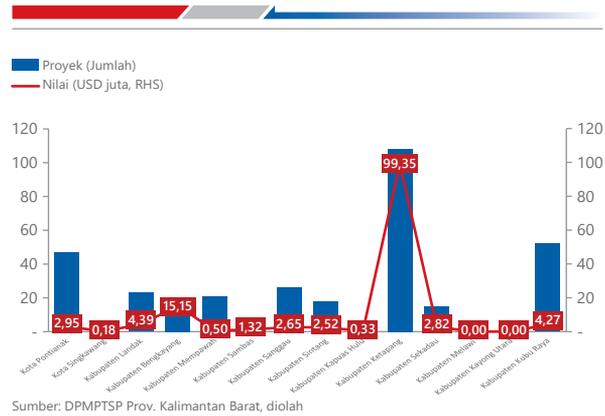
Grafik 1.38. Realisasi PMDN per Kabupaten/Kota

terutama didorong oleh penurunan nilai investasi pada bidang usaha (1) tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan dan (2) industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya, dengan kontraksi masing-masing -19,85% dan -19,47% (yoy). Hal ini antara lain disebabkan oleh berakhirnya proyek grup perusahaan asing pada *refinery* alumina pada tahun 2022, serta kondisi harga CPO internasional yang tidak setinggi periode sama tahun sebelumnya yang ditransmisikan kepada harga TBS Kalbar sehingga menjadi disinsentif investasi sektor perkebunan. Berdasarkan data dari DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Barat, realisasi PMA tertinggi pada triwulan III 2023 terjadi di Kabupaten Ketapang dengan nilai investasi USD99,35 juta atau dengan pangsa 72,82%.

1.3.5. Ekspor-Impor

1.3.5.1. Ekspor

Kinerja ekspor pada triwulan III 2023 melanjutkan tren kontraksi. Kinerja ekspor Kalimantan Barat pada triwulan III 2023 mengalami kontraksi 28,60% (yoy), sedikit membaik dibandingkan dengan triwulan II 2023 yang berkontraksi 35,19% (yoy). Kontraksi kinerja ekspor terutama disebabkan oleh penurunan nilai ekspor komoditas utama Kalimantan Barat antara lain bauksit, minyak kelapa sawit, karet, dan alumina. Realisasi nilai ekspor berdasarkan penggolongan SITC tercatat sebesar USD 497,34 juta atau berkontraksi 33,54% (yoy) pada triwulan III 2023, membaik dibandingkan dengan kontraksi ekspor pada triwulan II 2023 yang berkontraksi 39,20% (yoy).



Sumber: DPMPSTSP Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 1.39. Realisasi PMA per Kabupaten/Kota

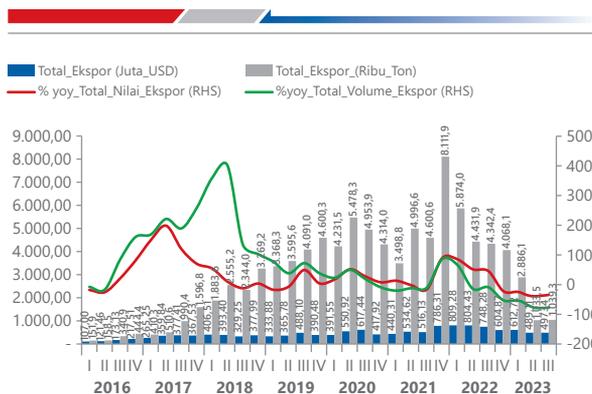
Berdasarkan penggolongan SITC, nilai dan volume ekspor komoditas bauksit terkontraksi 100% (yoy) menjadi nol secara nilai ekspor, melanjutkan tren nihilnya ekspor sejak triwulan sebelumnya yang juga terkontraksi 100% (yoy). Kinerja ekspor bauksit yang tetap menurun pada triwulan III 2023 disebabkan oleh tidak diterbitkannya penetapan kuota ekspor perusahaan bauksit untuk tahun 2023, serta pemberlakuan pelarangan ekspor bauksit mulai 10 Juni 2023.

Penurunan kinerja ekspor Kalimantan Barat pada triwulan III 2023 turut didorong oleh penurunan kinerja ekspor karet. Pada triwulan III 2023, nilai ekspor karet tercatat sebesar USD 36,28 juta atau terkontraksi 36,93% (yoy), lebih dangkal dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 44,75% (yoy) atau dengan tercatat nominal USD38,23 juta. Secara volume, ekspor karet tercatat 25,75 ribu ton atau terkontraksi 21,18% (yoy) pada triwulan III 2023, lebih dangkal dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi 28,43% (yoy) atau dengan volume 27,04 ribu ton. Penurunan kinerja ekspor ini antara lain didorong oleh penutupan beberapa perusahaan industri pengolahan karet pada beberapa triwulan sebelumnya dan penurunan produksi produsen eksisting akibat kesulitan mendapatkan bahan baku karet alam. Kondisi ini disebabkan oleh (1) penurunan produktivitas pohon karet yang sudah tua, (2) penyakit gugur daun sehingga menghasilkan lateks yang lebih minim, (3) minimnya realisasi *replanting* dan (4) alih lahan kepada komoditas lain dengan *margin* yang lebih tinggi. Penurunan nilai ekspor karet turut



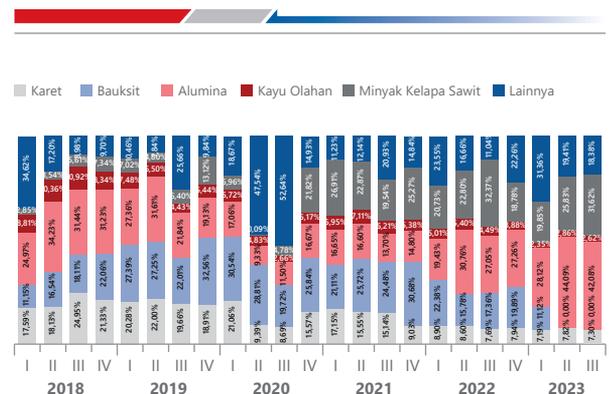
didorong oleh rata-rata harga internasional komoditas karet yang berkontraksi 8,09% pada triwulan III 2023. Sejalan dengan kedua komoditas sebelumnya, nilai ekspor komoditas minyak kelapa sawit dan turunannya sepanjang triwulan III 2023 tercatat sebesar USD157,28 juta atau berkontraksi 35,08% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan triwulan II 2023 yang berkontraksi 31,12% (yoy). Salah satu faktor pemicu penurunan nilai ekspor minyak kelapa sawit dan turunannya secara tahunan yaitu tingkat harga CPO internasional yang berkontraksi 7,23% (yoy), lebih dangkal dibanding triwulan sebelumnya yang berkontraksi 42,83% (yoy). Di sisi lain, volume ekspor minyak kelapa sawit dan turunannya turut mengalami penurunan. Volume ekspor tercatat 187,72 ribu ton atau berkontraksi 6,39% (yoy) pada triwulan III 2023, berbalik arah dibandingkan dengan triwulan II 2023 yang tercatat tumbuh 23,38% (yoy).

Penurunan kinerja ekspor turut tercermin dari penurunan nilai ekspor alumina yang berkontraksi 1,52% (yoy) pada triwulan III 2023, lebih dangkal dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 12,85% (yoy). Di sisi lain, volume ekspor alumina tercatat 558 ribu ton pada triwulan III 2023 atau tumbuh 1,11%, membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 0,65% (yoy). Kontraksi pertumbuhan nilai ekspor alumina ini disebabkan oleh harga alumina yang termoderasi. Selain itu, baseline produksi alumina tahun 2022 yang telah menyentuh kapasitas maksimal, menyebabkan ruang pertumbuhan volume produksi alumina yang terbatas pada sisa tahun 2023 sejalan dengan belum adanya penambahan operasi *refinery* alumina yang baru.



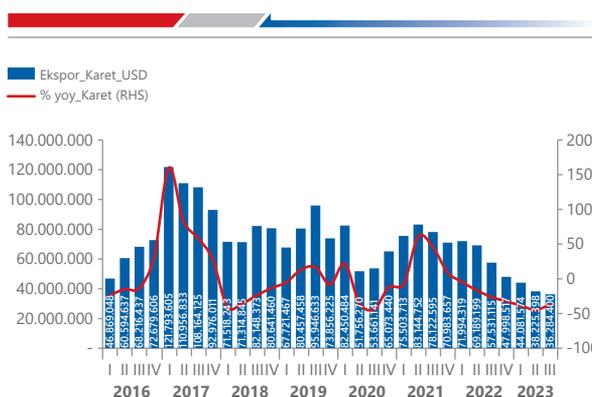
Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah

Grafik 1.40. Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor



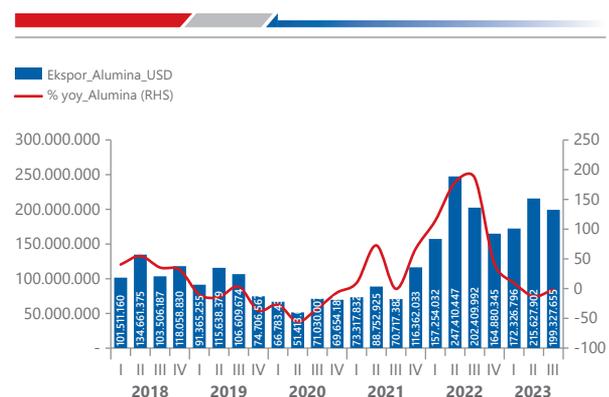
Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah

Grafik 1.41. Perbandingan Proporsi Nilai Ekspor Komoditas



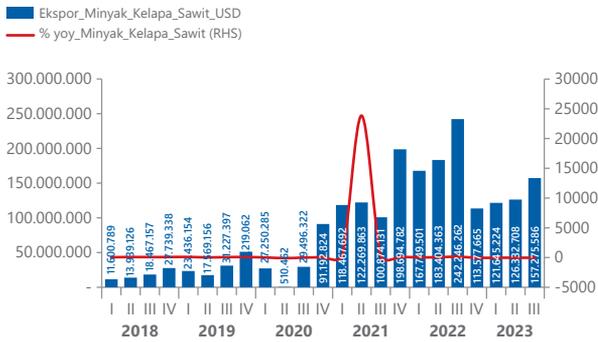
Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah

Grafik 1.42. Perkembangan Nilai Ekspor Karet (SITC)



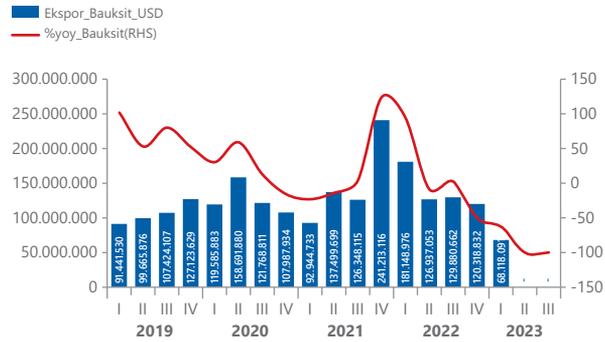
Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah

Grafik 1.43. Perkembangan Nilai Ekspor Alumina (SITC)



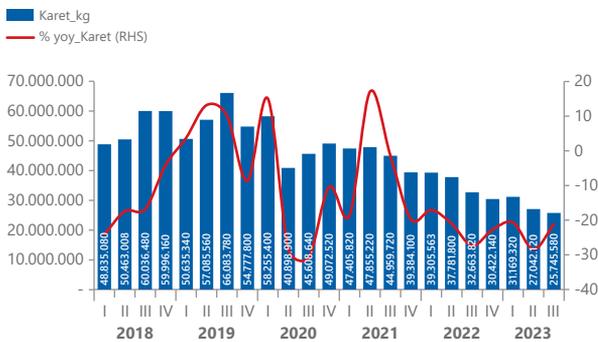
Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah

Grafik 1.44. Perkembangan Nilai Ekspor Minyak Kelapa Sawit (SITC)



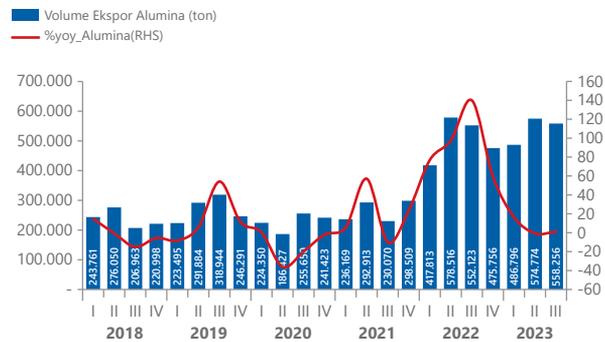
Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah

Grafik 1.45. Perkembangan Nilai Ekspor Bauksit (SITC)



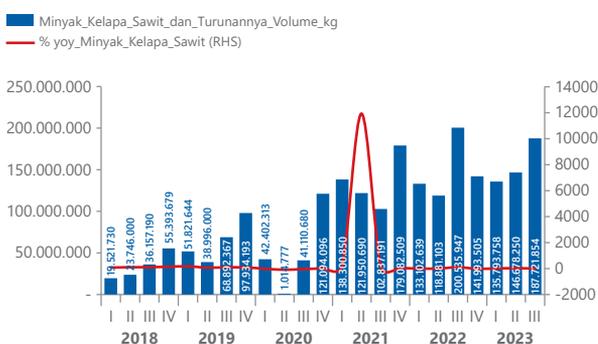
Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah

Grafik 1.46. Perkembangan Volume Ekspor Karet (SITC)



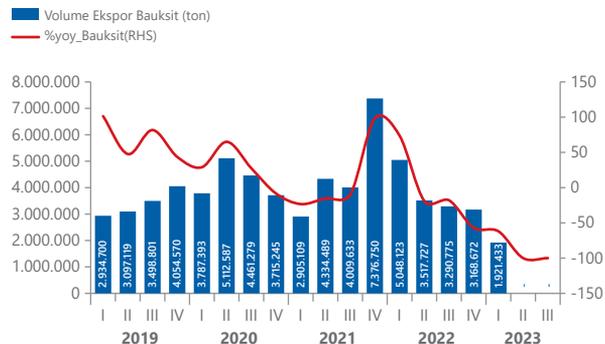
Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah

Grafik 1.47. Perkembangan Volume Ekspor Alumina (SITC)



Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah

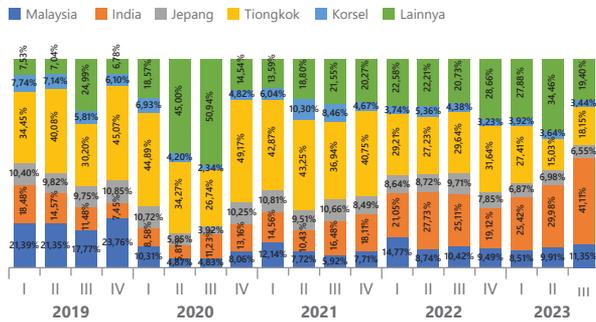
Grafik 1.48. Perkembangan Volume Ekspor Minyak Kelapa Sawit (SITC)



Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah

Grafik 1.49. Perkembangan Volume Ekspor Bauksit (SITC)





Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah

Grafik 1.50. Perkembangan Pangsa Negara Tujuan Ekspor per Triwulan

Komposisi negara tujuan ekspor utama Kalimantan Barat pada triwulan III 2023 masih relatif sama seperti triwulan sebelumnya, dengan terdapat peningkatan pada pangsa serapan ekspor oleh India. Negara Tiongkok, India, dan Malaysia merupakan pasar terbesar bagi komoditas ekspor Kalimantan Barat, dengan pangsa sebesar 70,61% dari total ekspor Kalimantan Barat, meningkat dibandingkan dengan pangsa pada triwulan sebelumnya yang tercatat 54,91%.

India dan Tiongkok menjadi negara tujuan ekspor terbesar pada triwulan III 2023 dengan serapan total sebesar 59,26% dari total ekspor Kalimantan Barat, meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat 45,01%. Secara spasial, ekspor ke India, menyumbang 41,11% dari total ekspor, diikuti Tiongkok yang menjadi pasar komoditas terbesar kedua sebesar 18,15%.

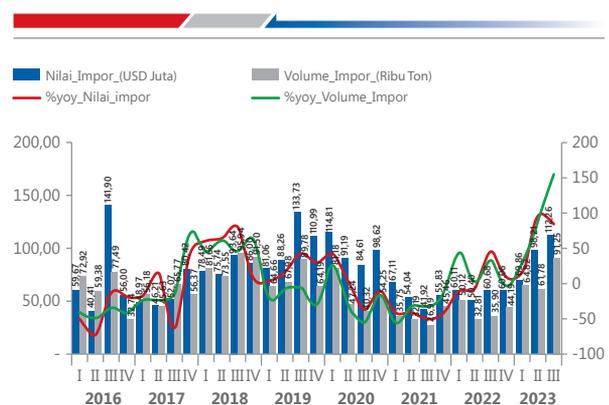
1.3.5.2. Impor

Kinerja impor Kalimantan Barat mencatat pertumbuhan sebesar 89,18% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 53,91% (yoy). Kinerja positif tersebut tercermin dari nilai impor Kalimantan Barat triwulan III 2023 yang sebesar USD112,26 juta atau tumbuh 85,02% (yoy), tetap tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 94,85% (yoy).

Secara nominal, nilai impor didominasi oleh barang modal yaitu sebesar 56,30% dari total impor, konsisten dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang didominasi oleh impor barang modal sebesar 58,69%. Hal ini sejalan dengan percepatan aktivitas impor barang modal untuk mendukung pembangunan *refinery* alumina di Kabupaten Mempawah.

Kinerja impor yang positif tercermin dari impor barang modal yang tumbuh 127,65% (yoy), tetap tumbuh tinggi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 215,46% (yoy). Peningkatan kinerja impor barang modal antara lain didorong oleh kebutuhan pengembangan fasilitas pendukung proses bisnis pihak terkait, khususnya mesin generator dan fasilitas produksi pendukung industri pengolahan *refinery* (misal: fasilitas mixing, dll). Selain itu, turut didorong oleh impor perangkat pembangkit tenaga listrik yang masih berlangsung.

Di kategori bahan baku, impor barang bahan baku tumbuh 16,51% (yoy), berbalik dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi 1,77% (yoy). Pertumbuhan nilai impor barang bahan baku ini didorong oleh peningkatan nilai impor karet alam sebagai bahan baku industri *crumb rubber*. Hal ini sejalan dengan tingginya kebutuhan industri terhadap karet alam dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun lalu. Selain itu, pertumbuhan impor barang bahan baku turut dipengaruhi oleh peningkatan impor pupuk dalam rangka mendukung lapangan usaha. Sebagai gambaran, impor bahan baku Kalbar pada triwulan III 2023 terutama disumbang oleh nilai impor pupuk dari Yordania.



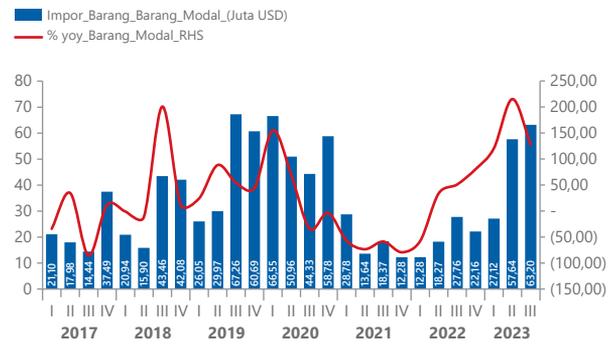
Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah

Grafik 1.51. Perkembangan Volume dan Nilai Impor



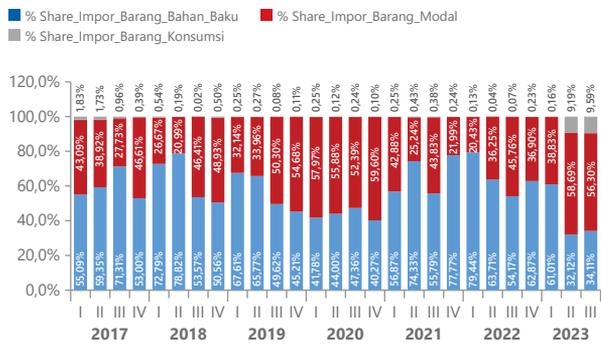
Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah

Grafik 1.52. Perkembangan Nilai Impor Barang Bahan Baku



Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah

Grafik 1.53. Perkembangan Nilai Impor Barang Modal

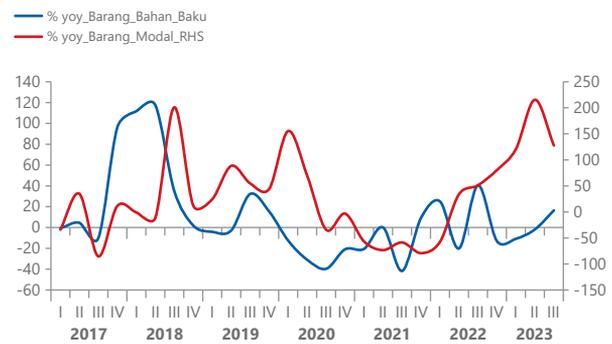


Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah

Grafik 1.54. Perkembangan Komposisi Komponen Impor

Pada kategori lainnya, impor barang konsumsi pada triwulan III 2023 tercatat sebesar USD10,76 juta mengalami kenaikan 25,080% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 43,935% (yoy). Impor barang konsumsi memiliki pangsa 9,59% dari total nilai impor Kalbar triwulan II 2023. Impor barang konsumsi pada triwulan III 2023 terutama disumbang oleh impor beras dengan nilai sebesar USD10,48 juta.

Berdasarkan negara asal, Tiongkok dan Malaysia menjadi negara asal impor terbesar dengan proporsi masing-masing sebesar 52,27% dan 19,23% pada triwulan III 2023. Proporsi impor dari Malaysia terutama disumbang oleh nilai impor listrik yang persisten tinggi, menunjukkan kebutuhan pasokan listrik dari negara tetangga. Sedangkan, proporsi impor yang tinggi daripada Tiongkok terutama disumbang oleh

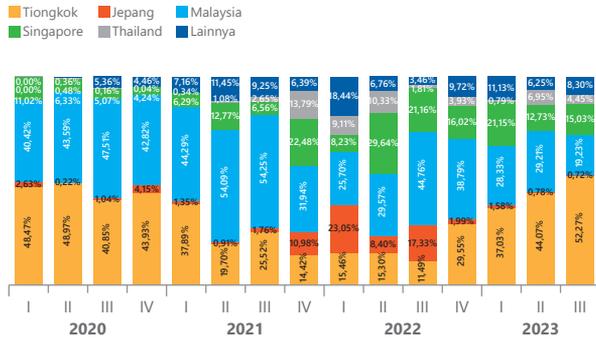


Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah

Grafik 1.55. Pergerakan Pertumbuhan Komponen Impor

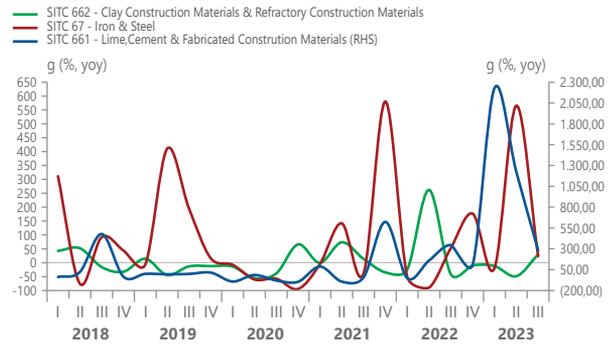
nilai impor mesin industri, seperti mesin generator dalam mendukung proses pembangunan *refinery* di Kalbar.

Kinerja impor triwulan III yang meningkat turut didorong oleh pertumbuhan seluruh tipe material konstruksi, terutama bahan material clay. Impor material *Clay Construction Materials & Refractory Construction* tumbuh 29,55% (yoy), berbalik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 48,62% (yoy). Sementara, impor material *lime, cement & fabricated* dan *iron & steel* melanjutkan pertumbuhan dari triwulan sebelumnya dengan pertumbuhan masing-masing 291,20% (yoy) dan 23,34% (yoy). Hal ini menunjukkan kebutuhan akan bahan konstruksi yang meningkat sejalan dengan perkembangan proyek konstruksi pemerintah dan swasta.



Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah

Grafik 1.56. Perkembangan Pangsa Negara Asal Impor per Triwulan

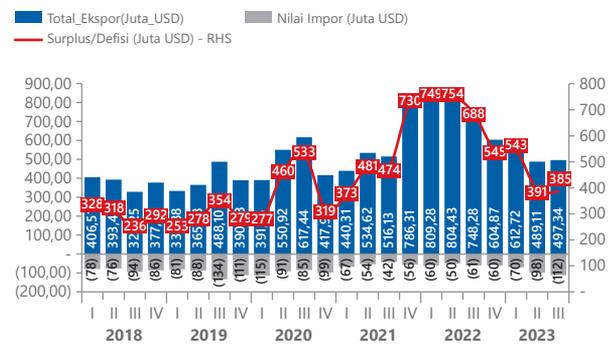


Sumber: Bea Cukai Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 1.57. Impor Material Konstruksi

1.3.5.3. Neraca Perdagangan Luar Negeri Kalimantan Barat

Berdasarkan perkembangan ekspor dan impor luar negeri sepanjang triwulan III 2023, neraca perdagangan luar negeri Kalimantan Barat masih terpantau positif meskipun melambat. Neraca perdagangan luar negeri mengalami surplus sebesar USD385 juta, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang surplus sebesar USD391 juta. Penurunan surplus neraca perdagangan disebabkan oleh peningkatan nilai impor di tengah nilai ekspor yang *underperform* khususnya komoditas bauksit, minyak kelapa sawit, dan karet pada triwulan III 2023 sejalan dengan larangan ekspor bauksit, dan perlambatan harga global CPO serta karet.



Sumber: Bea Cukai Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 1.58. Neraca Perdagangan Luar Negeri Kalimantan Barat

BOKS 1 Optimalisasi Peran Ekonomi Hijau Melalui Potensi Alam Kalimantan Barat



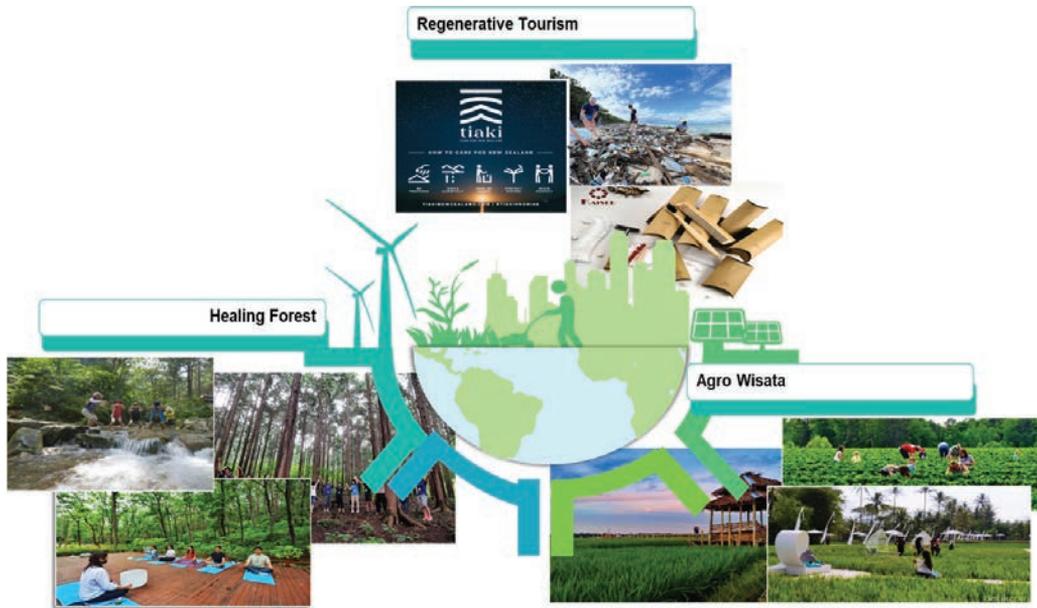
Pertumbuhan Ekonomi Hijau adalah sebuah pendekatan pembangunan ekonomi yang mempertimbangkan aspek ekonomi, kualitas lingkungan hidup, dan nilai-nilai sosial.



Percepatan pembangunan ekonomi yang begitu pesat di Kalimantan Barat tidak hanya memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, namun juga terdapat pengaruh negatif bagi keberadaan sumber daya alam utama seperti hutan dan lahan gambut, serta berkurangnya jasa lingkungan yang disediakan oleh sumber-sumber daya alam tersebut. Ketergantungan yang cukup besar terhadap eksploitasi sumber daya alam tercermin pada sektor pertanian, industri pengolahan, dan pertambangan sebagai penopang utama perekonomian dari tahun ke tahun. Di sisi lain, kinerja ekonomi daerah yang sangat bergantung dengan sumber daya alam relatif sensitif dengan *supply-demand* global terefleksi pada pergerakan harga komoditas sumber daya alam dunia. Tantangan lain adalah isu pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan/sustainability semakin berkembang berdampak pada peningkatan respon dalam lingkup internasional dan domestik, antara lain upaya boikot terhadap produk CPO Indonesia dari negara-negara Eropa dan tuntutan respon pemerintah dan institusi keuangan terhadap *sustainable finance*. Hal tersebut bukan tanpa alasan mengingat berdasarkan data dari

Organisasi Meteorologi Dunia, tahun 2023 dinyatakan menjadi tahun terpanas sepanjang sejarah pencatatan iklim.

Konferensi COP-27 di Mesir pada 6-20 November 2022, menghasilkan kesepakatan yang antara lain untuk Indonesia dan negara G20 dalam program Just Energy Transition Partnership (JETP) dengan skema pendanaan transisi energi dengan target nilai investasi 20 miliar dollar AS yang setara dengan Rp300 triliun. Pemanfaatan produk bertenaga listrik akan menjadi prioritas bagi Indonesia sejalan dengan upaya mendorong pemensiunan dini PLTU batu bara dan investasi di teknologi dan industri energi terbarukan. Hal ini tentu akan menjadi tantangan momentum yang akan dihadapi Kalimantan Barat ke depan di tengah saat ini masih dalam proses pengembangan hilirisasi produk tambang bauksit sebagai salah satu faktor input produksi baterai kendaraan listrik. Namun demikian, Kalimantan Barat masih memiliki potensi kekayaan alam lain yang belum diberdayakan secara optimal seperti hutan, sungai, dan pertanian sebagai alternatif penopang fundamental ekonomi melalui



sektor pariwisata bersinergi dengan alam (*ecotourism*). Adapun pengoptimalan potensi ekonomi hijau melalui *ecotourism* dapat diwujudkan melalui beberapa cara diantaranya:

Pemanfaatan Fungsi Hutan untuk Sarana Relaksasi

Penyediaan *healing forest* melalui pemanfaatan hutan yang telah secara alami ada dan tersebar di seluruh penjuru Kalimantan Barat untuk menjadi sarana relaksasi dengan media hutan. Pemanfaatan hutan ini dapat juga dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung aktivitas sehat seperti *jogging track*, *cycle route*, ataupun *camp site*. Hal serupa telah banyak diterapkan di Jepang dengan nama "*Shirin Yoku*" atau di belahan dunia lainnya dengan nama "*forest bathing*".

Peran Agrowisata sebagai Media Promosi Komoditas Unggulan dan Sarana Edukasi

Kawasan agrowisata dapat dioptimalkan dengan memanfaatkan potensi buah-buahan dan lahan perkebunan/pertanian yang banyak tersebar di Kalimantan Barat. Melalui agrowisata, membuka peluang untuk memperkenalkan komoditas lokal

seperti dukuh, jeruk, dan durian sehingga dapat disinergikan dengan kegiatan edukasi. Dengan memadukan promosi komoditas unggulan dan edukasi, agrowisata dapat menjadi alat yang kuat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah sambil mempromosikan praktik pertanian yang berkelanjutan dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sistem pertanian.

Memulihkan Kerusakan Alam melalui Wisata Regeneratif

Wisata regeneratif bertujuan untuk memulihkan kerusakan yang telah dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip alam, untuk menciptakan kondisi kehidupan untuk berkembang. Dengan konsep ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran lingkungan para wisatawan, hingga akhirnya turut aktif berperan dalam mengembangkan aktivitas wisata yang lebih pro terhadap lingkungan seperti membuat *tagline* pariwisata untuk tidak merusak alam, mensinergikan kegiatan wisata dengan program pembersihan alam, dan membuat kebijakan untuk penyedia akomodasi, tempat hiburan, maupun pusat perbelanjaan untuk menggunakan produk daur ulang.



Halaman ini sengaja dikosongkan





BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA



BAB 2

Keuangan Pemerintah



Kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan perlambatan. Hal ini terlihat dari realisasi pendapatan APBD Provinsi Kalimantan Barat pada triwulan III 2023 sebesar Rp4.420,01 miliar atau 73,54% dari pagu anggaran. Angka realisasi ini lebih rendah secara persentase dibandingkan dengan triwulan III 2022 yang sebesar Rp4.286,09 miliar atau 79,48% dari pagu anggaran.

Realisasi belanja APBD Provinsi Kalimantan Barat Triwulan III 2023 secara total sebesar Rp3.877,52 miliar atau 50,80% dari pagu anggaran. Dilihat dari persentasenya realisasi belanja menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan triwulan III 2022 yang sebesar Rp3.094,37 miliar atau 54,02% dari pagu anggaran.

Sementara itu, persentase realisasi belanja Kementerian/Lembaga di Kalimantan Barat hingga Triwulan III 2023 tercatat sebesar Rp7.227,90 miliar atau 62,81% dari pagu anggaran. Realisasi tersebut meningkat dibandingkan dengan realisasi belanja Triwulan III 2022 yang tercatat sebesar Rp6.393,60 miliar atau 61,55% dari pagu anggaran.



2.1. APBD PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Pagu anggaran pendapatan dan belanja pada APBD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022. Pagu anggaran pendapatan pada APBD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023 mengalami peningkatan 11,45% (yoy) menjadi Rp6.010,62 miliar. Peningkatan pagu anggaran pendapatan tersebut bersumber dari hampir seluruh komponen pendapatan kecuali komponen Retribusi Daerah yang mengalami penurunan pagu sebesar 11,22%. Sementara itu, komponen Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah mengalami peningkatan masing-masing sebesar 10,25%, 24,87% dan 42,62%. Peningkatan pagu ketiga komponen pendapatan ini mendorong kenaikan pagu Pendapatan Asli Daerah sebesar 13,33% dari Rp2.672,83 miliar pada tahun 2022 menjadi 3.029,18 miliar pada tahun 2023. Selain itu, pagu Pendapatan Transfer juga mengalami peningkatan sebesar 10,16% dari Rp2.655,22 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp2.924,95 miliar pada tahun 2023. Peningkatan pada komponen ini mencakup peningkatan pagu pada Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana alokasi Umum dan Dana alokasi Khusus masing-masing sebesar 44,49%, 7,09% dan 7,62%. Sementara itu, pagu Belanja juga mengalami peningkatan sebesar 33,25% (yoy) dari Rp5.727,87 miliar pada 2022 menjadi Rp7,632.40 miliar pada 2023. Peningkatan tersebut didorong dari

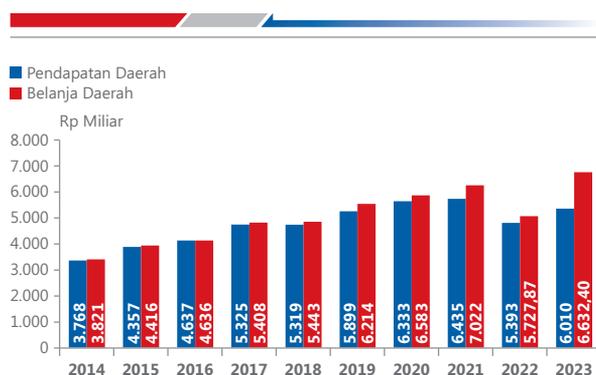
kenaikan beberapa pagu komponen belanja yaitu Belanja Modal, Bagi Hasil Pajak dan Belanja Pegawai yang masing-masing meningkat sebesar 47,59%, 11,85%, dan 4,42%.

Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan Triwulan III 2023 menunjukkan kinerja melambat. Pada sisi pendapatan, Triwulan III 2023 tercatat sebesar 73,54%, lebih rendah dari Triwulan III 2022 yang tercatat sebesar 79,48%. Dari sisi belanja juga mengalami penurunan dimana realisasi belanja Triwulan III 2023 tercatat sebesar 50,80%, turun dibandingkan Triwulan III 2022 yang tercatat sebesar 54,02%.

2.1.1. Anggaran Pendapatan Provinsi Kalimantan Barat

Pagu pendapatan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023 mengalami Peningkatan 11,45%. Peningkatan pagu anggaran pendapatan tersebut bersumber dari hampir seluruh komponen pendapatan kecuali pagu Retribusi Daerah yang mengalami penurunan 11,22% dari Rp13,45 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp11,94 miliar pada tahun 2023. Komponen pendapatan yang meningkat antara lain Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah yang mengalami peningkatan masing-masing sebesar 10,25% menjadi Rp2.583,49 miliar, 24,87% menjadi Rp120,34 miliar dan 42,62% menjadi Rp313,40 miliar. Peningkatan pagu ketiga komponen pendapatan ini mendorong kenaikan pagu Pendapatan Asli Daerah sebesar 13,33% dari Rp2.672,83 miliar pada tahun 2022 menjadi 3.029,18 miliar pada tahun 2023.

Selain itu, pagu Dana Perimbangan/Transfer juga mengalami peningkatan sebesar 10,16% dari Rp2.655,22 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp2.924,95 miliar pada tahun 2023. Peningkatan pada komponen ini mencakup peningkatan pagu pada Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana alokasi Umum dan Dana alokasi Khusus masing-masing sebesar 44,49% menjadi Rp296,58 miliar, 7,09% menjadi Rp1.683,74 dan 7,62% menjadi Rp944,63 miliar.



Sumber: BKAD Prov. Kalbar

Grafik 2.1. APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Tabel 2.1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 dan 2023

| Uraian Pos APBD | Pagu | | Realisasi s.d. Tw III | | % Realisasi Tw III | | % Perubahan | |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------|-------------|
| | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | APBD | Realisasi |
| Pendapatan Asli Daerah | 2.672,83 | 3.029,18 | 2.374,15 | 2.337,17 | 88,83 | 77,16 | 13,33 | (1,56) |
| - Pajak Daerah | 2.343,27 | 2.583,49 | 1.948,19 | 1.900,77 | 83,14 | 73,57 | 10,25 | (2,43) |
| - Retribusi Daerah | 13,45 | 11,94 | 9,65 | 10,41 | 71,75 | 87,18 | (11,22) | 7,88 |
| - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan | 96,37 | 120,34 | 101,02 | 121,01 | 104,83 | 100,56 | 24,87 | 19,79 |
| - Lain-Lain PAD Yang Sah | 219,74 | 313,40 | 315,29 | 304,79 | 143,48 | 97,25 | 42,62 | (3,33) |
| Dana Perimbangan/Transfer | 2.655,22 | 2.924,95 | 1.887,64 | 2.081,25 | 71,09 | 71,15 | 10,16 | 10,26 |
| - Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak | 205,26 | 296,58 | 93,32 | 181,98 | 45,46 | 61,36 | 44,49 | 95,01 |
| - Dana Alokasi Umum | 1.572,24 | 1.683,74 | 1.291,26 | 1.274,96 | 82,13 | 75,72 | 7,09 | (1,26) |
| - Dana Alokasi Khusus | 877,72 | 944,63 | 503,05 | 624,31 | 57,31 | 66,09 | 7,62 | 24,10 |
| Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya | 5,50 | - | 13,58 | - | 247,00 | - | (100,00) | (100,00) |
| - Dana Penyesuaian | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lain-Lain Pendapatan Yang Sah | 59,38 | 56,49 | 10,72 | 1,59 | 18,05 | 2,81 | (4,88) | (85,17) |
| - Hibah | 59,38 | 56,49 | 9,19 | 1,59 | 15,48 | 2,68 | (4,87) | (82,70) |
| - Pendapatan Lainnya | 2,28 | - | 1,53 | - | 67,11 | - | (100,00) | (100,00) |
| - Bantuan Keuangan dari Kab/Kota | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Pendapatan Daerah | 5.392,93 | 6.010,62 | 4.286,09 | 4.420,01 | 79,48 | 73,54 | 11,45 | 3,12 |

*) Data unaudited **) Dalam Rp miliar

Sumber: BKAD Prov. Kalbar

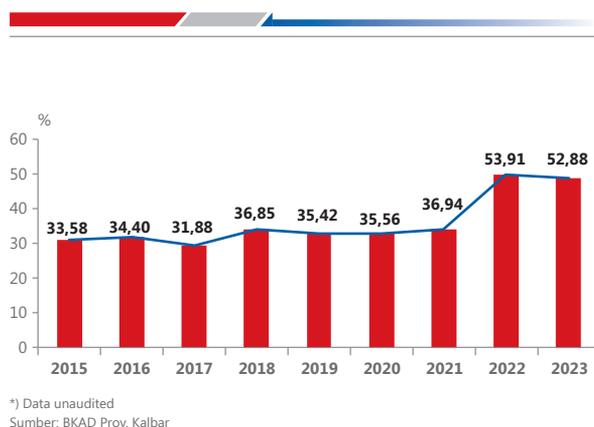
Persentase realisasi pendapatan pada APBD Provinsi Kalimantan Barat pada Triwulan III 2023 mengalami penurunan. Realisasi pendapatan tercatat sebesar Rp4.420,01 miliar atau 73,54% dari pagu anggaran. Angka persentase realisasi ini lebih rendah apabila dibandingkan dengan Triwulan III 2022 yang sebesar Rp4.286,09 miliar atau 79,48% dari pagu anggaran. Penurunan persentase realisasi pendapatan tersebut berasal dari komponen pendapatan asli daerah, transfer pemerintah pusat – lainnya, dan pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah.

Realisasi PAD Provinsi Kalimantan Barat Triwulan III 2023 tercatat sebesar Rp2.337,17 miliar atau sebesar 77,16% dari pagu anggaran. Capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan realisasi PAD di Triwulan III 2022 yang tercatat sebesar Rp2.374,17 miliar atau sebesar 88,83% dari pagu anggaran. Berdasarkan pangasanya, Pajak Daerah merupakan komponen PAD dengan porsi realisasi terbesar, mencapai 81,33% dari total realisasi PAD Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan Triwulan III 2023.

Persentase realisasi pajak daerah hingga Triwulan III 2023 sebesar 73,57%, menurun dibandingkan dengan Triwulan III 2022 yang sebesar 83,14%. Realisasi pajak daerah secara nominal juga mengalami penurunan, di mana realisasi pajak daerah hingga Triwulan III 2023 sebesar Rp1.900,77 miliar, dari sebelumnya sebesar Rp1.948,19 miliar pada Triwulan III 2022. Realisasi komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan turut mengalami penurunan di Triwulan III 2023 yaitu tercatat 100,56%, lebih rendah dari Triwulan III 2022 yang realisasinya 104,83%. Begitu juga dengan komponen lain-lain PAD yang sah mengalami penurunan baik secara nominal maupun persentase dari Rp315,29 miliar atau 143,48% pada Triwulan III 2022 menjadi Rp304,79 miliar atau 97,25% pada Triwulan III 2023. Di sisi lain, komponen retribusi daerah mengalami peningkatan baik secara nominal maupun persentase dari Rp9,65 miliar (71,75%) menjadi Rp10,41 miliar (87,18%) pada Triwulan III 2023.

Realisasi Dana Perimbangan hingga Triwulan III 2023 mengalami peningkatan baik secara nominal maupun persentase yaitu dari sebesar Rp1.887,64 miliar atau 71,09% pada Triwulan III 2022 menjadi Rp2.081,25 miliar atau 71,15% pada Triwulan III 2023. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan realisasi pada komponen Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Rp93,32 miliar atau 45,46% pada triwulan III 2022 menjadi Rp181,98 miliar atau 61,36% pada triwulan III 2023. Dana Alokasi Khusus juga mengalami peningkatan dari Rp503,05 miliar atau 57,31% pada Triwulan III 2022 menjadi Rp624,31 miliar atau 66,09% pada Triwulan III 2023. Namun demikian, komponen Dana Alokasi Umum mengalami penurunan dari Rp1.291,26 miliar atau 82,13% pada Triwulan III 2022 menjadi Rp1.274,96 miliar atau 75,72% pada Triwulan III 2023.

Rasio Kemandirian Fiskal Provinsi Kalimantan Barat Triwulan III 2023 tercatat sebesar 52,88%, mengalami penurunan dibandingkan dengan periode Triwulan III 2022 yang sebesar 53,91%. Realisasi PAD secara nominal pada triwulan III 2023 sebesar Rp2.337,17 miliar, lebih rendah dari triwulan III 2022 yang sebesar Rp2.374,15 miliar. Salah satu faktor yang menyebabkan penurunan Rasio Kemandirian Fiskal adalah adanya penurunan realisasi dana perimbangan secara tahunan pada triwulan III 2023 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun secara historis, tren rasio kemandirian fiskal



Grafik 2.2. Rasio Kemandirian Fiskal Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2016-2023

Kalimantan Barat terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Hal tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam hal ketergantungan Kalimantan Barat terhadap anggaran dari pemerintah pusat dalam membiayai kegiatan pemerintah daerah.

2.1.2. Anggaran Belanja Provinsi Kalimantan Barat

Pagu anggaran belanja pada APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023 sebesar Rp7.632,40 miliar atau tumbuh sebesar 33,25% dari anggaran belanja tahun 2022 yang sebesar Rp5.727,87 miliar. Peningkatan terjadi pada sebagian komponen anggaran belanja yaitu belanja modal, bagi hasil pajak dan belanja pegawai.

Pagu anggaran belanja modal mengalami kenaikan yang paling tinggi dibandingkan komponen belanja lain. Pagu belanja modal meningkat 47,59% dari semula Rp963,22 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp1.421,67 pada tahun 2023. Selanjutnya komponen belanja lain yang mengalami peningkatan pagu anggaran adalah bagi hasil pajak dan belanja pegawai yang masing-masing meningkat sebesar 11,85% dan 4,42%.

Sementara itu, sebagian besar pagu anggaran mengalami kontraksi. Komponen belanja barang mengalami penurunan tertinggi secara nominal yakni dari Rp1.696,30 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp1.680,72 miliar pada tahun 2023. Komponen lain yang mengalami penurunan pagu anggaran adalah belanja tidak terduga, bantuan sosial, hibah, dan bantuan keuangan yang masing-masing menurun sebesar 28,09%, 91,35%, 1,63%, dan 1,27%.

Realisasi belanja APBD Provinsi Kalimantan Barat Triwulan III 2023 secara total sebesar Rp3.877,52 miliar atau 50,80% dari pagu anggaran meningkat dibandingkan dari Triwulan III 2022 yang tercatat sebesar 54,02%. Komponen Bantuan Sosial merupakan komponen dari belanja daerah yang realisasinya menurun sebesar 76,83% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 dan 2023

| Uraian Pos APBD | Pagu | | Realisasi s.d. Tw III | | % Realisasi Tw III | | % Perubahan | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | APBD | Realisasi |
| Belanja | 4.575,84 | 6.352,00 | 2.331,57 | 2.985,85 | 50,95 | 47,01 | 38,82 | 28,06 |
| - Belanja Pegawai | 1.634,37 | 1.706,62 | 1.057,40 | 1.078,89 | 64,70 | 63,22 | 4,42 | 2,03 |
| - Belanja Barang | 1.696,30 | 1.680,72 | 802,63 | 1.003,20 | 47,32 | 59,69 | (0,92) | 24,99 |
| - Hibah | 244,35 | 240,37 | 167,91 | 214,73 | 68,72 | 89,33 | (1,63) | 27,88 |
| - Bantuan Sosial | 7,59 | 0,66 | 2,46 | 0,57 | 32,40 | 86,76 | (91,35) | (76,83) |
| - Belanja Modal | 963,22 | 1.421,67 | 301,09 | 687,90 | 31,26 | 48,39 | 47,59 | 128,47 |
| - Belanja Tidak Terduga | 30,00 | 21,57 | 0,08 | 0,560 | 0,27 | 2,60 | (28,09) | 600,00 |
| Transfer | 1.152,03 | 1.280,40 | 762,80 | 891,67 | 66,21 | 77,40 | 11,14 | 16,89 |
| - Bagi Hasil Pajak | 1.089,64 | 1.218,79 | 749,44 | 871,81 | 68,78 | 80,01 | 11,85 | 16,33 |
| - Bantuan Keuangan | 62,40 | 61,61 | 13,36 | 19,87 | 21,41 | 32,25 | (1,27) | 48,73 |
| Total Belanja Daerah | 5.727,87 | 7.632,40 | 3.094,37 | 3.877,52 | 54,02 | 50,80 | 33,25 | 25,31 |

*) Data unaudited **) Dalam Rp miliar

Sumber: BKAD Prov. Kalbar

Realisasi belanja barang meningkat dari 47,32% di Triwulan III 2022 menjadi 59,69% di Triwulan III 2023. Begitu juga Hibah yang juga mengalami kenaikan dari 68,72% menjadi 89,33%, bantuan sosial yang meningkat dari 32,40% menjadi 86,76% di Triwulan III 2023. Sementara itu, Belanja pegawai mengalami penurunan dari 64,70% menjadi 63,22% di Triwulan III 2023.

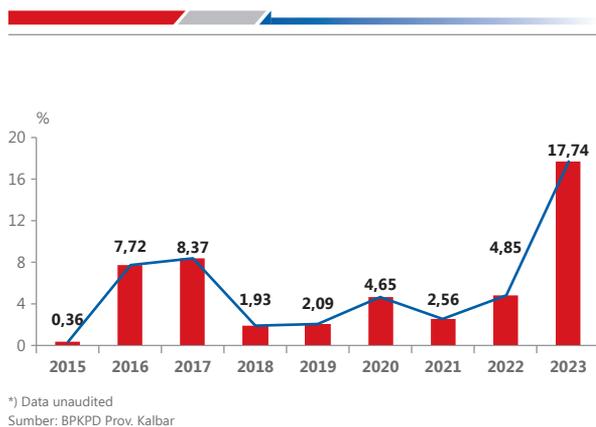
Rasio realisasi Belanja Modal terhadap total realisasi belanja hingga Triwulan III 2023 tercatat meningkat dari 4,85% pada Triwulan III 2022 menjadi 17,74% pada Triwulan III 2023. Realisasi belanja modal juga mengalami peningkatan baik secara nominal maupun persentase dari Rp301,09 miliar atau 31,26% pada

Triwulan III 2022 menjadi Rp687,90 miliar atau 48,39% pada Triwulan III 2023. Hal ini mengindikasikan adanya upaya dari pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur yang lebih baik di Kalimantan Barat. Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dapat menjadi faktor pendorong masuknya investasi serta memperlancar arus distribusi barang dan jasa yang diharapkan dapat memberikan *multiplier effect* terhadap perekonomian daerah.

2.2. APBD KABUPATEN/KOTA DI KALIMANTAN BARAT

2.2.1. Anggaran Pendapatan Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Barat

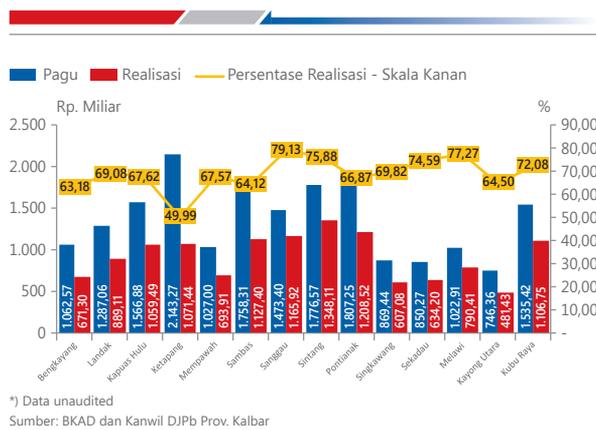
Total realisasi pendapatan di 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat hingga Triwulan III 2023 mencapai Rp12.855,07 miliar atau 67,92% dari total anggaran pendapatan kabupaten/kota tahun 2023. Kabupaten/kota dengan realisasi pendapatan terbesar secara nominal adalah Kabupaten Sintang dengan realisasi pendapatan sebesar Rp1.348,11 miliar atau 75,88% dari pagu anggaran. Selanjutnya, Kota/Kabupaten berikutnya dengan nominal realisasi tertinggi adalah Kota Pontianak dan Kabupaten Sanggau dengan realisasi masing-masing sebesar Rp1.208,52 miliar (66,87%) dan Rp1.165,92 miliar (79,13%).



*) Data unaudited

Sumber: BPKPD Prov. Kalbar

Grafik 2.3. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Provinsi Kalimantan Barat Periode 2016-2023

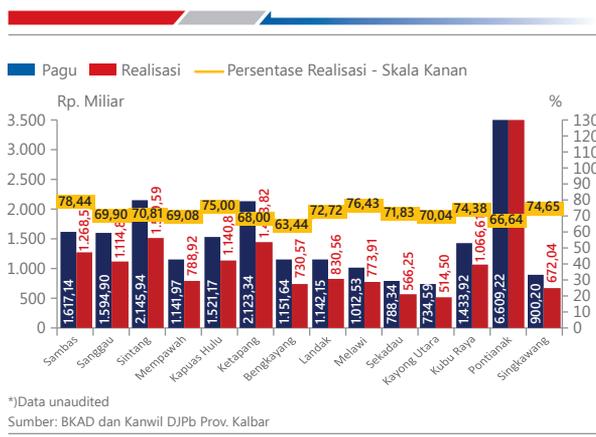


Grafik 2.4. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kabupaten/ Kota di Kalimantan Barat Tahun 2023

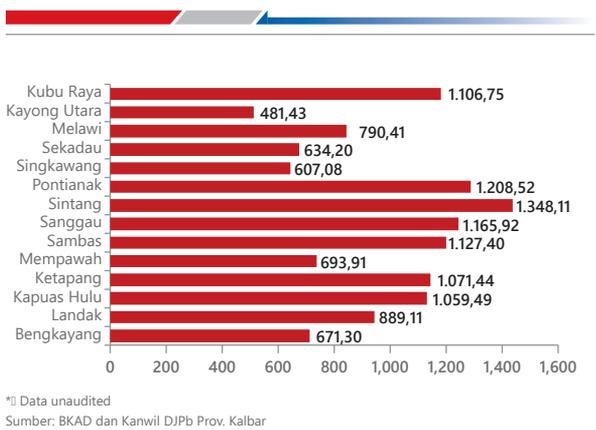
Sementara itu, Realisasi pendapatan terendah baik secara nominal maupun persentase adalah Kabupaten Kayong Utara sebesar Rp481,43 miliar atau 64,50% dari pagu anggaran.

2.2.2. Anggaran Belanja Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat

Total realisasi belanja di 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat hingga Triwulan III 2023 mencapai Rp16.835,63 miliar atau 70,39% dari total anggaran belanja tahun 2023. Kabupaten/kota dengan realisasi belanja terbesar secara nominal adalah Kota Pontianak dengan realisasi sebesar Rp4.404,66 miliar atau 66,64% dari pagu anggaran. Selanjutnya, Kota/Kabupaten berikutnya dengan nominal realisasi tertinggi adalah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Ketapang dengan



Grafik 2.6. Anggaran dan Realisasi Belanja Per Kabupaten/ Kota di Kalimantan Barat Periode 2023

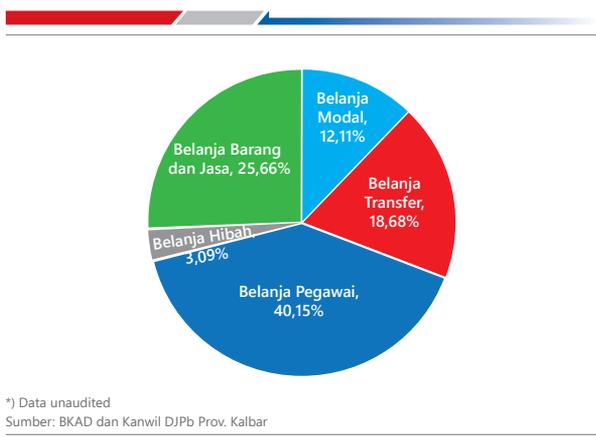


Grafik 2.5. Rasio Kemandirian Fiskal Daerah Kab/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2023

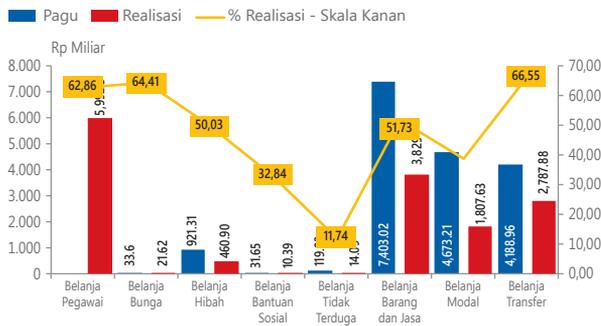
realisasi masing-masing sebesar Rp1.519,59 miliar (70,81%) dan Rp1.443,82 miliar (68,00%).

Di sisi lain, Kabupaten Kayong merupakan daerah dengan nominal realisasi belanja terkecil yaitu sebesar Rp514,5 miliar atau 70,04% dari pagu anggaran.

Realisasi belanja kabupaten/kota di Kalimantan Barat hingga Triwulan III 2023 didominasi oleh belanja pegawai. Realisasi belanja pegawai kabupaten/kota sebesar Rp5.992,39 miliar (62,86% dari pagu belanja pegawai) atau mencapai 40,15% dari total realisasi belanja. Realisasi belanja barang dan jasa kabupaten/kota sebesar Rp3.829,40 miliar (51,73% dari pagu belanja barang) atau mencapai 25,66% dari total realisasi belanja. Selanjutnya, realisasi belanja transfer kabupaten/kota sebesar Rp2.787,88 miliar (66,55% dari pagu belanja modal) atau 18,68% dari



Grafik 2.7. Proporsi Belanja Kab/Kota di Kalimantan Barat Periode 2023



*) Data unaudited
Sumber: BKAD dan Kanwil DJPb Prov. Kalbar

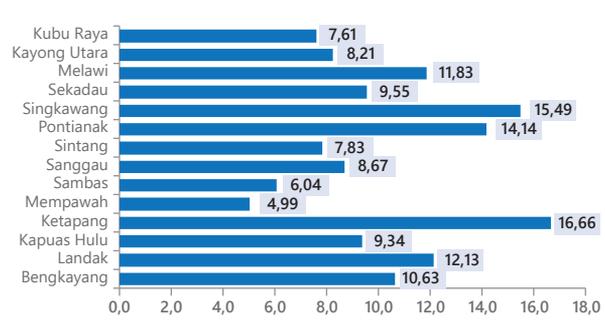
Grafik 2.8. Rincian Belanja Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat per Jenis Belanja s.d Triwulan III 2023

total realisasi belanja. Sementara itu, realisasi belanja modal kabupaten/kota mencapai Rp1.807,63 miliar (38,68% dari pagu belanja transfer) atau 12,11% dari total realisasi belanja.

Rasio realisasi belanja modal terhadap total realisasi belanja kabupaten/kota di Kalimantan Barat pada Triwulan III 2023 tercatat sebesar 10,25%. Kabupaten Ketapang merupakan daerah yang memiliki rasio realisasi belanja modal tertinggi terhadap total realisasi belanja yaitu sebesar 16,66% (Rp171,14 miliar). Sedangkan daerah dengan rasio realisasi modal terendah terhadap total realisasi belanja adalah Kabupaten Mempawah sebesar 4,99% (Rp27,83 miliar).

2.3. ALOKASI APBN DI KALIMANTAN BARAT

Selain menyalurkan Dana Transfer dalam rangka melakukan realisasi APBN di daerah, Pemerintah Pusat juga melakukan belanja langsung di daerah melalui kantor perwakilan yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga. Kantor perwakilan Kementerian/Lembaga di Kalimantan Barat pada tahun 2023 memperoleh pagu anggaran sebesar Rp11.507,91 miliar. Jumlah tersebut meningkat 10,79% (yoy) dibandingkan dengan pagu anggaran tahun 2022 yang sebesar Rp10,387,43 miliar. Peningkatan nilai tersebut diakibatkan kenaikan pagu anggaran pada belanja barang. Pagu pos belanja barang meningkat 40,23% dibandingkan tahun 2022 menjadi Rp5.228,01 miliar. Pagu belanja bantuan sosial



*) Data unaudited
Sumber: BKAD dan Kanwil DJPb Prov. Kalbar

Grafik 2.9. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Per Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat s.d. Triwulan III 2023

juga mengalami peningkatan 30,13% menjadi Rp10,63 miliar pada tahun 2023. Sementara itu, pagu belanja modal dan belanja pegawai mengalami penurunan masing-masing sebesar 8,31% (Rp2.398,60 miliar) dan 4,56% (Rp3.810,67 miliar) pada tahun 2023.

Berdasarkan fungsi, pagu anggaran Kementerian/Lembaga di Kalimantan Barat pada tahun 2023 mengalami penurunan pada fungsi Agama, Kesehatan, Ketertiban dan Keamanan, Lingkungan Hidup, Pariwisata dan Budaya serta Pertahanan. Fungsi yang mengalami penurunan pagu anggaran terbesar adalah fungsi Agama yang mengalami penurunan sebesar 18,01% dibandingkan tahun 2022. Selanjutnya diikuti oleh fungsi Kesehatan dan Pertahanan yang masing-masing menurun sebesar 16,05% dan 10,32%. Fungsi lainnya yang juga mengalami penurunan adalah fungsi Ketertiban dan Keamanan, Pariwisata dan Budaya serta Lingkungan Hidup dengan penurunan masing-masing 3,10%, 0,36% dan 0,20%. Sementara itu beberapa fungsi yang mengalami peningkatan pagu adalah fungsi Pelayanan Umum, Perumahan dan Fasilitas umum, Ekonomi dan Pendidikan. Masing-masing dari fungsi tersebut mengalami peningkatan 125,81%, 106,49%, 13,37%, dan 7,78%.

Persentase realisasi belanja Kementerian/Lembaga di Kalimantan Barat hingga Triwulan III 2023 tercatat sebesar 62,81% dari pagu anggaran atau senilai Rp7.227,90 miliar. Realisasi tersebut meningkat secara nominal maupun persentase dibandingkan

Tabel 2.3. Anggaran dan Realisasi Alokasi Belanja APBN di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 dan 2023

| Uraian Pos Anggaran | Pagu | | Realisasi s.d. Tw III | | % Realisasi | | % Perubahan | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | APBN | Realisasi |
| Berdasarkan Jenis Belanja | | | | | | | | |
| Belanja Modal | 2.616,07 | 2.398,60 | 1.056,08 | 1.197,77 | 40,37 | 49,94 | (8,31) | 13,42 |
| Belanja Barang | 3.771,02 | 5.288,01 | 2.431,42 | 3.173,09 | 64,48 | 60,01 | 40,23 | 30,50 |
| Belanja Pegawai | 3.992,17 | 3.810,67 | 2.898,20 | 2.849,48 | 72,60 | 74,78 | (4,55) | (1,68) |
| Belanja Bantuan Sosial | 8,17 | 10,63 | 7,90 | 7,56 | 96,71 | 71,12 | 30,13 | (4,30) |
| Berdasarkan Fungsi | | | | | | | | |
| Agama | 207,96 | 170,51 | 132,81 | 140,72 | 63,86 | 82,53 | (18,01) | 5,96 |
| Ekonomi | 3.234,43 | 3.667,03 | 1.567,16 | 1.838,61 | 48,45 | 50,14 | 13,37 | 17,32 |
| Kesehatan | 185,10 | 155,39 | 89,52 | 101,31 | 48,36 | 65,20 | (16,05) | 13,17 |
| Ketertiban dan Keamanan | 2.042,08 | 1.978,83 | 1.426,82 | 1.464,03 | 69,87 | 73,98 | (3,10) | 2,61 |
| Lingkungan Hidup | 331,89 | 331,23 | 169,00 | 184,01 | 50,92 | 55,55 | (0,20) | 8,88 |
| Pariwisata dan Budaya | 1,40 | 1,39 | 0,03 | 0,36 | - | - | (0,36) | |
| Pelayanan Umum | 462,18 | 1.043,64 | 320,00 | 679,06 | 69,24 | 65,07 | 125,81 | 112,21 |
| Pendidikan | 1.807,64 | 1.948,20 | 1.128,99 | 1.211,77 | 62,46 | 62,20 | 7,78 | 7,33 |
| Perlindungan Sosial | | | | | | | | |
| Pertahanan | 1.697,21 | 1522,02 | 1.219,37 | 1.140,47 | 71,85 | 74,93 | (10,32) | (6,47) |
| Perumahan dan Fasilitas Umum | 334,00 | 689,67 | 339,90 | 467,58 | 101,77 | 67,80 | 106,49 | 37,56 |
| Total Belanja | 10.387,43 | 11.507,91 | 6.393,60 | 7.227,90 | 61,55 | 62,81 | 10,79 | 13,05 |
| Transfer Ke Daerah | | | | | | | | |
| Total Dana Transfer Ke Daerah | 7.144,65 | 18.056,19 | 664,70 | 8.701,95 | 9,30 | 48,19 | 152,72 | 1.209,16 |
| Total Belanja dan Transfer | 17.532,08 | 29.564,10 | 7.058,30 | 15.929,85 | 40,26 | 53,88 | 68,63 | 125,69 |

*) Data unaudited **) Dalam Rp miliar

Sumber: Kanwil DJPb Prov. Kalbar;

dengan realisasi belanja Triwulan III 2022 yang tercatat sebesar Rp6.393,60 miliar atau 61,55% dari pagu anggaran. Peningkatan realisasi terbesar terjadi pada fungsi pelayanan umum yang meningkat 112,21%. Peningkatan realisasi yang tinggi juga terjadi pada fungsi perumahan dan fasilitas umum yang meningkat 37,56%, fungsi Ekonomi meningkat 17,32%, dan fungsi Kesehatan meningkat 13,17%.

Pada triwulan III 2023 terdapat 2 pos anggaran belanja yang mengalami peningkatan realisasi, dimana peningkatan tertinggi terjadi pada realisasi Belanja

Barang dari Rp2.431,42 miliar di Triwulan III 2022 menjadi Rp3.173,09 miliar di Triwulan III 2023 atau meningkat 30,50% dan Belanja Modal meningkat dari Rp1.056,08 miliar di Triwulan III 2022 menjadi Rp1.197,77 miliar di Triwulan III 2023 atau meningkat sebesar 13,42%, sedangkan Belanja Pegawai dan Belanja Bantuan Sosial mengalami penurunan masing-masing sebesar 1,68% dan 4,30%.



Halaman ini sengaja dikosongkan



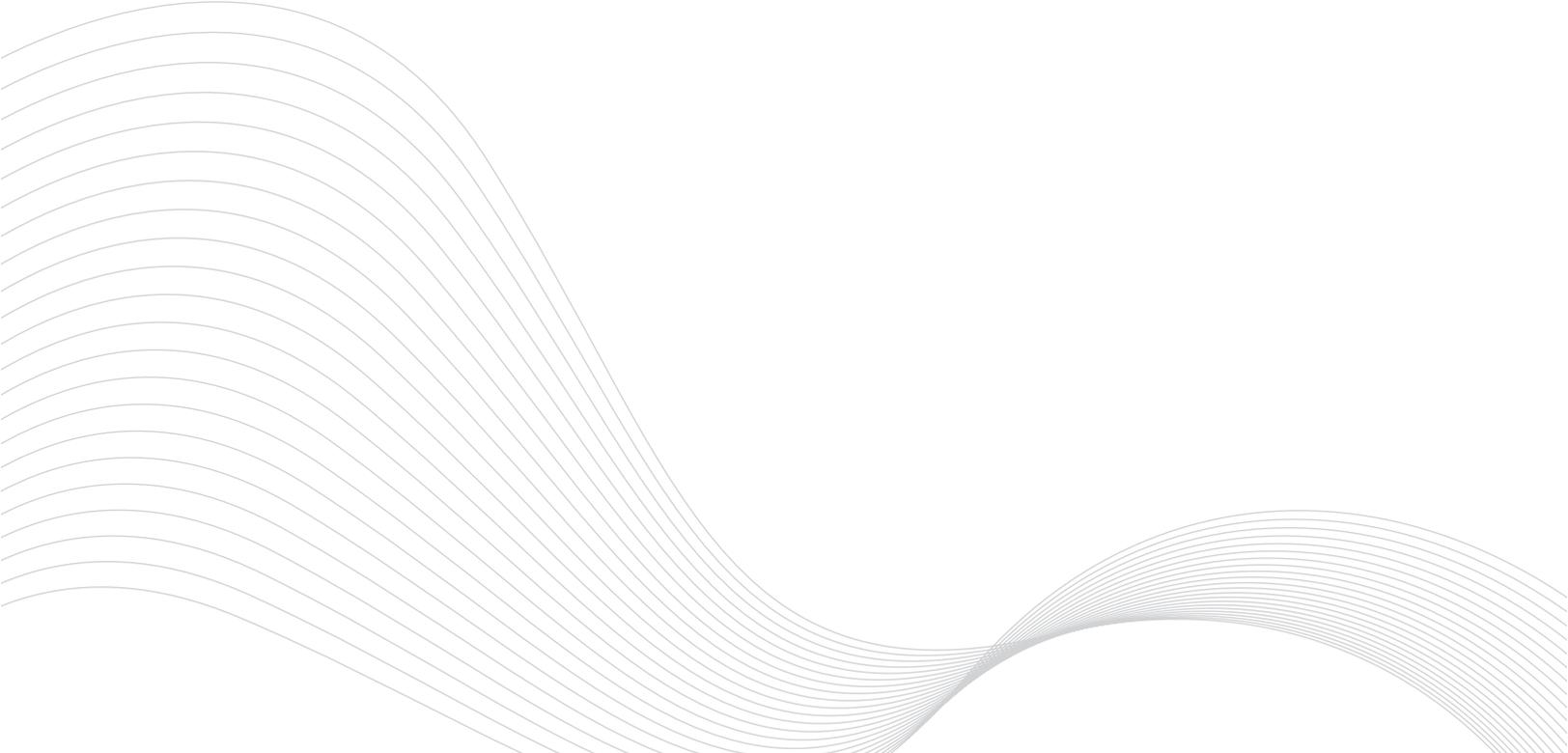


BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA



BAB 3

Perkembangan Inflasi Daerah

- 
- *Inflasi Kalimantan Barat pada triwulan III 2023 kembali melanjutkan tren penurunan dari periode-periode sebelumnya dan tetap stabil pada kisaran $3\pm 1\%$. Capaian ini didukung oleh beberapa poin antara lain:*
 - *Koordinasi dan komunikasi yang solid antar instansi dalam forum TPID dan penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP)*
 - *Turunnya harga komoditas bahan pangan dan tarif angkutan udara yang memiliki andil cukup besar*
 - *Inflasi Kalimantan Barat pada triwulan IV tahun 2023 menghadapi berbagai tantangan antara lain dampak dari pencabutan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), Faktor cuaca ekstrim La Nina, efek lanjutan dari kenaikan bahan bakar minyak, dan meningkatnya konsumsi pada Natal dan Tahun Baru.*

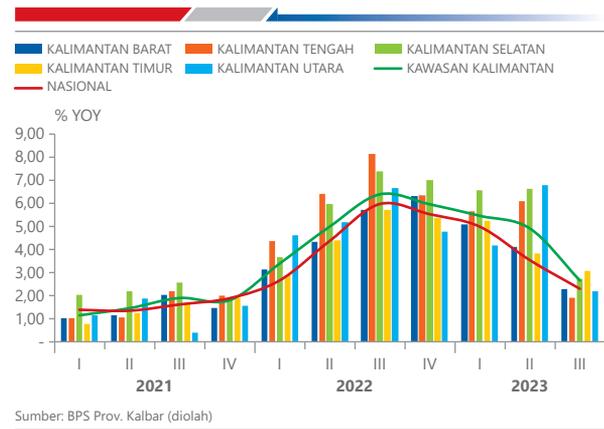


3.1. GAMBARAN UMUM

Perkembangan inflasi Kalimantan Barat di triwulan III 2023 tercatat sebesar 2,26% (yoy), sedikit lebih rendah dari inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,28% (yoy) dan inflasi regional Kalimantan yang sebesar 2,64% (yoy). Inflasi Triwulan III 2023 ini menurun dibandingkan dengan Triwulan II 2023 yang tercatat sebesar 4,10% (yoy).

Meredanya tekanan inflasi tahunan Kalimantan Barat pada triwulan III 2023 dapat terlihat hampir di beberapa kelompok, terutama 3 kelompok dengan andil terbesar adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau, transportasi, serta perawatan pribadi dan jasa lainnya. Menurunnya tekanan inflasi pada triwulan III 2023 dipengaruhi oleh normalisasi tekanan inflasi dari beberapa kelompok seperti turunnya harga komoditas bahan pangan seiring stabilnya persediaan, turunnya tarif angkutan udara memasuki periode *low season* dan normalisasi kenaikan Harga bahan bakar minyak (BBM) yaitu bensin dari tahun lalu. Berdasarkan hal tersebut, capaian inflasi triwulan ini berada padatarget inflasi nasional yaitu 3±1% walaupun ada beberapa faktor yang perlu menjadi perhatian utama yaitu faktor mobilitas masyarakat sudah kembali normal setelah pencabutan PPKM, permintaan yang meningkat untuk kebutuhan bahan pangan, dan faktor geopolitik yang secara tidak langsung mempengaruhi harga dan pasokan dari luar.

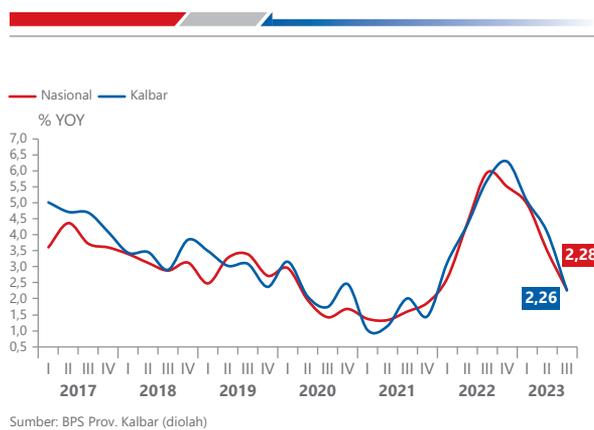
Secara spasial, pergerakan inflasi Kalimantan Barat sepanjang Triwulan III 2023 terpantau sejalan



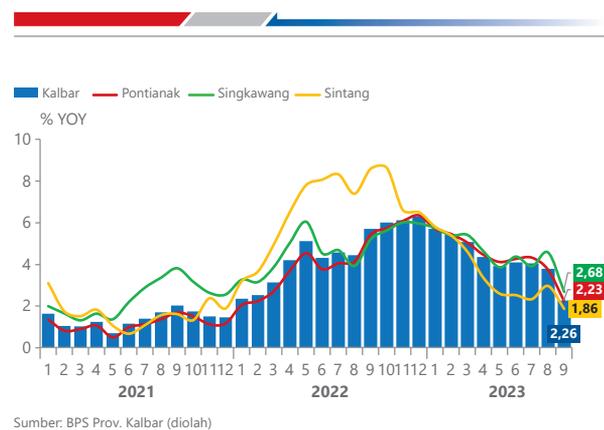
Grafik 3.2. Laju Inflasi Antar Provinsi di Kalimantan dan Nasional Triwulan III 2023

dari historis kota-kota sampel inflasi. Inflasi kota Pontianak, Kota Singkawang, dan Kota Sintang pada Triwulan III 2023 tercatat turun masing-masing sebesar 2,23% (yoy), 2,68% (yoy), dan 1,86% (yoy) dibandingkan dengan Triwulan sebelumnya yang masing-masing tercatat sebesar 4,26% (yoy), 4,37% (yoy), dan 2,52% (yoy).

Memasuki Triwulan IV 2023, tekanan harga di Kalimantan Barat masih terpantau stabil. Inflasi tahunan pada Oktober 2023 tercatat sebesar 2,31% (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi Triwulan III 2023 yang tercatat sebesar 2,26% (yoy). kenaikan ini disebabkan oleh adanya tekanan tarif angkutan udara dan harga bensin. Sedangkan dari kelompok makanan dan minuman terdapat kenaikan harga komoditas pangan utama akibat keterbatasan stok akibat menurunnya produksinya seiring dengan



Grafik 3.1. Laju Inflasi Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional



Grafik 3.3. Perkembangan Inflasi Kota Sampel Kalimantan Barat

berkurangnya luas panen dan memasuki masa tanam. Namun demikian, upaya TPID dalam melakukan pengendalian inflasi daerah jangka pendek yang efektif akan menjaga tingkat inflasi dalam arah yang stabil.

3.2. INFLASI BULANAN (MTM)

IHK Kalimantan Barat pada Juli 2023 mengalami inflasi sebesar 0,07% (mtm). Realisasi tersebut lebih rendah dibanding bulan sebelumnya yang sebesar 0,27% (mtm) dan searah dengan pergerakan inflasi nasional yang sebesar 0,21% (mtm). Secara historis, realisasi inflasi Kalimantan Barat tersebut lebih tinggi dibandingkan rerata historis perkembangan harga barang dan jasa pada bulan Juli selama tiga tahun terakhir yang tercatat deflasi sebesar -0,13% (mtm). Tekanan inflasi pada bulan ini terutama didorong oleh peningkatan harga pada kelompok transportasi dan kelompok rekreasi, olah raga dan budaya. Sementara Kelompok Makanan, Minuman, Dan Tembakau mengalami deflasi. Kelompok Transportasi mengalami peningkatan inflasi sebesar 1,34% (mtm) dan menyumbang andil tertinggi yaitu sebesar 0,174%. Peningkatan tekanan harga kelompok transportasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berdasarkan komoditas, penyumbang inflasi terbesar yaitu angkutan udara. Peningkatan tarif angkutan udara terutama terjadi pada maskapai penerbangan bertarif rendah (*low-cost carrier*), terutama Citilink. Selain itu, berdasarkan liaison dengan PT. Garuda Indonesia pada Juli 2023 disampaikan bahwa kenaikan tarif angkutan udara juga didorong oleh kenaikan airport tax seiring dengan peningkatan biaya operasional di bandara. Dari sisi demand, periode libur sekolah di 2 (dua) minggu pertama bulan Juli 2023 mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi angkutan udara, sehingga kemudian memicu terjadinya mekanisme kenaikan harga.

Di tengah tekanan inflasi kelompok transportasi dan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya, inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau menyumbang deflasi. Kelompok makanan, minuman

dan tembakau mengalami deflasi sebesar 0,55% (mtm) dengan andil deflasi 0,185%. Realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat inflasi sebesar 1,32% (mtm). Berdasarkan komoditas, deflasi kelompok ini didorong oleh penurunan harga sawi hijau, ketimun, daging babi, dan kacang panjang. Penurunan harga sawi hijau, ketimun, dan kacang panjang terutama dipengaruhi oleh pasokan yang memadai seiring dengan dampak El Nino yang relatif moderat disertai dengan hujan yang masih terjadi beberapa kali. Sedangkan penurunan harga daging babi disebabkan karena menurunnya permintaan seiring dengan kekhawatiran masyarakat terhadap kasus babi yang sakit. Hal ini terutama terjadi di Kota Singkawang dan sekitarnya.

Sementara itu, IHK Bulan Agustus 2023 tercatat deflasi sebesar 0,31% (mtm). Secara historis, realisasi inflasi Kalimantan Barat tersebut lebih rendah dibandingkan rerata historis perkembangan harga barang dan jasa pada bulan Agustus selama tiga tahun terakhir yang tercatat deflasi sebesar -0,07% (mtm). Kelompok makanan, minuman dan tembakau mengalami deflasi sebesar 0,58% (mtm) dengan andil deflasi 0,20%. Berdasarkan komoditas, deflasi kelompok ini didorong oleh penurunan harga daging ayam ras, bawang merah, tomat, udang basah, dan cabai rawit. Penurunan harga daging ayam ras terutama dipengaruhi oleh peningkatan pasokan dan penurunan harga dari supplier seiring adanya pelonggaran kebijakan afkir dini di level nasional. Sementara penurunan harga bawang merah dan cabai rawit didorong oleh panen raya di berbagai daerah sentra sehingga pasokan meningkat. Frekuensi hujan yang berkurang di periode El Nino yang relatif moderat di Kalimantan Barat juga mendorong produksi cabai rawit dan tomat. Adapun penurunan harga udang basah disebabkan karena hasil tangkapan nelayan yang meningkat.

Dari sisi pendorong inflasi, Inflasi kelompok pakaian dan alas kaki pada bulan laporan tercatat sebesar 0,31% (mtm) dengan andil sebesar 0,01%. Berdasarkan komoditas, peningkatan inflasi kelompok ini terutama didorong oleh peningkatan harga baju kaos dan pakaian bayi yang masing-masing mengalami inflasi

sebesar 7,50% (mtm) dan 6,93% (mtm). Peningkatan harga tersebut disebabkan oleh kenaikan permintaan seiring dengan mobilitas masyarakat yang kian meningkat pasca pencabutan status pandemi secara resmi sejak Juni 2023.

Pada Bulan September 2023 IHK di Kalimantan Barat tercatat mengalami inflasi sebesar 0,08% (mtm) atau secara tahunan tercatat inflasi sebesar 2,26% (yoy). Inflasi tersebut utamanya didorong oleh kelompok transportasi dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran dengan andil masing-masing sebesar 0,035% dan 0,021%. Berdasarkan komoditasnya, andil inflasi terbesar bulan September 2023 adalah beras, kacang panjang, ketimun, buncis, biaya pulsa ponsel, dan bensin. Namun demikian, inflasi pada komoditas tersebut tertahan oleh penurunan harga daging ayam ras, cumi-cumi, ikan tongkol, bawang merah, dan udang basah. Secara historis, realisasi inflasi bulanan pada September 2023 tersebut lebih rendah dibandingkan dengan rerata inflasi September tiga tahun terakhir yang sebesar 0,64% (mtm).

Secara bulanan, inflasi Kalimantan Barat masih berada pada tren yang stabil. realisasi inflasi Kalimantan Barat masih lebih rendah dibandingkan rerata historis perkembangan harga barang dan jasa pada bulan September selama tiga tahun terakhir yang tercatat inflasi sebesar 0,64% (mtm). Realisasi inflasi pada bulan ini terutama didorong oleh inflasi kelompok transportasi dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran dengan andil masing-masing sebesar 0,035% dan 0,021%. Capaian inflasi tersebut tertahan oleh beberapa kelompok yang mengalami deflasi, antara lain kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi bulanan sebesar -0,021%. Dengan perkembangan tersebut, realisasi inflasi Kalimantan Barat secara tahunan tercatat sebesar 2,26% (yoy), lebih rendah dari inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 3,79% (yoy) dan tetap pada rentang sasaran inflasi 3+1%. Jika dibandingkan dengan provinsi lain se-Kalimantan, Kalimantan Barat mengalami inflasi bulanan terendah. Sedangkan, secara tahunan berada pada peringkat ketiga tertinggi

setelah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur yang saat ini masuk pada top 10 inflasi tahunan tertinggi se-nasional.

Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi September di Kalimantan Barat terutama didorong oleh peningkatan tekanan harga pada kelompok transportasi. Kelompok Transportasi mengalami inflasi sebesar 0,27% (mtm) dan menyumbang andil inflasi sebesar 0,035%. Realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang inflasi sebesar 1,28% (mtm) dan lebih rendah dibandingkan rata-rata inflasi untuk kelompok komoditas transportasi pada bulan September dalam 3 tahun terakhir yang sebesar 3,22% (mtm). Berdasarkan komoditas, inflasi kelompok ini didorong oleh peningkatan harga bensin dan solar. Peningkatan harga bensin akibat penyesuaian harga BBM non subsidi jenis Pertamina dan Pertamina Turbo pada 1 September 2023. Sejalan dengan itu, peningkatan harga solar dipengaruhi oleh penyesuaian harga BBM jenis Dexlite dan Pertamina Dex.

Peningkatan tekanan harga yang lebih tinggi pada kelompok transportasi tertahan oleh deflasi angkutan udara di Pontianak. Penurunan tarif angkutan udara terutama terjadi pada maskapai penerbangan bertarif rendah (*low-cost carrier*) yaitu Citilink, Sriwijaya Air, dan Lion Air. Di sisi supply, realisasi penurunan tarif angkutan udara juga dipengaruhi oleh upaya TPID Kalimantan Barat yang telah secara intensif berkoordinasi dengan pihak terkait untuk meredam kenaikan harga tiket angkutan udara. Di sisi demand, bulan September merupakan periode *low season* setelah pada triwulan sebelumnya mengalami kenaikan frekuensi penerbangan yang cukup tinggi di musim liburan sekolah pada bulan Juni. Hal ini kemudian menyebabkan berlanjutnya penurunan tarif angkutan udara di Pontianak.

Inflasi kelompok pakaian dan alas kaki pada bulan laporan tercatat sebesar 0,16% (mtm) dengan andil sebesar 0,01%. Angka inflasi secara bulanan tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,31% (mtm) dan lebih tinggi dibandingkan rata-rata inflasi kelompok pakaian dan alas kaki bulan

September dalam 3 tahun terakhir yang deflasi 0,17% (mtm). Berdasarkan komoditas, inflasi kelompok ini terutama didorong oleh peningkatan harga celana dalam anak yang mengalami inflasi sebesar 5,56% (mtm). Peningkatan harga tersebut disebabkan oleh kenaikan transaksi pada retail *offline* seiring dengan mobilitas masyarakat yang kian meningkat pasca pencabutan status pandemi secara resmi sejak Juni 2023.

Di tengah inflasi kelompok transportasi dan inflasi kelompok pakaian dan alas kaki, kelompok makanan, minuman dan tembakau mengalami deflasi 0,06% (mtm) dengan andil deflasi 0,021%. Realisasi mtm tersebut lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat deflasi 0,58% (mtm). Apabila dibandingkan dengan rata-rata inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau bulan September dalam 3 tahun terakhir yang inflasi 0,61% (mtm), realisasi tersebut berbeda arah. Berdasarkan komoditas, deflasi kelompok ini didorong oleh penurunan harga daging ayam ras, cumi-cumi, ikan tongkol, bawang merah,

dan udang basah. Penurunan harga daging ayam ras terutama dipengaruhi oleh peningkatan pasokan dan penurunan harga dari supplier seiring adanya pelonggaran kebijakan afkir dini di level nasional. Penurunan harga cumi-cumi, ikan tongkol, serta udang basah disebabkan oleh peningkatan pasokan sejalan dengan peningkatan tangkapan nelayan. Sementara penurunan harga bawang merah didorong oleh panen raya di berbagai daerah sentra sehingga pasokan meningkat. Di sisi lain, deflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang lebih dalam tertahan oleh peningkatan harga komoditas beras, kacang panjang, ketimun, dan buncis. Peningkatan inflasi beras didorong oleh menurunnya produksi padi dan luas panen padi nasional pada September 2023 dari bulan sebelumnya. Penurunan produksi tersebut mengakibatkan pasokan beras dari luar Kalbar terus menurun. Sementara, peningkatan harga kacang panjang, ketimun, dan buncis akibat peningkatan biaya pengairan sejalan dengan kebutuhan tenaga kerja tambahan untuk mengakomodir pengairan tersebut.

Tabel 3.1. Perkembangan Inflasi Bulanan (mtm)

| Kelompok Barang | Tw III 2022 | | | Tw IV 2022 | | | Tw I 2023 | | | Tw II 2023 | | | Tw III 2023 | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|------------|-------|------|-----------|-------|-------|------------|------|-------|-------------|-------|-------|
| | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep |
| Umum | 0,12 | -0,07 | 1,57 | 0,07 | 0,34 | 0,55 | 0,26 | 0,00 | 0,08 | 0,48 | 0,36 | 0,27 | 0,07 | -0,31 | 0,08 |
| Makanan, Minuman dan Tembakau | -0,36 | -1,02 | 1,10 | -0,62 | 0,82 | 0,91 | 0,78 | -0,46 | 0,04 | 0,45 | 0,89 | 1,32 | -0,55 | -0,58 | -0,06 |
| Pakaian dan Alas Kaki | 0,00 | 0,03 | 0,01 | -0,12 | 0,01 | 0,24 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 1,41 | 0,11 | 0,10 | 0,17 | 0,31 | 0,16 |
| Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga | 0,30 | 0,67 | 0,33 | 0,21 | 0,01 | 0,09 | 0,22 | 0,07 | 0,12 | 0,01 | 0,01 | 0,10 | 0,01 | 0,13 | 0,03 |
| Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga | 0,10 | 0,12 | 0,47 | 0,21 | 0,10 | 0,19 | 0,22 | 0,18 | -0,11 | 0,13 | 0,17 | 0,17 | 0,14 | -0,15 | 0,38 |
| Kesehatan | 0,00 | -0,13 | -0,09 | 0,25 | 0,00 | 0,44 | -0,37 | 0,11 | -0,30 | 0,49 | 0,23 | 0,13 | 0,53 | -0,20 | -0,11 |
| Transportasi | 0,74 | 0,90 | 9,17 | 0,67 | -0,01 | 1,00 | -0,51 | 0,69 | 0,29 | 1,58 | 0,18 | -1,82 | 1,34 | -1,28 | 0,27 |
| Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan | 0,00 | -0,06 | -0,01 | -0,02 | -0,01 | 0,19 | 0,14 | -0,01 | -0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,08 | -0,13 | 0,00 | 0,41 |
| Rekreasi, Olahraga dan Budaya | 0,15 | -0,63 | -0,13 | 0,32 | 0,21 | 0,02 | 0,08 | 0,20 | 0,20 | -0,03 | 0,00 | 0,36 | 2,08 | 0,28 | 0,21 |
| Pendidikan | 0,96 | 0,36 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,26 | 0,00 |
| Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran | 0,27 | 0,36 | 0,19 | 0,99 | 0,28 | 0,22 | 0,08 | 0,37 | 0,00 | 0,03 | 0,06 | 0,22 | 0,02 | 0,01 | 0,28 |
| Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya | 0,52 | 0,44 | 0,03 | 1,07 | 0,56 | 0,66 | 0,27 | 0,17 | 0,32 | 0,56 | 0,22 | 0,08 | 0,10 | 0,17 | -0,08 |

Sumber: BPS Prov. Kalbar

Tabel 3.2. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Bulanan (mtm)

| | Juli 2023 | | | Agustus 2023 | | | September 2023 | | |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| | 0.07% | | | -0.31% | | | 0.08% | | |
| | Komoditas | mtm | Andil | Komoditas | mtm | Andil | Komoditas | mtm | Andil |
| INFLASI | ANGKUTAN UDARA | 12,19 | 0,17 | KANGKUNG | 17,88 | 0,06 | BERAS | 3,13 | 0,12 |
| | DAGING AYAM RAS | 4,04 | 0,07 | IKAN TONGKOL/ IKAN AMBU-AMBU | 5,78 | 0,04 | KACANG PANJANG | 23,16 | 0,05 |
| | IKAN TONGKOL/ IKAN AMBU-AMBU | 5,03 | 0,04 | SAWI HIJAU | 11,22 | 0,04 | KETIMUN | 22,18 | 0,03 |
| | WORTEL | 11,32 | 0,02 | MAKANAN RINGAN/SNACK | 6,11 | 0,03 | BUNCIS | 39,21 | 0,03 |
| | BIOSKOP | 8,15 | 0,02 | KONTRAK RUMAH | 0,84 | 0,02 | BIAYA PULSA PONSEL | 0,83 | 0,02 |
| | UDANG BASAH | 1,55 | 0,01 | BAYAM | 8,27 | 0,02 | BENSIN | 0,39 | 0,02 |
| | OBAT DENGAN RESEP | 2,01 | 0,01 | WORTEL | 9,82 | 0,02 | GULA PASIR | 3,02 | 0,02 |
| | TELUR AYAM RAS | 0,70 | 0,01 | KETIMUN | 8,46 | 0,01 | TOMAT | 11,32 | 0,01 |
| | SEKOLAH MENENGAH ATAS | 1,20 | 0,01 | BAJU KAOS TANPA KERAH / T-SHIRT ANAK | 7,50 | 0,01 | UPAH BABY SITTER | 9,54 | 0,01 |
| | KENTANG | 5,57 | 0,01 | BIAYA LES/PRIVAT | 1,70 | 0,01 | CABAI MERAH | 10,09 | 0,01 |
| DEFLASI | SAWI HIJAU | -25,14 | -0,11 | ANGKUTAN UDARA | -11,78 | -0,18 | DAGING AYAM RAS | -2,95 | -0,05 |
| | KETIMUN | -29,48 | -0,06 | DAGING AYAM RAS | -10,07 | -0,17 | CUMI-CUMI | -9,71 | -0,04 |
| | DAGING BABI | -10,03 | -0,05 | BAWANG MERAH | -19,63 | -0,09 | IKAN TONGKOL/ IKAN AMBU-AMBU | -5,26 | -0,04 |
| | KACANG PANJANG | -17,10 | -0,04 | TOMAT | -22,25 | -0,04 | BAWANG MERAH | -10,70 | -0,04 |
| | MINYAK GORENG | -2,82 | -0,04 | UDANG BASAH | -2,96 | -0,02 | UDANG BASAH | -3,91 | -0,03 |
| | CABAI RAWIT | -10,00 | -0,03 | CABAI RAWIT | -6,82 | -0,02 | BAWANG PUTIH | -5,70 | -0,03 |
| | BAYAM | -11,44 | -0,03 | JERUK | -5,33 | -0,02 | TELUR AYAM RAS | -1,54 | -0,02 |
| | KANGKUNG | -7,95 | -0,03 | AYAM HIDUP | -7,31 | -0,01 | DAGING BABI | -4,88 | -0,02 |
| | BUNCIS | -12,33 | -0,01 | CABAI MERAH | -8,98 | -0,01 | BAYAM | -4,11 | -0,01 |
| | IKAN KEMBUNG/IKAN GEMBUNG/ IKAN BANYAR/ IKAN GEMBOLO/ IKAN ASO-ASO | -0,81 | -0,01 | DAGING SAPI | -1,94 | -0,01 | IKAN KEMBUNG/IKAN GEMBUNG/ IKAN BANYAR/ IKAN GEMBOLO/ IKAN ASO-ASO | -0,89 | -0,01 |

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat

3.3. INFLASI TAHUNAN (YOY)

Perkembangan inflasi tahunan Kalimantan Barat pada Triwulan III 2023 tercatat sebesar 2,26% (yoy). Realisasi inflasi pada Triwulan III 2023 tersebut lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada Triwulan II 2023 yaitu tercatat sebesar 4,10% (yoy). Tekanan inflasi secara tahunan pada Triwulan II 2023 tersebut terutama disumbang oleh tekanan harga pada kelompok transportasi, kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.

Inflasi pada kelompok transportasi menurun dari 13,24% (yoy) pada Triwulan II 2023 menjadi sebesar 2,36% (yoy) di Triwulan III 2023. Pada kelompok tersebut, subkelompok pengoperasian peralatan

transportasi pribadi memiliki andil tertinggi dengan inflasi sebesar sebesar 1,74% (yoy), capaian jauh lebih rendah jika dibandingkan Triwulan II 2023 yang tercatat sebesar 17,73% (yoy). Sedangkan berdasarkan komoditas, kenaikan tekanan inflasi tahunan pada subkelompok pengoperasian peralatan transportasi pribadi Triwulan II 2023 terutama diakibatkan oleh komoditas bensin. Hal ini sebagai dampak dari penyesuaian harga BBM yang resmi diberlakukan mulai tanggal 1 Maret 2023 namun pengaruhnya terhadap inflasi semakin menurun.

Inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau menurun dari 3,88% (yoy) pada Triwulan II 2023 menjadi sebesar 2,95% (yoy) di Triwulan III 2023. Pada kelompok tersebut, subkelompok

makanan mengalami inflasi sebesar 1,94% (yoy), lebih rendah dibandingkan Triwulan II 2023 yang sebesar 2,58% (yoy). Komoditas – komoditas yang meredam kenaikan inflasi lebih tinggi antara lain cabai rawit yang tercatat deflasi 28,04% (yoy), bawang merah yang tercatat deflasi sebesar 22,21% (yoy), dan bayam yang tercatat deflasi sebesar 20,75% (yoy). Penurunan harga tersebut dipengaruhi oleh ketersediaan stok yang melimpah dari daerah sentra produksi karena masih berlangsungnya musim panen dan curah hujan yang kondusif di Kalimantan Barat sehingga berdampak positif terhadap perkembangan komoditas sayur-sayuran.

Sedangkan dari sisi pendorong inflasi, kenaikan inflasi tahunan pada subkelompok makanan triwulan III 2023 terutama terjadi pada komoditas bawang putih, beras, dan telur ayam ras. Tekanan inflasi pada komoditas beras dikarenakan stok yang berkurang akibat El-Nino dan pembatasan ekspor beras dari negara produsen. Sementara kenaikan komoditas bawang putih disebabkan panen yang tidak sebaik prakiraan sebelumnya di daerah sentra produksi

akibat gangguan cuaca ekstrem. Sedangkan telur ayam ras meningkat seiring dengan semakin tingginya permintaan menjelang Natal dan Tahun Baru.

Tekanan inflasi Triwulan III 2023 juga disebabkan oleh naiknya tekanan harga pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, yang mengalami inflasi sebesar 3,91% (yoy) namun lebih rendah dari triwulan II 2023 yang tercatat sebesar 5,43% (yoy). Turunnya inflasi pada kelompok ini disebabkan hampir semua komoditas seiring dengan telah berakhirnya periode libur anak sekolah dan kegiatan besar lainnya.

Apabila dilihat per komoditas, laju dan andil inflasi tahunan tertinggi pada Triwulan III 2023 adalah komoditas beras yang mengalami inflasi sebesar 10,86% (yoy) dan memberikan andil inflasi tahunan sebesar 0,38%, yang didorong oleh keterbatasan stok. Di sisi lain, deflasi terendah secara tahunan terjadi pada komoditas cabai rawit yang mengalami deflasi sebesar 28,04% (yoy) sehingga memberikan andil 0,11%.

Tabel 3.3. Perkembangan Inflasi Tahunan (yoy)

| Kelompok Barang | Tw III 2022 | | | Tw IV 2022 | | | Tw I 2023 | | | Tw II 2023 | | | Tw III 2023 | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|------------|-------|-------|-------------|-------|------|
| | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep |
| Umum | 4,58 | 4,43 | 5,71 | 6,00 | 6,12 | 6,30 | 5,70 | 5,43 | 5,06 | 4,36 | 3,91 | 4,10 | 4,04 | 3,79 | 2,26 |
| Makanan, Minuman dan Tembakau | 6,13 | 4,93 | 5,33 | 5,48 | 5,88 | 5,96 | 5,43 | 4,99 | 4,74 | 3,02 | 2,42 | 3,88 | 3,69 | 4,15 | 2,95 |
| Pakaian dan Alas Kaki | -0,19 | -0,20 | 0,28 | 0,17 | 0,18 | 0,42 | 0,46 | 0,47 | 0,48 | 1,74 | 1,82 | 1,92 | 2,09 | 2,37 | 2,52 |
| Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga | 4,39 | 5,14 | 5,26 | 5,41 | 5,12 | 5,08 | 4,40 | 4,12 | 3,35 | 2,34 | 2,25 | 2,15 | 1,85 | 1,31 | 1,00 |
| Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga | 5,82 | 5,85 | 6,26 | 6,48 | 6,18 | 6,33 | 5,63 | 5,39 | 4,23 | 2,09 | 2,05 | 1,97 | 2,02 | 1,74 | 1,64 |
| Kesehatan | -0,43 | -0,97 | -1,06 | -0,17 | -0,17 | 0,44 | 0,02 | -0,15 | -0,54 | 0,55 | 0,82 | 0,76 | 1,29 | 1,22 | 1,20 |
| Transportasi | 6,84 | 7,71 | 17,17 | 17,69 | 18,03 | 18,57 | 16,81 | 16,36 | 15,98 | 17,02 | 15,57 | 13,24 | 13,91 | 11,45 | 2,36 |
| Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan | -0,23 | -0,29 | -0,31 | -0,34 | -0,36 | -0,11 | 0,16 | 0,15 | 0,09 | 0,12 | 0,18 | 0,30 | 0,17 | 0,23 | 0,65 |
| Rekreasi, Olahraga dan Budaya | 4,67 | 3,63 | 3,47 | 3,69 | 3,14 | 2,79 | 2,51 | 2,71 | 2,81 | 2,18 | 2,09 | 0,74 | 2,68 | 3,62 | 3,98 |
| Pendidikan | 1,32 | 1,39 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,28 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 0,68 | 0,57 | 0,55 |
| Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran | 3,07 | 3,36 | 3,22 | 4,12 | 4,23 | 4,46 | 4,15 | 4,17 | 3,53 | 3,29 | 2,99 | 3,12 | 2,86 | 2,49 | 2,58 |
| Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya | 6,17 | 6,63 | 6,52 | 7,32 | 7,48 | 8,04 | 7,17 | 6,73 | 6,69 | 6,21 | 5,18 | 5,00 | 4,57 | 4,29 | 4,17 |

Sumber: BPS Prov. Kalbar

Tabel 3.4. Perkembangan Andil Inflasi Tahunan (yoy)

| Kelompok Barang | Tw III 2022 | | | Tw IV 2022 | | | Tw I 2023 | | | Tw II 2023 | | | Tw III 2023 | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|------------|-------|-------|-----------|------|-------|------------|------|------|-------------|------|------|
| | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep |
| Umum | 4,58 | 4,43 | 5,71 | 6,00 | 6,12 | 6,30 | 5,70 | 5,43 | 5,06 | 4,36 | 3,91 | 4,10 | 4,04 | 3,79 | 2,26 |
| Makanan, Minuman dan Tembakau | 2,04 | 1,64 | 1,78 | 1,82 | 1,96 | 2,00 | 1,83 | 1,67 | 1,59 | 1,02 | 0,82 | 1,32 | 1,25 | 1,39 | 0,98 |
| Pakaian dan Alas Kaki | -0,01 | -0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,12 |
| Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga | 0,73 | 0,86 | 0,88 | 0,90 | 0,86 | 0,85 | 0,73 | 0,69 | 0,56 | 0,39 | 0,37 | 0,36 | 0,31 | 0,22 | 0,17 |
| Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga | 0,30 | 0,30 | 0,32 | 0,33 | 0,32 | 0,32 | 0,29 | 0,27 | 0,22 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,08 |
| Kesehatan | -0,01 | -0,03 | -0,03 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| Transportasi | 0,80 | 0,91 | 2,02 | 2,09 | 2,11 | 2,18 | 1,98 | 1,94 | 1,90 | 2,01 | 1,85 | 1,58 | 1,67 | 1,39 | 0,31 |
| Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| Rekreasi, Olahraga dan Budaya | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
| Pendidikan | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran | 0,24 | 0,27 | 0,25 | 0,33 | 0,33 | 0,35 | 0,33 | 0,33 | 0,28 | 0,26 | 0,23 | 0,24 | 0,22 | 0,19 | 0,20 |
| Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya | 0,36 | 0,39 | 0,38 | 0,43 | 0,44 | 0,47 | 0,42 | 0,39 | 0,39 | 0,36 | 0,30 | 0,29 | 0,27 | 0,25 | 0,24 |

Sumber: BPS Prov. Kalbar

Tabel 3.5. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Tahunan (yoy)

| | Juli 2023 | | | Agustus 2023 | | | September 2023 | | |
|----------------|--------------------------|--------|-------|--------------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| | 4,04% | | | 3,79% | | | 2,26% | | |
| | Komoditas | yoy | Andil | Komoditas | yoy | Andil | Komoditas | yoy | Andil |
| INFLASI | BENSIN | 28,56 | 1,03 | BENSIN | 28,49 | 1,02 | BERAS | 10,86 | 0,38 |
| | ROKOK KRETEK FILTER | 15,64 | 0,39 | ROKOK KRETEK FILTER | 15,25 | 0,38 | ROKOK KRETEK FILTER | 14,08 | 0,35 |
| | BERAS | 7,82 | 0,28 | BERAS | 8,04 | 0,29 | BAWANG PUTIH | 54,93 | 0,16 |
| | ANGKUTAN UDARA | 18,04 | 0,24 | BAWANG PUTIH | 63,99 | 0,19 | TELUR AYAM RAS | 6,00 | 0,08 |
| | BAWANG PUTIH | 68,63 | 0,20 | DAGING AYAM RAS | 8,99 | 0,13 | MOBIL | 3,54 | 0,07 |
| | BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA | 6,44 | 0,17 | TELUR AYAM RAS | 10,04 | 0,13 | ANGKUTAN UDARA | 4,71 | 0,06 |
| | DAGING AYAM RAS | 9,15 | 0,15 | BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA | 3,35 | 0,09 | TUKANG BUKAN MANDOR | 5,66 | 0,06 |
| | MOBIL | 6,99 | 0,14 | DAGING BABI | 21,50 | 0,08 | BENSIN | 1,27 | 0,06 |
| | TELUR AYAM RAS | 8,51 | 0,11 | SOLAR | 26,98 | 0,07 | MAKANAN RINGAN/SNACK | 12,86 | 0,05 |
| DAGING BABI | 21,48 | 0,08 | MOBIL | 3,45 | 0,07 | MIE | 6,59 | 0,05 | |
| Deflasi | BAWANG MERAH | -22,77 | -0,15 | BAWANG MERAH | -28,39 | -0,16 | CABAI RAWIT | -28,04 | -0,11 |
| | CABAI RAWIT | -27,77 | -0,12 | CABAI RAWIT | -27,09 | -0,11 | BAWANG MERAH | -22,21 | -0,10 |
| | MINYAK GORENG | -4,96 | -0,07 | CABAI MERAH | -27,74 | -0,05 | BAYAM | -20,75 | -0,06 |
| | PISANG | -14,06 | -0,04 | PISANG | -14,10 | -0,04 | SAWI HIJAU | -14,16 | -0,06 |
| | CABAI MERAH | -19,76 | -0,04 | TOMAT | -17,76 | -0,03 | DAGING AYAM RAS | -3,22 | -0,05 |
| | TOMAT | -15,25 | -0,03 | MINYAK GORENG | -2,17 | -0,03 | IKAN KEMBUNG/IKAN GEMBUNG/ IKAN BANYAR/ IKAN GEMBOLO/ IKAN ASO-ASO | -3,52 | -0,04 |
| | KETIMUN | -17,14 | -0,03 | TAHU MENTAH | -4,07 | -0,02 | CABAI MERAH | -17,31 | -0,03 |
| | KOL PUTIH/KUBIS | -33,10 | -0,03 | KOL PUTIH/KUBIS | -26,05 | -0,02 | CUMI-CUMI | -6,93 | -0,03 |
| | KACANG PANJANG | -11,59 | -0,03 | TEMPE | -3,26 | -0,02 | TAHU MENTAH | -4,06 | -0,02 |
| | BAYAM | -9,81 | -0,03 | ANGGUR | -9,87 | -0,01 | KANGKUNG | -4,37 | -0,02 |

Sumber: BPS Prov. Kalbar



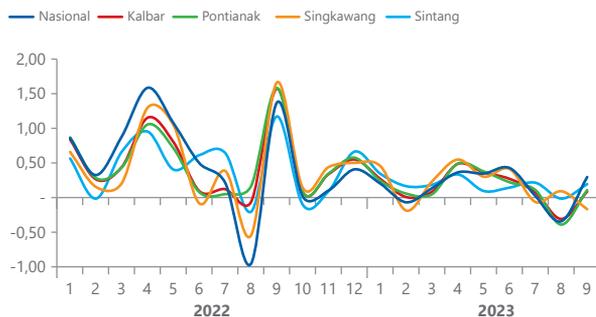
Memasuki Triwulan IV 2023, tekanan harga di Kalimantan Barat terpantau stabil dan masih dalam kisaran $3\pm 1\%$. Inflasi tahunan pada Oktober 2023 tercatat sebesar 2,31% (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi Triwulan III 2023 yang tercatat sebesar 2,26% (yoy). Kenaikan ini didorong oleh kenaikan harga pada kelompok *volatile foods*, *administerd prices*, dan inti terutama menjelang Natal dan Tahun Baru serta adanya kenaikan BBM di awal September 2023.

3.4. INFLASI KOTA

Realisasi inflasi tahunan pada Triwulan III 2023 di kota sampel inflasi Kalimantan Barat secara umum mengalami penurunan searah dengan capaian inflasi Kalimantan Barat. Inflasi tahunan di Kota Pontianak pada Triwulan III 2023 tercatat sebesar 2,23% (yoy), menurun dibandingkan Triwulan II 2023 yang tercatat sebesar 4,26% (yoy). Demikian halnya dengan inflasi

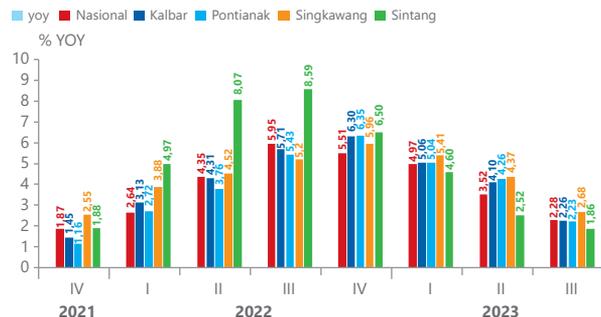
Kota Singkawang tercatat sebesar 2,68% (yoy) pada Triwulan III 2023 atau menurun dari Triwulan II 2023 yang tercatat sebesar 4,37% (yoy) dan inflasi Kota Sintang yang tercatat sebesar 1,86% (yoy) pada Triwulan III 2023 menurun dari 2,52% (yoy) pada Triwulan II 2023.

Apabila dilihat berdasarkan komoditasnya, tekanan inflasi pada Triwulan III 2023 di kota sampel inflasi di Kalimantan Barat terutama disebabkan oleh kenaikan harga kelompok transportasi dan makanan, minuman, dan tembakau dengan komoditas tarif angkutan, rokok kretek filter, gula pasir, bawang putih, dan beras. Sementara itu, kenaikan tekanan inflasi lebih lanjut di kota sampel inflasi di Kalimantan Barat pada Triwulan III 2023 tertahan oleh penurunan harga pada komoditas bawang merah, sayur-sayuran, daging ayam ras, dan cabai merah kering yang terjadi di ketiga kota tersebut.



Sumber: BPS Prov. Kalbar

Grafik 3.4. Pergerakan Inflasi Bulanan 3 Kota di Kalimantan Barat



Sumber: BPS Prov. Kalbar

Grafik 3.5. Perkembangan Inflasi Tahunan 3 Kota di Kalimantan Barat



Tabel 3.6. Perkembangan Inflasi Kota di Provinsi Kalimantan Barat (yoy)

| Kelompok Barang | Inflasi Tahunan (yoy) | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|
| | Kota Pontianak | | | Kota Singkawang | | | Kabupaten Sintang | | |
| | Tw I 2022 | Tw II 2022 | Tw III 2023 | TwII 2022 | Tw II 2022 | Tw III 2022 | Tw I 2022 | Tw II 2022 | Tw IV 2023 |
| Umum | 5,04 | 4,26 | 2,23 | 5,41 | 4,37 | 2,68 | 4,60 | 2,52 | 1,86 |
| Makanan, Minuman dan Tembakau | 4,26 | 4,17 | 2,87 | 6,65 | 5,23 | 4,17 | 4,70 | 0,28 | 1,63 |
| Pakaian dan Alas Kaki | 0,55 | 2,42 | 3,20 | 0,62 | 0,74 | 0,94 | -0,17 | 0,29 | 0,29 |
| Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga | 3,68 | 2,22 | 0,99 | 1,27 | 1,35 | 1,17 | 4,16 | 2,88 | 0,84 |
| Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga | 4,71 | 1,76 | 1,35 | 2,43 | 1,41 | 1,42 | 3,78 | 4,27 | 3,96 |
| Kesehatan | -1,64 | -0,04 | 0,11 | 3,33 | 2,81 | 5,49 | 3,96 | 5,17 | 4,76 |
| Transportasi | 16,11 | 13,28 | 2,38 | 16,22 | 13,99 | 1,50 | 14,57 | 11,74 | 3,51 |
| Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan | 0,38 | 0,48 | 0,73 | -0,18 | -0,19 | 0,25 | -1,12 | -0,09 | 0,74 |
| Rekreasi, Olahraga dan Budaya | 3,00 | 0,52 | 4,47 | 2,47 | 1,09 | 2,14 | 1,82 | 1,93 | 2,67 |
| Pendidikan | 1,16 | 1,16 | 0,31 | 2,51 | 2,51 | 1,94 | 1,12 | 1,12 | 0,25 |
| Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran | 3,06 | 3,20 | 2,67 | 6,69 | 3,69 | 2,88 | 0,29 | 0,38 | 0,34 |
| Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya | 7,41 | 5,03 | 4,38 | 4,87 | 4,90 | 3,34 | 4,45 | 4,96 | 3,93 |

Sumber: BPS Prov. Kalbar

Tabel 3.7. Andil Inflasi Tahunan 3 Kota di Kalimantan Barat

| Kelompok Barang | Andil Inflasi Tahunan (yoy) | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|
| | Kota Pontianak | | | Kota Singkawang | | | Kabupaten Sintang | | |
| | Tw I 2022 | Tw II 2022 | Tw III 2023 | TwII 2022 | Tw II 2022 | Tw III 2022 | Tw I 2022 | Tw II 2022 | Tw IV 2023 |
| Umum | 5,04 | 4,26 | 2,23 | 5,41 | 4,37 | 2,68 | 4,60 | 2,52 | 1,86 |
| Makanan, Minuman dan Tembakau | 1,36 | 1,35 | 0,91 | 2,45 | 1,97 | 1,54 | 1,84 | 0,11 | 0,65 |
| Pakaian dan Alas Kaki | 0,03 | 0,12 | 0,16 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | -0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga | 0,62 | 0,38 | 0,17 | 0,21 | 0,22 | 0,19 | 0,67 | 0,45 | 0,13 |
| Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga | 0,24 | 0,09 | 0,07 | 0,13 | 0,07 | 0,07 | 0,21 | 0,23 | 0,21 |
| Kesehatan | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,06 | 0,12 | 0,09 | 0,11 | 0,10 |
| Transportasi | 2,03 | 1,68 | 0,33 | 1,54 | 1,33 | 0,16 | 1,51 | 1,21 | 0,39 |
| Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan | 0,02 | 0,02 | 0,03 | -0,01 | -0,01 | 0,01 | -0,07 | -0,01 | 0,04 |
| Rekreasi, Olahraga dan Budaya | 0,05 | 0,01 | 0,08 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 |
| Pendidikan | 0,06 | 0,05 | 0,01 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran | 0,25 | 0,26 | 0,21 | 0,57 | 0,32 | 0,25 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya | 0,43 | 0,30 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,18 | 0,29 | 0,32 | 0,25 |

Sumber: BPS Prov. Kalbar

Tabel 3.8. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Bulanan di 3 Kota Sampel (mtm)

| | Juli 2023 | | | Agustus 2023 | | | September 2023 | | | |
|---------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|--------|--------------|------------------------------|--------|----------------|------------------------------|--------|-------|
| | Komoditas | mtm | Andil | Komoditas | mtm | Andil | Komoditas | mtm | Andil | |
| PONTIANAK Jul: -0,07% Agus: 0,09% Sep: -0,17% | Inflasi | ANGKUTAN UDARA | 14,09 | 0,23 | KANGKUNG | 25,37 | 0,07 | BERAS | 3,26 | 0,12 |
| | | DAGING AYAM RAS | 4,42 | 0,07 | SAWI HIJAU | 14,23 | 0,04 | KACANG PANJANG | 41,57 | 0,05 |
| | | IKAN TONGKOL/ IKAN AMBU-AMBU | 5,73 | 0,03 | MAKANAN RINGAN/SNACK | 7,66 | 0,04 | BUNCIS | 52,59 | 0,05 |
| | | BIOSKOP | 9,13 | 0,02 | IKAN TONGKOL/ IKAN AMBU-AMBU | 4,77 | 0,03 | TOMAT | 21,56 | 0,02 |
| | | WORTEL | 12,69 | 0,02 | KONTRAK RUMAH | 0,98 | 0,03 | BIAYA PULSA PONSEL | 0,85 | 0,02 |
| | Deflasi | SAWI HIJAU | -28,41 | -0,11 | ANGKUTAN UDARA | -13,39 | -0,25 | CUMI-CUMI | -11,18 | -0,05 |
| | | KETIMUN | -40,88 | -0,05 | DAGING AYAM RAS | -12,34 | -0,20 | IKAN TONGKOL/ IKAN AMBU-AMBU | -6,93 | -0,04 |
| | | MINYAK GORENG | -4,16 | -0,05 | BAWANG MERAH | -19,34 | -0,09 | UDANG BASAH | -5,91 | -0,04 |
| | | KACANG PANJANG | -32,32 | -0,04 | TOMAT | -27,46 | -0,04 | DAGING AYAM RAS | -2,39 | -0,03 |
| | | CABAI RAWIT | -13,73 | -0,04 | UDANG BASAH | -5,06 | -0,03 | BAWANG MERAH | -8,39 | -0,03 |
| SINGKAWANG Apr: 0,55% Mei: 0,30% Jun: 0,41% | Inflasi | DAGING AYAM RAS | 3,27 | 0,07 | IKAN TONGKOL/ IKAN AMBU-AMBU | 7,85 | 0,11 | BERAS | 3,18 | 0,11 |
| | | IKAN TONGKOL/ IKAN AMBU-AMBU | 5,13 | 0,07 | SAWI HIJAU | 12,82 | 0,06 | KETIMUN | 17,10 | 0,04 |
| | | SEKOLAH MENENGAH ATAS | 5,77 | 0,06 | OBAT DENGAN RESEP | 10,06 | 0,05 | SAWI HIJAU | 5,73 | 0,03 |
| | | BAWANG MERAH | 12,32 | 0,04 | KANGKUNG | 16,42 | 0,04 | KACANG PANJANG | 12,89 | 0,02 |
| | | UDANG BASAH | 2,20 | 0,03 | BAYAM | 13,63 | 0,03 | BIAYA PULSA PONSEL | 0,77 | 0,02 |
| | Deflasi | DAGING BABI | -10,00 | -0,15 | BAWANG MERAH | -22,51 | -0,09 | DAGING BABI | -7,69 | -0,10 |
| | | SAWI HIJAU | -22,31 | -0,13 | DAGING BABI | -3,70 | -0,05 | IKAN TONGKOL/ IKAN AMBU-AMBU | -6,23 | -0,10 |
| | | KETIMUN | -20,09 | -0,06 | CABAI RAWIT | -9,19 | -0,04 | TELUR AYAM RAS | -6,41 | -0,10 |
| | | KANGKUNG | -12,96 | -0,04 | MINYAK GORENG | -1,54 | -0,02 | DAGING AYAM RAS | -3,49 | -0,08 |
| | | BAYAM | -13,32 | -0,03 | TOMAT | -12,62 | -0,02 | BAWANG MERAH | -20,86 | -0,07 |
| SINTANG Jul: 0,02% Agus: -0,35% Sep: 0,29% | Inflasi | DAGING AYAM RAS | 3,26 | 0,06 | IKAN BAUNG | 6,64 | 0,05 | KETIMUN | 33,99 | 0,14 |
| | | BERAS | 1,04 | 0,05 | IKAN TONGKOL/ IKAN AMBU-AMBU | 5,43 | 0,03 | ANGKUTAN UDARA | 6,95 | 0,13 |
| | | SEMEN | 2,87 | 0,03 | CABAI RAWIT | 6,72 | 0,03 | BERAS | 2,30 | 0,10 |
| | | BAWANG PUTIH | 5,26 | 0,02 | MOBIL | 1,60 | 0,02 | KACANG PANJANG | 9,16 | 0,08 |
| | | SABUN CAIR/CUCI PIRING | 7,46 | 0,02 | TELUR AYAM RAS | 0,98 | 0,02 | IKAN TONGKOL/ IKAN AMBU-AMBU | 9,80 | 0,07 |
| | Deflasi | KETIMUN | -18,18 | -0,10 | DAGING AYAM RAS | -13,51 | -0,28 | DAGING AYAM RAS | -5,05 | -0,09 |
| | | SAWI HIJAU | -10,93 | -0,05 | KACANG PANJANG | -9,98 | -0,10 | BAWANG MERAH | -14,35 | -0,06 |
| | | KACANG PANJANG | -4,18 | -0,04 | BAWANG MERAH | -17,94 | -0,09 | BAWANG PUTIH | -7,36 | -0,04 |
| | | CABAI RAWIT | -5,51 | -0,02 | AYAM HIDUP | -7,79 | -0,04 | BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA | -1,10 | -0,03 |
| | | IKAN NILA | -4,53 | -0,02 | KETIMUN | -7,45 | -0,03 | CABAI RAWIT | -6,70 | -0,03 |

3.5. PROGRAM PENGENDALIAN INFLASI TAHUN 2023

Program pengendalian inflasi di Kalimantan Barat pada Triwulan III 2023 difokuskan untuk menjaga suplai bahan pokok makanan di tengah ancaman el-Nino dan curah hujan yang tidak menentu. Upaya pengendalian inflasi jangka pendek yang telah dilakukan antara lain menyelenggarakan Operasi Pasar (untuk komoditas beras, minyak goreng, gula) dan Gelar Pangan Murah (untuk komoditas beras, daging ayam ras,

minyak goreng, telur ayam ras, bawang merah, gula, dan aneka sayuran) yang dilakukan di beberapa pasar tradisional yang menjadi sampel survei inflasi BPS. Selain itu, juga dilakukan penyaluran bansos, memperluas implementasi pasar tani, penguatan stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) dan bantuan pangan (Banpang) komoditas Beras oleh Bulog, melakukan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai kanal, menggalakkan program kampung sayur, sosialisasi gerakan menanam di pekarangan,

serta memfasilitasi interaksi antara petani/pedagang yang mempunyai produksi/stok surplus dengan market/konsumen yang membutuhkan baik intra maupun dengan daerah di luar Kalimantan Barat. Pelaksanaan program dilakukan melalui koridor Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan mengacu pada peta jalan (*roadmap*) program pengendalian inflasi Kalimantan Barat periode 2022-2024. *Roadmap* tersebut memiliki 4 strategi utama, yakni: ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi efektif. Pelaksanaan strategi 4K yang telah dilaksanakan meliputi:

- a. **Keterjangkauan harga:** melalui Gerakan Pangan Murah yang merupakan bentuk sinergi Dinas Ketahanan Pangan, Bapanas, Bank Indonesia, dan Bulog Provinsi Kalimantan Barat, dimana hingga saat ini telah diselenggarakan sebanyak lebih dari 84 kali, termasuk yang diselenggarakan dalam rangka GNPIP, Puncak PQN, dan HUT RI ke-78 dengan subsidi sebesar 20% dari harga pasar.
- b. **Ketersediaan pasokan:** melalui penyediaan bibit dan benih untuk memperkuat sisi hulu sektor pertanian, seperti bibit cabai rawit, hortikultura, perikanan yang akan diberikan kepada PKK se - Kalimantan Barat, Kelompok Wanita Tani (KWT), dan Pondok Pesantren.
- c. **Kelancaran distribusi:** melalui perluasan Kerjasama Antar Daerah antara lain penandatanganan PKS Singbebaswah. Selain itu juga mendorong optimalisasi pemberian fasilitas ongkos angkut melalui sinergi pemerintah daerah beserta instansi terkait dengan pelaku usaha.
- d. **Komunikasi efektif:** himbauan belanja bijak, penggunaan komoditas lokal, dan mengutamakan kebutuhan dibanding keinginan melalui berbagai kanal komunikasi kepada masyarakat.



Halaman ini sengaja dikosongkan



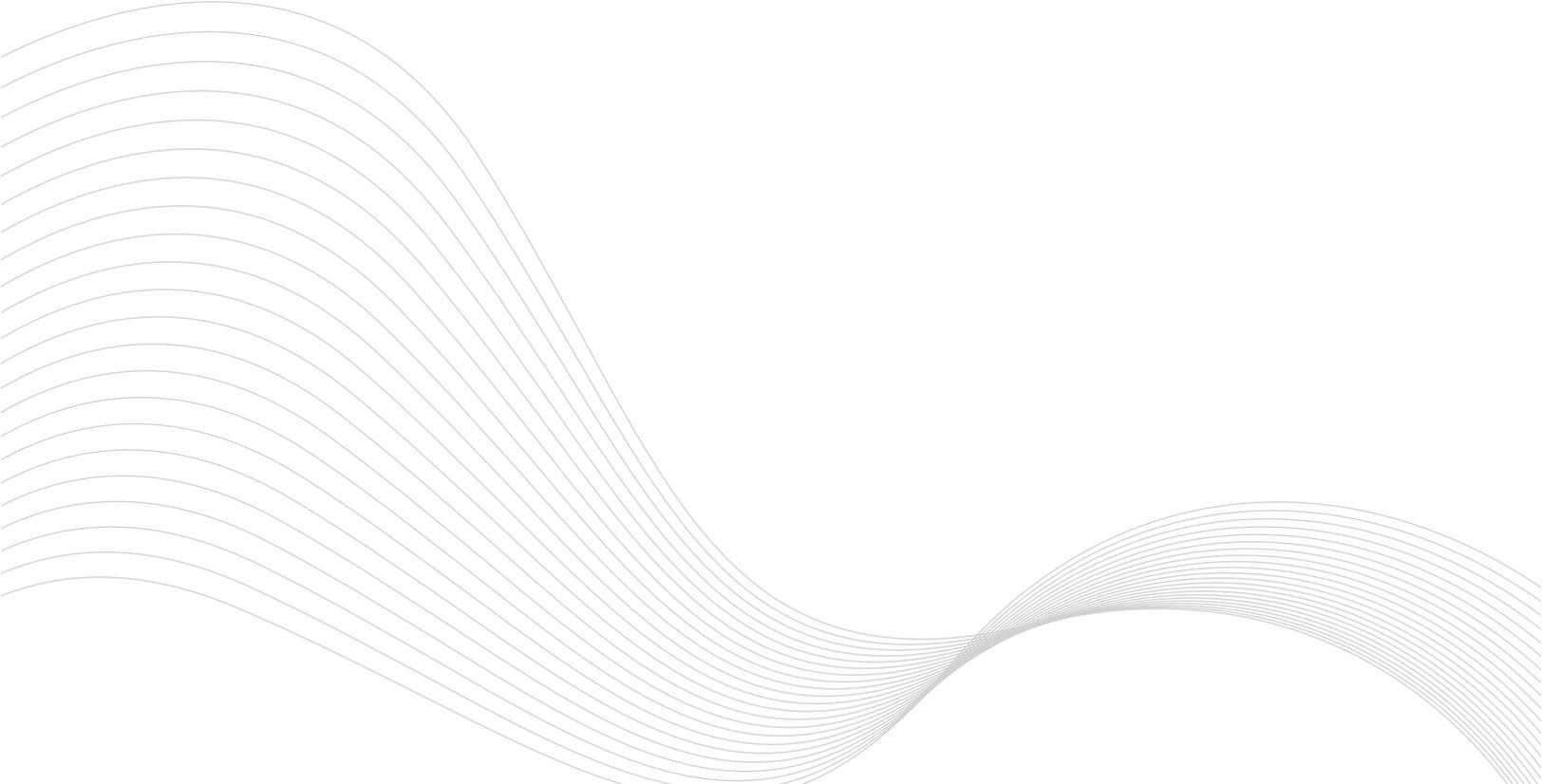


BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA



BAB 4

**Pembiayaan Daerah,
Serta Pengembangan
Akses Keuangan
dan UMKM**



Intermediasi perbankan Kalimantan Barat pada triwulan III 2023 tetap tumbuh dan berada pada level yang terjaga. Kredit perbankan tumbuh sebesar 6,05% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya 2,96% (yoy). Pertumbuhan tersebut didorong peningkatan konsumsi masyarakat seiring peningkatan mobilitas pasca pencabutan status pandemi oleh Presiden sejak Juni 2023, percepatan beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kalimantan Barat, dan kebijakan regulator yang mendukung antara lain kebijakan Loan to value (LTV) yang akomodatif. Pada perbankan syariah, pembiayaan tumbuh sebesar 8,48% (yoy) pada triwulan III 2023. Di segmen UMKM, pertumbuhan kredit juga terus berlanjut. Rasio kredit UMKM sudah mencapai 31,70%. Adapun Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan Kalimantan Barat juga terus meningkat, didorong oleh peningkatan giro dan deposito. Sementara itu, risiko kredit bermasalah di Kalimantan Barat mengalami sedikit peningkatan namun masih berada dalam level yang terjaga (di bawah 5%).



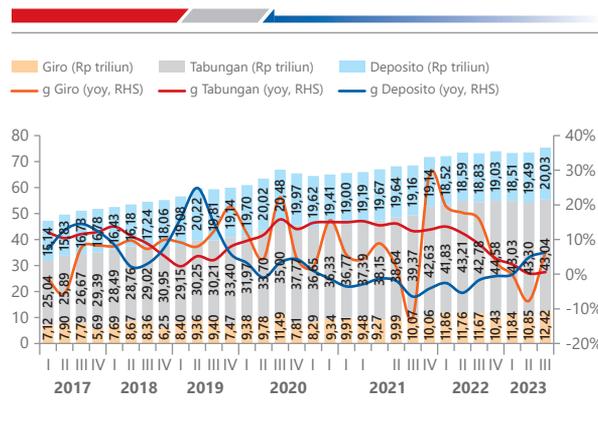
4.1. PERKEMBANGAN PERBANKAN SECARA UMUM⁴

4.1.1. Dana Pihak Ketiga (DPK)

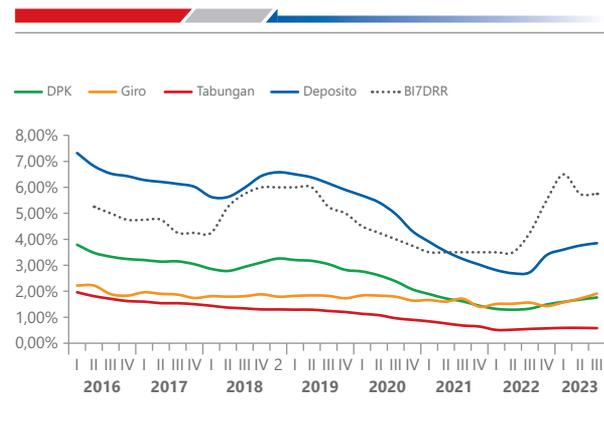
Dana pihak ketiga (DPK) Perbankan di Kalimantan Barat pada triwulan III 2023 tumbuh meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. DPK perbankan pada akhir triwulan III 2023 tercatat sebesar Rp75,49 triliun atau secara tahunan tumbuh sebesar 3,02% (yoy). Pertumbuhan DPK tersebut lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 0,12% (yoy). Peningkatan tersebut utamanya didorong oleh peningkatan kinerja giro dan deposito. Instrumen giro tercatat meningkat dari sebelumnya -7,70% (yoy) menjadi 6,46% (yoy) pada periode laporan, sedangkan deposito tumbuh meningkat dari 4,85% (yoy) menjadi 6,35% (yoy). Peningkatan pertumbuhan giro dan deposito tersebut sejalan dengan suku bunga tertimbang untuk instrumen giro dan deposito yang meningkat masing-masing menjadi 1,91%

dan 3,85% pada triwulan III 2023. Peningkatan DPK tersebut tersebut juga mengindikasikan adanya penurunan kebutuhan dana untuk konsumsi rumah tangga. Hal ini mengingat pangsa rumah tangga mendominasi DPK Kalimantan Barat sebesar 71,85%. Peningkatan giro turut didorong oleh peningkatan giro milik pemerintah daerah. Kondisi tersebut juga sejalan dengan konsumsi rumah tangga pada komponen pengeluaran PDRB Provinsi Kalimantan Barat yang mengalami perlambatan dari 5,80% (yoy) pada triwulan II 2023 menjadi 4,20% (yoy) pada triwulan laporan.

Di wilayah Kalimantan, total DPK perbankan Kalimantan Barat berada di posisi terbesar ketiga setelah Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. DPK perbankan Kalimantan Barat tersebut terdiri atas DPK rupiah sebesar 96,80% atau Rp73,08 triliun dan sisanya sebesar 3,20% atau Rp2,41 triliun dalam bentuk valuta asing.



Grafik 4.1. Perkembangan Jenis DPK Perbankan



Grafik 4.2. Perkembangan SBT DPK Perbankan

Tabel 4.1. Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) *

| Cakupan (Rp Triliun) | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III |
| Nasional | 6.786,87 | 6.966,35 | 7.162,29 | 7.479,46 | 7.481,68 | 7.602,30 | 7.647,33 | 8.153,59 | 8.005,58 | 8.042,10 | 8.147,17 |
| Kalbar | 65,69 | 68,26 | 68,60 | 71,83 | 72,21 | 73,55 | 73,28 | 74,05 | 73,38 | 73,64 | 75,49 |
| g Kalbar (% yoy) | 7,60 | 7,48 | 2,43 | 9,58 | 9,93 | 7,75 | 6,83 | 3,08 | 1,61 | 0,12 | 3,02 |
| Kaltim | 103,77 | 109,15 | 118,71 | 117,05 | 117,89 | 130,13 | 133,98 | 146,01 | 148,18 | 152,76 | 158,81 |
| Kalsel | 56,42 | 57,68 | 63,69 | 63,44 | 64,49 | 68,91 | 72,86 | 75,97 | 76,15 | 77,25 | 76,63 |
| Kalteng | 30,92 | 32,30 | 34,73 | 34,45 | 34,30 | 35,11 | 35,92 | 36,59 | 35,32 | 36,32 | 39,07 |

* Data DPK Kalimantan Utara masih terhitung di dalam DPK Kalimantan Timur

4. Hanya menggunakan data bank umum, data bank perkreditan rakyat (BPR) tidak dimasukkan.

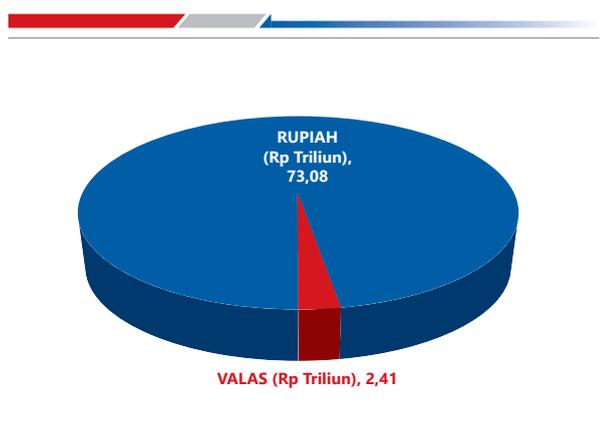
5. Data perbankan Kalimantan Utara masih masuk dalam data perbankan Kalimantan Timur.

Berdasarkan kegiatan bank, penghimpunan DPK di Kalimantan Barat masih didominasi oleh DPK konvensional. Pada periode laporan, DPK Bank Umum konvensional mendominasi sebesar 93,53% dari total DPK atau sebesar Rp70,61 triliun. DPK konvensional tersebut mengalami perbaikan menjadi 2,92% (yoy) dari sebelumnya kontraksi 0,02% (yoy). Di sisi lain, DPK perbankan syariah pada periode laporan tercatat sebesar Rp4,88 triliun atau sebesar 6,47% dari total DPK. Angka tersebut tumbuh sebesar 4,42% (yoy). Hal ini menunjukkan modal/kemampuan pembiayaan syariah di Kalimantan Barat terus meningkat dari waktu ke waktu.

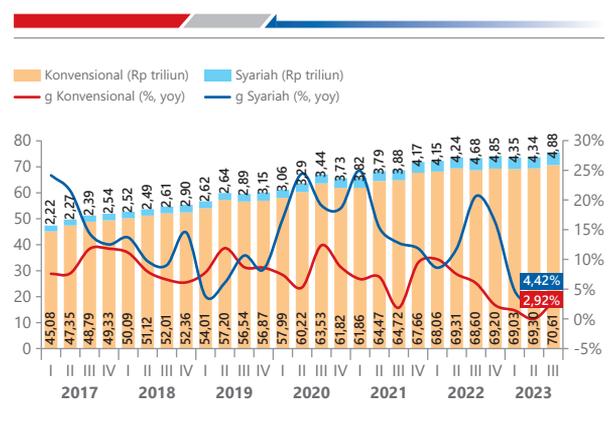
Di sisi lainnya, perkembangan pembiayaan syariah mengalami peningkatan akibat peningkatan kegiatan ekonomi syariah sejalan dengan visi RPJMD Provinsi Kalimantan Barat yang juga mendukung akselerasi sektor ekonomi dan keuangan syariah. Bank Indonesia Kalimantan Barat turut mendukung pembiayaan syariah tersebut melalui transformasi digital untuk pelaku ekonomi syariah seperti UMKM, rumah ibadah, lembaga sosial, pesantren dan masyarakat, pembentukan Himpunan Ekonomis Bisnis Pesantren (Hebitren) Kalimantan Barat, serta memperkuat *national branding* produk unggulan daerah Kalimantan Barat melalui peningkatan industri halal, antara lain kurasi lokal dan pendampingan UMKM menuju Industri Kreatif Syariah Indonesia (IKRA). Hal ini diharapkan dapat berkontribusi pada pencapaian visi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Salah satunya melalui pelaksanaan kegiatan Gema Ekonomi

Syariah yang dilaksanakan pada 13 Maret hingga 18 April 2023. Kegiatan ini mencakup pelaksanaan kurasi Produk UMKM bersama Dewan Industri Kreatif Syariah Indonesia, pendampingan sertifikasi halal UMKM, *business matching*, seminar pengembangan kemandirian pontren, edukasi keuangan syariah, dan *showcase* produk halal UMKM di Kalimantan Barat. Selain itu, dalam pengembangan UMKM khususnya pelaku usaha syariah, Bank Indonesia bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat menyelenggarakan sosialisasi, halal corner, dan akselerasi pendampingan halal kepada UMKM, Rumah Potong Hewan (RPH), dan Rumah Potong Unggas (RPU). Tercatat 25 pelaku UMKM, 1 RPH, dan 1 RPU tersertifikasi halal melalui pendampingan tersebut.

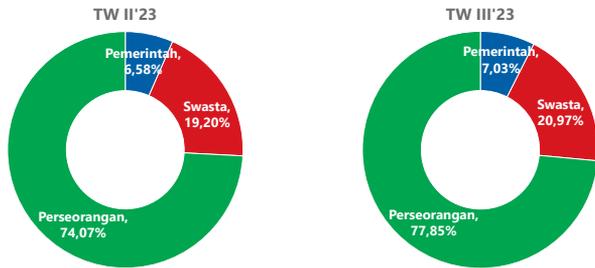
Berdasarkan sisi kepemilikan, DPK triwulan III 2023 tetap didominasi oleh segmen perseorangan. DPK perseorangan mendominasi DPK total Kalimantan Barat dengan pangsa sebesar 71,85%, menurun dibandingkan dengan triwulan II 2023 dengan pangsa 74,07%. Hal ini mencerminkan dari tingkat konsumsi perseorangan yang masih tertahan seiring tekanan inflasi yang menaikkan harga barang konsumsi maupun nonkonsumsi. Adopsi gaya hidup yang semakin hemat (*frugal living*) disinyalir turut mendorong masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Selain itu, faktor kenaikan suku bunga deposito juga menjadi salah satu *trigger* peningkatan DPK perseorangan. Berbanding terbalik dengan



Grafik 4.3. Posisi Valuta DPK Perbankan TW II 2023 (Rp triliun)

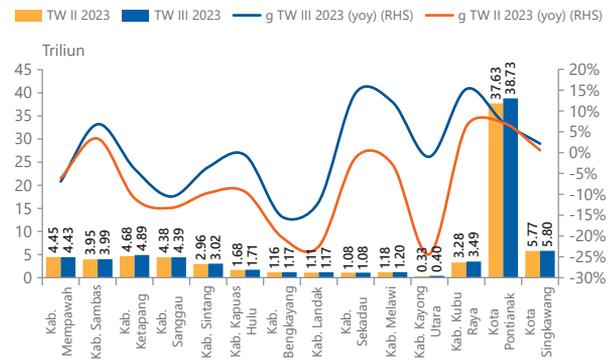


Grafik 4.4. Perkembangan DPK Perbankan Berdasarkan Kegiatan Bank



Grafik 4.5. Pangsa Penghimpunan DPK Kalimantan Barat berdasarkan Golongan Nasabah

perkembangan DPK perseorangan, pangsa DPK swasta justru meningkat dari 19,20% pada triwulan II 2023 menjadi 20,97% pada triwulan III 2023. Peningkatan pangsa DPK swasta tersebut disinyalir didorong kondisi ketidakpastian ekonomi global yang tinggi saat ini, sehingga mendorong sektor swasta untuk menahan belanja atau investasi. Sementara itu, pangsa DPK pemerintah juga meningkat pangasanya dari 6,58% di triwulan II 2023 menjadi 7,03% di triwulan III 2023. Hal ini seiring dengan tingkat pendapatan daerah yang meningkat. Merujuk data DJPb Provinsi Kalimantan Barat per akhir September 2023, pendapatan negara



Grafik 4.6. Pertumbuhan Penghimpunan DPK Kabupaten/ Kota di Kalimantan Barat

per September 2023 yaitu sekitar 8.666,51 miliar, artinya 71,73 persen dari target sudah terpenuhi.

Secara spasial, DPK Kalimantan Barat tetap terpusat di Kota Pontianak. Pada triwulan III 2023, pangsa DPK secara nominal untuk Kota Pontianak mencapai 51,31% (Rp38,73 triliun). Selanjutnya Kota Singkawang dengan pangsa 7,69% (Rp5,80 triliun) dan disusul oleh Kabupaten Ketapang dengan pangsa sebesar 6,48% (Rp4,89 triliun). Ketiga daerah tersebut menjadi pusat konsentrasi DPK karena merupakan pusat aktivitas industri dan perdagangan di Kalimantan Barat. Dari sisi pertumbuhan spasial pada triwulan III 2023, DPK

Tabel 4.2. Perkembangan nominal DPK Kalimantan Barat Per Kabupaten/Kota (Rp Triliun)

| Wilayah | 2020 | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III |
| Kalimantan Barat | 61,05 | 63,51 | 66,97 | 65,55 | 65,69 | 68,26 | 68,60 | 71,83 | 72,21 | 73,55 | 73,28 | 74,05 | 73,38 | 73,64 | 75,49 |
| Kab. Mempawah | 4,81 | 4,56 | 4,75 | 4,92 | 4,63 | 4,77 | 4,82 | 4,78 | 4,74 | 4,74 | 4,76 | 4,63 | 4,33 | 4,45 | 4,43 |
| Kab. Sambas | 3,27 | 3,33 | 3,60 | 3,59 | 3,53 | 3,68 | 3,83 | 3,92 | 3,79 | 3,82 | 3,74 | 3,97 | 4,03 | 3,95 | 3,99 |
| Kab. Ketapang | 3,80 | 4,12 | 4,34 | 4,37 | 4,48 | 4,83 | 4,64 | 4,98 | 5,08 | 5,25 | 5,09 | 4,86 | 4,68 | 4,68 | 4,89 |
| Kab. Sanggau | 3,18 | 3,34 | 3,45 | 3,56 | 3,77 | 4,04 | 4,23 | 4,87 | 4,94 | 5,05 | 4,90 | 4,76 | 4,43 | 4,38 | 4,39 |
| Kab. Sintang | 2,81 | 2,95 | 3,23 | 2,93 | 2,90 | 2,95 | 3,49 | 3,13 | 3,23 | 3,28 | 3,12 | 3,27 | 3,00 | 2,96 | 3,02 |
| Kab. Kapuas Hulu | 1,61 | 1,70 | 1,91 | 1,72 | 1,70 | 1,69 | 1,84 | 1,90 | 1,85 | 1,85 | 1,72 | 1,71 | 1,79 | 1,68 | 1,71 |
| Kab. Bengkayang | 1,15 | 1,23 | 1,36 | 1,25 | 1,24 | 1,35 | 1,28 | 1,42 | 1,33 | 1,45 | 1,39 | 1,31 | 1,21 | 1,16 | 1,17 |
| Kab. Landak | 1,01 | 1,08 | 1,20 | 1,11 | 1,15 | 1,08 | 1,30 | 1,37 | 1,41 | 1,44 | 1,33 | 1,17 | 1,18 | 1,11 | 1,17 |
| Kab. Sekadau | 0,71 | 0,85 | 0,98 | 0,84 | 0,89 | 0,94 | 0,91 | 0,98 | 0,96 | 1,09 | 0,94 | 0,94 | 1,11 | 1,08 | 1,08 |
| Kab. Melawi | 0,95 | 1,08 | 1,06 | 1,04 | 1,03 | 1,16 | 1,15 | 1,19 | 1,17 | 1,21 | 1,07 | 1,04 | 1,20 | 1,18 | 1,20 |
| Kab. Kayong Utara | 0,37 | 0,39 | 0,47 | 0,32 | 0,33 | 0,32 | 0,37 | 0,40 | 0,39 | 0,44 | 0,41 | 0,39 | 0,37 | 0,33 | 0,40 |
| Kab. Kubu Raya | 2,35 | 2,52 | 2,69 | 2,60 | 2,64 | 2,76 | 3,10 | 3,17 | 2,90 | 3,08 | 3,03 | 3,02 | 3,11 | 3,28 | 3,49 |
| Kota Pontianak | 30,04 | 31,14 | 32,53 | 32,11 | 32,09 | 33,17 | 32,02 | 34,23 | 34,75 | 35,10 | 36,09 | 37,10 | 37,19 | 37,63 | 38,73 |
| Kota Singkawang | 4,98 | 5,23 | 5,38 | 5,19 | 5,31 | 5,50 | 5,60 | 5,49 | 5,67 | 5,74 | 5,68 | 5,87 | 5,74 | 5,77 | 5,80 |

Sumber: Bank Indonesia Cognos, diolah

Kabupaten Kubu Raya tumbuh paling tinggi sebesar 15,27% (yoy), disusul oleh Kabupaten Sekadau yang tumbuh sebesar 14,34% (yoy) dan Kota Pontianak yang tumbuh 7,32% (yoy).

4.1.2. Penyaluran Kredit

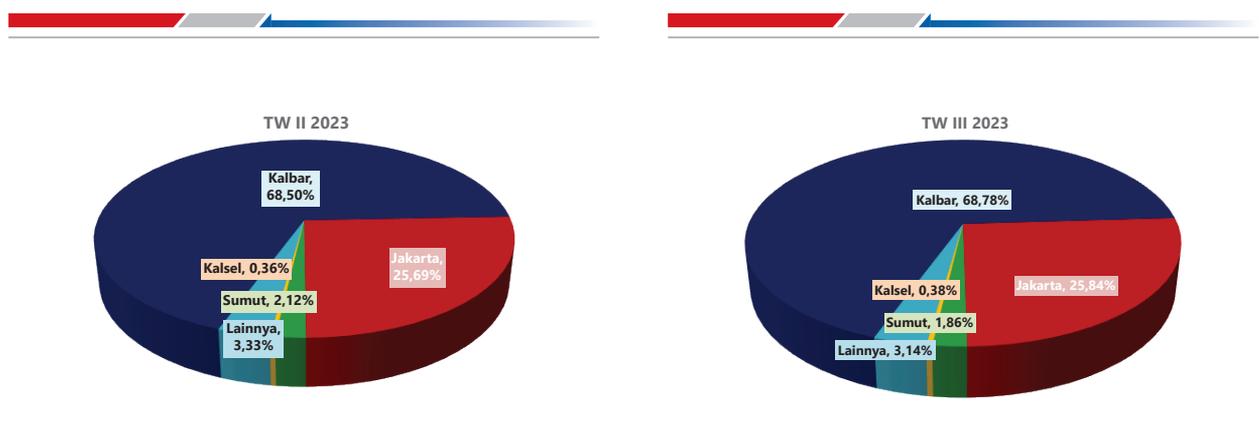
Penyaluran kredit oleh perbankan di Kalimantan Barat terus membaik pada triwulan III 2023. Penyaluran kredit pada periode laporan mencapai Rp90,67 triliun atau tumbuh 6,05% (yoy). Realisasi tersebut meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,96% (yoy). Realisasi penyaluran kredit tersebut berkontribusi sebesar 1,31% dari total penyaluran kredit perbankan nasional yang mencapai Rp6.908 triliun. Apabila dibandingkan dengan wilayah lainnya di Kalimantan, pangsa penyaluran kredit di Kalimantan Barat berada di posisi kedua setelah Kalimantan Timur. Pertumbuhan kredit pada triwulan

III 2023 di Kalimantan Barat ini didorong oleh konsumsi masyarakat yang terus bertumbuh meskipun dalam intensitas yang melambat. Selain itu, pertumbuhan kredit juga sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat pasca pencabutan status pandemi oleh Presiden sejak Juni 2023 dan juga percepatan beberapa PSN di Kalimantan Barat. Kebijakan Bank Indonesia terkait uang muka atau *down payment* (DP) nol persen untuk kredit kendaraan bermotor dan kredit kepemilikan rumah (KPR) hingga 31 Desember 2024 juga disinyalir turut mendorong pertumbuhan kredit di Kalimantan Barat.

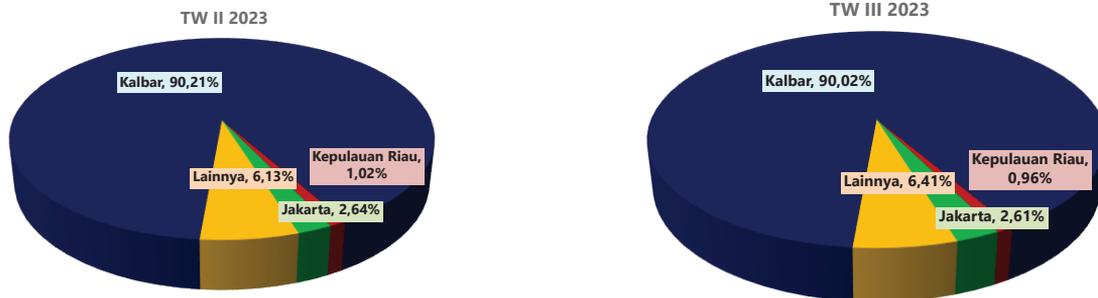
Penyaluran kredit berdasarkan lokasi proyek di Kalimantan Barat menunjukkan peningkatan. Total kredit yang disalurkan oleh perbankan yang berlokasi di Kalimantan Barat pada triwulan III 2023 tercatat sebesar Rp62,36 triliun atau sebesar 68,78% dari total kredit di Kalimantan Barat yang sebesar Rp90,66 triliun.

Tabel 4.3. Perkembangan Kredit Perbankan (Rp Triliun)

| Wilayah | 2022 | | | 2023 | | |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | II | III | IV | I | II | III |
| Kalimantan Barat | 86,57 | 85,49 | 86,40 | 87,33 | 89,13 | 90,67 |
| g Kalbar (% yoy) | 6,88 | 11,36 | 0,83 | 2,21 | 2,96 | 6,05 |
| Kalimantan Tengah | 65,07 | 68,92 | 69,41 | 69,48 | 73,11 | 75,68 |
| Kalimantan Selatan | 77,85 | 82,85 | 89,69 | 90,52 | 88,21 | 90,27 |
| Kalimantan Timur | 148,26 | 153,65 | 164,32 | 166,31 | 172,48 | 170,45 |
| Kalimantan Utara | 14,08 | 14,24 | 14,33 | 14,92 | 15,18 | 17,58 |
| Nasional | 6.236 | 6.338 | 6.498 | 6.517 | 6.723 | 6.908 |
| g Nasional (% yoy) | 10,48 | 11,04 | 11,63 | 10,16 | 7,80 | 8,99 |



Grafik 4.7. Lokasi Bank Asal Penyalur Kredit berdasarkan Lokasi Proyek di Kalimantan Barat



Grafik 4.8. Lokasi Penyaluran Kredit oleh Perbankan Asal Kalimantan Barat

Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan posisi triwulan II 2023 yang sebesar Rp61,06 triliun. Sisa kredit pada triwulan III 2023 disalurkan oleh perbankan yang berlokasi di provinsi lain terutama DKI Jakarta sebesar Rp23,42 triliun (pangsa 25,84%).

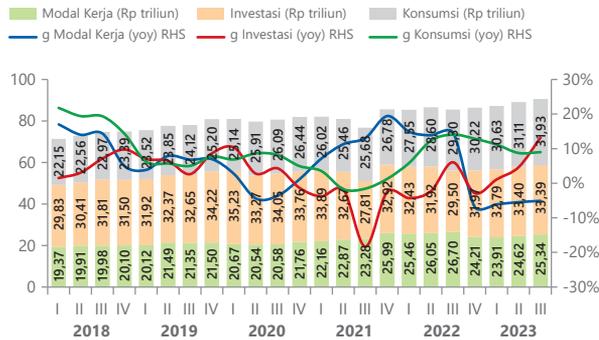
Di sisi lain, perbankan yang berlokasi di Kalimantan Barat menyalurkan kredit sebesar Rp6,92 triliun ke provinsi di luar Kalimantan Barat. Penyaluran kredit ke provinsi lain tersebut sekitar 9,98% dari total kredit Rp69,28 triliun yang disalurkan oleh perbankan umum yang berlokasi di Kalimantan Barat pada triwulan III 2023. Pangsa tersebut meningkat dibandingkan dengan triwulan II 2023 yang tercatat sebesar 9,79%. Pangsa terbesar disalurkan ke DKI Jakarta dan Provinsi Sumatra Barat masing-masing sebesar Rp1,81 triliun (pangsa 2,61%) dan Rp0,70 triliun (pangsa 1,02%).

Berdasarkan jenis penggunaannya, kredit produktif masih mendominasi penyaluran kredit pada triwulan III 2023. Nilai kredit produktif yang disalurkan mencapai Rp58,73 triliun (pangsa 64,78%) yang terdiri dari kredit investasi sebesar Rp33,39 triliun (pangsa 36,83%) serta kredit modal kerja sebesar Rp25,34 triliun (pangsa 27,95%). Sementara itu, penyaluran kredit konsumsi adalah sebesar Rp31,93 triliun (pangsa 35,22%).

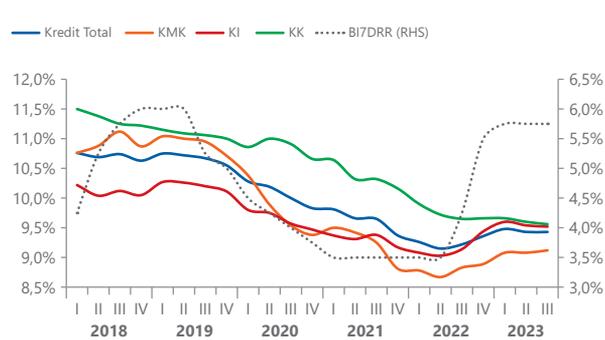
Pertumbuhan kredit pada triwulan III 2023 terutama didorong oleh pertumbuhan kredit investasi yang tumbuh 13,19% (yoy). Pertumbuhan kredit investasi tersebut lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 4,64% (yoy). Peningkatan kinerja kredit

investasi salah satunya didorong oleh percepatan beberapa PSN di Kalimantan Barat, antara lain percepatan investasi *refinery* alumina PT BAI. Kondisi pelarangan ekspor bauksit sejak Juni 2023 mulai berdampak beberapa perusahaan merealisasikan investasi melalui pembangunan *refinery* alumina. Selain itu, berdasarkan hasil liaison yang dilakukan oleh Bank Indonesia, aktivitas investasi oleh pelaku usaha perkebunan dan industri pengolahan CPO terus berlanjut khususnya di kabupaten sentra produksi utama seperti Kabupaten Ketapang. Sejalan dengan perbaikan kredit investasi, kredit modal kerja juga membaik meskipun masih terkontraksi. Kontraksi kredit modal kerja tersebut tidak terlepas dari kondisi perekonomian yang penuh ketidakpastian antara lain karena harga komoditas dan permintaan global yang menurun khususnya negara mitra dagang utama yaitu Tiongkok.

Adapun kredit konsumsi tetap tumbuh positif sebesar 9,00% (yoy), meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 8,75% (yoy). Pertumbuhan kredit konsumsi ini mencerminkan perbaikan aktivitas konsumsi masyarakat sejalan dengan kebijakan pemerintah yang secara resmi mencabut status pandemi sejak Juni 2023. Selain itu, peningkatan kredit konsumsi pada periode laporan juga dipengaruhi oleh Kebijakan Bank Indonesia terkait uang muka atau *Down Payment* (DP) nol persen untuk kredit kendaraan bermotor dan kredit pemilikan rumah (KPR) yang akan berlaku hingga 31 Desember 2024. Peningkatan kredit konsumsi ini sejalan dengan Indeks



Grafik 4.9. Jenis Kredit Perbankan di Kalimantan Barat

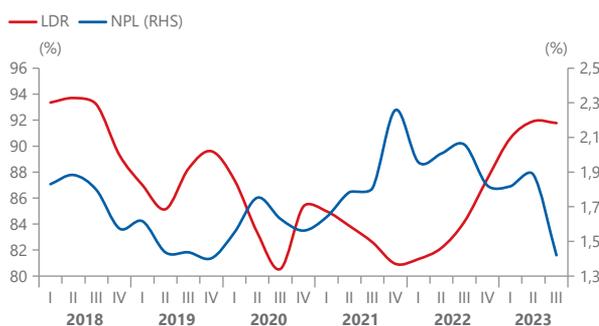


Grafik 4.10. Suku Bunga Tertimbang (SBT) Kredit Perbankan di Kalimantan Barat

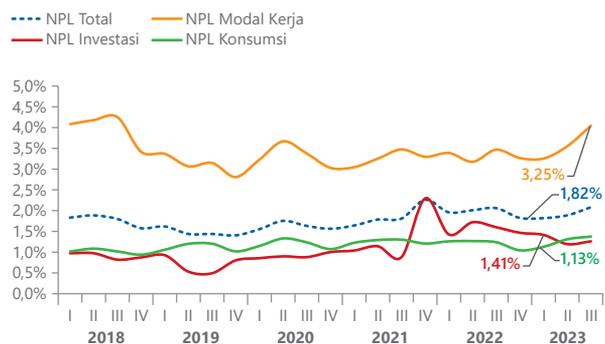
Harga Properti Residensial (IHPR) triwulan III 2023 di Kalimantan Barat tercatat naik sebesar 11,38% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan dengan kenaikan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 11,32% (yoy).

Kebijakan Bank Indonesia yang menahan kenaikan suku bunga BI7DRR turut menjaga pertumbuhan kredit perbankan tetap positif. Kebijakan BI yang menahan BI7DRR di level 5,75% per triwulan III 2023 lalu konsisten dengan *stance* kebijakan moneter untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam kisaran sasaran 3,0±1% pada sisa tahun 2023 dan 2,5±1% pada 2024. Fokus kebijakan diarahkan pada penguatan stabilisasi nilai Rupiah untuk mengendalikan inflasi barang impor (*imported inflation*) dan memitigasi dampak rambatan ketidakpastian pasar keuangan global. Suku bunga perbankan saat ini masih kondusif

dalam mendukung pemulihan ekonomi di Kalimantan Barat. Kenaikan suku bunga perbankan terutama suku bunga kredit, relatif terbatas dibandingkan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Bahkan beberapa bank terindikasi menurunkan suku bunga (khususnya kredit konsumsi dan kredit investasi) guna menarik lebih banyak kredit. Hal tersebut dipengaruhi likuiditas yang masih longgar. Suku bunga tertimbang (SBT) kredit di Kalimantan Barat pada triwulan III 2023 tidak mengalami perubahan dibanding triwulan sebelumnya yaitu sebesar 9,43%. Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan jenis penggunaannya, SBT pada kredit konsumsi dan kredit investasi mengalami penurunan masing-masing menjadi sebesar 9,56% dan 9,52% pada triwulan III 2023. Sedangkan SBT kredit modal kerja meningkat menjadi sebesar 9,12%.



Grafik 4.11. Perkembangan LDR dan Rasio NPL Perbankan



Grafik 4.12. Perkembangan Rasio NPL Perbankan Berdasarkan Jenis Penggunaan



Dari sisi kualitas kredit, **Non-Performing Loan (NPL)** kredit perbankan di Kalimantan Barat pada triwulan III 2023 dalam level terjaga (di bawah **threshold** 5%). Level NPL yang rendah dan terjaga tersebut didorong oleh semua jenis penggunaan kredit. NPL kredit modal kerja meningkat dari sebelumnya 3,55% menjadi 4,04%, NPL kredit konsumsi naik dari 1,31% menjadi 1,38%, dan NPL kredit investasi naik dari 1,19% menjadi 1,26%. Adapun tingkat intermediasi perbankan yang diindikasikan oleh *Loan to Deposit Ratio* tercatat sedikit menurun dari 91,92% menjadi 91,77% sejalan dengan pertumbuhan tingkat konsumsi masyarakat yang tidak setinggi triwulan sebelumnya.

Secara spasial, penyaluran kredit di Kalimantan Barat didominasi oleh Kota Pontianak. Kota Pontianak memiliki kontribusi sebesar 26,22% (Rp23,77 triliun) dari total kredit di Kalimantan Barat, disusul oleh Kabupaten Ketapang sebesar 14,46% (Rp13,10 triliun), dan Kabupaten Sintang 9,57% (Rp8,67 triliun). Proporsi tersebut relatif sama dibandingkan periode sebelumnya. Sementara itu, daerah dengan pangsa penyaluran kredit terendah di Kalimantan Barat pada triwulan III 2023 adalah Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Melawi, dengan besaran kredit masing-masing Rp605 miliar (pangsa 0,67%) dan Rp2,25 triliun (pangsa 2,48%).

Dari sisi pertumbuhan kredit, Kabupaten Ketapang merupakan daerah dengan pertumbuhan kredit paling tinggi. Penyaluran kredit di Kabupaten Ketapang tercatat sebesar 24,72% (yoy), disusul oleh Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Melawi dengan pertumbuhan kredit masing-masing 14,41% (yoy) dan 12,49% (yoy). Pada periode laporan, pertumbuhan penyaluran kredit negatif terjadi di daerah Kabupaten Mempawah yaitu sebesar -15,02% (yoy). Berdasarkan risiko kredit, hampir seluruh kabupaten/kota masih mencatatkan NPL yang rendah. Tercatat NPL tertinggi (namun masih di bawah **threshold**) terjadi di Kabupaten Bengkayang yang mencapai 2,67% pada triwulan III 2023.

Berdasarkan kegiatan bank, perbankan konvensional masih mendominasi penyaluran kredit di Kalimantan Barat. Total penyaluran kredit perbankan konvensional mencapai Rp82,41 triliun (pangsa 90,89%), jauh di atas perbankan syariah yang menyalurkan sebesar Rp8,26 triliun (pangsa 9,11%). Pada triwulan laporan, kredit perbankan konvensional mengalami perbaikan dari sebelumnya tumbuh 2,21% (yoy) menjadi 5,81% (yoy). Sementara perbankan syariah tetap tumbuh meskipun melambat yaitu dari 11,08% (yoy) menjadi 8,48% (yoy). Hal ini menandakan perbankan syariah di Kalimantan Barat memiliki kinerja yang baik dan stabil

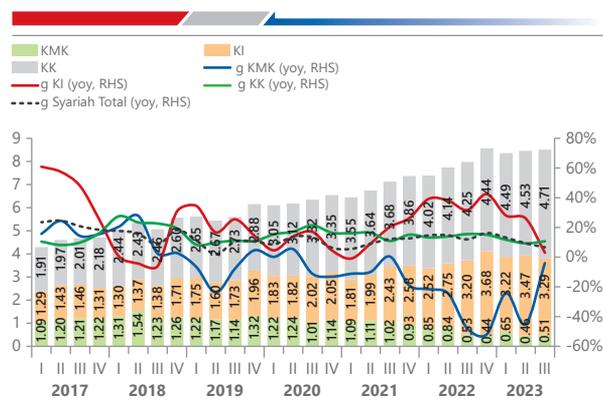
Tabel 4.4. Perkembangan Nominal Kredit Berdasarkan Kabupaten/Kota (Rp Miliar)

| Wilayah | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III |
| Kalimantan Barat | 82.066 | 81.000 | 76.772 | 85.688 | 85.438 | 86.575 | 85.493 | 86.401 | 87.327 | 89.135 | 90.666 |
| Kab. Mempawah | 9.482 | 9.154 | 8.357 | 9.282 | 9.124 | 9.168 | 8.016 | 6.745 | 6.776 | 6.824 | 6.812 |
| Kab. Sambas | 3.501 | 3.582 | 3.391 | 3.832 | 3.777 | 3.797 | 3.887 | 4.201 | 4.137 | 4.212 | 4.197 |
| Kab. Ketapang | 10.504 | 9.686 | 8.757 | 10.590 | 10.679 | 10.557 | 10.510 | 10.975 | 10.900 | 12.396 | 13.108 |
| Kab. Sanggau | 6.161 | 6.146 | 4.406 | 5.771 | 5.928 | 5.904 | 5.927 | 5.883 | 5.864 | 6.117 | 5.937 |
| Kab. Sintang | 9.075 | 8.886 | 7.927 | 9.693 | 9.675 | 9.666 | 8.820 | 8.810 | 8.605 | 8.668 | 8.677 |
| Kab. Kapuas Hulu | 4.154 | 4.217 | 3.828 | 5.371 | 5.419 | 5.486 | 5.531 | 5.565 | 6.436 | 6.011 | 5.994 |
| Kab. Bengkayang | 3.384 | 3.275 | 1.882 | 2.267 | 2.334 | 2.539 | 2.564 | 2.598 | 2.633 | 2.481 | 2.503 |
| Kab. Landak | 2.051 | 2.053 | 2.230 | 2.404 | 2.209 | 2.305 | 2.404 | 2.480 | 2.577 | 2.608 | 2.613 |
| Kab. Sekadau | 988 | 1.228 | 2.217 | 2.903 | 2.766 | 3.068 | 3.084 | 3.107 | 3.388 | 3.410 | 3.401 |
| Kab. Melawi | 1.674 | 1.672 | 1.742 | 1.886 | 1.939 | 2.067 | 2.000 | 2.038 | 2.090 | 2.124 | 2.250 |
| Kab. Kayong Utara | 1.023 | 446 | 454 | 500 | 487 | 515 | 528 | 616 | 577 | 583 | 605 |
| Kab. Kubu Raya | 6.572 | 6.644 | 6.553 | 6.573 | 6.445 | 6.599 | 6.717 | 6.957 | 7.011 | 7.317 | 7.431 |
| Kota Pontianak | 20.735 | 21.256 | 22.206 | 21.747 | 21.718 | 21.909 | 22.444 | 23.260 | 23.162 | 23.164 | 23.775 |
| Kota Singkawang | 2.762 | 2.755 | 2.824 | 2.869 | 2.937 | 2.995 | 3.062 | 3.166 | 3.171 | 3.220 | 3.362 |

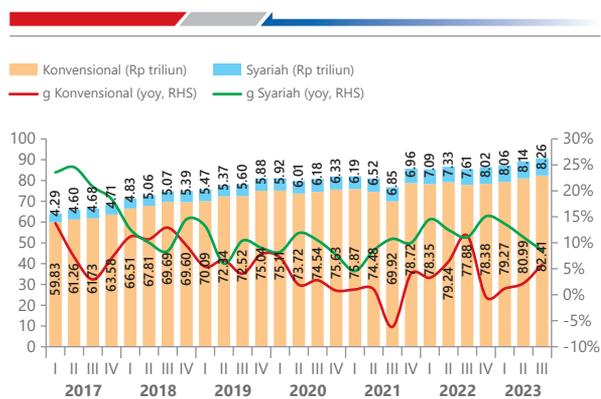
Tabel 4.5. Perkembangan NPL Berdasarkan Kabupaten/Kota

| Wilayah | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III |
| Kalimantan Barat | 1,64% | 1,78% | 1,81% | 2,26% | 1,96% | 2,01% | 2,06% | 1,82% | 1,38% | 1,35% | 1,42% |
| Kab. Mempawah | 1,81% | 1,84% | 1,85% | 3,22% | 1,78% | 2,03% | 2,23% | 2,33% | 2,28% | 1,44% | 1,99% |
| Kab. Sambas | 0,54% | 0,69% | 0,86% | 0,66% | 0,75% | 0,84% | 0,86% | 0,70% | 0,68% | 0,73% | 1,22% |
| Kab. Ketapang | 0,62% | 0,79% | 0,98% | 2,78% | 2,79% | 2,79% | 2,77% | 2,68% | 2,82% | 2,69% | 2,28% |
| Kab. Sanggau | 0,70% | 0,67% | 0,97% | 0,65% | 0,95% | 1,24% | 1,42% | 2,50% | 2,74% | 2,48% | 1,37% |
| Kab. Sintang | 0,77% | 0,91% | 0,94% | 0,78% | 0,75% | 0,78% | 1,19% | 0,84% | 0,84% | 0,88% | 0,95% |
| Kab. Kapuas Hulu | 0,57% | 0,55% | 0,68% | 0,46% | 0,57% | 0,57% | 0,63% | 0,80% | 0,82% | 0,85% | 0,83% |
| Kab. Bengkayang | 0,95% | 1,00% | 1,74% | 1,40% | 1,56% | 1,72% | 1,73% | 1,48% | 1,82% | 2,08% | 2,67% |
| Kab. Landak | 1,82% | 1,72% | 1,91% | 1,63% | 1,60% | 1,90% | 1,66% | 1,57% | 1,55% | 1,42% | 1,50% |
| Kab. Sekadau | 1,09% | 0,85% | 0,45% | 0,32% | 0,37% | 0,36% | 0,33% | 0,37% | 0,42% | 0,49% | 0,46% |
| Kab. Melawi | 1,30% | 1,74% | 1,49% | 1,43% | 1,78% | 1,59% | 1,67% | 1,72% | 1,65% | 1,97% | 1,67% |
| Kab. Kayong Utara | 0,33% | 0,69% | 0,69% | 0,62% | 0,66% | 0,71% | 0,76% | 0,59% | 0,71% | 0,63% | 0,63% |
| Kab. Kubu Raya | 1,07% | 1,04% | 1,03% | 4,35% | 0,89% | 2,20% | 0,98% | 0,77% | 0,82% | 1,17% | 1,31% |
| Kota Pontianak | 3,57% | 3,82% | 3,36% | 3,43% | 3,69% | 3,31% | 3,52% | 2,63% | 2,46% | 2,53% | 0,00% |
| Kota Singkawang | 1,40% | 1,40% | 1,66% | 1,32% | 1,49% | 1,36% | 1,45% | 1,16% | 1,38% | 1,35% | 1,42% |

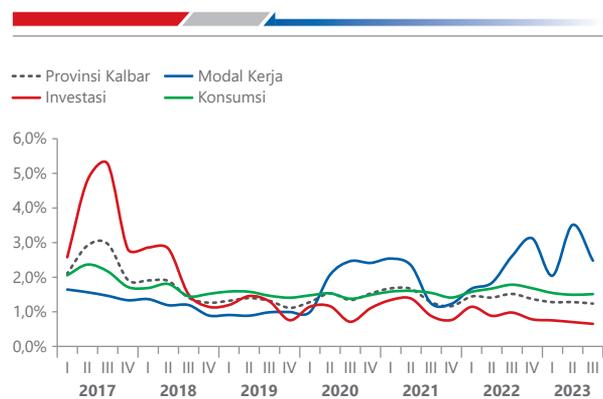
di tengah kondisi perekonomian yang menantang, meskipun melambat dalam 2 (dua) triwulan terakhir. Pertumbuhan perbankan syariah tersebut diikuti dengan tren peningkatan pangsa pembiayaan syariah yang konsisten sejak awal 2020. Pertumbuhan pembiayaan syariah tersebut terutama didorong oleh peningkatan pertumbuhan pembiayaan konsumsi. Dari sisi kualitas pembiayaan syariah, seluruh jenis pembiayaan memiliki tingkat *non-performing finance* (NPF) yang sehat dan terjaga yaitu di bawah *threshold* 5%.



Grafik 4.14. Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Jenis Penggunaan



Grafik 4.13. Perkembangan Pembiayaan Perbankan Berdasarkan Kegiatan Bank

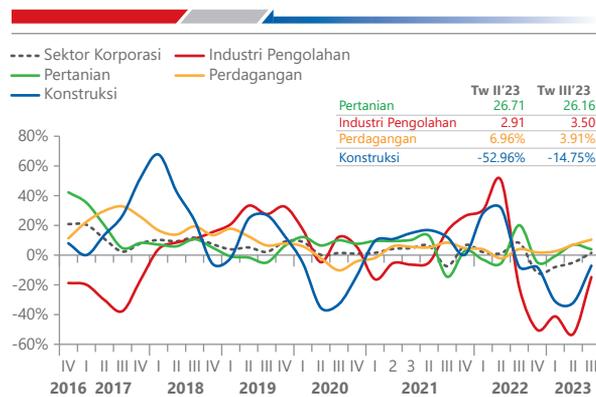


Grafik 4.15. Perkembangan Non Performing Finance (NPF) Pembiayaan Syariah

Secara spasial, perkembangan NPF pembiayaan syariah triwulan III 2023 di Kalimantan Barat juga terjaga dengan baik. Apabila dilihat dari sisi kualitas pembiayaan, kerentanan tertinggi berada di Kabupaten Mempawah dengan tingkat NPF sebesar 3,21% pada triwulan III 2023, menurun dari triwulan sebelumnya dengan tingkat NPF sebesar 3,26%.

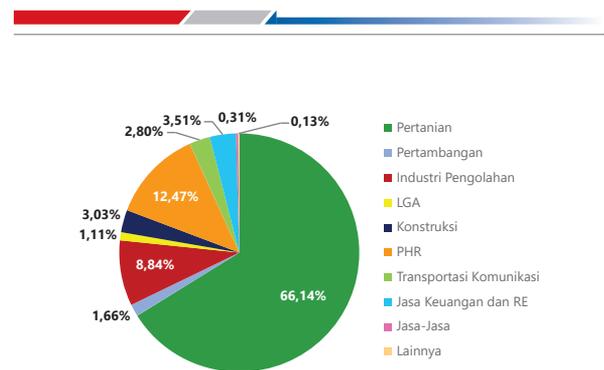
4.2. KETAHANAN SEKTOR KORPORASI⁵

Kinerja sektor korporasi Kalimantan Barat pada triwulan III 2023 yang terindikasi dari sisi pembiayaan masih berkontraksi namun membaik. Hal tersebut tercermin dari penyaluran kredit kepada sektor korporasi mencapai Rp39,55 triliun atau tumbuh sebesar 1,53% (yoy), membaik dibanding periode sebelumnya yang sebesar -4,80% (yoy). Pertumbuhan tersebut terutama bersumber dari peningkatan kredit sektor industri pengolahan, konstruksi, dan LGA (listrik, gas, dan air bersih). Pertumbuhan ketiga sektor tersebut masing-masing sebesar -14,75% (yoy), -7,09% (yoy) dan 6,43% (yoy), dari sebelumnya -52,96% (yoy), -31,93% (yoy) dan -2,90% (yoy). Perbaikan



Grafik 4.16. Pertumbuhan Kredit Korporasi Sektor Ekonomi Utama Kalbar

5. Mulai triwulan I 2016, kredit kepada sektor korporasi dipersempit pengertiannya dengan mengeluarkan beberapa unsur berdasarkan golongan pemilik yakni (i) penduduk yang merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah serta badan-badan dan lembaga-lembaga pemerintah, (ii) bukan penduduk, dan (iii) bank. Selain itu, untuk pembahasan ketahanan sektor korporasi juga ditambahkan perhitungan DPK dengan berdasarkan penggolongan pemilik yang sama.

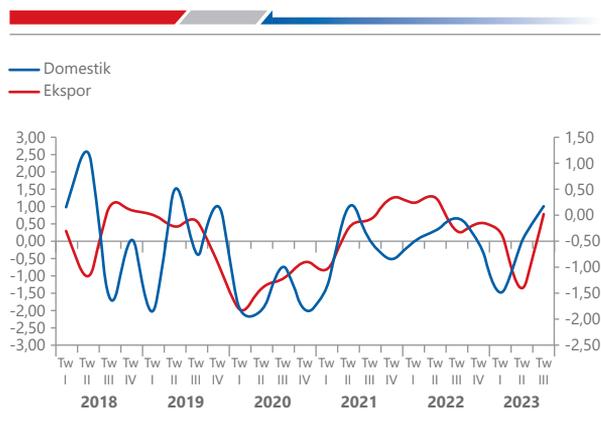


Grafik 4.17. Komposisi Kredit Korporasi Berdasarkan Sektor Ekonomi

pembiayaan ke sektor industri pengolahan, meskipun masih berkontraksi, salah satunya didorong oleh perbaikan harga CPO di Kalimantan Barat meskipun masih dalam level yang terbatas. Sementara itu, peningkatan pembiayaan ke sektor konstruksi salah satunya didorong oleh berlanjutnya konstruksi proyek pemerintah seperti duplikasi Jembatan Kapuas I, proyek pembangunan *refinery* alumina, Jembatan Sungai Sambas Besar, serta pelebaran maupun perbaikan jalan provinsi dan kab/kota.

Kredit korporasi di Kalimantan Barat mayoritas disalurkan ke sektor pertanian. Berdasarkan pangsa, mayoritas kredit korporasi disalurkan pada lapangan usaha ekonomi utama Kalimantan Barat, yaitu pertanian sebesar Rp26,16 triliun (pangsa 66,14%), perdagangan, hotel, dan restoran Rp4,93 triliun (pangsa 12,47%), dan industri pengolahan Rp3,50 triliun (pangsa 8,84%).

Sejalan dengan pembiayaan ke sektor korporasi yang tumbuh meningkat, kinerja korporasi secara umum di Kalimantan Barat pada Triwulan III 2023 juga menunjukkan peningkatan. Hal ini terindikasi dari hasil *liaison* yang menunjukkan peningkatan *likert scale* penjualan domestik dan penjualan. Peningkatan *likert scale* penjualan domestik didorong oleh kinerja konsumsi rumah tangga yang membaik pada berbagai komoditas utama khususnya di sektor transportasi dan pergudangan terutama subsektor angkutan udara. Pada tahun 2023 peningkatan *global traffic* mencapai 80% dibandingkan dengan masa pra pandemi. Adapun

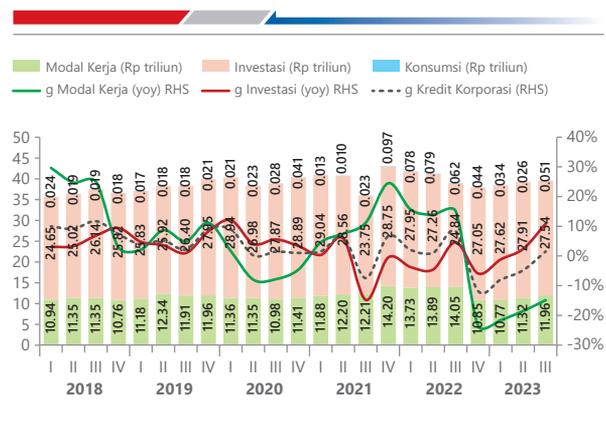


Grafik 4.18. Perkembangan Likert Scale Penjualan Domestik

peningkatan *likert scale* penjualan ekspor terutama terjadi pada sektor akomodasi dan makan-minum seiring dengan pembukaan PLBN *cross-border* dari Malaysia. Selain itu, *likert scale* investasi korporasi juga meningkat khususnya di sektor perdagangan besar dimana beberapa perusahaan terindikasi melakukan ekspansi usaha.

Berdasarkan jenis penggunaan, mayoritas kredit sektor korporasi pada triwulan III 2023 disalurkan untuk investasi dengan nilai sebesar Rp27,53 triliun (pangsa 69,92%) dan modal kerja sebesar Rp11,96 triliun (pangsa 30,25%). Berdasarkan pertumbuhan, penyaluran kredit korporasi dalam bentuk Kredit Investasi (KI) dan Kredit Modal Kerja (KMK) masing-masing tumbuh sebesar 10,85% (yoy) dan -14,86% (yoy) pada triwulan III 2023. Angka tersebut mengalami sedikit perbaikan periode sebelumnya yang masing-masing sebesar 2,38% dan -18,53% (yoy).

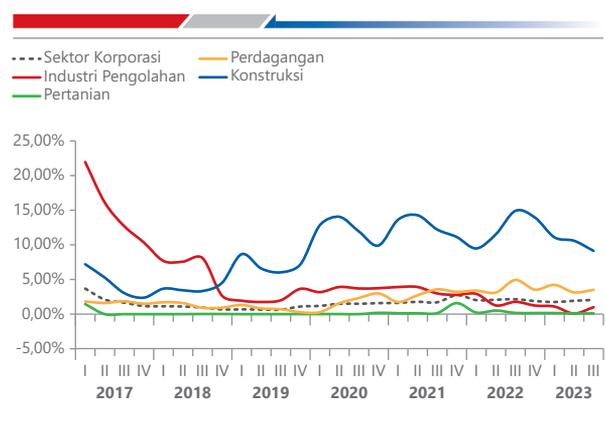
Berdasarkan lokasi proyek, daerah-daerah yang menerima kredit korporasi terbesar adalah Kota Pontianak, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Sintang masing-masing sebesar Rp11,41 triliun (pangsa 28,85%), Rp8,29 triliun (pangsa 20,97%), dan Rp4,70 triliun (pangsa 11,88%). Peningkatan pertumbuhan kredit korporasi triwulan III 2023 di Kalimantan Barat terutama disebabkan oleh perbaikan kinerja penyaluran kredit korporasi di Kabupaten Kayong Utara yang meningkat sebesar 322,66% (yoy) dan Kabupaten Ketapang yang meningkat 31,17% (yoy). Peningkatan pertumbuhan kredit korporasi yang lebih tinggi tertahan terutama oleh penurunan



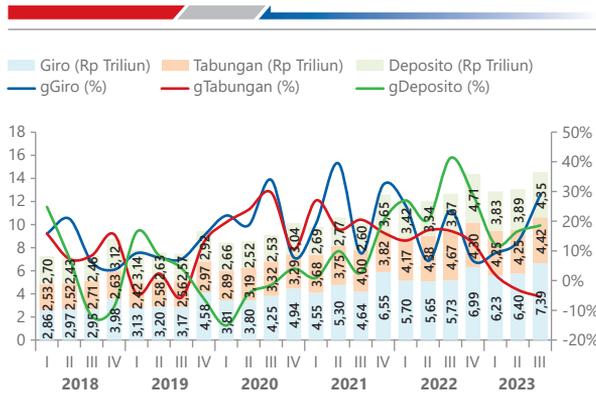
Grafik 4.19. Penyaluran Kredit kepada Sektor Korporasi di Kalimantan Barat Berdasarkan Jenis Penggunaan

kinerja penyaluran kredit di Kabupaten Bengkayang dan Mempawah.

Kualitas kredit korporasi pada triwulan III 2023 berada pada level yang aman dan terjaga. Hal ini tercermin dari rasio NPL sebesar 2,05% atau menurun kualitas kreditnya dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 1,93%. Rasio NPL tersebut masih dalam batas aman di bawah *threshold* 5%. Berdasarkan sektor ekonomi, realisasi rasio NPL tersebut terutama didorong oleh kondisi NPL yang terjaga dari sektor pertanian, industri pengolahan, pertambangan, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, dan jasa-jasa. Namun demikian, perlu terus diwaspadai tingkat NPL beberapa sektor yang masih di atas *threshold* yaitu sektor listrik, gas, dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, dan sektor keuangan.

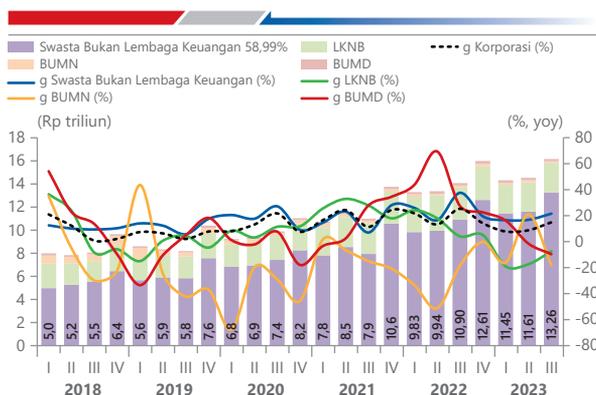


Grafik 4.20. NPL Kredit kepada Sektor Korporasi di Kalimantan Barat

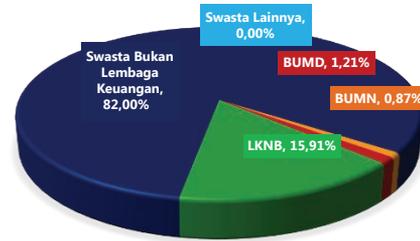


Grafik 4.21. Perkembangan Jenis DPK Korporasi Kalimantan Barat

Di tengah aktivitas usaha di Kalimantan Barat pada triwulan III 2023 yang meningkat, DPK sektor korporasi tumbuh meningkat. Pada periode laporan, DPK korporasi pada perbankan di Kalimantan Barat tercatat sebesar Rp14,20 triliun, tumbuh sebesar 14,84% (yoy) atau meningkat dibandingkan dengan triwulan II 2023 sebesar 8,71% (yoy). Pertumbuhan DPK korporasi terutama didorong oleh giro dan deposito. Giro tumbuh sebesar 28,92% (yoy) atau meningkat dibanding triwulan II 2023 yang sebesar 13,17% (yoy). Sementara itu, deposito tumbuh dari 16,65% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 18,61% (yoy) pada triwulan laporan. Adapun tabungan mengalami kontraksi sebesar -5,40% (yoy). Peningkatan giro dan deposito di segmen korporasi menunjukkan bahwa pelaku usaha cenderung *wait and see* di tengah kondisi ketidakpastian global.



Grafik 4.22. Perkembangan DPK Sektor Korporasi pada KC/ KCP di Kalimantan Barat Berdasarkan Golongan Pemilik



Grafik 4.23. Pangsa DPK Sektor Korporasi pada KC/KCP di Kalimantan Barat Berdasarkan Golongan Pemilik

Berdasarkan golongan pemilik, mayoritas DPK tetap disumbangkan oleh korporasi sektor swasta - bukan lembaga keuangan. Penghimpunan dana dari sektor swasta - bukan lembaga keuangan pada triwulan III 2023 mencapai Rp13,26 triliun (pangsa 82,00% dari DPK Korporasi), atau tumbuh sebesar 21,57% (yoy). Realisasi tersebut meningkat dibandingkan dengan triwulan II 2023 yang sebesar 8,71% (yoy).

4.3. KETAHANAN SEKTOR RUMAH TANGGA⁶

Pada triwulan III 2023, sektor Rumah Tangga (RT) di Kalimantan Barat terus bertumbuh positif. Hal ini tercermin dari realisasi pertumbuhan konsumsi RT pada PDRB Kalimantan Barat sebesar 4,20% (yoy) pada triwulan III 2023. Selain itu, konsumsi rumah tangga juga masih mendominasi pangsa PDRB Kalimantan dari sisi pengeluaran sebesar 48,66%. Kinerja konsumsi rumah tangga didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat yang tercermin dari peningkatan jumlah penumpang angkutan udara dan laut. Berdasarkan data BPS per September 2023, penumpang yang datang ke Kalimantan Barat melalui angkutan udara dan angkutan laut tercatat meningkat

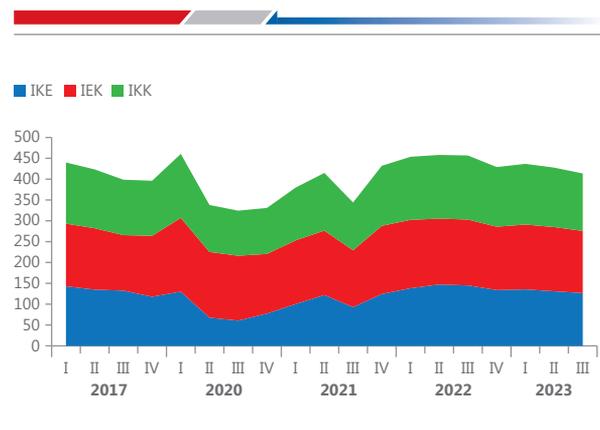
6. Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, tidak cukup hanya melihat ketahanan individu. Interkoneksi yang terjadi antara komponen juga perlu dilihat untuk memitigasi terjadinya risiko sistemik. Di Kalimantan Barat, rumah tangga merupakan salah satu komponen penting dalam perekonomian dan sistem keuangan baik dari sisi kontribusi maupun keterkaitannya dengan perbankan, pemerintah, lembaga keuangan lainnya dan korporasi.

masing-masing sebesar 15,87% (yoy) dan 1,42% (yoy). Selain itu, jumlah Wisman di Kalimantan Barat posisi per September 2023 juga mengalami peningkatan sebesar 43,11% (yoy). Kunjungan wisman yang melalui jalur darat paling banyak yaitu melalui pintu masuk Entikong, kemudian diikuti dengan pintu masuk Aruk dan pintu masuk Nanga Badau.

Perbaikan ini juga tercermin dari hasil Survei Konsumen Bank Indonesia Kalimantan Barat dimana optimisme terhadap kondisi ekonomi secara umum sepanjang triwulan III 2023 terus terjaga. Indeks Ekspektasi Penghasilan masih berada di level yang optimis, meskipun menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja juga mengalami peningkatan. Indeks Ekspektasi Penghasilan, pada triwulan III 2023 sebesar 138,50, masih pada level optimis walau sedikit menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 142,33. Sementara Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja, pada triwulan III 2023 sebesar 142,80, meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 136,66. Searah dengan hal tersebut, Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) yang mencerminkan kondisi ekonomi saat ini dibandingkan dengan 6 bulan sebelumnya, menunjukkan optimisme yang terjaga sepanjang triwulan III 2023 rata-rata sebesar 114,17, meskipun menurun dibandingkan rata-rata triwulan sebelumnya sebesar 118,05. Perbaikan juga tercermin dari Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang mengindikasikan ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi 6 bulan yang akan datang.



Grafik 4.24. Perkembangan Indeks Penghasilan dan Ketersediaan Lapangan Kerja di Kalimantan Barat

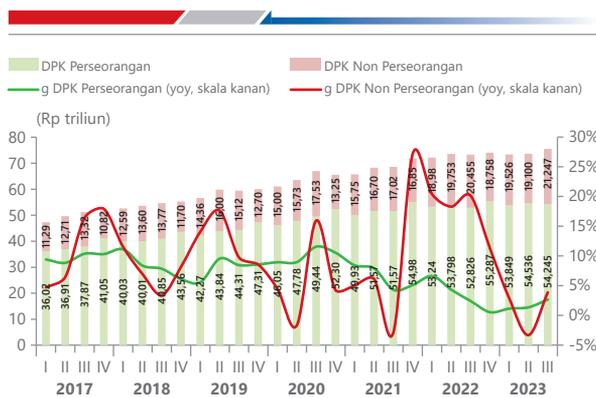


Grafik 4.25. Perkembangan IKK, IKE, dan IEK Survei Konsumen di Kalimantan Barat

IEK di sepanjang triwulan III 2023 rata-rata sebesar 134,17 atau sedikit menurun dibandingkan triwulan II 2023 yang sebesar 138,71. Selanjutnya, perbaikan optimisme konsumen juga tercermin dari peningkatan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang secara rata-rata tercatat sebesar 124,17 pada triwulan III 2023, menurun dari rata-rata triwulan sebelumnya sebesar 128,38.

Adapun realisasi DPK perbankan di Kalimantan Barat yang berasal dari nasabah perseorangan tercatat sebesar Rp54,24 triliun atau tumbuh meningkat sebesar 2,68% (yoy). Peningkatan pertumbuhan tersebut meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 1,37% (yoy). Peningkatan tersebut terutama didorong oleh perbaikan pertumbuhan giro dan deposito. Peningkatan giro dan deposito perseorangan ini disinyalir didorong oleh kenaikan suku bunga giro dan deposito seiring dengan BI7DRR yang masih berada di level suku bunga tinggi. Dana perseorangan masih mendominasi DPK perbankan di Kalimantan Barat dengan pangsa 71,85%.

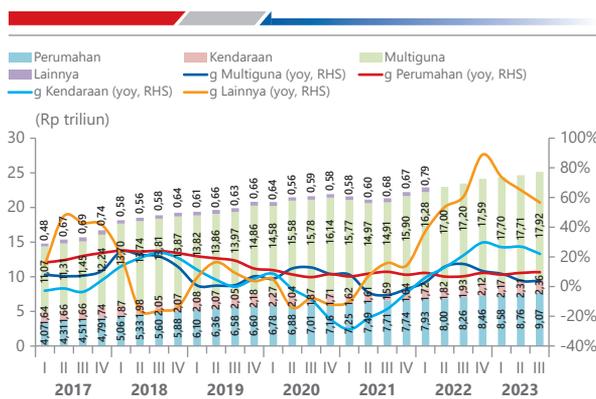
Sementara itu, jumlah penyaluran kredit kepada debitur perseorangan pada triwulan III 2023 mengalami perlambatan. Kredit perseorangan tercatat sebesar Rp31,88 triliun atau tumbuh sebesar 9,06% (yoy). Pertumbuhan tersebut meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 8,97% (yoy). Peningkatan kredit RT terutama terjadi pada kredit kepemilikan ruko/rukan dan kredit peralatan



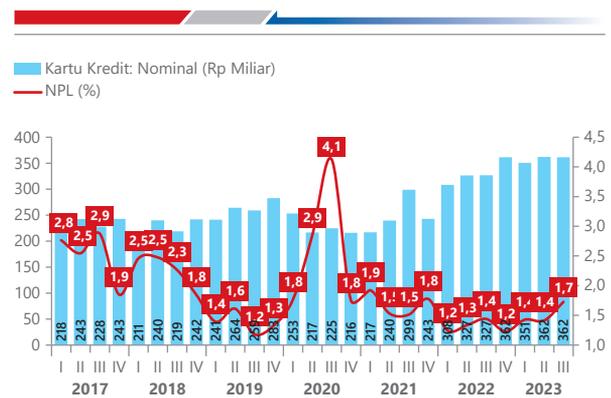
Grafik 4.26. Pertumbuhan DPK Perseorangan Berdasarkan Jenis Penempatan

rumah tangga. Merujuk hasil liaison, hal ini disebabkan oleh perkembangan harga TBS Kalimantan Barat yang mulai menunjukkan perbaikan meskipun dalam level terbatas. Hal ini kemudian mendorong permintaan pembiayaan ruko/rukan karena kapasitas untuk membayar angsuran meningkat. Mata pencaharian masyarakat Kalimantan Barat didominasi di sektor perkebunan sawit, maka perkembangan harga sawit global berdampak pada tingkat permintaan pembiayaan di sektor properti.

Di sisi lain, pertumbuhan kartu kredit nasabah perseorangan di Kalimantan Barat pada triwulan III 2023 melambat. Pertumbuhan kartu kredit di Kalimantan Barat tercatat sebesar 10,59% (yoy), sedikit melambat dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 10,91% (yoy). Dari sisi pertumbuhan jumlah rekening kartu kredit juga tetap tumbuh meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu dari 8,31%



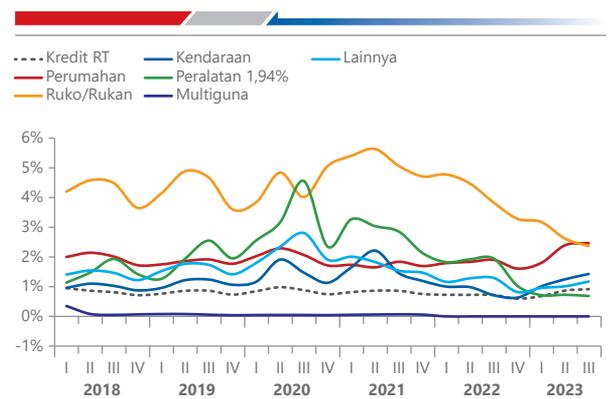
Grafik 4.27. Perkembangan Kredit Rumah Tangga



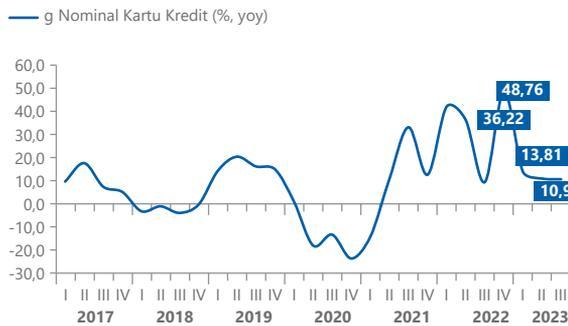
Grafik 4.28. Nominal dan NPL Kartu Kredit Rumah Tangga

(yoy) menjadi 2,85% (yoy). Perlambatan tersebut masih wajar seiring dengan maraknya alternatif pembiayaan selain kartu kredit yang ditujukan untuk aktifitas transaksi rutin.

Sementara itu, kualitas kredit perseorangan tetap berada dalam level terjaga yang tercermin dari tingkat rasio NPL yang rendah. Rasio NPL kredit perseorangan tercatat sebesar 1,73% pada triwulan III 2023. Rasio NPL tersebut meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,41%. NPL kredit RT yang stabil terjadi pada seluruh jenis kredit perseorangan yaitu peralatan, KKB, multiguna, dan perumahan. Potensi risiko yang perlu diwaspadai adalah NPL sektor perumahan yang meskipun dalam saat ini berada di level yang rendah yaitu 2,47% pada periode laporan, mengingat NPL kredit perumahan memiliki eksposur terbesar (76,56%) terhadap total NPL kredit perseorangan.



Grafik 4.29. Perkembangan Rasio NPL Kredit RT Berdasarkan Sektor



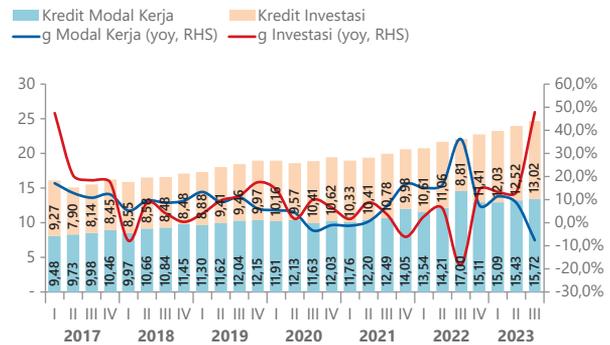
Grafik 4.30. Pertumbuhan Nominal Kartu Kredit Rumah Tangga

4.4. KETAHANAN SEKTOR UMKM⁷

Pada triwulan III 2023, pembiayaan UMKM Kalimantan Barat menunjukkan pertumbuhan yang meningkat dengan kualitas kredit yang membaik. Pembiayaan kepada sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pada triwulan III 2023 di Kalimantan Barat tercatat sebesar Rp28,74 triliun atau tumbuh 11,34% (yoy), meningkat dibanding triwulan sebelumnya sebesar 10,62% (yoy). Sementara itu, pangsa pembiayaan UMKM meningkat menjadi 31,70% dari total penyaluran kredit di Kalimantan Barat, lebih tinggi dibandingkan dengan pangsa pada triwulan sebelumnya yang sebesar 31,36%. Di sisi lain, rasio NPL kredit UMKM pada akhir triwulan III 2023 tercatat sebesar 2,99%, tidak banyak berubah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 2,66%. Realisasi NPL tersebut masih dalam batas aman di bawah *threshold* 5%.

Berdasarkan jenis penggunaan, pembiayaan UMKM Kalimantan Barat pada triwulan III 2022 didorong oleh kinerja kredit investasi yang tumbuh positif. Kredit investasi UMKM tumbuh sebesar 47,79% (yoy) pada triwulan III 2023, meningkat signifikan dari sebelumnya 13,17% (yoy). Sementara itu, penyaluran kredit modal kerja kepada UMKM mengalami penurunan dari 8,63% (yoy) menjadi -7,54% (yoy)

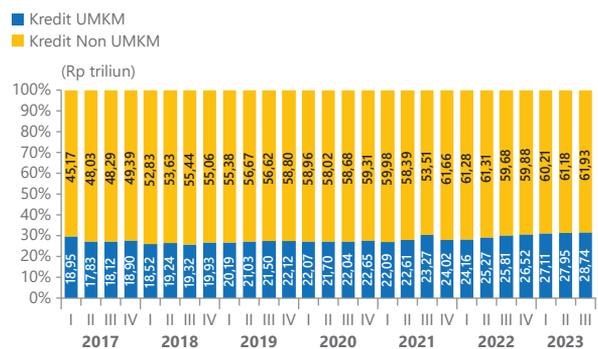
7. Pengertian UMKM adalah sesuai UU No. 20 Tahun 2008. Mulai triwulan I 2016, pengertian kredit kepada sektor UMKM dipersempit yakni kredit kepada UMKM yang merupakan bagian dari sektor korporasi dan perseorangan yang merupakan penduduk.



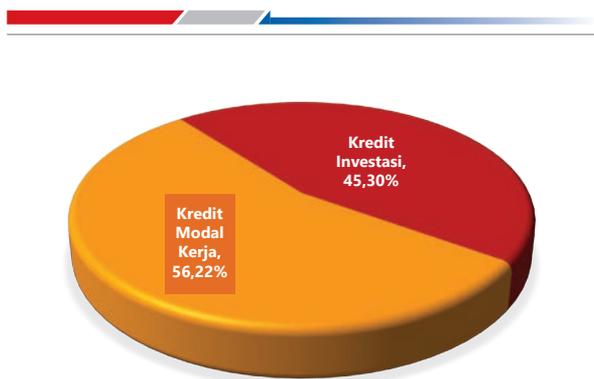
Grafik 4.31. Pembiayaan UMKM Kalbar Berdasarkan Jenis Penggunaan

pada triwulan laporan. Berdasarkan pangsa, mayoritas pembiayaan UMKM disalurkan untuk modal kerja dengan pangsa 54,70% (Rp15,72 triliun), sedangkan sisanya disalurkan untuk investasi yang memiliki pangsa 45,30% (Rp13,02 triliun).

Berdasarkan lapangan usaha, pangsa pembiayaan UMKM didominasi oleh sektor pertanian dan sektor PHR. Pangsa sektor pertanian dan PHR terhadap Pembiayaan UMKM di Kalimantan Barat masing-masing sebesar 39,98% dan 39,83%. Adapun pendorong pertumbuhan pembiayaan UMKM yaitu sektor industri pengolahan dan sektor konstruksi yang masing-masing tumbuh sebesar 45,85% (yoy) dan -14,12% (yoy). Adapun sektor yang menjadi penahan pertumbuhan yang lebih tinggi dari pembiayaan



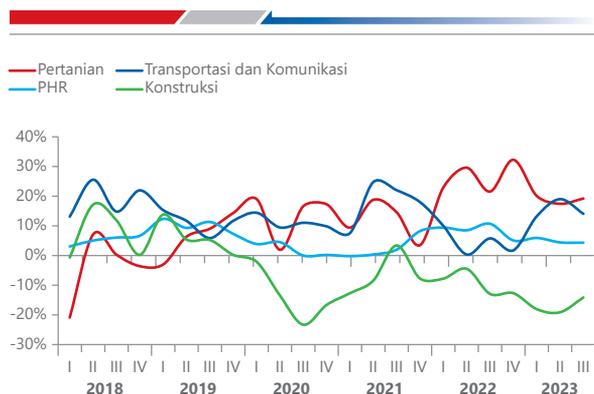
Grafik 4.32. Perkembangan Pembiayaan UMKM (dalam triliun)



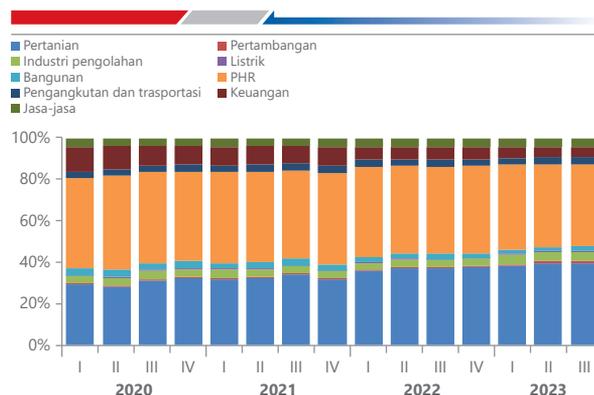
Grafik 4.33. Pangsa Pembiayaan UMKM Kalbar TW III 2023 berdasarkan Jenis Penggunaan

kepada segmen UMKM adalah sektor transportasi dan komunikasi dan sektor perikanan yang terkoreksi masing-masing menjadi sebesar 14,03% (yoy) dan 7,93% (yoy).

Berdasarkan skala usaha, kredit UMKM lebih banyak disalurkan untuk kredit usaha kecil dengan pangsa 35,61% (Rp10,23 triliun). Sementara itu, kredit usaha menengah dan kredit usaha mikro memiliki pangsa masing-masing 28,56% (Rp8,21 triliun) dan 35,83% (Rp10,30 triliun). Berdasarkan pertumbuhannya, kredit usaha mikro mengalami peningkatan pertumbuhan paling tinggi menjadi 33,15% (yoy) pada triwulan III 2023, menurun dibandingkan dengan triwulani I 2023 yang tumbuh sebesar 51,65 % (yoy). Pertumbuhan kredit UMKM yang lebih tinggi tertahan oleh kredit usaha menengah yang mengalami kontraksi dari -7,93% (yoy).

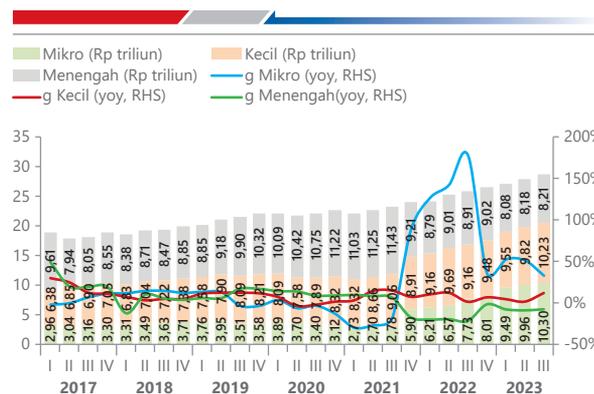


Grafik 4.34. Pendorong Pertumbuhan Pembiayaan UMKM Triwulan III 2023 Berdasarkan Lapangan Usaha

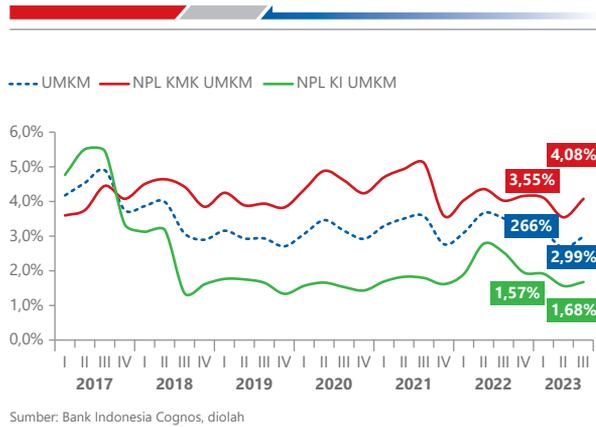


Grafik 4.35. Nominal (Rp Triliun) dan Pangsa Pembiayaan UMKM Kalbar Berdasarkan Lapangan Usaha

Dari sisi kualitas, kredit UMKM tetap terjaga dan berada di bawah target *threshold*. NPL kredit UMKM tercatat sebesar 2,99%, sedikit meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 2,66%. NPL kredit modal kerja dan kredit investasi tercatat masing-masing sebesar 4,08% dan 1,68%, meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 3,55% dan 1,57%. Sementara itu, berdasarkan lapangan usaha, peningkatan rasio NPL kredit UMKM didorong oleh peningkatan NPL terutama pada sektor PHR dan industri pengolahan masing-masing dari 4,09% dan 1,57% pada triwulan sebelumnya menjadi 4,83% dan 2,05%. Adapun sektor yang NPL nya berada di atas *threshold* yaitu sektor konstruksi sebesar 14,89%. Meskipun terdapat sektor yang memiliki tingkat NPL tinggi, namun NPL kredit UMKM secara keseluruhan di Kalimantan Barat masih terjaga di batas yang aman yaitu di bawah 5%.



Grafik 4.36. Perkembangan Kredit UMKM Berdasarkan Kategori Debitur



Grafik 4.37. Perkembangan NPL Kredit UMKM



Grafik 4.38. Perkembangan NPL Kredit UMKM Berdasarkan Lapangan Usaha

BOKS 2 Edukasi CBP Rupiah: Urgensi Memahami Peran Rupiah

Tak akan pernah lekang dalam ingatan krisis moneter yang melanda Indonesia pada 1998 silam. Kala itu, kekhawatiran masyarakat terhadap stabilitas sistem perbankan memicu aksi menarik tabungan secara massal. Tindakan kolektif tersebut lantas menjadi akar permasalahan kekurangan likuiditas yang signifikan pada perbankan, hingga memperburuk krisis keuangan tersebut. Biaya restrukturisasi pasca krisis pun tidaklah murah. Tak kurang dari 70 persen produk domestik bruto (PDB) harus digelontorkan. Krisis ini jelas memberikan kerugian yang sangat besar.

Pengalaman adalah guru terbaik. Berkaca dari tragedi historis tersebut, terdapat pelajaran yang dapat dipetik. Masyarakat harus lebih tenang manakala krisis ekonomi tengah terjadi. Tak perlu gegabah melakukan penarikan dana. Terlebih, mengambil tindakan *panic buying* yang akan memicu inflasi semakin tak terkendali. Rendahnya literasi keuangan masyarakat dituding jadi salah satu penyebabnya.

Data terbaru dari OJK menunjukkan indeks literasi keuangan hanya berada pada angka 49,68 persen, lain halnya dengan tingkat inklusi keuangan masyarakat yang sudah berada pada titik 85,10 persen. Sehingga, dapat dikatakan bahwa sebagian besar masyarakat telah merasakan manfaat dari kemudahan akses keuangan, namun belum memiliki pemahaman yang memadai tentang peran Rupiah dalam perekonomian. Disparitas signifikan tersebut mengindikasikan sinyal bahaya bagi negeri ini. Seperti kita tahu, tingginya tingkat literasi keuangan pada individu akan mengurangi kecemasan dalam menghadapi ketidakstabilan ekonomi, sehingga tidak gegabah untuk melakukan penarikan massal ataupun *panic buying* saat terjadi krisis.

Serangkaian problema tersebut harus disikapi secara holistik. Tak hanya pemerintah, semua segmen harus berpartisipasi aktif dalam mengambil langkah preventif. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral juga tak terkecuali. Keberadaan Bank Indonesia dalam hal ini KPwBI Provinsi Kalimantan Barat tentu sangat

krusial. Praktikanya, mengedukasi masyarakat agar dapat memahami peran Rupiah dengan lebih baik melalui *event CBP Goes to School*, Bincang CBP kepada Milenial, dan program-program edukasi lainnya yang menysasar generasi penerus bangsa di seluruh wilayah Kalimantan Barat.

Materi edukasi yang dipaparkan memuat setidaknya tiga *keypoints* yang dapat diterapkan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman akan fungsi Rupiah. Pertama, cerdas bertransaksi dengan Rupiah. Sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, "*Rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di NKRI dan setiap transaksi di wilayah NKRI wajib menggunakan Rupiah.*" Dalam praktikanya, menggunakan Rupiah dalam setiap transaksi, baik tunai (uang kartal) maupun non tunai (*e-money*, kartu debit, kartu kredit atau QRIS).

Kedua, berbelanja secara bijak. Perilaku *panic buying* akan menyebabkan tekanan yang berlebihan pada sisi permintaan, sehingga berpotensi memicu inflasi yang tak terkendali. Selain itu, dewasa ini tingkat hedonisme Gen Z juga sedang tinggi. Kecenderungan lebih memilih gaya hidup mewah, dibandingkan menabung atau berhemat. Sebagaimana pepatah "*mencegah lebih baik daripada mengobati*", penting untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar berbelanja sesuai dengan kebutuhan, bukan hanya mengikuti keinginan semata.

Ketiga, memahami pentingnya berhemat. Meskipun istilah "menabung" sudah umum, namun lain halnya dengan dana darurat. Lantas, berapa banyak penduduk Indonesia yang telah menyiapkan dana darurat? Melansir data dari Lifepal, hanya 9 persen dari penduduk Indonesia yang telah memiliki dana darurat. Padahal, diperlukan dana yang disisihkan dan dipersiapkan khusus untuk kondisi mendesak. Kejadian-kejadian seperti krisis moneter 1998, krisis ekonomi 2008, dan pandemi covid-19 bukan tak mungkin akan terulang kembali di masa depan.



Selanjutnya, peningkatan pemahaman keuangan di kalangan masyarakat akan krusial dalam mencegah sengkarnya sistem perbankan. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai produk dan layanan perbankan, masyarakat dapat membuat keputusan finansial yang lebih cermat dan mengurangi risiko yang tidak perlu.

Bilamana terjadi peningkatan masyarakat yang memiliki dana darurat dan memanfaatkan berbagai

produk keuangan, maka aliran uang di Indonesia akan semakin lancar. Efek dominonya, dana yang terkumpul dapat dialokasikan oleh penyedia jasa keuangan untuk mendukung pembiayaan korporasi dan konsumsi rumah tangga. Langkah-langkah kecil ini harus terus ditingkatkan karena memberi kontribusi masif. Tujuannya satu, yaitu stabilitas sistem keuangan terjaga dengan baik.



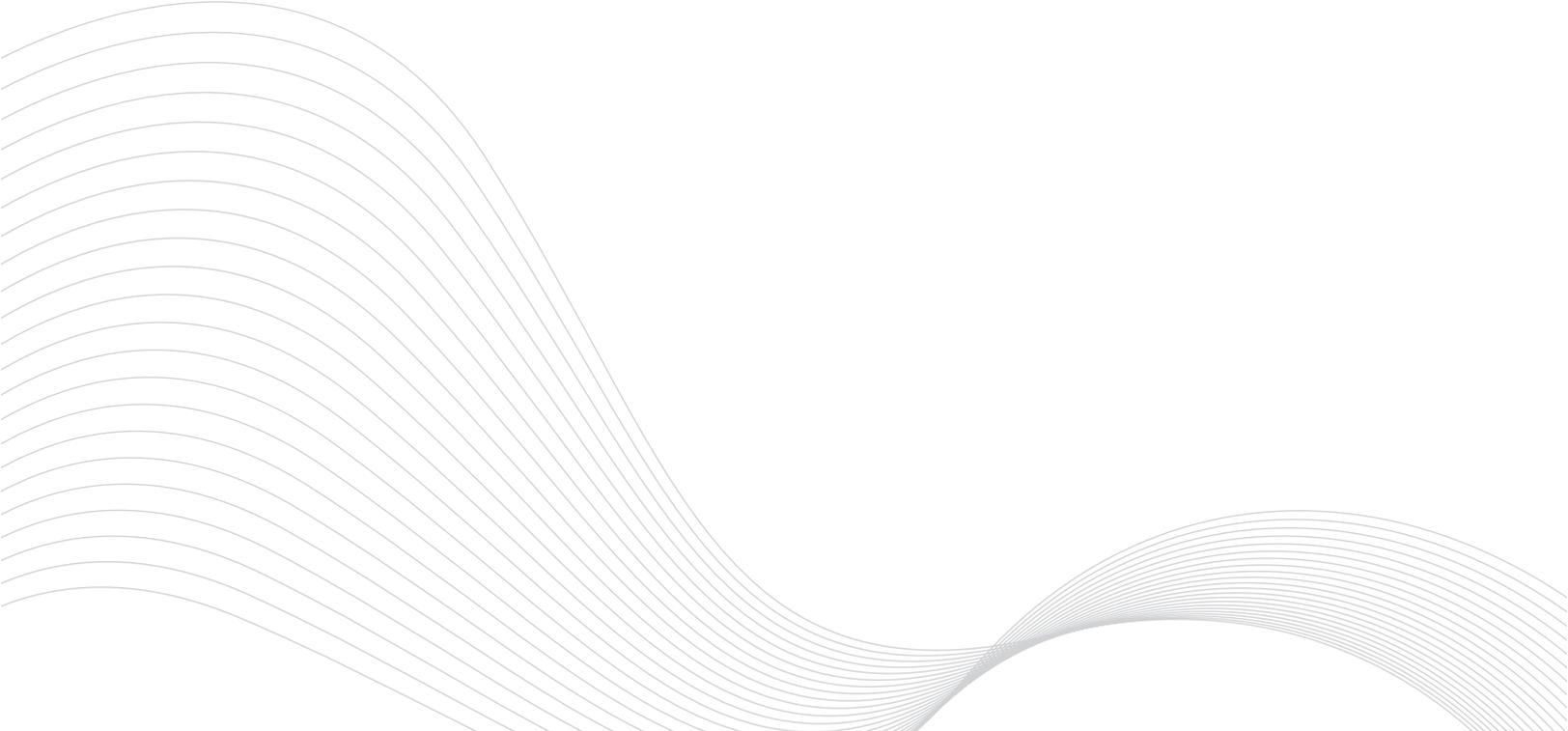


BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA



BAB 5

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah



Pada triwulan III 2023, pengelolaan Uang Rupiah Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kalimantan Barat mengalami net inflow sebesar Rp117,43 miliar sejalan dengan normalisasi aktivitas ekonomi pasca HBKN Iduladha dan periode liburan pada sektor pendidikan. Sementara itu, penurunan transaksi BI-RTGS dan SKNBI dari sisi nominal transaksi selama triwulan III 2023 turut dipengaruhi oleh perkembangan implementasi BI-Fast.

Perkembangan implementasi Bantuan Sosial Non Tunai melalui Program Keluarga Harapan (PKH) berjalan baik. Tingkat penyerapan PKH pada triwulan III 2023 mencapai 96,8%. Selanjutnya, upaya akselerasi elektronifikasi transaksi keuangan di Kalimantan Barat terus dilakukan terutama melalui metode pembayaran digital QRIS dan menjaga kelancaran penyaluran program bantuan sosial. Hingga September 2023 Jumlah merchant QRIS di Kalimantan Barat hingga akhir triwulan III 2023 mencapai 311.089 merchants dan jumlah pengguna sebanyak 582.598 user QRIS.

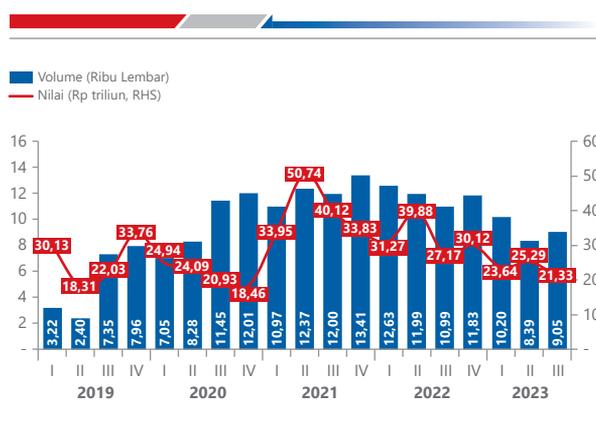


5.1. PERKEMBANGAN TRANSAKSI NON TUNAI

5.1.1. Transaksi Kliring dan *Real Time Gross Settlement*

Transaksi melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) tercatat mengalami kontraksi dari sisi nominal dan volume. Nominal transaksi BI-RTGS triwulan III 2023 tercatat sebesar Rp21,33 triliun, mengalami kontraksi sebesar 21,47% (yoy) dari periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp27,17 triliun, sementara volume transaksi BI-RTGS mencapai 9.046 transaksi, mengalami kontraksi sebesar 17,7% (yoy) dibandingkan triwulan III 2022 yang tercatat 10.992 transaksi.

Transaksi SKNBI mengalami kontraksi dari sisi nominal maupun volume. Sepanjang triwulan III 2023, nominal transaksi SKNBI mencapai Rp6,92 triliun, mengalami kontraksi sebesar 6,32% (yoy) dibandingkan dengan triwulan III 2022 yang mencapai Rp7,38 triliun. Volume SKNBI tercatat 132.282 transaksi atau terkontraksi sebesar 1,32% (yoy) dibandingkan triwulan III 2022 yang tercatat 134.050 transaksi. Penurunan transaksi BI-RTGS dan SKNBI ini turut dipengaruhi oleh perkembangan transaksi melalui BI-FAST. Per 20 Maret 2023, jumlah peserta BI-FAST bertambah 14 bank dan 2 Lembaga Selain Bank (LSB), sehingga total peserta BI-FAST telah mencapai 122 peserta atau 94% dari pangsa sistem pembayaran ritel nasional.



Grafik 5.1. Perkembangan Transaksi RTGS di Kalimantan Barat



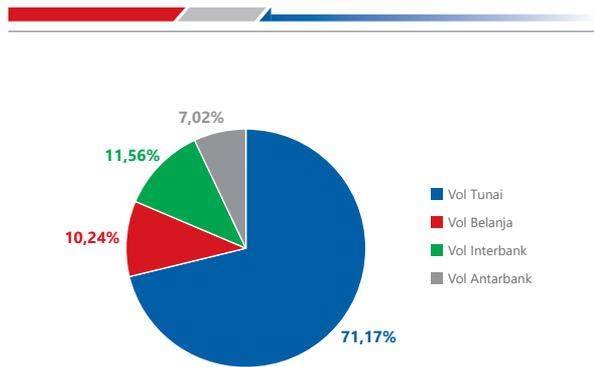
Grafik 5.2. Perkembangan Transaksi RTGS di Kalimantan Barat

5.1.2. Transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)

Nilai transaksi APMK berupa kartu ATM/debet mengalami penurunan. Nilai transaksi kartu ATM/debet pada periode triwulan III 2023 tercatat Rp21,96 triliun, kontraksi sebesar 11,14% (yoy) dibandingkan triwulan III 2022 yang sebesar Rp24,71 triliun. Penurunan juga terjadi pada volume transaksi kartu ATM/debet yang tercatat sebesar 18,01 juta transaksi atau terkontraksi sebesar 24,54% (yoy) dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Jumlah kartu ATM/debet di Kalimantan Barat per September 2023 tercatat sebanyak 4.306.382 kartu sedangkan jumlah mesin ATM tercatat 1.503. Berdasarkan jenis transaksi, volume penggunaan kartu ATM/debet pada triwulan III 2023 didominasi oleh transaksi tarik tunai dengan pangsa sebesar 71,17% diikuti oleh transaksi interbank dengan pangsa sebesar 11,56%, dan transaksi lainnya (antar bank dan belanja) dengan pangsa sebesar 17,26%. Penurunan nilai dan volume transaksi AMPK berupa kartu ATM/debet ini turut dipengaruhi oleh masifnya layanan keuangan berbasis digital, seperti *mobile banking* dan penggunaan QRIS.

Nilai transaksi kartu kredit pada triwulan III 2023 mengalami pertumbuhan dari sisi volume maupun nominal transaksi. Secara nominal, penggunaan kartu kredit pada triwulan III 2023 tumbuh sebesar 36,58% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan



Grafik 5.3. Penggunaan transaksi APMK ATM/Debet di Kalimantan Barat

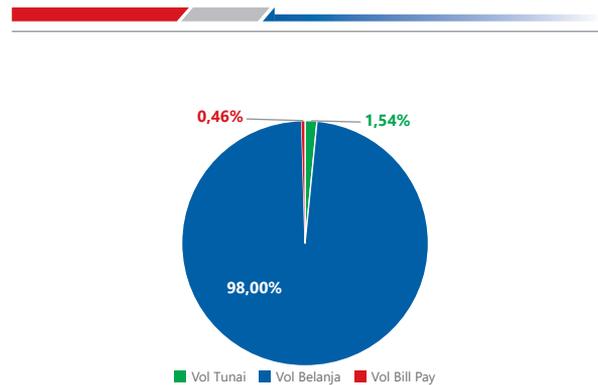
sebelumnya yang tumbuh sebesar 29,07% (yoy). Secara volume, penggunaan kartu kredit tercatat tumbuh sebesar 20,6% (yoy) pada triwulan III 2023, meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 15,42% (yoy).

Jumlah kartu kredit di Kalimantan Barat per September 2023 adalah 136.554 kartu, meningkat dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya sebesar 133.639 kartu. Peningkatan jumlah kartu kredit dipengaruhi oleh berkembangnya layanan dan inovasi di bidang sistem pembayaran diantaranya pengajuan kartu kredit secara digital. Berdasarkan jenis transaksi, penggunaan kartu kredit didominasi untuk transaksi belanja yang mencapai pangsa sebesar 98,00%.

5.2. PENYEDIAAN UANG LAYAK EDAR⁸

Pada triwulan III 2023, KPwBI Provinsi Kalimantan Barat mengalami *net inflow* sebesar Rp117,4 miliar. Kondisi ini *rebound* jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami *net outflow* sebesar Rp521,5 miliar, sejalan dengan normalisasi aktivitas ekonomi pasca HBKN Iduladha dan periode liburan pada sektor pendidikan. Aliran uang yang keluar dari Bank Indonesia tercatat sebesar Rp1,89 triliun, mengalami kontraksi sebesar 44,19% dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp3,38

8. Terjadinya *net outflow* tersebut didorong oleh lebih besarnya jumlah uang yang keluar (*outflow*) dari KPwBI Provinsi Kalimantan Barat dibandingkan dengan jumlah uang yang masuk (*inflow*).

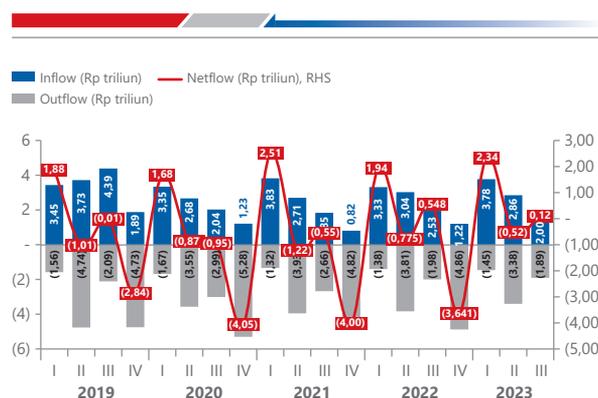


Grafik 5.4. Penggunaan transaksi APMK Kartu Kredit di Kalimantan Barat

triliun. Arus balik pasca Iduladha memengaruhi terjadinya *inflow* pada triwulan III 2023. Berdasarkan pecahannya, aliran uang masuk didominasi oleh uang pecahan Rp100.000 senilai Rp837,56 miliar diikuti pecahan Rp50.000 dan Rp20.000 masing-masing senilai Rp570,94 miliar dan Rp36,27 miliar.

5.3. PERKEMBANGAN TEMUAN UANG RUPIAH YANG DIRAGUKAN KEASLIANNYA

Temuan uang Rupiah yang diragukan keasliannya selama triwulan III 2023 mencapai 260 bilyet yang didominasi oleh pecahan Rp100.000 sebanyak 158 bilyet dan pecahan Rp50.000 sebanyak 102 bilyet. Berdasarkan sumbernya, 80% temuan uang Rupiah



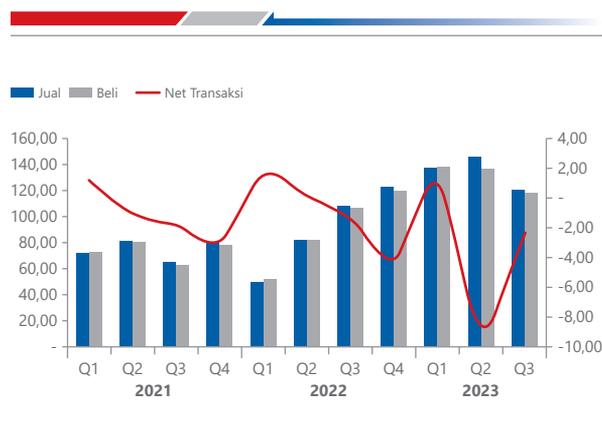
Grafik 5.5. Perkembangan *Inflow-Outflow* di KPwBI Prov. Kalimantan Barat

yang diragukan keasliannya diperoleh dari perbankan, 17,69% merupakan temuan dari PJPUR, dan sisanya dari masyarakat. Keseluruhan temuan uang Rupiah yang diragukan keasliannya tersebut dilaporkan secara berkala kepada Kepolisian untuk dapat ditelusuri dan ditindaklanjuti sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

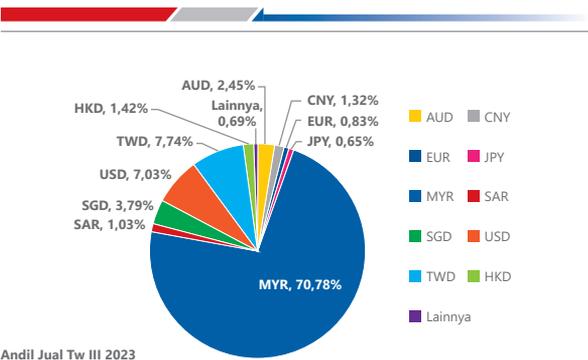
Dari sumber temuan uang Rupiah yang diragukan keasliannya menyiratkan keberhasilan KPwBI Provinsi Kalimantan Barat dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi Cinta Bangsa Paham (CBP) Rupiah ke berbagai lapisan masyarakat sehingga masyarakat dapat lebih cermat dalam mengenali ciri-ciri keaslian uang Rupiah. Temuan Uang Rupiah yang diragukan keasliannya ini juga mengalami penurunan dibanding triwulan II 2023 yakni sebanyak 420 bilyet. Sepanjang tahun 2023, kegiatan sosialisasi CBP yang telah dilakukan diantaranya CBP *Goes to School*, Bincang CBP Milenial, CBP *Goes to Pesantren*, dan *Training of Trainers* (ToT) kepada Guru SMA di Kalimantan Barat.

5.4. PERKEMBANGAN KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK (KUPVA BB) DAN PENYEDIA JASA PEMBAYARAN LAYANAN REMITANSI (PJP LR).

Transaksi pembelian dan penjualan uang kertas asing (UKA) oleh KUPVA Bukan Bank (KUPVA BB) di Kalimantan Barat mengalami peningkatan. Pada



Grafik 5.6. Transaksi Valuta Asing di Prov. Kalimantan Barat

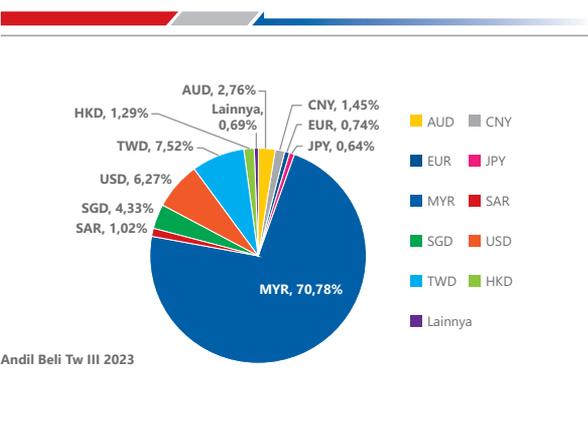


Andil Jual Tw III 2023

Grafik 5.7. Andil Penjualan Valas di Kalimantan Barat per Jenis Mata Uang

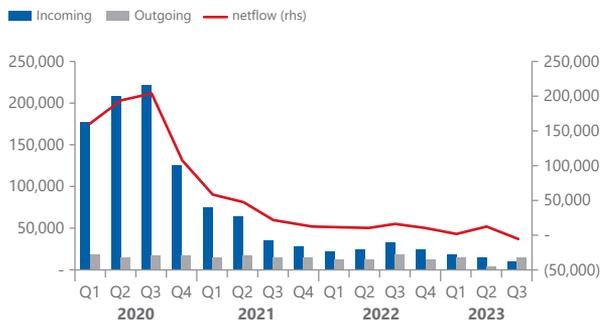
triwulan III 2023, total pembelian UKA oleh KUPVA BB tercatat sebesar Rp117,97 miliar, meningkat 10,73% (yoy) dari triwulan yang sama di tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp106,53 miliar. Transaksi penjualan UKA oleh KUPVA BB juga tercatat mengalami peningkatan menjadi Rp120,35 miliar, meningkat 11,54% (yoy) dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp107,9 miliar. Peningkatan pembelian dan penjualan UKA oleh KUPVA BB ini juga sejalan dengan aktivitas mobilitas masyarakat di Kalimantan Barat yang kembali normal dengan pembukaan PLBN, aktivitas untuk keperluan pengobatan, serta telah terbukanya aktivitas pariwisata di Kota Singkawang bagi wisatawan mancanegara.

Berdasarkan jenis mata uang, Malaysian Ringgit (MYR) masih mendominasi transaksi valas KUPVA BB di Kalimantan Barat. Pada triwulan III 2023, transaksi



Andil Beli Tw III 2023

Grafik 5.8. Andil Pembelian Valas di Kalimantan Barat per Jenis Mata Uang

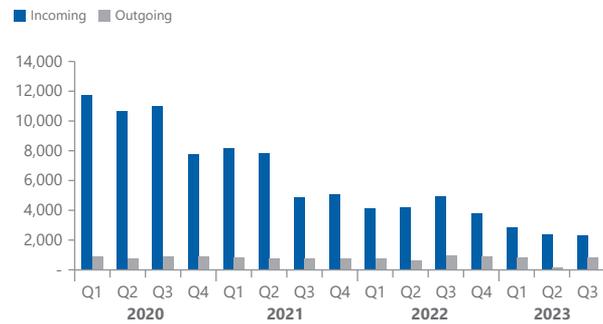


Grafik 5.9. Nominal Transaksi PJP LR di Kalimantan Barat

pembelian UKA MYR memiliki pangsa sebesar 71,16% dari keseluruhan transaksi pembelian UKA KUPVA BB, diikuti oleh Taiwan Dollar (TWD) yang mencapai 7,52%, dan US Dollar (USD) sebesar 6,27%. Sedangkan dari sisi penjualan, transaksi UKA MYR memiliki pangsa sebesar 70,76%, diikuti oleh Taiwan Dollar (TWD) sebesar 7,74%, dan US Dollar (USD) sebesar 7,03%. Letak geografis Kalimantan Barat yang berbatasan darat langsung dengan Malaysia menjadi penyebab dominasi Malaysian Ringgit (MYR) pada transaksi valas di Kalimantan Barat.

Nilai pengiriman uang dari dan ke luar negeri melalui Penyedia Jasa Pembayaran Layanan Remitansi (PJP LR) di Kalimantan Barat pada triwulan III 2023 mengalami kontraksi. *Netflow* nominal pengiriman uang dari dan ke luar negeri di Kalimantan Barat tercatat *net-outflow* sebesar Rp5,02 miliar, *rebound* dari triwulan tahun sebelumnya yang tercatat *net-inflow* sebesar Rp14,8 miliar. Nominal *incoming* tercatat sebesar Rp9,05 miliar terkontraksi sebesar 72,32% (yoy) dibandingkan dengan triwulan III 2022 yang tercatat sebesar Rp32,69 miliar. Sementara nominal *outgoing* tercatat sebesar Rp14,07 miliar, mengalami kontraksi 21,29% (yoy) dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp17,88 miliar.

Dari sisi volume, transaksi *incoming* tercatat sebanyak 2.334 transaksi, kontraksi 52,48% (yoy) dibandingkan triwulan III 2022 sebesar 4.912 transaksi. Volume transaksi *outgoing* tercatat sebanyak 845 transaksi,

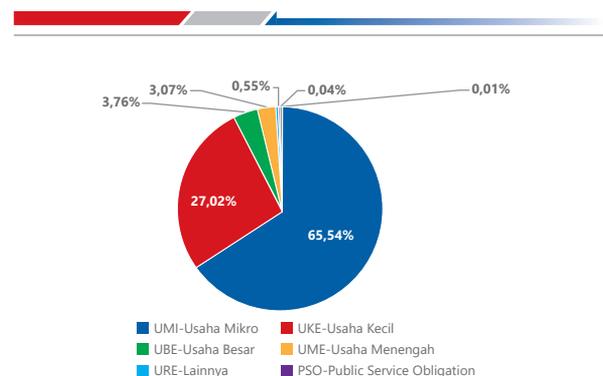


Grafik 5.10. Volume Transaksi PJP LR di Kalimantan Barat

mengalami kontraksi 13,95% (yoy) dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 982 transaksi.

5.5. PROGRAM ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI KEUANGAN

Implementasi elektronifikasi transaksi keuangan dengan metode pembayaran digital menggunakan QRIS terus terakselerasi di wilayah Kalimantan Barat. Jumlah *merchant* QRIS di Kalimantan Barat hingga akhir triwulan III 2023 mencapai 311.089 *merchants*. Berdasarkan sebaran, Kota Pontianak sebagai ibu kota provinsi dengan didukung infrastruktur jaringan yang memadai masih menjadi wilayah dengan jumlah *merchants* terbesar. Jumlah *merchant* di Kota



Grafik 5.11. Pangsa Merchant QRIS berdasarkan Kategori Usaha di Prov. Kalimantan Barat

Pontianak mencapai 133.466 *merchants*, disusul oleh Kabupaten Kubu Raya, Kota Singkawang, dan Kabupaten Ketapang, masing-masing sebesar 28.431, 27.409, dan 27.239 *merchants*.

Berdasarkan kategori *merchant*, kategori Usaha Mikro (UMI) mendominasi *merchant* QRIS di wilayah Kalimantan Barat pada triwulan III 2023 dengan pangsa sebesar 65,54% atau sebanyak 203.897 *merchants*, diikuti kategori usaha Kecil (UKE) dengan pangsa 27,02% atau sebanyak 84.070 *merchants* serta Usaha Besar (UBE), kategori Usaha Menengah (UME), lainnya (URE), *Public Service Obligation* (PSO) serta Badan Layanan Umum (BLU) dengan jumlah *merchant* masing-masing sebanyak 11.699 (3,76%), 9.556 (3,07%), 1.715 (0,55%), 113 (0,04%) dan 39 (0,01%).

Pada tahun 2023, Bank Indonesia akan fokus pada peningkatan transaksi dan jumlah pengguna QRIS untuk mendorong akselerasi pengembangan ekonomi digital di Indonesia, dengan target mencapai 45 juta pengguna pada akhir tahun 2023. Jumlah pengguna QRIS di Kalimantan Barat pada September 2023 telah

mencapai sejumlah 582.598 *user* QRIS. Berbagai program perluasan pengguna QRIS dilakukan bersinergi dengan pemerintah daerah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, pasar tradisional dan modern, serta komunitas informal yang ada di Kalimantan Barat melalui sosialisasi, edukasi, akuisisi pengguna dan *merchants*, *user experience* QRIS serta promo produk dengan pembayaran menggunakan QRIS.

Elektronifikasi transaksi keuangan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako terus berjalan optimal. Tingkat penyerapan Program Sembako pada posisi bulan Agustus 2023, tercatat sebesar 95,87% dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 290.085. Penyaluran PKH tahap III (Periode Juli – Agustus 2023) di Kalimantan Barat dilakukan secara nontunai melalui PT Bank Rakyat Indonesia dan PT. Bank Mandiri serta tunai melalui PT. POS Indonesia sebesar Rp84,098 miliar kepada 157.670 KPM dengan tingkat penyerapan pada posisi Agustus 2023 sebanyak 152.617 atau 96,80% dari jumlah KPM.

BOKS 3**Era Baru Pelindungan Konsumen Bank Indonesia Pasca Penerbitan UU Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)**

Salah satu isu yang mendorong penerbitan UU Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) adalah masih rendahnya pelindungan konsumen dalam sektor keuangan. Pelindungan konsumen dipandang sebagai suatu persyaratan yang perlu diperkuat guna meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam memanfaatkan produk dan layanan keuangan sehingga pada akhirnya mendukung tercapainya stabilitas sektor keuangan. Demikian pula dengan terbitnya UU Nomor 26 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) serta adanya *update G20/OECD High Level Principles on Financial Consumer Protection* berdampak pada Bank Indonesia melakukan peninjauan kembali substansi pengaturan mengenai pelindungan data dan aspek-aspek pelindungan konsumen yang berada dalam cakupan kewenangan Bank Indonesia, agar dapat sejalan dan mendukung penerapan UU tersebut.

Hal ini berdampak pada pencabutan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen dan diterbitkan **Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia**. Adapun pokok – pokok perubahan pengaturan yang diatur dalam PBI mencakup:

1. Redefinisi konsumen dan penyelenggara
2. Penyesuaian ruang lingkup pelindungan konsumen
3. Penyempurnaan prinsip pelindungan konsumen
4. Penjelasan tujuan pelindungan konsumen
5. Penambahan pengaturan terkait hak dan kewajiban konsumen dan penyelenggara
6. Pengaturan penanganan pengaduan konsumen melalui penyelesaian sengketa
7. Penyesuaian sanksi administratif

Pada beleid mengenai pelindungan konsumen tersebut, Bank Indonesia melakukan penguatan hak, kewajiban, dan larangan yang perlu dipatuhi penyelenggara penyedia jasa pembayaran serta pengaturan mengenai hak dan kewajiban konsumen. Dalam hal terdapat indikasi unsur penyimpangan, konsumen berhak didengar pendapat dan pengaduannya atas produk yang digunakan dan/atau layanan yang dimanfaatkan serta mendapatkan advokasi, pelindungan, dan upaya penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks cakupan pelindungan konsumen Bank Indonesia, apabila konsumen masih belum mendapatkan kesepakatan dengan penyelenggara, konsumen dapat melakukan konsultasi, edukasi, dan fasilitasi di Bank Indonesia dengan menyampaikan pengaduan ke Bank Indonesia melalui *contact center* Bank Indonesia (BI Bicara) Telp. 131, surat elektronik atau *email* ke bicara@bi.go.id atau surat tertulis kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) yang terdekat dengan domisili konsumen.

Penyesuaian Peraturan Bank Indonesia sebagaimana mandat undang-undang merupakan langkah yang diambil agar perkembangan industri jasa keuangan bisa bermanfaat optimal bagi perekonomian nasional sesuai dengan penguatan *legal mandate* Bank Indonesia pasca UU P2SK yakni mencapai nilai stabilitas rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kalimantan Barat terus berupaya melakukan sosialisasi dan edukasi pelindungan konsumen diantaranya melalui rangkaian kegiatan *flagship event* Ngander Kapuas (Ngobrolin Keuangan Digital, Pelindungan Konsumen, dan Keuangan Inklusi Sampai Tuntas)



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Pelindungan Konsumen KPwBI kalbar

pada tanggal 18 Juli 2023 yang menghadirkan narasumber dari KPwBI Prov. Kalimantan Barat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Barat, dan narasumber eksternal *Islamic finance specialist* dan diikuti oleh siswa/I SMA/SMK, guru SMA/SMK, dan

mahasiswa/i perguruan tinggi di Kalimantan Barat. Lomba pelindungan konsumen dengan tema “Tips Aman Bertransaksi Digital Ala Milenial dan Gen Z” diumumkan pada puncak acara Pekan QRIS Nasional (PQN) tanggal 20 Agustus 2023.





Halaman ini sengaja dikosongkan



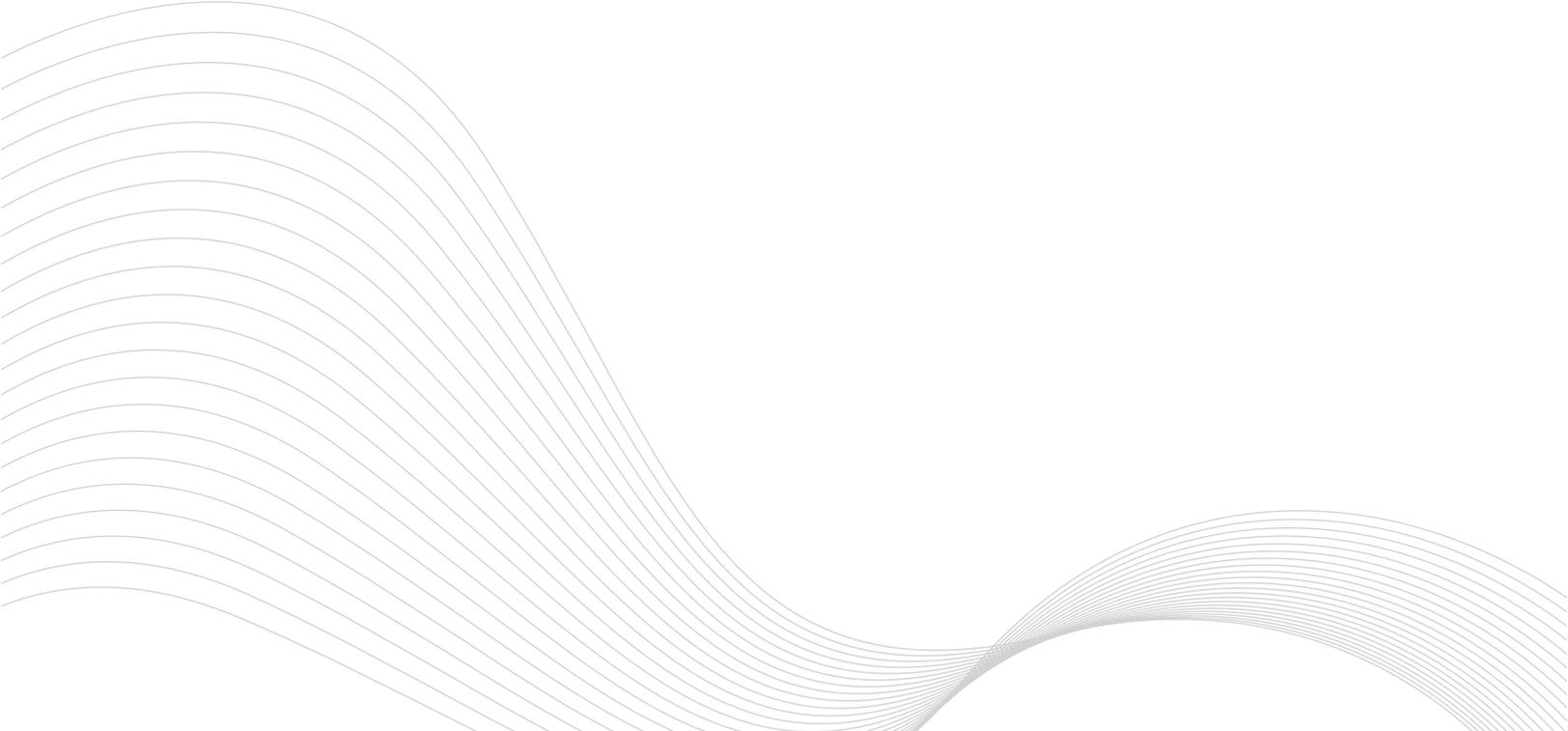


BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA



BAB 6

**Ketenagakerjaan
dan Kesejahteraan**



Kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat menunjukkan perbaikan berdasarkan indikator terkini. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2023 berada pada angka 5,05%, membaik dibandingkan Agustus 2022 sebesar 5,11%.

Rasio kemiskinan mengalami perbaikan menjadi 6,71% pada Maret 2023, turun dibandingkan Maret 2022 yang tercatat sebesar 6,73%. Meski demikian, jumlah penduduk miskin Kalimantan Barat pada Maret 2023 meningkat 3,1 ribu jiwa atau 0,89% (yoy), dibandingkan Maret 2023.

Selanjutnya, Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan III 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,81% (qtq) atau 139,50 dari sebelumnya sebesar 133.10 pada akhir triwulan II 2023.



6.1. GAMBARAN UMUM

Kondisi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat berdasarkan perkembangan indikator ketenagakerjaan terkini menunjukkan tren perbaikan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2023 tercatat 5,05%, menurun dari periode yang sama tahun sebelumnya yakni sebesar 5,11% pada Agustus 2022. Salah satu faktor pendorong perbaikan TPT adalah kondisi peningkatan kebutuhan tenaga kerja bagi di berbagai lapangan usaha, terutama sektor perdagangan besar dan eceran. TPT tertinggi tercatat di Kota Pontianak sebesar 8,92% sedangkan TPT terendah tercatat di Kab. Kapuas Hulu sebesar 2,19%. Sepanjang Agustus 2022-2023, terjadi penyerapan tenaga kerja sebanyak 217.720 orang, dengan lapangan usaha pertanian masih menjadi sektor penyerap tenaga kerja tertinggi.

Nilai Tukar Petani (NTP) Kalimantan Barat tetap berada di atas batas sejahtera (100), meningkat dibandingkan Juli 2023. NTP tercatat meningkat 4,81% (qtq) dari 133.10 pada akhir triwulan II 2023 menjadi 139.50 pada akhir triwulan III 2023. Peningkatan NTP secara qtq pada triwulan III 2023 diakibatkan oleh kenaikan indeks harga hasil produksi yang lebih tinggi dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani, terutama pada komoditas perkebunan rakyat.

Di sisi lain, rasio kemiskinan tercatat juga mengalami perbaikan menjadi 6,71% pada Maret 2023, dibandingkan Maret 2022 yang tercatat 6,73%. Meski demikian, secara jumlah, penduduk miskin mengalami

peningkatan 3,1 ribu jiwa atau peningkatan 0,89% (yoy).

6.2. KETENAGAKERJAAN KALIMANTAN BARAT

Kondisi ketenagakerjaan Kalimantan Barat menunjukkan tren positif sebagai hasil perbaikan kinerja perekonomian. Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023, terjadi peningkatan jumlah penduduk pencari kerja sebesar 7,18% (yoy), dari yang sebelumnya (Agustus 2022) berjumlah 138 ribu orang menjadi 148 ribu orang. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja di wilayah Kalimantan Barat masih tertahan oleh beberapa faktor,

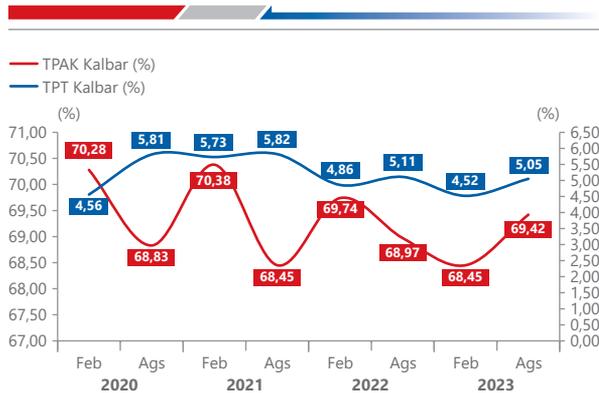
Berdasarkan usia kerja, jumlah penduduk dengan usia >15 tahun pada Agustus 2023 tercatat sebanyak 4,21 juta jiwa atau mengalami peningkatan 7,74% (yoy) dibandingkan dengan Agustus 2022. Jumlah penduduk bekerja juga mengalami peningkatan sebesar 8,51% (yoy) dari 2,558 juta jiwa pada Agustus 2022 menjadi 2,775 juta jiwa pada Agustus 2023.

Tren perbaikan lainnya juga ditunjukkan dari sisi TPT, pada Agustus 2023 menjadi 5,05%, turun dari angka 5,11% pada Agustus 2022. Hal ini menandakan adanya perbaikan penyerapan tenaga kerja karena pertumbuhan aktivitas perekonomian di lapangan usaha, khususnya lapangan usaha pertanian dan perdagangan besar serta eceran. Perbaikan tersebut juga didorong optimisme pelaku usaha terhadap permintaan domestik di tahun depan,

Tabel 6.1. Indikator Ketenagakerjaan (Ribuan Jiwa)

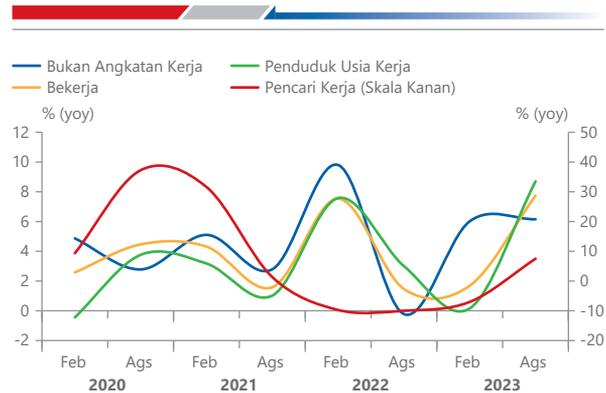
| Keterangan (Ribuan Jiwa) | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Perubahan Ags'23 terhadap | |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------|------------|
| | Feb | Ags | Feb | Ags | Feb | Ags | Feb | Ags | Feb'22 (%) | Ags'22 (%) |
| Jumlah Penduduk Usia Kerja | 3.662 | 3.791 | 3.820 | 3.851 | 4.108 | 3.908 | 4.177 | 4.210 | 1,69 | 7,74 |
| Angkatan Kerja | 2.573 | 2.610 | 2.688 | 2.636 | 2.865 | 2.695 | 2.860 | 2.920 | (0,19) | 8,34 |
| a. Bekerja | 2.456 | 2.458 | 2.534 | 2.483 | 2.726 | 2.558 | 2.730 | 2.780 | 0,16 | 8,70 |
| b. Pencari Kerja | 117 | 151 | 154 | 153 | 139 | 138 | 129 | 148 | (7,04) | 7,50 |
| Bukan Angkatan Kerja | 1.077 | 1.182 | 1.132 | 1.215 | 1.243 | 1.212 | 1.318 | 1.287 | 6,02 | 6,16 |
| TPAK Kalbar (%) | 70,28 | 68,83 | 70,38 | 68,45 | 69,74 | 68,97 | 68,45 | 69,42 | (1,85) | 0,65 |
| TPT Kalbar (%) | 4,56 | 5,81 | 5,73 | 5,82 | 4,86 | 5,11 | 4,52 | 5,05 | (7,00) | (1,17) |

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah



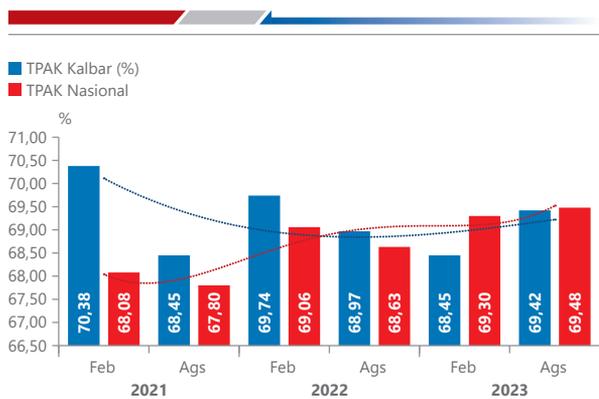
Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 6.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)



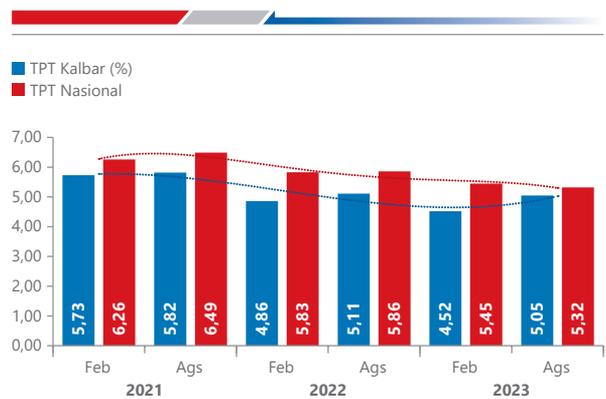
Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 6.2. Tingkat Pertumbuhan Indikator Ketenagakerjaan



Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 6.3. Perkembangan Tingkat Penyerapan Angkatan Kerja (TPAK) Kalimantan Barat dan Nasional



Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 6.4. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kalimantan Barat dan Nasional

sehingga melakukan penyerapan tenaga kerja untuk mengoptimalkan operasional. Sebagian besar kontak liaison Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat juga mengonfirmasi tidak adanya pemutusan hubungan kerja pada tahun ini, namun sebaliknya terdapat penambahan tenaga kerja pada sektor usaha tertentu.

Ditinjau dari sisi LU, sektor pertanian masih mendominasi penyerapan tenaga kerja di Kalimantan Barat pada Agustus 2023. Secara persentase, LU pertanian mampu menyerap 47,49% dari total tenaga kerja. LU berikutnya yang juga memberikan kontribusi penyerapan tenaga kerja adalah LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor serta LU Konstruksi dengan persentase

masing-masing sebesar 14,71% dan 6,50% dari total tenaga kerja di Kalimantan Barat.

Penyerapan tenaga kerja pada LU pertanian mengalami peningkatan serapan tenaga kerja sekitar 6,52%. Peningkatan penyerapan pada LU pertanian ditopang oleh peningkatan kinerja perkebunan seperti perkebunan kelapa sawit, sejalan dengan peningkatan utilisasi pabrik kelapa sawit. Penyerapan tenaga kerja pada LU manufaktur mengalami peningkatan 14,24% (yoy), dari 359 ribu jiwa pada Agustus 2022 menjadi 410 ribu jiwa pada Agustus 2023. Kenaikan penyerapan tenaga kerja ini didukung oleh perbaikan kinerja beberapa sektor yang sempat terdampak pandemi Covid-19 seperti konstruksi, industri pengolahan, dan listrik, gas, air. Selain itu, peningkatan permintaan

Tabel 6.2. Persentase Penduduk Bekerja Berdasarkan Lapangan Usaha (Ribu Jiwa)

| Lapangan Pekerjaan Utama | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Ags '23 Terhadap Ags '22 | |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|-----------|
| | Feb | Ags | Feb | Ags | Feb | Ags | Feb | Ags | Growth | Indikator |
| Pertanian | 1.135 | 1.211 | 1.189 | 1.175 | 1.225 | 1.237 | 1.236 | 1.318 | 6,52% | ↑ |
| Manufaktur* | 337 | 381 | 391 | 408 | 436 | 359 | 462 | 410 | 14,24% | ↑ |
| Jasa** | 985 | 866 | 954 | 900 | 1.065 | 962 | 1.032 | 778 | -19,09% | ↓ |

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah

*) Lapangan usaha Manufaktur terdiri dari industri pengolahan, pertambangan, listrik, gas, air, dan konstruksi

**) Lapangan usaha Jasa terdiri dari perdagangan, transportasi, lembaga keuangan, dan jasa lainnya

dari masyarakat juga turut mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja pada sektor ini. Di sisi lain, penyerapan tenaga kerja pada LU jasa mengalami kontraksi -19,09% (yoy), dari 962 ribu jiwa pada Agustus 2022 menjadi 778 ribu jiwa pada Agustus 2023. Penurunan ini bersumber dari penurunan penyerapan tenaga kerja pada sektor pengangkutan & pergudangan, penyedia jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta aktivitas jasa lainnya.

Berdasarkan status pekerjaan utama, sebagian besar angkatan kerja di Kalimantan Barat masih bekerja di lapangan usaha informal⁹. Kondisi ini terlihat dari jumlah pekerja informal pada Agustus 2023 yang

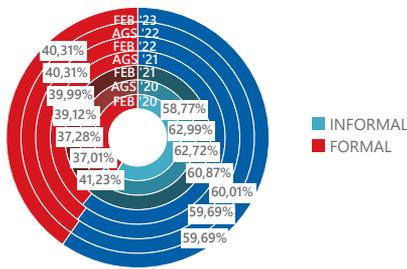
mencapai 1,66 juta jiwa, atau setara dengan 59,69% dari total penduduk bekerja. Sisanya, sebanyak 1,12 juta pekerja atau 40,31% bekerja di lapangan usaha formal. Pada Agustus 2023, jumlah pekerja pada klasifikasi status pekerjaan informal mengalami peningkatan 10,21% (yoy). Peningkatan ini didorong oleh jumlah pekerja bebas dan pekerja berusaha sendiri yang meningkat masing-masing sebesar 22,21% (yoy) dan 8,32% (yoy). Sementara itu, kondisi jumlah pekerja pada status pekerjaan formal mengalami peningkatan 6,05%, yang dipicu oleh tumbuhnya jumlah buruh/karyawan/pegawai sebesar 13,91% (yoy).

Tabel 6.3. Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Status Utama Pekerja (Ribu Jiwa)

| STATUS PEKERJAAN | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Perubahan Ags '23 thd | |
|--------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|----------|-----------------------|-------------|
| | Feb | Ags | Feb | Ags | Feb | Ags | Feb | Ags | Feb '22 (%) | Ags '22 (%) |
| INFORMAL | 1.444 | 1.549 | 1.589 | 1.511 | 1.636 | 1.503 | 1.641 | 1.656 | 1,26% | 10,21% |
| Berusaha sendiri | 509 | 522 | 501 | 516 | 550 | 575 | 564 | 623 | 13,28% | 8,32% |
| Berusaha dibantu buruh tdk tetap | 415 | 425 | 465 | 399 | 493 | 407 | 440 | 403 | -18,40% | -1,07% |
| Pekerja Bebas | 135 | 166 | 188 | 187 | 188 | 159 | 243 | 194 | 3,37% | 22,21% |
| Pekerja Keluarga | 385 | 436 | 435 | 409 | 404 | 362 | 394 | 436 | 7,91% | 20,61% |
| FORMAL | 1.013 | 910 | 945 | 971 | 1.090 | 1.055 | 1.089 | 1.119 | 2,63% | 6,05% |
| Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar | 94 | 78 | 83 | 77 | 94 | 78 | 97 | 88 | -5,85% | 13,91% |
| Buruh/ karyawan/pegawai | 919 | 832 | 862 | 893,88 | 996,35 | 977,41 | 992,08 | 1.030,47 | 3,42% | 5,43% |

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah

9. Status pekerjaan informal adalah pekerja yang memiliki status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non-pertanian serta pekerja keluarga tidak dibayar.



Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 6.5. Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Formal dan Informal

Secara umum, serapan tenaga kerja di Kalimantan Barat mencerminkan adanya kesesuaian dengan struktur PDRB. Besarnya peranan LU pertanian dalam menyerap tenaga kerja sejalan dengan posisi LU tersebut sebagai LU dengan pangsa terbesar dalam PDRB. Sehubungan dengan itu, perlu adanya tambahan fokus dan perhatian serius jangka panjang dalam upaya meningkatkan kinerja LU pertanian beserta hilirisasinya. Upaya jangka panjang ini akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan sebagian besar tenaga kerja, khususnya dalam upaya pemulihan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat.

6.3. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PEDESAAN

6.3.1. Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) diperoleh melalui perbandingan antara indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani. NTP juga mengukur daya tukar produk pertanian terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi maupun biaya produksi. Berdasarkan data yang diperoleh, terlihat bahwa semakin tinggi NTP semakin tinggi juga tingkat kesejahteraan petani.

NTP Kalimantan Barat menunjukkan perbaikan pada akhir triwulan III 2023, meskipun tetap berada di atas batas sejahtera (100). NTP tercatat tumbuh 4,81% (qtq) dari 133,10 pada akhir triwulan II 2023 menjadi

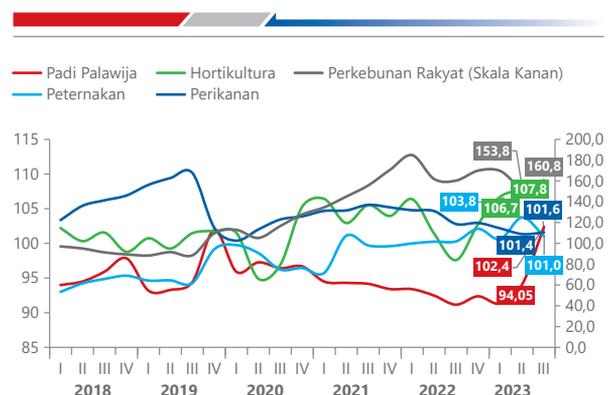


Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 6.6. Perkembangan NTP Kalimantan Barat

139.50 pada akhir triwulan III 2023. Peningkatan NTP secara qtq pada triwulan III 2023 diakibatkan oleh peningkatan nilai tukar pada subsektor padi palawija. Perbaikan kinerja subsektor tanaman pangan didukung oleh perbaikan indeks yang diterima petani pada kelompok palawija.

Berdasarkan angka NTP pada masing-masing subsektor, subsektor perkebunan rakyat berada pada posisi tertinggi, yaitu sebesar 160,79. Kemudian, diikuti oleh subsektor hortikultura, perikanan tangkap, dan padi palawija dengan nilai masing-masing 105,29, 102,98, dan 102,38. Di sisi lain, terdapat 1 (satu) subsektor yang memiliki NTP di bawah batas sejahtera (100) yaitu subsektor perikanan budidaya sebesar 95,12.



Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 6.7. Perkembangan NTP Provinsi Kalimantan Barat Berdasarkan Klasifikasi Subsektor

Tabel 6.4. Nilai Tukar Petani Provinsi Kalimantan Barat

| No | Uraian | 2023 | | | | | | | | | | Pertumbuhan (qtq) |
|-----------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| | | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | |
| 1. | Indeks Harga Yang Diterima Petani (It) | 160,95 | 161,92 | 164,81 | 165,07 | 159,83 | 155,71 | 157,05 | 158,33 | 163,33 | 164,35 | 5,55% |
| 1.1. | Padi Palawija | 105,77 | 105,99 | 106,43 | 108,28 | 110,28 | 110,90 | 111,87 | 111,99 | 117,75 | 121,20 | 9,29% |
| 1.2. | Hortikultura | 112,10 | 123,05 | 123,79 | 124,46 | 126,77 | 126,31 | 123,32 | 123,80 | 123,55 | 124,25 | -1,63% |
| 1.3. | Perkebunan Rakyat | 190,34 | 191,79 | 196,04 | 195,58 | 186,34 | 179,49 | 181,33 | 183,32 | 188,97 | 189,16 | 5,39% |
| 1.4. | Peternakan | 115,73 | 114,76 | 114,91 | 116,31 | 117,33 | 119,71 | 120,87 | 118,95 | 118,06 | 117,60 | -1,76% |
| 1.5. | Perikanan | 117,54 | 117,19 | 118,28 | 118,33 | 118,27 | 118,66 | 118,38 | 119,69 | 119,59 | 119,84 | 0,99% |
| 1.5.1. | Perikanan Tangkap | 119,47 | 118,98 | 120,24 | 120,50 | 120,39 | 120,72 | 120,53 | 121,81 | 121,71 | 122,00 | 1,06% |
| 1.5.2. | Perikanan Budidaya | 108,98 | 109,28 | 109,62 | 108,74 | 108,89 | 109,55 | 108,85 | 110,31 | 110,21 | 110,25 | 0,64% |
| 2. | Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Ib) | 115,20 | 115,56 | 115,75 | 116,02 | 116,57 | 116,99 | 117,07 | 117,01 | 117,30 | 117,81 | 0,70% |
| 2.1. | Padi Palawija | 116,04 | 116,44 | 116,55 | 116,81 | 117,41 | 117,92 | 117,96 | 117,85 | 118,00 | 118,38 | 0,39% |
| 2.2. | Hortikultura | 115,53 | 115,86 | 116,02 | 116,24 | 116,77 | 117,22 | 117,33 | 117,36 | 117,59 | 118,01 | 0,67% |
| 2.3. | Perkebunan Rakyat | 114,94 | 115,28 | 115,50 | 115,78 | 116,32 | 116,69 | 116,77 | 116,73 | 117,08 | 117,65 | 0,82% |
| 2.4. | Peternakan | 113,71 | 114,12 | 114,22 | 114,42 | 114,68 | 115,38 | 115,81 | 115,78 | 115,98 | 116,41 | 0,89% |
| 2.5. | Perikanan | 115,04 | 115,60 | 115,77 | 116,25 | 116,77 | 117,08 | 117,1 | 117,14 | 117,35 | 118,00 | 0,79% |
| 2.5.1. | Perikanan Tangkap | 115,53 | 116,07 | 116,30 | 116,73 | 117,31 | 117,63 | 117,59 | 117,61 | 117,80 | 118,47 | 0,71% |
| 2.5.2. | Perikanan Budidaya | 112,89 | 113,53 | 113,43 | 114,13 | 114,37 | 114,67 | 114,96 | 115,03 | 115,37 | 115,90 | 1,07% |
| 3. | Nilai Tukar Petani | 139,72 | 140,12 | 142,38 | 142,27 | 137,11 | 133,10 | 134,15 | 135,31 | 139,25 | 139,50 | 4,81% |
| 3.1. | Padi Palawija (NTPP) | 91,14 | 91,02 | 91,31 | 92,69 | 93,92 | 94,05 | 94,83 | 95,02 | 99,79 | 102,38 | 8,86% |
| 3.2. | Hortikultura (NTPH) | 105,68 | 106,20 | 106,70 | 107,07 | 108,56 | 107,76 | 105,11 | 105,48 | 105,07 | 105,29 | -2,29% |
| 3.3. | Perkebunan Rakyat (NTPR) | 165,60 | 166,37 | 169,73 | 168,93 | 160,20 | 153,81 | 155,29 | 157,05 | 161,41 | 160,79 | 4,54% |
| 3.4. | Peternakan (NTPPT) | 101,77 | 100,56 | 100,60 | 101,65 | 102,31 | 103,75 | 104,36 | 102,74 | 101,79 | 101,03 | -2,62% |
| 3.5. | Perikanan (NTPN) | 102,17 | 101,38 | 102,17 | 101,79 | 101,28 | 101,35 | 101,09 | 102,18 | 101,91 | 101,56 | 0,21% |
| 3.5.1. | Perikanan Tangkap | 103,41 | 102,51 | 103,39 | 103,24 | 102,62 | 102,63 | 102,51 | 103,57 | 103,32 | 102,98 | 0,34% |
| 3.5.2. | Perikanan Budidaya | 96,54 | 96,26 | 96,64 | 95,28 | 95,21 | 95,54 | 94,68 | 95,90 | 95,53 | 95,12 | -0,44% |

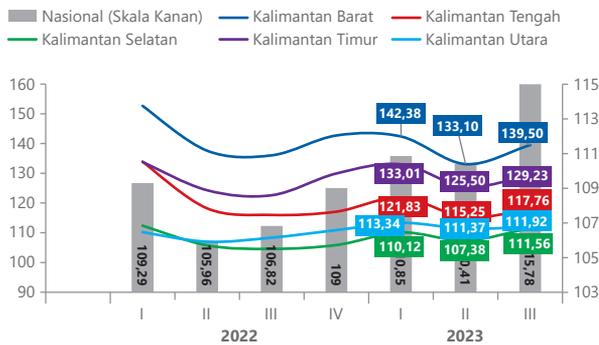
6.3.2. Perbandingan dengan NTP Provinsi Lain di Kalimantan

NTP Provinsi Kalimantan Barat pada triwulan III 2023 masih merupakan yang tertinggi di wilayah Kalimantan. Secara umum peningkatan NTP secara qtq terjadi di seluruh provinsi regional Kalimantan. NTP Provinsi Kalimantan Barat tumbuh sebesar 4,8% (qtq), hampir sama dengan pertumbuhan NTP nasional sebesar 4,9% (qtq). NTP Kalimantan Barat sebesar 139,50 merupakan yang tertinggi di Regional Kalimantan, disusul oleh Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah dengan NTP masing-masing sebesar 129,23 dan 117,76.

Tabel 6.5. Perbandingan NTP dengan Provinsi Lain di Kalimantan dan Nasional

| PROVINSI | 2023 | | | Pertumbuhan Tw II 2023 | |
|------------------------|--------|--------|--------|------------------------|-------|
| | I | II | III | (qtq) | (yoy) |
| Kalimantan Barat | 142,38 | 133,10 | 139,50 | 4,8% | 2,54% |
| Kalimantan Tengah | 121,83 | 115,25 | 117,76 | 2,2% | 1,53% |
| Kalimantan Selatan | 110,12 | 107,38 | 111,56 | 3,9% | 6,67% |
| Kalimantan Timur | 133,01 | 125,50 | 129,23 | 3,0% | 5,40% |
| Kalimantan Utara | 113,34 | 111,37 | 111,92 | 0,5% | 3,30% |
| Nasional (Skala Kanan) | 110,85 | 110,41 | 115,78 | 4,9% | 8,39% |

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah



Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah

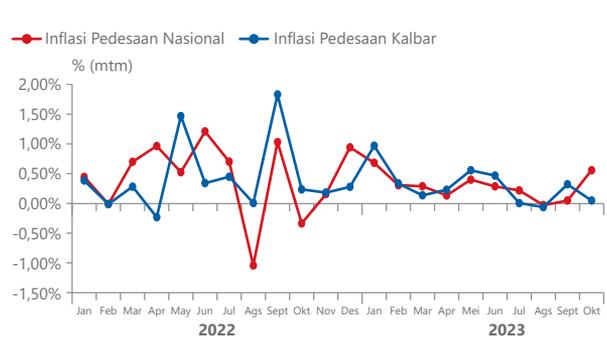
Grafik 6.8. Pergerakan NTP Antar Provinsi di Kalimantan

6.4. INFLASI PEDESAAN

Indeks konsumsi rumah tangga (IKRT) di Kalimantan Barat menunjukkan peningkatan pada triwulan III 2023. Indeks IKRT Kalimantan Barat tercatat sebesar 118,1, meningkat dari triwulan II 2023 yang sebesar 117,13. Sejalan dengan peningkatan IKRT, inflasi pedesaan Kalimantan Barat pada triwulan III 2023 sebesar 0,56% (mtm), 3,61% (ytd) dan 6,74% (yoy). Secara mtm, inflasi pedesaan Kalimantan Barat, yang diturunkan dari IKRT, memiliki tren yang sama dengan inflasi pedesaan secara nasional.

6.5. PROFIL KEMISKINAN DAN PEMERATAAN PENDUDUK KALIMANTAN BARAT

Jumlah penduduk miskin Maret 2023 yang tercatat 353,35 ribu jiwa (6,71%), mengalami sedikit peningkatan dibandingkan periode sama tahun lalu (Maret 2022) yang sebesar 350,25 ribu jiwa (6,73%) atau meningkat 0,89% (yoy). Proporsi penduduk



Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah

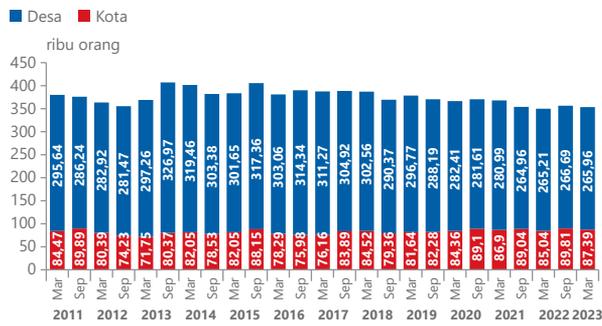
Grafik 6.9. Perbandingan Inflasi Pedesaan Kalimantan Barat dan Nasional (mtm)

miskin pada Maret 2023 masih didominasi oleh penduduk daerah pedesaan dengan dengan jumlah 265,96 ribu jiwa atau 75,27% dari total penduduk miskin di Kalimantan Barat. Jumlah kemiskinan di pedesaan ini mengalami peningkatan sebesar 0,28% (yoy) dari Maret 2022 yang sebanyak 265,21 ribu jiwa (8,07% dari penduduk pedesaan). Sementara itu, jumlah penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2023 tercatat berjumlah 87,39 ribu jiwa (4,63% dari penduduk perkotaan), meningkat 0,89% (yoy) dari jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 yang tercatat 85,04 ribu jiwa. Peningkatan tahunan (yoy) jumlah penduduk miskin desa dan kota diakibatkan oleh peningkatan garis kemiskinan dari Rp520.660/Kapita/Bulan pada Maret 2022 menjadi Rp563.288/Kapita/Bulan pada Maret 2023. Selain itu, penambahan jumlah penduduk miskin tersebut turut didorong oleh penurunan nilai tukar yang diterima masyarakat petani, tercermin melalui penurunan nilai tukar petani (NTP) dari 152,67 pada Maret 2022 menjadi 142,38 pada Maret 2023.

Tabel 6.6. Perkembangan Inflasi Pedesaan

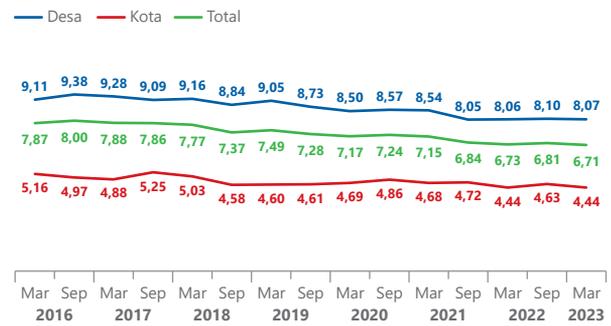
| Uraian | 2023 | | | | | | | | | | mtm | ytd | yoy |
|-----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Ags | Sept | Okt | | | |
| Konsumsi Rumah Tangga | 115,11 | 115,50 | 115,66 | 115,93 | 116,58 | 117,13 | 117,14 | 117,07 | 117,45 | 118,11 | 0,56% | 3,61% | 6,74% |
| Indeks Biaya Produksi Dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) | 115,93 | 116,23 | 116,53 | 116,79 | 117,01 | 116,95 | 117,21 | 117,18 | 117,24 | 117,30 | 0,05% | 1,81% | 5,04% |

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah



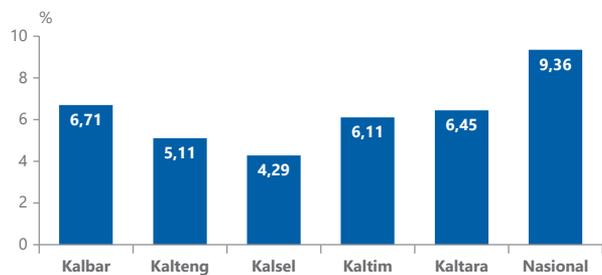
Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 6.10. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kalimantan Barat



Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 6.12. Perkembangan Persentase Tingkat Kemiskinan di Kalimantan Barat



Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 6.11. Perbandingan Tingkat Kemiskinan di Kalimantan dan Nasional

Persentase angka kemiskinan di Kalimantan Barat tersebut (6,71) tercatat lebih rendah dibandingkan persentase angka kemiskinan di nasional yang sebesar 9,36%. Namun demikian, persentase angka kemiskinan di Kalimantan Barat menempati posisi pertama secara regional Kalimantan.

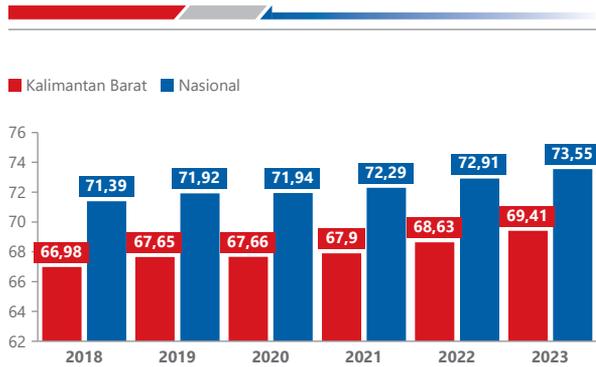
6.6. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA¹⁰

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan tren peningkatan.

IPM meningkat sebesar 1,14% (yoy) pada tahun 2023 menjadi 69,41 dari 68,63 pada tahun 2022. Status IPM Provinsi Kalimantan Barat tersebut berada dalam kategori sedang dengan rentang nilai IPM 60-70. Sementara itu, IPM nasional telah mencapai 73,55 pada tahun 2023 atau berada pada kategori tinggi dengan rentang nilai IPM 70-80.

Peningkatan IPM Provinsi Kalimantan Barat sejalan dengan komitmen pemerintah daerah untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat setiap tahunnya. IPM diukur berdasarkan beberapa dimensi, diantaranya umur harapan hidup, harapan lama sekolah, dan pengeluaran per kapita. Oleh karena itu, upaya untuk mempercepat peningkatan IPM terus dilakukan oleh pemerintah daerah melalui sinergi dengan berbagai pihak terkait. Salah satunya dengan upaya melakukan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) pendidikan inklusif untuk melaksanakan penguatan pada pembangunan unit sekolah baru dengan fokus: (1) penambahan ruang kelas, khususnya untuk SMA dan SMK, (2) mendorong masyarakat putus sekolah untuk melanjutkan pendidikan dengan mengikuti paket C, dan juga (3) mewujudkan pendidikan merata khususnya bagi anak berkebutuhan khusus.

10. Nilai IPM yang digunakan merupakan angka IPM dengan menggunakan metode perhitungan IPM Tahun 2014. Terdapat penggantian komponen tahun dasar PNB Per Kapita dari tahun 2005 ke 2011. Metode agregasi indeks menggunakan rata-rata ukur (geometrik).



Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 6.13. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Barat dan Nasional

Selama tahun 2023, seluruh provinsi di regional Kalimantan menunjukkan peningkatan angka IPM. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Kalimantan, IPM Kalimantan Barat merupakan yang terendah. Provinsi lain di wilayah Kalimantan sudah berada pada kategori IPM tinggi dimana Kalimantan Timur menempati posisi tertinggi yaitu dengan IPM di angka 78,2. Kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama dari pemangku kepentingan di Provinsi Kalimantan Barat untuk terus berupaya

melakukan peningkatan pembangunan manusia yang berkelanjutan.

Seluruh komponen IPM mengalami peningkatan pada tahun 2023. Pengeluaran per kapita meningkat dari Rp8.974.000 pada tahun 2021 menjadi Rp9.355.000 pada tahun 2022. Sementara itu, dimensi pengetahuan yang dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) juga mengalami kenaikan dalam skala yang relatif terbatas. HLS di Kalimantan Barat adalah sebesar 12,66 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk berada pada jenjang pendidikan formal hingga 12,65 tahun atau hingga lulus SMA/ SMK. Sejalan dengan peningkatan pada HLS, RLS di wilayah Kalimantan Barat juga menunjukkan peningkatan dari 7,45 tahun pada 2021 menjadi 7,59 tahun pada 2022. Berdasarkan indikator tersebut, diketahui bahwa rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga SMP kelas I.

Saat ini tercatat dua wilayah dengan status pembangunan manusia tinggi, yaitu Kota Pontianak dan Kota Singkawang dengan nilai IPM masing-masing sebesar 80,84 dan 72,89. Pencapaian status

Tabel 6.7. IPM Provinsi Wilayah Kalimantan 2015-2022

| Provinsi | Indeks Pembangunan Manusia | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Kalimantan Barat | 65,59 | 65,88 | 66,26 | 66,98 | 67,65 | 67,66 | 67,9 | 68,63 | 69,41 | |
| Kalimantan Tengah | 68,53 | 69,13 | 69,79 | 70,42 | 70,91 | 71,05 | 71,25 | 71,63 | 72,2 | |
| Kalimantan Selatan | 68,38 | 69,05 | 69,65 | 70,17 | 70,72 | 70,91 | 71,28 | 71,84 | 72,5 | |
| Kalimantan Timur | 74,17 | 74,59 | 75,12 | 75,83 | 76,61 | 76,24 | 76,88 | 77,44 | 78,2 | |
| Kalimantan Utara | 68,76 | 69,2 | 69,84 | 70,56 | 71,15 | 70,63 | 71,19 | 71,83 | 72,49 | |

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah

Tabel 6.8. Perkembangan IPM Kalimantan Barat Berdasarkan Komponennya

| Komponen | Satuan | Indeks Pembangunan Manusia | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| Umur Harapan Hidup (UHH) | Tahun | 69,87 | 69,90 | 69,92 | 70,18 | 70,56 | 70,69 | 70,76 | 71,02 | | |
| Harapan Lama Sekolah (HLS) | Tahun | 12,25 | 12,37 | 12,50 | 12,55 | 12,58 | 12,60 | 12,65 | 12,66 | | |
| Rata-rata Lama Sekolah (RLS) | Tahun | 6,93 | 6,98 | 7,05 | 7,12 | 7,31 | 7,37 | 7,45 | 7,59 | | |
| Pengeluaran Perkapita Pertahun | Rp 000 | 8.279 | 8.348 | 8.472 | 8.860 | 9.055 | 8.930 | 8.974 | 9.355 | | |
| IPM | | 65,59 | 65,88 | 66,26 | 66,98 | 67,65 | 67,66 | 67,90 | 68,63 | | |

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah

IPM tersebut didorong oleh komitmen pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan dan penyediaan infrastruktur pendidikan, penyediaan dan perluasan peluang lapangan pekerjaan, peningkatan program dan infrastruktur kesehatan maupun rekreasi yang kian lengkap dan memadai. Sementara itu, status IPM di dua belas wilayah lainnya masih termasuk dalam klasifikasi sedang. Keseluruhan data ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah harus lebih fokus dalam melakukan koordinasi, memberikan perhatian, dan menjalankan komitmen dalam peningkatan IPM agar semakin merata di seluruh wilayah Kalimantan Barat.



Halaman ini sengaja dikosongkan



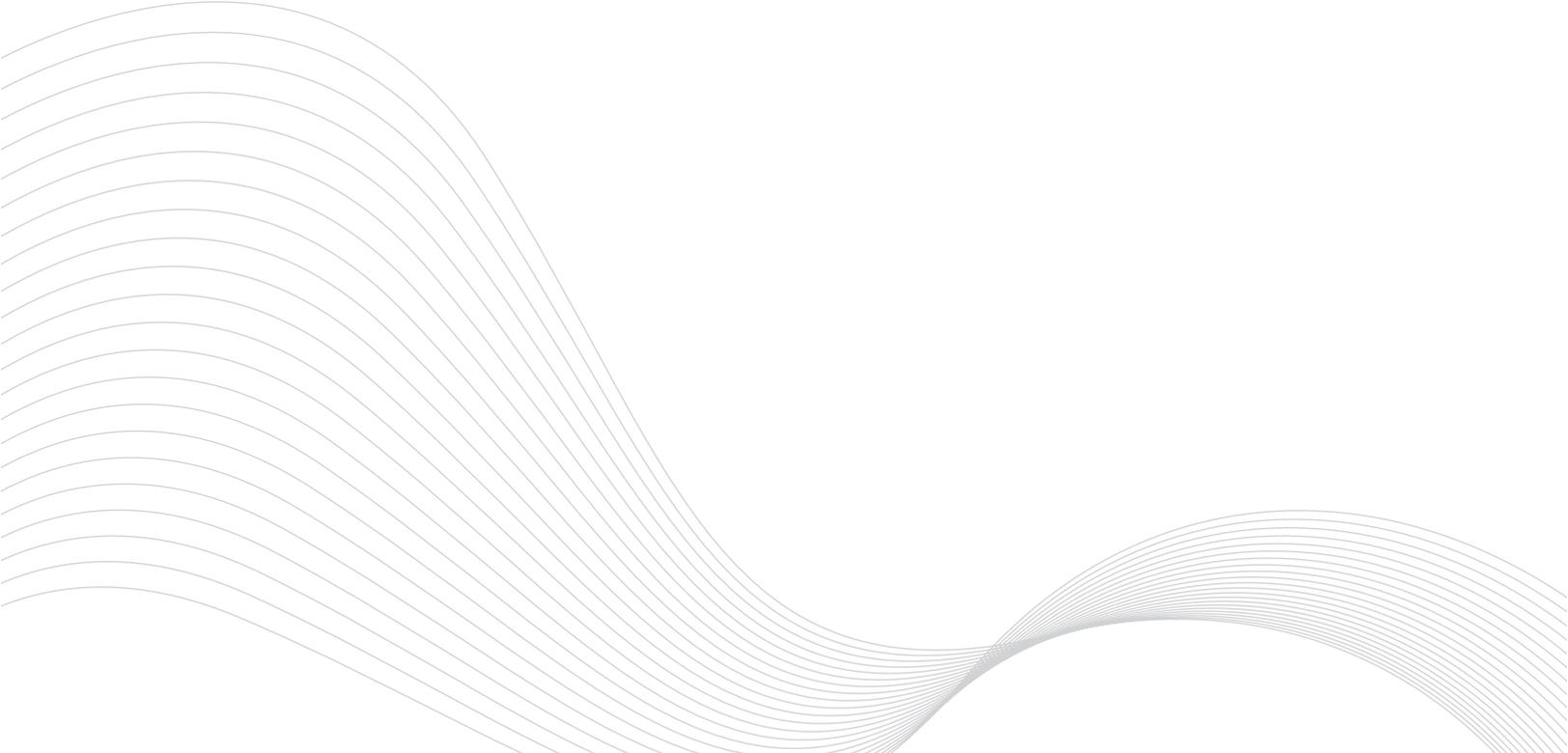


BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA



BAB 7

Prospek Perekonomian Daerah



Kinerja ekonomi global masih dibayangi oleh ketidakpastian yang meningkat. Divergensi pertumbuhan antarnegara yang semakin melebar. Meningkatnya ketegangan geopolitik tidak hanya di Rusia-Ukraina, melainkan juga Palestina-Israel, mendorong harga energi dan pangan meningkat sehingga mendorong inflasi global yang tetap tinggi.

Perekonomian Kalimantan Barat tahun 2023 diperkirakan tumbuh positif dari tahun 2022, walaupun melambat. Kinerja lapangan usaha utama dan tingkat konsumsi masyarakat yang diperkirakan masih tumbuh menjadi faktor pendorong perekonomian Kalimantan Barat pada tahun 2023.

Secara keseluruhan inflasi tahun 2023 di Kalimantan Barat diperkirakan lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022 dan tetap pada rentang target inflasi nasional yang sebesar $3,0 \pm 1\%$ (yoy) pada akhir 2023.



7.1. PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI DUNIA

Perekonomian global masih menghadapi ketidakpastian tinggi dan diperkirakan melambat. Hal ini disertai divergensi pertumbuhan antarnegara yang semakin melebar. Ekonomi Amerika Serikat (AS) pada 2023 masih tumbuh kuat terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan sektor jasa yang berorientasi domestik, sedangkan Tiongkok melambat dipengaruhi oleh pelemahan konsumsi dan penurunan kinerja sektor properti. Pertumbuhan ekonomi global pada 2023 diperkirakan sebesar 2,9% dan melambat menjadi 2,8% pada 2024 dengan kecenderungan risiko yang lebih rendah. Meningkatnya ketegangan geopolitik tidak hanya di Rusia-Ukraina, melainkan juga Palestina-Israel, mendorong harga energi dan pangan meningkat sehingga mendorong inflasi global tetap tinggi. Hal mengakibatkan suku bunga kebijakan moneter di negara maju diperkirakan akan tetap bertahan tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama (*higher for longer*), termasuk *Federal Funds Rate* (FFR) Amerika Serikat. Kenaikan suku bunga global diperkirakan akan diikuti pada tenor jangka panjang dengan kenaikan *yield* obligasi pemerintah negara maju, khususnya AS (*US Treasury*), akibat peningkatan kebutuhan pembiayaan utang pemerintah, dan kenaikan premi risiko jangka panjang (*term-premia*). Ketidakpastian ekonomi dan keuangan global tetap tinggi karena terjadi bersamaan dengan meningkatnya ketegangan geopolitik, oleh karena itu memerlukan penguatan respons kebijakan untuk memitigasi dampak negatif rambatan global terhadap ketahanan ekonomi domestik di negara-negara *Emerging Market Economies* (EMEs), termasuk Indonesia.

Berbagai perkembangan tersebut mendorong pembalikan arus modal dari negara EMEs ke negara maju dan ke aset yang lebih likuid sehingga mengakibatkan dolar AS menguat terhadap berbagai mata uang dunia. Secara *year-to-date* (22 November 2023), nilai tukar Rupiah tercatat depresiasi terbatas 0,04% dari level akhir Desember 2022, lebih baik dibandingkan dengan Rupee India, Baht Thailand, dan Ringgit Malaysia yang masing-masing tercatat melemah sebesar 0,70%, 1,70%, dan 5,84%. Ke

depan, upaya stabilisasi nilai tukar Rupiah oleh Bank Indonesia terus diperkuat agar sejalan dengan nilai fundamentalnya dan mendukung pengendalian *imported inflation*. Salah satunya melalui strategi operasi moneter "*pro market*" dengan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) yang dioptimalkan guna meningkatkan manajemen likuiditas institusi keuangan domestik dan menarik masuknya aliran portofolio asing dari luar negeri. Kemudian, Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah, perbankan, dan dunia usaha untuk mendukung implementasi instrumen penempatan valas Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) sejalan dengan PP Nomor 36 Tahun 2023.

7.2. PROSPEK EKONOMI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023

Perekonomian Kalimantan Barat tahun 2023 diperkirakan tumbuh positif, walaupun melambat dibandingkan dengan tahun 2022. Kinerja lapangan usaha utama khususnya lapangan usaha (LU) perdagangan dan konstruksi, disertai tingkat konsumsi masyarakat yang diperkirakan tumbuh menjadi faktor pendorong perekonomian Kalimantan Barat pada tahun 2023.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan LU perdagangan, transportasi, dan akomodasi makan minum diperkirakan akan mendorong pertumbuhan perekonomian Kalimantan Barat tahun 2023. Hal ini antara lain didorong oleh konsumsi dan mobilitas masyarakat yang meningkat, seiring dengan pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan status pandemi, disertai *festive seasons* (Imlek, Cap Go Meh, Ramadhan, Idulfitri, Natal, Liburan Sekolah, dll) yang lebih meriah. Selain itu, LU pertanian, industri pengolahan, serta konstruksi diperkirakan akan menunjukkan kinerja positif dalam mendorong pertumbuhan perekonomian Kalimantan Barat. Hal ini sejalan dengan tingkat produksi di LU pertanian dan industri pengolahan yang diperkirakan masih terjaga walaupun melambat, terutama untuk komoditas TBS, CPO, dan alumina. Optimisme tersebut

juga didukung dengan aktivitas pemupukan yang terus dilakukan oleh perkebunan TBS, khususnya perkebunan korporasi. Selain itu, kondisi cuaca yang lebih kondusif di wilayah sentra produksi TBS dan program mitigasi banjir oleh pemerintah daerah setempat, mendorong aktivitas panen TBS yang intensif. Produktivitas TBS yang terjaga dapat menopang peningkatan utilisasi kapasitas pabrik pengolahan CPO. Permintaan terhadap komoditas CPO diperkirakan terjaga sejalan dengan konsumsi domestik dan konsumsi negara mitra dagang utama khususnya India. Namun, pertumbuhan LU pertanian yang lebih tinggi tertahan oleh penyesuaian utilisasi produksi pabrik kelapa sawit (PKS) mengikuti kapasitas *storage tank* akibat kendala transportasi via sungai Kapuas. Kendala transportasi tersebut diakibatkan oleh penurunan debit sungai Kapuas pada Triwulan III 2023 sejalan dengan fenomena El Nino/kemarau. Selain itu, aktivitas pembukaan lahan telah menimbulkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di 14 Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat hampir sepanjang triwulan III 2023. Hal ini memengaruhi aktivitas tanam dan panen komoditas pertanian sekitar, khususnya tanaman pangan dan hortikultura. Kemarau yang berkepanjangan turut berisiko menimbulkan trek yang mengganggu tingkat produksi ke depan dari komoditas perkebunan tahunan seperti TBS, karet, dan kelapa.

LU konstruksi diperkirakan akan tumbuh meningkat sejalan dengan keberlanjutan pembangunan proyek-proyek *mutiyears* pemerintah dan swasta. Proyek utama pendorong LU konstruksi bersumber dari percepatan realisasi investasi dan konstruksi proyek *refinery* alumina di Kabupaten Mempawah. Hal ini turut tercemrin dari aktivitas impor barang modal yang intensif di Pelabuhan Kijing, Mempawah, khususnya pada semester II 2023. Selain itu, pertumbuhan konsumsi pemerintah daerah melalui realisasi APBD dan APBN khususnya belanja modal diharapkan dapat mendukung pertumbuhan pada LU konstruksi. Di sisi lain, pertumbuhan perekonomian Kalimantan Barat 2023 yang lebih tinggi diperkirakan akan tertahan oleh kontraksi pada LU pertambangan. Kinerja LU pertambangan yang menurun diperkirakan masih akan berlanjut disebabkan keterbatasan kuota ekspor bauksit mentah pada semester I 2023 dan

moratorium ekspor bauksit mulai 10 Juni 2023. Selain itu, keterbatasan kapasitas serapan industri alumina eksisting turut menahan perbaikan LU pertambangan di tahun 2023. Ke depan, dibutuhkan koordinasi dan kerja sama *stakeholders* daerah untuk mendukung realisasi investasi pada proyek industri alumina eksisting maupun potensial.

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga (RT) diperkirakan tumbuh positif pada tahun 2023. Peningkatan kinerja konsumsi RT sejalan dengan penurunan dampak pandemi Covid-19 dan penghapusan kebijakan restriksi mobilitas masyarakat. Hal ini diharapkan dapat mendorong peningkatan konsumsi dan mobilitas masyarakat yang lebih tinggi pada Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN). Fenomena peningkatan konsumsi ini telah terlihat pada perayaan HBKN Imlek dan Cap Go Meh pada triwulan I 2023 dan Ramadhan serta Idulfitri pada triwulan II 2023. Aneka bentuk perayaan dan festival sepanjang Imlek dan Cap Go Meh menjadi daya tarik utama pariwisata dan pendorong konsumsi berbagai lapisan masyarakat. Pemberlakuan cuti bersama yang lebih panjang di tengah penghapusan PPKM mendorong pertumbuhan aktivitas konsumsi dan mobilitas masyarakat pada Ramadhan dan Idulfitri. Selain itu, siklus peningkatan aktivitas *meetings, incentives, conferences, and exhibitions* (MICE) pada triwulan IV 2023 seiring dengan percepatan realisasi anggaran tahun 2023, turut mendorong aktivitas konsumsi. Namun demikian, risiko penutunan keyakinan konsumen di tengah ketidakpastin global yang masih tinggi, diperkirakan dapat menahan pertumbuhan konsumsi RT yang lebih tinggi.

Kinerja investasi diperkirakan tumbuh positif pada tahun 2023. Hal tersebut didorong oleh kelanjutan realisasi investasi terutama pada investasi proyek strategis di wilayah Kalimantan Barat. Percepatan pembangunan *refinery* alumina di Kabupaten Mempawah pada tahun 2023 menjadi salah satu faktor pendorong investasi. Selain itu, mulainya realisasi pada proyek baru *refinery* alumina di Kabupaten Sanggau pasca moratorium ekspor bauksit, turut mendorong investasi di daerah. Rencana pembangunan infrastruktur pendukung Pelabuhan

Kijing dan keberlangsungan pembangunan Kawasan Industri Ketapang (KIK) juga menjadi pendorong kinerja investasi. Potensi permintaan domestik dan global CPO, dapat menjadi insentif bagi pelaku usaha industri pengolahan dan pertanian untuk melakukan investasi. Untuk meningkatkan kinerja investasi ke depan, diperlukan dorongan dan upaya realisasi investasi baru ke beberapa *refinery* pengolahan komoditas (seperti *refinery* turunan CPO dan bauksit).

Ekspor pada tahun 2023 diperkirakan berkontraksi. Hal ini antara lain disebabkan keterbatasan kuota ekspor bauksit mentah semester I 2023 dan moratorium ekspor bauksit pada semester II 2023, tepatnya mulai 10 Juni 2023. Kinerja ekspor produk olahan karet diperkirakan masih tertahan disebabkan berlanjutnya permasalahan keterbatasan bahan baku karet alam. Sementara, kinerja ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) dan turunannya juga tertahan akibat perlambatan harga CPO global. *Reopening* perekonomian Tiongkok yang masih terbatas, menahan potensi permintaan dari negara tersebut. Di sisi lain, volume ekspor alumina yang terjaga menahan perlambatan kinerja ekspor tahun 2023. Hal ini sejalan dengan *refinery* alumina di Ketapang yang beroperasi optimal.

Impor diperkirakan tumbuh meningkat pada tahun 2023, seiring dengan peningkatan kebutuhan barang bahan baku dan barang modal. Hal ini didorong oleh kebutuhan akan bahan baku pencucian bauksit (soda api) pada proses produksi alumina dan bahan baku listrik dari negara tetangga. Selain itu, kinerja impor turut didorong oleh kebutuhan impor barang modal, akibat berlanjutnya investasi pelaku usaha dan proyek *multiyears*.

Terkait prospek ekonomi Kalimantan Barat tahun 2023 tersebut, terdapat beberapa risiko yang perlu diwaspadai, antara lain:

1. Pemulihan ekonomi dunia yang terhambat akibat kebijakan moneter negara maju yang ketat untuk durasi yang panjang (*higher for longer*), eskalasi konflik geopolitik Rusia-Ukraina dan Israel-Palestina, pasar tenaga kerja di negara maju yang ketat, kebutuhan pembiayaan utang pemerintah Amerika Serikat (AS), serta pelemahan konsumsi dan investasi di Tiongkok.
2. Penurunan harga dan permintaan komoditas ekspor utama Kalimantan Barat akibat peningkatan pasokan komoditas global, pemulihan produksi substitusi, dan perlambatan aktivitas perekonomian negara tujuan utama ekspor.
3. Berlanjutnya penurunan produksi karet alam mengakibatkan penurunan produksi olahan karet (misalnya *crumb rubber*).
4. Terhambatnya pembangunan berbagai proyek infrastruktur Kalimantan Barat.
5. Realisasi investasi Proyek Strategis Nasional (PSN) dan pelaku usaha yang terhambat.
6. Realisasi belanja pemerintah daerah dan pusat yang terhambat.
7. Penurunan tingkat produktivitas komoditas perkebunan dan pertanian akibat fenomena El Nino/kemarau pada masa mendatang.
8. Anomali cuaca dan bencana alam (kebakaran hutan/lahan, kemarau panjang dan banjir) yang dapat berdampak pada produksi tanaman pangan dan perkebunan.
9. Penurunan ekspektasi masyarakat dan pelaku usaha terhadap perbaikan perekonomian masa mendatang yang berisiko menahan aktivitas konsumsi dan investasi.

7.3. PRAKIRAAN INFLASI DAERAH TAHUN 2023

Secara keseluruhan tahun 2023, inflasi gabungan kota IHK di Provinsi Kalimantan Barat diperkirakan lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022 dan kembali berada dalam rentang sasaran inflasi $3 \pm 1\%$ secara tahunan. Merujuk Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia bulan November 2023, Bank Indonesia mempertahankan *BI 7-Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) di level 6,00%. Kebijakan tersebut konsisten dengan *stance* kebijakan moneter Bank Sentral untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam kisaran sasaran $3,0 \pm 1\%$ pada tahun 2023 dan $2,5 \pm 1\%$ pada 2024. Fokus kebijakan diarahkan pada penguatan stabilisasi nilai Rupiah untuk mengendalikan inflasi

barang impor (*imported inflation*) dan memitigasi dampak rambatan ketidakpastian pasar keuangan global. Dukungan dari sisi kebijakan tersebut juga didukung oleh kebijakan penurunan harga BBM non-subsidi sejak awal tahun 2023 oleh pemerintah sebagai respon atas penurunan harga minyak dunia.

Namun demikian, faktor-faktor pendorong inflasi perlu terus diwaspadai. Peningkatan konsumsi masyarakat terutama di periode HBKN seperti Imlek, Cap Go Meh, Ramadhan, Idulfitri, Iduladha, dan libur sekolah secara historis akan meningkatkan tekanan inflasi pada kelompok transportasi dan kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Pada kelompok transportasi, hal tersebut akan meningkatkan *demand* sehingga tarif transportasi angkutan udara.

Di sisi lain, pergerakan harga bahan bakar juga menjadi salah satu pemicu peningkatan tarif transportasi. Sebagai Informasi, bensin merupakan salah satu komoditas penting dalam menentukan dinamika inflasi di Kalimantan Barat dengan pangsa terbesar yaitu sekitar 4,5% dari total nilai konsumsi di 3 (tiga) kota gabungan sampel inflasi. Dengan demikian perkembangan harga bensin akan memengaruhi dinamika inflasi.

Dari sisi sektor makanan, minuman, dan tembakau, konsumsi masyarakat yang meningkat akan mendorong permintaan bahan makanan. Dengan adanya pencabutan larangan PPKM sejak akhir tahun 2022 dan pencabutan status pandemi oleh presiden per bulan Juni 2023 maka akan mendongkrak konsumsi bahan makanan. Selain itu, dampak El-Nino khususnya pada sentra pemasok komoditas utama Kalbar (mis. beras dari Jawa) yang disertai dengan peningkatan terjadinya karhutla di beberapa wilayah di Kalimantan Barat serta kebijakan kenaikan cukai rokok yang berlaku sejak bulan Januari 2023 juga menjadi perhatian utama pada inflasi tahun 2023.

Mencermati risiko tersebut, TPID Kalimantan Barat terus melakukan berbagai upaya stabilisasi harga dalam jangka pendek. Langkah tersebut antara lain: memantau ketersediaan stok dan pasokan bahan pangan strategis, penyelenggaraan operasi pasar dan Gelar Pangan Murah (GPM), Fasilitasi Ongkos Angkut (FOA), penyaluran bansos, memperluas

implementasi pasar tani, penguatan stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) dan bantuan pangan (Banpang) komoditas beras oleh Bulog, melakukan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai kanal, menggalakkan program kampung sayur, sosialisasi gerakan menanam di pekarangan, serta memfasilitasi interaksi antara petani/pedagang yang mempunyai produksi/stok *surplus* dengan *market*/konsumen yang membutuhkan baik intra maupun dengan daerah di luar Kalimantan Barat. Terkait dengan kerja sama antardaerah (KAD), saat ini telah dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Kota Singkawang, Kab Bengkayang, Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Mempawah (Singbebaswah). Penandatanganan PKS tersebut dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2023 bersamaan dengan kegiatan *opening ceremony* GNPIP, Puncak Pekan QRIS Nasional (PQN), dan perayaan HUT RI ke-78. Ke depan, KAD tersebut akan diintensifkan untuk komoditas pangan dan hortikultura khususnya jagung, daging ayam, dan aneka cabai. Rangkaian kegiatan GNPIP tersebut merupakan bentuk dukungan Bank Indonesia bersinergi dengan TPID dan *stakeholders* terkait dalam mengendalikan inflasi di Kalimantan Barat dalam Gerakan 4K, yaitu:

1. **Keterjangkauan harga:** melalui Gerakan Pangan Murah yang merupakan bentuk sinergi Dinas Ketahanan Pangan, Bapanas, Bank Indonesia, dan Bulog Provinsi Kalimantan Barat, di mana hingga saat ini telah diselenggarakan sebanyak lebih dari 86 kali, termasuk yang diselenggarakan dalam rangka GNPIP, Puncak PQN, dan HUT RI ke-78 dengan subsidi sebesar 20% dari harga pasar. Penguatan SPHP dan Banpang Tahap I dan Tahap II oleh Bulog khususnya pada bulan September-November.
2. **Ketersediaan pasokan:** melalui penyediaan bibit dan benih untuk memperkuat sisi hulu sektor pertanian, seperti bibit cabai rawit, hortikultura, perikanan yang akan diberikan kepada PKK se Kalimantan Barat, Kelompok Wanita Tani (KWT), dan Pondok Pesantren. Selain itu, turut memberikan bantuan alat pertanian maupun sarana produksi pertanian (alsintan dan saprotan).

3. **Kelancaran distribusi:** melalui perluasan Kerjasama Antar Daerah antara lain melalui penandatanganan PKS dan mengoptimalkan KAD Singbebaswah. Selain itu juga mendorong optimalisasi pemberian fasilitas ongkos angkut melalui sinergi pemerintah daerah beserta instansi terkait dengan pelaku usaha. Koordinasi dengan Pertamina dalam rangka memastikan jumlah pasokan BBM.
4. **Komunikasi efektif:** himbauan belanja bijak, penggunaan komoditas lokal, dan mengutamakan kebutuhan dibandingkan dengan keinginan melalui berbagai kanal komunikasi kepada masyarakat.

Selain itu, TPID Kalimantan Barat juga telah merealisasikan langkah-langkah pengendalian inflasi dengan horizon jangka panjang. Upaya yang dilakukan adalah integrasi program pengendalian inflasi dari hulu-hilir seperti peningkatan produksi melalui penggunaan teknologi, melakukan diversifikasi *supplier* baru dari luar Kalimantan Barat terutama untuk komoditas yang produksi lokalnya masih terbatas misalnya bawang merah dan aneka cabai, memperlancar distribusi melalui pemasaran digital, dan turut mendukung gerakan menanam komoditas hortikultura untuk memenuhi kebutuhan skala rumah tangga.

Khusus terkait El Nino pada bulan September-Oktober 2023, TPID Kalimantan Barat juga telah melakukan berbagai langkah pencegahan dan perbaikan. Upaya yang dilakukan di Kalimantan Barat antara lain Gerakan Serbu El Nino yaitu penggunaan pompa air dan *transplanter* untuk daerah rentan kering dan implementasi Asuransi Usaha Tanam Padi (AUTP) dengan target sasaran 25 ribu hektar di 14 kabupaten/kota. Dari sisi untuk menjaga produksi hasil pertanian, TPID Kalimantan Barat juga mendorong petani untuk memanen air hujan dengan membuat jebakan- jebakan air di lahan maupun di sekeliling lahan pertanian, memberikan bahan organik ke dalam tanah. Salah satu upaya menyediakan bahan organik yang paling mudah dan murah adalah dengan mengembalikan sisa biomassa yang tidak terangkut saat panen ke dalam tanah seperti jerami padi.

7.4 REKOMENDASI

Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan pengendalian inflasi yang stabil maka dibutuhkan koordinasi, sinergi, dan partisipasi aktif langsung dari seluruh elemen yang terlibat dalam menghadapi dan mengantisipasi risiko yang berpotensi memperlambat ekonomi. Untuk itu, dalam upaya mewujudkan Perekonomian Kalimantan Barat yang kuat maka perlu dipertimbangkan beberapa hal berikut:

1. **Mempercepat realisasi APBD dan stimulus fiskal secara tepat waktu dan tepat sasaran,** termasuk penyaluran bansos, untuk menggerakkan perekonomian di tengah tekanan perlambatan ekspor.
2. **Mempercepat proses pengadaan proyek-proyek strategis** di awal sampai dengan pertengahan tahun.
3. Mengakselerasi realisasi investasi beberapa proyek strategis di Kalimantan Barat beserta infrastruktur pendukungnya, seperti pembangunan beberapa *refinery* alumina, kawasan industri (Ketapang, Landak), dan Kawasan Pelabuhan Kijing.
4. **Penguatan sinergi pengendalian inflasi melalui TPID dan GNPIP.**
5. Penguatan **koordinasi kebijakan** pusat-daerah.
6. **Sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan refinery alumina yang padat modal,** terdapat beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:
 - a. **Bentuk dukungan dalam ranah pemerintah daerah:** (a) mendorong zonasi pembangunan *refinery* sehingga beban pembangunan *refinery* dapat didistribusikan secara kolektif baik biaya maupun perizinan; (b) mendorong perbankan dalam negeri membentuk sindikasi pembiayaan proyek *refinery*; (c) mendorong peningkatan pasokan listrik ke daerah pembangunan *refinery* guna memenuhi tingginya kebutuhan listrik operasional *refinery* alumina; (d) mendorong penyempurnaan perda untuk mempermudah

- penyusunan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) guna menciptakan perencanaan tata ruang wilayah yang baik;
- b. **Bentuk koordinasi dan dukungan bersama pemerintah pusat:** (a) mendukung kebijakan insentif fiskal berupa pembebasan bea masuk, *tax holiday*, dan *tax allowance* bagi pelaku usaha yang membangun refinery alumina; (b) mendorong lebih banyak proyek *refinery* alumina untuk didaftarkan sebagai PSN yang mendapatkan dukungan yang lebih dari pemerintah pusat dan daerah; (c) mendorong sinergi antar kementerian/Lembaga, serta (d) mengoptimalkan koordinasi kebijakan pusat dan daerah, salah satunya terkait konsistensi implementasi dan rancangan kebijakan pemerintah dalam mendorong hilirisasi.
7. **Menarik investasi masuk ke wilayah Kalimantan Barat** melalui berbagai langkah, al: (1) pemberian insentif investasi; (2) pengembangan sumber daya manusia (SDM); (3) perbaikan infrastruktur; (4) mapping proyek *clean and clear* secara efektif (misal kawasan industri); (5) keikutsertaan dalam kegiatan promosi investasi; (6) kemudahan perizinan; serta (7) harmonisasi kebijakan nasional dengan kebijakan daerah yang terutama berkaitan dengan kesesuaian tata ruang.
8. **Mendorong program pendampingan petani kebun** agar memenuhi syarat program Perkebunan Sawit Rakyat (PSR) untuk mendukung penguatan kapasitas dan kapabilitas petani. Selain itu, perlu mendorong replikasi model kemitraan sawit perusahaan-petani untuk mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani.
9. **Mengoptimalkan pemberdayaan UMKM melalui penciptaan permintaan** oleh pemda melalui himbauan kepala daerah kepada ASN, instansi dan perbankan di daerah untuk menggunakan produk-produk lokal/UMKM. Hal ini dapat ditetapkan melalui surat keputusan (SK). Selain itu, turut **mendorong peran BPD Kalbar dan perbankan di daerah dalam bentuk penyaluran kredit** kepada UMKM dan sektor produktif lainnya.
10. **Akselerasi digitalisasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan inklusivitas**, termasuk implementasinya untuk mendukung fiskal daerah.
11. **Menghimbau pembiasaan pemanfaatan transaksi cashless/elektronik**, baik melalui transfer, uang elektronik maupun QRIS (QR code Indonesian Standard). Di samping itu, **akselerasi program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)** perlu untuk terus didorong oleh sehingga dapat mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), *governance*, serta efisiensi dan efektivitas transaksi pemerintah daerah.
12. **Mendorong peningkatan pergerakan wisnus dan mengoptimalkan pembukaan pariwisata** yang lebih luas untuk mendukung pemulihan ekonomi.
13. **Mendorong diversifikasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi lainnya** yang memiliki potensi untuk memberikan nilai tambah bagi perekonomian lokal, terutama yang mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif, inklusif, dan hijau yang berkelanjutan.
- Sementara itu, upaya pengendalian inflasi daerah terus dilakukan secara konsisten melalui TPID dan juga GNPIP bekerja sama dengan stakeholder terkait. Upaya yang diperlukan untuk mencegah terjadinya gejolak harga komoditas antara lain terus melaksanakan operasi pasar/gelar pasar murah secara intensif dan *targeted* untuk mempercepat inflasi Kalimantan Barat berada dalam rentang target inflasi $3 \pm 1\%$. Pelaksanaan operasi pasar/gelar pasar murah juga krusial dilakukan di periode non-HBKN. Hal ini untuk memanfaatkan momentum pencapaian inflasi yang rendah atau bahkan deflasi di periode *low season*. Rekomendasi berikutnya yaitu perlu didorong oleh pengembangan lokasi kegiatan operasi pasar yang lebih permanen di lingkungan pasar tradisional utama khususnya pada 3 (tiga) kota sampel inflasi yaitu Pontianak, Singkawang, dan Sintang untuk mendukung pelaksanaan operasi pasar/gelar pangan murah yang telah ada saat ini. Mencermati perkembangan inflasi bulanan hingga bulan Oktober 2023, diusulkan untuk *piloting* pengembangan lokasi kegiatan operasi pasar yang lebih permanen di

lingkungan pasar tradisional utama tersebut di Kota Pontianak dan Kota Singkawang. Selanjutnya, terkait pengendalian inflasi angkutan udara, perlu koordinasi dengan Dinas Perhubungan dan maskapai terkait khususnya maskapai *low-cost carrier* untuk menunda kenaikan tarif yang lebih tinggi terutama di periode *high season*. Kemudian, pemberian bantuan/subsidi bahan baku, a.l. bibit dan pupuk kepada petani, maupun bantuan saprodi/alsintan juga perlu terus digencarkan guna menekan biaya produksi tanam dan

peningkatan produktivitas. Pararel dengan upaya yang telah dilakukan saat ini untuk terus diimplementasikan secara konsisten seperti perbaikan tata niaga dan distribusi logistik, peningkatan produktivitas beberapa komoditas khususnya hortikultura, *moral suasion* kepada masyarakat untuk menghindari *forward/panic buying* serta memperkuat pengawasan untuk menghindari penyelewengan distribusi BBM, pupuk bersubsidi, dan minyak goreng bersubsidi.

•• DAFTAR ISTILAH •••

Clean money policy adalah kebijakan Bank Indonesia untuk menarik uang tidak layak edar dan menyediakan uang layak edar bagi masyarakat.

CPO (*Crude Palm Oil*) atau dikenal sebagai minyak sawit mentah. Minyak sawit atau minyak kelapa sawit adalah minyak nabati yang dapat dikonsumsi, yang didapatkan dari mesocarp buah pohon kelapa sawit.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah salah satu transfer dana pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi.

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi.

Dana Perimbangan adalah sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang dihimpun perbankan dari masyarakat yang berupa giro, tabungan, atau deposito.

Disagregasi Inflasi adalah penguraian komponen inflasi menjadi 3 kelompok (*inti*, *volatile foods*, dan *administered prices*) berdasarkan faktor yang mempengaruhinya.

Ekspor adalah keseluruhan barang yang keluar dari suatu wilayah/daerah baik yang bersifat komersil maupun bukan komersil.

Impor adalah seluruh barang yang masuk ke suatu wilayah/daerah baik yang bersifat komersil maupun bukan komersil.

Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) adalah salah satu komponen pembentuk IKK. Indeks ini menunjukkan tingkat keyakinan konsumen terhadap ekspektasi kondisi ekonomi saat ini.

Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu. Sejak Januari 2020 menggunakan tahun dasar 2018 = 100.

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) adalah indeks yang menunjukkan tingkat keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan mendatang.

Industri adalah suatu kegiatan yang mengubah barang dasar menjadi barang jadi/setengah jadi dan atau barang yang kurang nilainya, menjadi yang lebih tinggi nilainya termasuk kegiatan jasa industri, pekerjaan perakitan (*assembling*) dari bagian suatu industri.

Inflasi adalah peningkatan harga barang dan jasa secara umum dalam satu periode. Umumnya inflasi diukur dengan perubahan harga sekelompok barang dan jasa yang dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat yang tercermin pada perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Inflow adalah uang kartal yang masuk ke Bank Indonesia, misalnya melalui kegiatan setoran yang dilakukan oleh bank umum.

Investasi adalah kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan produksi melalui peningkatan modal.

Liaison adalah kegiatan pengumpulan data dan informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan secara periodik melalui wawancara langsung kepada pelaku ekonomi mengenai perkembangan dan arah kegiatan ekonomi dengan cara yang sistematis dan didokumentasikan dalam bentuk laporan.

Month to Month (mtm) adalah perbandingan data antara suatu bulan dengan bulan sebelumnya.

Netflow adalah selisih antar *inflow* dan *outflow*.

Non Performing Loan (NPL) adalah kredit di perbankan yang masuk dalam kriteria kurang lancar, bermasalah, diragukan, dan macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia.

Outflow adalah uang kartal yang dikeluarkan Bank Indonesia melalui proses penarikan tunai bank umum dari giro di Bank Indonesia atau pembayaran tunai melalui Bank Indonesia.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku adalah penjumlahan nilai tambah bruto (NTB) yang mencakup seluruh komponen faktor pendapatan yaitu gaji, bunga, sewa tanah, keuntungan, penyusutan pajak tidak langsung dari seluruh lapangan usaha.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan adalah perhitungan PDRB yang didasarkan atas produk yang dihasilkan menggunakan harga tahun tertentu sebagai dasar perhitungannya. Tahun dasar yang digunakan saat ini adalah 2010 = 100.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kelayakan daerah. Dana perimbangan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) adalah merupakan pintu gerbang pemeriksaan yang strategis dalam rangka mendukung pemberian pelayanan kepada para pelintas batas antar negara. Keberadaannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Republik Indonesia dengan negara tetangga.

Quarter to Quarter (qtq) adalah perbandingan data antara suatu triwulan dengan triwulan sebelumnya.

Share of Growth adalah kontribusi suatu lapangan usaha atau komponen ekonomi terhadap total pertumbuhan PDRB.

Standard International Trade Classification (SITC) adalah sistem penggolongan produk yang dikembangkan pada tahun 1962 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). SITC dibuat dengan tujuan untuk mengklasifikasikan produk yang diperdagangkan tidak hanya didasarkan atas sifat material dan fisik produk tetapi, juga sesuai dengan tahap pengolahan serta fungsi ekonomi produk tersebut dalam rangka memfasilitasi analisis ekonomi

Year on Year (yoy) adalah perbandingan data antara suatu tahun dengan tahun sebelumnya.

••• **TIM PENYUSUN** •••

Penanggung Jawab

Nur Asyura Anggini Sari

Editor

Abidin Abdul Haris

Tim Penyusun

Ari Setyo Wibowo

Aris Rudianto

Steven Theja

Lia Larasita

Djihan Islahiyah

Iwan Irawan

Hendy Pebrian Azano Ramadhan Putra



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

**Tim Perumusan dan Implementasi KEKDA
Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Kalimantan Barat
Jl. Ahmad Yani No. 2, Pontianak
Telp : 0561 - 734134
Faks : 0561 - 732033**